



**STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PANTAI SIORO BERBASIS
LOCAL COMMUNITY DI DESA NGREJO KECAMATAN
TANGGUNGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Disusun oleh :

BAGUS PRASOJO

NIM.135030107113017



Dosen Pembimbing

Dr.Sarwono, M.Si

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

**TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI**

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Agustus 2017

Pukul : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Bagus Prasajo

Judul : Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sioro Berbasis *Local*

Community (Studi pada desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung

Kabupaten Tulungagung)

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota,

Anggota,

Dr. Drs. Mochammad Rozikin, M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001

Drs. Romula Adiono, M.AP

NIP. 19620401 198703 1 003

**Identitas Tim Penguji**

Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sioro Berbasis *Local Community* di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Nama Mahasiswa : Bagus Prasajo

NIM : 135030107113017

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Sarwono, M.Si

Ketua Penguji : Dr.Mochammad Rozikin, M.AP

Anggota : Drs.Romula Adiono, M.AP



iv

iv

PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 26 Juli 2017

**Bagus Prasajo****NIM.135030107113017**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	DATA PRIBADI	KETERANGAN
a.	Nama Lengkap	Bagus Prasojo
b.	Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 14 Mei 1995
c.	Jenis Kelamin	Laki-laki
d.	Agama	Islam
e.	Alamat	Jalan Raya Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
f.	No.Hp	081231605143
g.	Email	Bagusprasojo980@gmail.com
h.	Nama Orang Tua	
	Ayah	Bambang Mursito Adi (Alm)
	Ibu	Sukatmi

2.	RIWAYAT PENDIDIKAN	
	TAHUN PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN
a.	2001-2007	SD NEGERI 1 BARON NGANJUK
b.	2007-2009	SMP NEGERI 1 BARON NGANJUK
c.	2010-2013	SMA NEGERI 1 NGRONGGOT NGANJUK
d.	2013-2017	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang..
3. Ibu Dr. Lely Indah Minarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Sarwono M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staff pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Kepala dan Staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang telah membantu dalam kegiatan pelaksanaan penelitian.
7. Kepala Desa dan Seluruh Aparatur Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yang telah berkontribusi memberikan data terkait dengan tema skripsi.
8. Kepala Sub Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
9. Ketua Kelompok Komunitas Sadar Wisata (Mpok Darwis) Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung beserta masyarakat desa Ngrejo yang telah memberikan data dan informasi yang relevan serta pengetahuan di lapangan selama proses skripsi berlangsung.
10. Keluarga dan Orang Tua tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dukungan, dorongan, bimbingan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat kampus Ahmad Ady Hermawan, Endery Satriyo, Yudistira Eka, Risky, Salma Venna Auliya, Abel Baskoro, Lintang Dwi Rasyida, Yudo Cristanto, Maria Ardhina Reswary, Jon Faber Aritonang, Dyah Ajeng Fitriafani, Nabil Alfaiz, Muhammad Nauval Khilmi, Wicaksono Nur Syamsi.

12. Teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Juli 2016

Penulis

ABSTRAK

Bagus Prasojo, 2017. (Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sioro Berbasis *Local Community* Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung) Dr.Sarwono

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang keadaan wisata Sioro yang berada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dan menganalisis tentang situasi dan kondisi baik kondisi masyarakat, mata pencaharian, potensi yang ada di sekitaran wisata serta juga melakukan analisis terhadap rencana-rencana yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk mengembangkan wisata Sioro yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengelolaan wisata Pantai Sioro sebagai *tourism place new* di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh stakeholder seperti halnya warga desa Ngrejo dan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Kabupaten :

- a. Rencana strategi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan wisata Pantai Sioro sebagai wisata baru di Kabupaten Tulungagung.
- b. Strategi kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan adanya pengembangan wisata Pantai Sioro sebagai tempat wisata baru di Kabupaten Tulungagung.
- c. Strategi pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pengembangan wisata Pantai Sioro sebagai wisata baru di Kabupaten Tulungagung.

Masyarakat Desa Ngrejo :

- a. Inisiatif masyarakat dalam hal melakukan pengembangan wisata Pantai Sioro di Kabupaten Tulungagung sebagai kegiatan perekonomian lokal.
- b. Strategi pelaksanaan masyarakat Desa Ngrejo dalam hal pengembangan wisata Pantai Sioro di Kabupaten Tulungagung.

Alternatif-alternatif dan inovasi ke depan dari masyarakat desa Ngrejo dan pemerintah daerah dalam hal pengembangan wisata Sioro sebagai tempat wisata baru di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa inti-inti dan poin-poin penting terkait dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yakni sebagai berikut:

Dari langkah-langkah Pemerintah Daerah

1. Belum adanya perjanjian kerjasama yang menghasilkan dokumen legal dalam melakukan pengembangan terhadap sector pariwisata sehingga pelaksanaannya pun masih bisa dilakukan hal ini menjadikan anggaran apapun baik dari APBDDes, APBD, BUMDes, dana hibah dan lainnya masih belum bisa cair karena menunggu adanya legalitas dan juga aturan dasar dalam pengembangan wisata di Sioro.
2. Perluasan kesempatan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat sudah mulai luas terutama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sector pariwisata

yang ada di setiap desa.

3. Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sudah mulai dicanangkan dan sudah masuk dalam program kerja di semua lembaga atau instansi pemerintah termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan dari langkah-langkah masyarakat bersama Mpok Darwis yakni sebagai berikut :

➤ Dari langkah-langkah Pok Darwis

Peran dari Pok Darwis membawa cukup perubahan yang cukup produktif dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian yang ada di desa. Hal ini beberapa langkah yang dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan Jaringan HT untuk membantu koneksi jaringan HP pengunjung pada saat mengunjungi pantai.
2. Pemberian latihan terhadap kelompok tani seperti halnya penjualan pupuk dan juga pencocokan tanam sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.
3. Penanaman pohon-pohon sebagai upaya penghijauan kembali yang ada di Desa Ngrejo dan juga upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil produk unggulan.
4. Akan mengembangkan agrowisata yang saat ini akan di kembangkan di desa Ngrejo seperti halnya buah pisang, alpukat, dan durian yang saat ini sedang di persiapkan.
5. Mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok tani sebagai daya dukung untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Ngrejo.
6. Uji perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk pembagian prosentase hasil antara Perhutani, Dinas Pariwisata, Mpok Darwis dan juga Balai Desa agar adanya keadilan dalam pembagian dana hasil.
7. Penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pembentukan komunitas “mpok darwis” sebagai payung hukum kelompok sadar wisata itu sendiri.
8. Pembentukan kantor sekretariat LMDH (Lembaga Masyarakat dan Hutan) yang digunakan sebagai kios dan distributor yang nantinya untuk mengakomodasi kelompok tani di desa Ngrejo dalam pengembangan hasil-hasil produk unggulan dalam bidang pertanian.
9. Mengembangkan bahan mangrove sebagai produk unggulan desa Ngrejo sebagai upaya untuk menarik para wisatawan serta juga sebagai daya dukung kegiatan wisata Pantai Sioro.
10. Pembangunan rumah pohon yang di bangun di sekitaran jalan untuk menuju Pantai Sioro untuk memudahkan pengunjung melihat obyek wisata Sioro
11. Pemberian panah arah menuju pantai Sioro untuk memudahkan wisatawan dan pengunjung baik pengunjung local maupun dari luar kota.



ABSTRACT

Bagus Prasojo, 2017. (Sioro Coast Tourism Development Strategy Based Local Community At Tourism and Culture and Village Ngrejo Tanggunggunung District Tulungagung Regency) Dr.Sarwono.

This study is used to describe the state of Sioro tourism located in the Village Ngrejo Tanggunggunung Tulungagung District and analyze the situation and conditions both the condition of society, livelihood, the potential that exist in the surrounding tourism as well as to analyze the plans made by various parties Related to develop Sioro tourism in Ngrejo Village Tanggunggunung District.

This research uses descriptive research type using qualitative approach. Sioro Coast tourism management as tourism place new in Ngrejo Village Tanggunggunung District Tulungagung Regency conducted by stakeholders as well as Ngrejo villagers and Local Government.

District Government:

- a. Local government policy strategy plan related to Sioro Coast tourism development as new tourism in Tulungagung regency.
- b. The strategy of future government policy is related to the development of Sioro Beach tourism as a new tourist attraction in Tulungagung regency.
- c. The implementation strategy of the local government of Tulungagung Regency is related to the development of Sioro Beach tourism as a new tourism in Tulungagung regency.

Ngrejo Village Community:

- a. Community initiatives in terms of developing Sioro Coast tourism in Tulungagung District as a local economic activity.
- b. Strategy of the implementation of Ngrejo Village community in the development of Sioro Coastal tourism in Tulungagung regency.

Alternatives and future innovations from Ngrejo villagers and local government in terms of Sioro tourism development as a new tourist attraction in Ngrejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency.

he results of this study indicate that there are several core and core points related to the results of research that researchers have done as follows:

From the steps of Local Government

1. The absence of cooperation agreements that produce legal documents in the development of the tourism sector so that the implementation can still be done this makes any budget either from APBDes, Budgets, BUMDes, grants and others still can not liquid because waiting for the legality and also the rules Base in the development of tours in Sioro.

2. The expansion of district government's opportunity to the community has been widespread, especially to increase community participation to develop tourism sector in every village.

3. The role of government in the development of creative economy has started to be declared and has been included in the work program in all institutions or government agencies including Tourism and Culture Department of Tulungagung Regency.

While from the steps of society together Mpok Darwis namely as follows:

From the steps of Pok Darwis

The role of Pok Darwis brings quite a fairly productive change and adds value to the economy in the village. Here are some steps that are done as follows:

1. Construction of HT Network to help HP network connections of visitors when visiting the beach.
2. Provision of training to farmer groups as well as the sale of fertilizer and also matching planting as an effort to increase the productivity of plantations.
3. Planting trees as reforestation efforts in Ngrejo Village as well as efforts to improve productivity of superior products.
4. Will develop agro-tourism that will now be developed in the village of Ngrejo as well as bananas, avocados, and durian are currently being prepared.
5. Accommodate the interests of farmer groups as the carrying capacity to develop agricultural products in Ngrejo Village.
6. Test the cooperation agreement between the parties concerned in an effort to divide the percentage of the result between Perhutani, Tourism Department, Mpok Darwis and also Village Hall for justice in the distribution of fund result.
7. Drafting of the Regional Regulation (Perda) related to the formation of "mpok darwis" commune as the legal umbrella of the tourism conscious group itself.
8. Establishment of secretariat office of LMDH (Lembaga Masyarakat dan Hutan) which used as kiosk and distributor which later to accommodate farmer group in Ngrejo village in development of superior product result in agriculture field.
9. Developing mangrove materials as a superior product of Ngrejo village as an effort to attract tourists as well as the carrying capacity of Sioro Coast tourist activities.
10. Construction of a tree house in the wake of the road to go to Sioro Beach to facilitate visitors see Sioro attractions
11. Giving arrows to the direction of Sioro beach to facilitate tourists and visitors both local visitors and from out of town.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sioro Berbasis *Local Community* Di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir kelompok yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

13. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
14. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang..
15. Ibu Dr. Lely Indah Minarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
16. Bapak Dr. Sarwono M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
17. Seluruh Dosen dan Staff pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
18. Kepala dan Staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang telah membantu dalam kegiatan pelaksanaan penelitian.
19. Kepala Desa dan Seluruh Aparatur Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yang telah berkontribusi memberikan data terkait dengan tema skripsi.
20. Kepala Sub Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
21. Ketua Kelompok Komunitas Sadar Wisata (Mpok Darwis) Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung beserta masyarakat desa

Ngrejo yang telah memberikan data dan informasi yang relevan serta pengetahuan di lapangan selama proses skripsi berlangsung.

22. Keluarga dan Orang Tua tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dukungan, dorongan, bimbingan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
23. Sahabat-sahabat kampus Ahmad Ady Hermawan, Endery Satriyo, Yudistira Eka, Risky, Salma Venna Auliya, Abel Baskoro, Lintang Dwi Rasyida, Yudo Cristanto, Maria Ardhina Reswary, Jon Faber Aritonang, Dyah Ajeng Fitriafani, Nabil Alfaiz, Muhammad Nauval Khilmi, Wicaksono Nur Syamsi.
24. Teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Juli 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

COVER	i
TANDA PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	49
C. Tujuan Penelitian.....	49
D. Kontribusi Penelitian.....	50
E. Sistematika Pemikiran Penulisan.....	51
BAB II KAJIAN PENDEKATAN/PUSTAKA	53
A. Administrasi Negara/Publik.....	53
1. Pengertian Administrasi.....	53
2. Pengertian Administrasi Publik/Negara.....	55
3. Pendekatan NPM (New Public Management).....	57
4. Reinventing Government.....	60
B. Governance Approach.....	64
1. Gambaran Umum Governance.....	64
2. Aktor-aktor dalam Pendekatan Governance.....	66
C. Pendekatan-pendekatan dalam strategi.....	70
1. Pengertian Umum Strategi.....	70
2. Tipe-tipe dalam Sebuah Strategi.....	72
D. Kebijakan Publik.....	74
1. Pengertian Umum Kebijakan Publik.....	74

2.	Model-model dalam Kebijakan Publik	75
3.	Gambaran umum Pelaksanaan Kebijakan.....	92
E.	Pendekatan Sustainability Development	94
1.	Pengertian Sustainability.....	94
2.	Prinsip-prinsip dalam Pembangunan berkelanjutan.....	96
3.	Aksi Agenda 21 dalam Program Pembangunan Berkelanjutan	99
4.	Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Sustainable Development	104
5.	Pergeseran paradigma dan strategi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.....	111
6.	Aspek-aspek indikator dalam Kinerja Pembangunan Kepariwisataaan	112
F.	Local Governance	115
1.	Gambaran Umum tentang Local Governance.....	115
2.	Konseptual Perspektif <i>Local Governance</i> dan Hubungan Lokal Pusat	117
3.	Perbandingan antara Local Governance dengan Desentralisasi.....	118
4.	Elemen-elemen kunci dalam hal Citizen-Centered Governance.....	120
G.	Pariwisata	123
1.	Pengertian Pariwisata	123
2.	Sumber daya pariwisata	126
3.	Pengelolaan Pariwisata	140
4.	Konsep Kebijakan Pariwisata	157
5.	Proses perencanaan pariwisata.....	160
6.	Peran dan tanggungjawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata.....	162
7.	Mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata.....	173
8.	Siklus Hidup Destinasi Wisata.....	177
BAB III METODE PENELITIAN		182
A.	Jenis Penelitian	182
B.	Fokus penelitian.....	183
C.	Lokasi dan Situs Kegiatan Penelitian	184
D.	Sumber Data	185
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	186
F.	Metode Analisis	187
Rencana Frame Work (Kerangka Kerja) dalam Penelitian Skripsi		190
BAB IV PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN		191
1.	Gambaran Umum	191
A.	Profil dan Peta Kabupaten Tulungagung	191
B.	Aspek Kependudukan	195
C.	Luas Wilayah Per Kecamatan	199
D.	Potensi Daerah	201
E.	Kondisi Perekonomian Daerah	208



2. Penyajian Data	238
A. Gambaran Tentang Kecamatan Tanggunggunung Sebagai Tempat Wisata	238
a. Gambaran Geografis Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung	238
b. Aspek kependudukan kecamatan Tanggunggunung	241
c. Aspek potensi pertanian	243
d. Aspek Perdagangan	247
e. Transportasi dan Komunikasi	249
f. Aspek jasa	252
g. Keuangan	254
B. Wisata alam Kabupaten Tulungagung dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ..	256
C. Keadaan Pantai Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung	276
a. Gambaran tentang Pantai Sioro	276
b. Pendapatan dari Pengelolaan Potensi Unggulan	284
D. Upaya dan langkah-langkah dari pihak terkait	300
1. Langkah-langkah Komunitas Mpok Darwis dalam Pengembangan Sioro	300
2. Legalitas dan Dasar Hukum Pemberdayaan Komunitas Mpok Darwis	307
3. Langkah dan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	319
E. Analisis data dan interpretasi	321
1. Langkah-langkah komunitas Mpok Darwis dalam Pengembangan Sioro	321
2. Legalitas dan dasar hukum pemberdayaan komunitas Mpok Darwis	355
3. Langkah dan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	367
BAB V PENUTUP	391
A. Kesimpulan	391
B. Saran	393
Daftar Pustaka	396

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Table 1. Data pertumbuhan Pariwisata

Table 2. Data penerimaan wisatawan mancanegara menurut tempat tinggal

Table 3. Data Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia

Tabel 4. Produk Domestik Bruto Pariwisata

Tabel 5. Daftar wisata Kabupaten Tulungagung

Tabel 6. data tentang table tersembunyi yang ada di Kabupaten Tulungagung

Table 7. Observasi Lapangan Pantai Sioro

Table 8. Daftar paparan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Table 8. Proses Policy suatu Kerangka Analisis

Table 9. Prinsip-prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan

Table 10. Daftar aksi agenda dalam Program Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 11. Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

Table 12. Aspek Indikator dalam Kinerja Pembangunan Kepariwisata

Table 13. Perbandingan antara Desentralisasi dan Local Governance

Table 14. Daftar elemen Kunci dalam Citizen-Centered Governance

Tabel 15. Daftar Pengembangan Sumber Daya Alam sebagai Pariwisata

Tabel 16. Daftar factor pendorong dalam Pengembangan Wisata

Table 17. Daftar peluang karier dalam sector pariwisata

Table 18. Sumber Daya Pariwisata Minat Khusus

Tabel 19. Fungsi-fungsi dalam Pengelolaan Pariwisata Strategis

Table 20. Metode dalam Pengelolaan Pariwisata

Table 21. Prinsip-prinsip dalam Penerapan Strategi Manajemen Sumber Daya

Table 22. Prinsip-prinsip dalam Manajemen Sumber Daya Pariwisata

Table 23. Paradigma Kebijakan Pariwisata

Table 24. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Manajemen Pariwisata

Table 25. Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata

Tabel 26. Kegiatan-kegiatan pokok dalam Pariwisata

Tabel 27. Penjelasan tahapan destinasi wisata

Table 28. Peluang Pengembangan Destinasi Wisata

Table 29. Sumber Data Penelitian

Table 30. Data luas kemiringan tanah Kabupaten Tulungagung

Table 31. Luas wilayah dan kepadatan penduduk

Table 32. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

Tabel 33. Daftar wisata di Kabupaten Tulungagung

Tabel 34. Wisata Pantai yang Belum di Ketahui

Tabel 35. PDRB Kabupaten Tulungagung 2010-2014

Table 36. PDRB Kabupaten Tulungagung ADHB 2010-2014

Tabel 37. PDRB atas dasar harga konstan

Tabel 38. Daftar sector penting untuk domestic regional Bruto Daerah

Tabel 39. Rencana dan Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung

Table 40. Rencana dan realisasi belanja kabupaten daerah Kabupaten Tulungagung

Tabel 41. Luas wilayah dan jarak kecamatan ke Kota

Tabel 42. Indikator Kependudukan Kecamatan Tanggunggunung

Tabel 43. Daftar statistic Tanaman Pangan Tahun 2013

Table 44. Data statistic peternakan Kecamatan Tanggunggunung

Table 45. Jumlah usaha dan tenaga kerja perdagangan

Table 46. Daftar sarana transportasi di Kecamatan Tanggunggunung

Tabel 47. Data sarana komunikasi di Kecamatan Tanggunggunung

Table 48. Data tentang jasa-jasa di Kecamatan Tanggunggunung

Table 49. Daftar perseorangan di Kecamatan Tanggunggunung

Table 50 wajib pajak dan penerimaan di Kecamatan Tanggunggunung

Table 51. Wisata alam yang masuk dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Table 52. Data observasi tentang wisata Pantai Sioro

Table 53. data tentang pendapatan kelompok tani “WONOMULYO”

Table 54. Program-program dan langkah kerja Pengembangan wisata Sioro

Table 55 Substansi peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pok Darwis

Table 56. Indikator dalam kinerja sasaran strategis

Table 57. Oriientasi dalam Paradigma Pembangunan

Table 58. Analisis tentang pembangunan Wisata Sioro

Table 59. Aspek-aspek indicator dalam kinerja pembangunan kepariwisataan

Table 60. Analisis pembangunan kepariwisataan wisata Sioro

Table 61. Daftar fungsi dalam Pengelolaan pariwisata strategis

Table 62. Analisis langkah-langkah tentang wisata Sioro

Tabel 63. Perbedaan antara desentralisasi dengan local governance

Table 64. Uraian Analisis penerapan di Desa Ngrejo berdasarkan Local Governance

Table 65. Analisis stakeholder di Desa Ngrejo dalam Pengembangan Wisata Sioro

Table 66. Uraian analisis tentang pemberdayaan Pok Darwis

Table 67. Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata

Table 68. Analisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung





DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep Pengelolaan Potensi Wisata

Gambar 2. Regulasi dalam Pengelolaan pariwisata

Gambar 3. Substansi undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Gambar 4. persoalan potensi pengelolaan wisata Pantai Sioro

Gambar 5. Uraian Sasaran Kebijakan

Gambar 6. Konsep dalam Daya Saing Daerah

Gambar 7. Konsep pariwisata sebagai daya saing daerah

Gambar 8. Kajian-kajian dalam Administrasi Publik

Gambar 9. Konsep dalam New Public Management

Gambar 10. Gambaran dalam Konsep Governance

Gambar 11. Konsep Kebijakan Model Elite

Gambar 12. Gambaran dinamika dalam proses kebijakan

Gambar 13. Proses dalam Kebijakan

Gambar 14. Model alokasi Sumber yang Rasional

Gambar 15. Konsep kebijakan incremental

Gambar 16. Kebijakan dalam Model Sistem

Gambar 17. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 18. Model 4 kuadran hubungan antara kepariwisataan dan lingkungan

Gambar 19. Ilustrasi Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan

Gambar 20. Indikator Kepariwisataan Keberlanjutan

Gambar 21. Elemen-elemen dalam Pariwisata

Gambar 22. Fungsi-fungsi dalam Manajemen

Gambar 23. Stakholder dalam Pariwisata

Gambar 24. Aspek Kebijakan Pariwisata

Gambar 25. Sklus Destinasi Pariwisata

Gambar 26. Alur analisis data Miles and Hubberman



Gambar 27. Kerangka kerja penelitian skripsi

Gambar 28. Peta Kabupaten Tulungagung

Gambar 29. Peta Kecamatan Tanggunggunung

Gambar 30. Jalan menuju wisata pantai

Gambar 31. Jalan setapak menuju pantai

Gambar 32. Jalan setapak perkebunan pisang

Gambar 33. Pemandangan sekitar di jalan setapak

Gambar 34. Pemandangan pantai Sioro

Gambar 35. Kondisi jalan sebagian menuju Sioro

Gambar 36. Kondisi jalan menuju Sioro

Gambar 37. Kondisi jalan menuju wisata Sioro

Gambar 38. Ombak Pantai Sioro

Gambar 39. Wisata Pantai Sioro

Gambar 40. Pembangunan rumah pohon

Gambar 41. Rumah Pohon di jalan menuju Sioro

Gambar 42. Bersama Bupati, Mpok Darwis dan masyarakat

Gambar 43. Pembangunan rumah pohon

Gambar 44. Pembangunan rumah pohon

Gambar 45. Pembangunan rumah pohon

Gambar 46. Syrup mangrove Khas Unggulan Tulungagung

Gambar 47. Syrup Mangrove

Gambar 48. Jalan setapak menuju Wisata Pantai Sioro

Gambar 49. Jalan masuk menuju wisata Pantai Sioro

Gambar 50. Produk unggulan Desa Ngrejo

Gambar 51. Gambaran persoalan pembangunan wisata Sioro

Gambar 52. Skema prosedur pembentukan Mpok Darwis atas inisiatif masyarakat



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

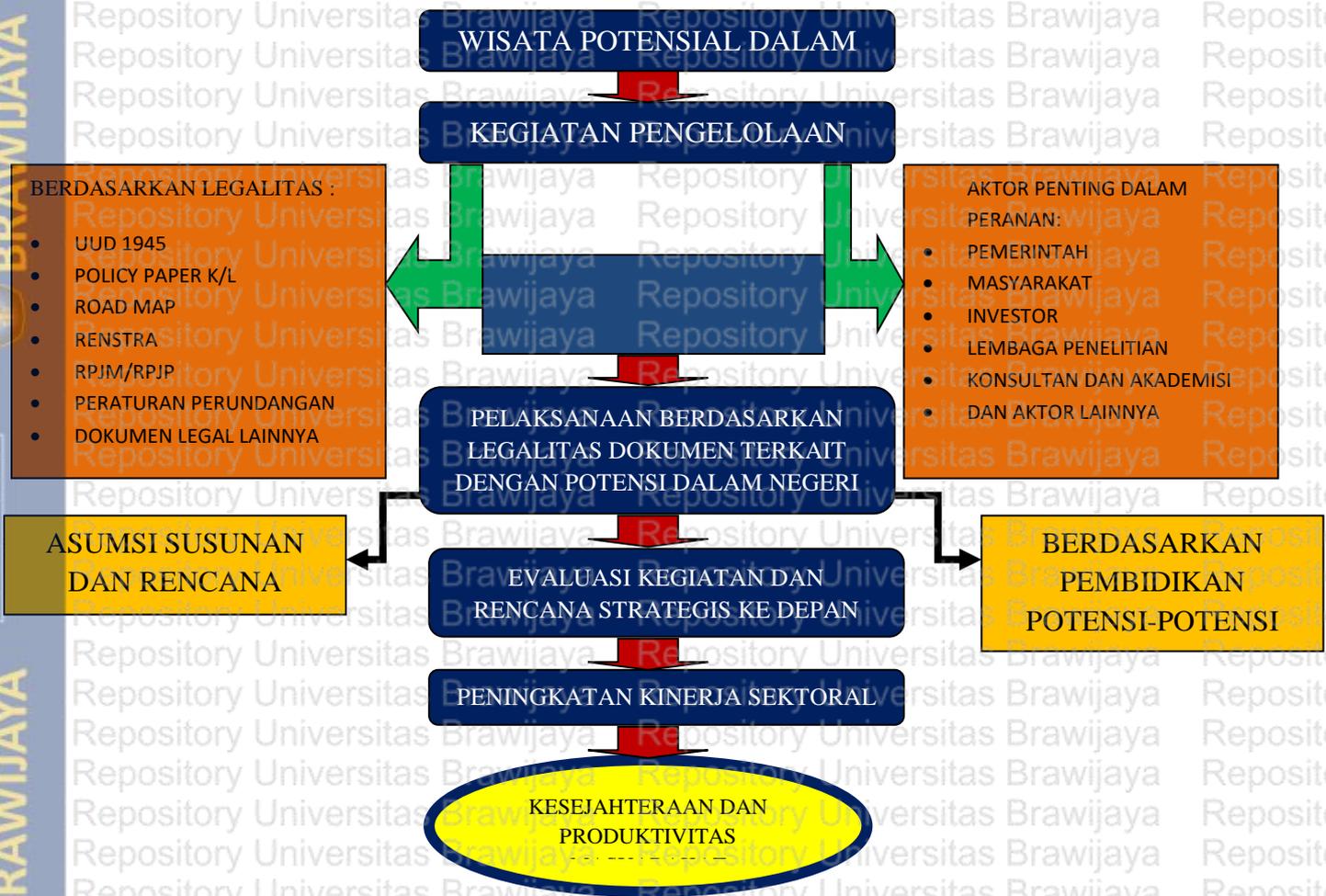
Indonesia adalah sebagai negara yang sangat potensial akan sumber daya alam yang sebagaimana potensi tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. Keberadaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat berperan besar dalam mendorong sebuah perekonomian suatu negara termasuk dalam hal negara Indonesia yang memiliki berbagai potensi alam untuk dikelola oleh negara sebagai kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini seperti halnya diamanahkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi Indonesia dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini bahwa dalam perumusan sebuah kebijakan terkait dengan adanya pengelolaan potensi-potensi yang tersimpan yang memiliki kontribusi besar dan nilai tambah dari sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh negara atau pihak *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang memiliki peran besar dalam hal melakukan pengelolaan terhadap potensi tersebut, hal ini bahwa peran aktor di dalam sebuah negara tersebut memiliki peranan yang penting dalam hal untuk melakukan berbagai peningkatan nilai tambah yang sangat besar untuk menyumbang anggaran pendapatan belanja negara serta juga memberikan sumbangan-sumbangan terhadap pendapatan negara untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan dalam suatu negara. Sehingga peran pemerintah, Masyarakat dan Investor menjadi penting untuk melakukan pengelolaan potensi-potensi penting yang ada dalam bumi Indonesia. Namun dengan begitu besarnya potensi alam Indonesia ini kemungkinan besar pemerintah sangat terbatas dalam hal keberadaan anggaran/alokasi dana untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan potensi alam yang ada di Indonesia sehingga keberadaan Masyarakat dan Investor sangat penting dan memiliki peran besar untuk membantu pemerintah dalam mengeksplorasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di dalam negeri sehingga dalam hal ini bahwa dengan adanya suatu



pengelolaan tersebut dapat menjadikan adanya nilai tambah terhadap anggaran pendapatan belanja negara dan meningkatkan pendapatan serta memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat serta menjalankan adanya suatu roda pembangunan yang ada di Indonesia.

Hal ini bahwa Indonesia merupakan sebagai negara yang memiliki wisata yang sangat potensial dan bahkan setiap pulau di Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan dapat menarik wisatawan-wisatawan bahkan dari luar negeri pun selalu banyak yang berdatangan untuk menikmati keindahan pesona alam wisata yang ada di Indonesia. Dengan begitu besarnya jumlah wisatawan-wisatawan yang dari luar yang terus berdatangan maka dalam hal ini akan memberikan adanya sebuah sumbangan dan kontribusi terhadap perekonomian negara dan juga bahkan akan meningkatkan adanya devisa negara sebagai pendapatan yang sangat penting untuk menambah keuangan negara. Hal ini bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta sangatlah berperan untuk menjadikan setiap potensi wisata yang ada di Indonesia untuk dikelola serta terus melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hal untuk menarik para pengunjung-pengunjung dari luar agar terus berdatangan ke tempat wisata yang potensial di dalam negeri. Hal ini akan mendongkrak perekonomian suatu negara serta memberikan kesempatan untuk negara dalam hal membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pariwisata. Terkait dengan pengelolaan potensi alam di Indonesia bahwa jika digambarkan kerangka pikir konsepnya maka akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka konsep Pengelolaan Potensi Wisata



Dalam *Grand Design* yang dipaparkan di atas adalah gambaran secara umum terkait dengan adanya pengelolaan suatu potensi-potensi bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan serta mengikut sertakan investor dan masyarakat berperan di dalamnya dalam hal pengelolaan potensi yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini bahwa sebenarnya peran aktor dalam suatu negara sangatlah penting dan yang sebagaimana masing-masing seperti halnya pemerintah, masyarakat dan juga swasta harus memiliki adanya sinergitas dan kerjasama yang kuat dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan dalam suatu negara. Termasuk dengan potensi pariwisata di Indonesia sangat memberikan adanya sebuah peran yang sangat penting terhadap perekonomian dalam suatu negara. Berdasarkan data yang



dipaparkan oleh Bappenas bahwa di sebutkan untuk kontribusi terhadap PDB Nasional dan kedatangan para wisatawan asing ke Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan bahkan pemerintah pusat melalui adanya Kementerian Pariwisata memiliki target sasaran tertentu untuk terus mengoptimalkan sektor pariwisata yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Namun dalam hal ini bahwa berdasarkan paparan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipaparkan terkait dengan kontribusi terhadap PDB dan Wisatawan Mancanegara yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pertumbuhan Pariwisata di Indonesia.

SASARAN PERTUMBUHAN PARIWISATA DI INDONESIA

No.	URAIAN SASARAN	Baseline 2014	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8%
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 Juta	20 Juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 Juta	275 Juta
4	Devisa (Trilyun Rupiah)	120	240

Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa uraian yang dilakukan Deputi Ekonomi Bappenas bahwa dalam gambaran terutama kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional mencapai sekitar 4,2%. Sedangkan di tahun 2019 pemerintah akan mentargetkan mencapai sekitar 8%. Sedangkan untuk wisatawan manca negara di tahun 2014 berjumlah 9 juta orang yang berkunjung ke Indonesia. Namun pemerintah dalam hal ini memiliki target untuk meningkatkan wisatawan manca negara di tahun 2019 menjadi 20 juta



orang.Sedangkan untuk Wisatawan Nusantara ada sekitar 250 Juta Kunjungan dan di tahun 2019 di prediksi mencapai sekitar 275 Kunjungan.Sedangkan untuk Devisa Negara dari sektor pariwisata di tahun 2014 berjumlah mencapai sekitar 120 Trilyun Rupiah dan di tahun 2019 akan diprediksi mengalami kenaikan menjadi 240 Trilyun Rupiah.Artinya bahwa dalam paparan tersebut dijelaskan sektor pariwisata adalah sebagai sebuah sektor yang memiliki sumbangan besar terhadap produk domestik nasional dan juga memiliki peran kinerja sektoral yang sangat penting untuk memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Negara.Dalam hal ini bahwa pendapatan indonesia selain di dukung oleh pendapatan migas sektor pertanian kehutanan dan sebagainya namun juga termasuk pariwisata memiliki suatu peran penting dalam hal mendorong sebuah perekonomian yang ada di dalam suatu negara.Dalam hal ini bahwa sektor pariwisata di Indonesia di nilai sangatlah potensial dan juga dapat menarik wisatawan-wisatawan asing berkunjung di Indonesia untuk melihat potensi alam dan wisata yang ada di Indonesia yang sebagaimana hal ini sangat memengaruhi adanya devisa negara.Untuk saat ini bahwa Kementerian Pariwisata sebagai pemerintah pusat selalu berupaya untuk mendorong adanya kinerja sektoral dalam bidang pariwisata sebagai daya dukung untuk perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata dan meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sektor pariwisata itu sendiri.Dalam upaya peran Kementerian Pariwisata itu sendiri adalah bahwa sudah menyusun berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan adanya sektor pariwisata yang ada di daerah serta juga memberikan berbagai instruksi terhadap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan dalam sektor pariwisata.Namun dalam hal ini bahwa peran dari yang lain sangat dibutuhkan termasuk dalam halnya masyarakat dan juga investor untuk memberikan berbagai kontribusi dalam hal melakukan berbagai potensi dari pesisir-pesisir pantai yang bisa dikatakan sangatlah potensial yang sebagaimana wisata tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah termasuk masyarakat sekitar yang sangat menguntungkan dan



juga memberikan berbagai kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah pesisir tersebut. Selain itu juga bahwa Indonesia adalah merupakan sebagai suatu wilayah yang sangat potensial termasuk wilayah Kabupaten Tulungagung yang masuk dalam kajian dokumen ini bahwa Kabupaten Tulungagung adalah sebagai wilayah yang sangat memiliki potensi wisata yang sangat besar dan juga bisa dikatakan sebagai wilayah yang dapat menyokong kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di daerah kabupaten Tulungagung. Namun sangat dalam hal ini bahwa ternyata untuk wilayah tersebut belum mendapatkan adanya jangkauan yang benar-benar untuk memudahkan akses untuk menuju ke tempat wisata tersebut sehingga dalam hal ini bahwa masih bisa dikatakan tempat wisata tersebut belum tereksplora secara menyeluruh ke seluruh masyarakat dan bisa dikatakan cukup tersembunyi. Hal ini bahwa menjadi kesempatan bukan hanya pemerintah daerah yang berperan namun masyarakat memiliki inisiatif dan juga melakukan gerakan-gerakan yang setidaknya upaya membenahi berbagai fasilitas dan infrastruktur yang setidaknya memberikan upaya sebagaimana mestinya bahwa wisata tersebut terkelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan juga menghasilkan pendapatan yang dapat menyokong adanya sebuah perekonomian yang ada di wilayah pesisir daerah.

Wilayah-wilayah pesisir sangatlah memberikan manfaat khususnya masyarakat pesisir itu sendiri dalam hal bagaimana melakukan berbagai upaya agar wisata pesisir tersebut dapat menarik berbagai pengunjung wisatawan dari luar kota sehingga masyarakat yang ada di berbagai sekitar sehingga sebagaimana hal tersebut dapat memberikan adanya suatu manfaat dan juga menjadikan wisata pesisir-pesisir yang ada di berbagai daerah tersebut tereksplorasi dan dapat diketahui oleh berbagai wisatawan baik dalam negeri maupun asing untuk melihat pesona wisata pesisir yang ada di daerah. Namun hal ini juga bahwa dengan mengutamakan peran masyarakat pesisir bukan berarti akan mengurangi atau menghilangkan peran pemerintah daerah secara keseluruhan namun pemerintah daerah di sini sangatlah berperan



penting untuk memberikan berbagai fasilitas yang sangat penting seperti jalan, air bersih, listrik, toilet dan sebagainya untuk memberikan fasilitas terhadap para wisatawan yang mengunjungi wisata tersebut sehingga dalam hal ini bahwa hal tersebut sangat memudahkan pengunjung baik dari dalam maupun dari luar untuk mengunjungi obyek wisata yang akan dituju. Hal ini bahwa untuk mendukung adanya sebuah kegiatan perekonomian terutama pada daerah pesisir bahwa sebenarnya daya dukung dari berbagai fasilitas sangat dibutuhkan termasuk sarana dan prasarana menjadi hal upaya untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan yang ada di sekitaran di pesisir dan mendorong perekonomian bagi masyarakat pesisir. Hal ini bahwa sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan dan dalam hal ini bahwa dengan berbagai potensi lokal atau daerah yang sangat besar artinya bahwa upaya tersebut untuk memberikan sumbangan terhadap perekonomian lokal sehingga menjadikan perekonomian daerah serta juga meningkatkan upaya untuk daya saing lokal serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangatlah penting dan merupakan sebagai asset penting dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menjadi lahan atau tempat untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar pesisir. Selain itu juga Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai kekayaan laut yang sangat besar dan wilayah sebagian ± 80 persen Indonesia di kelilingi oleh potensi laut sehingga pun potensi hasil perikanan di Indonesia cukup besar dan bahkan pun Indonesia berhasil melakukan berbagai kegiatan ekspor ke luar untuk hasil-hasil perikanan sehingga hal tersebut memberikan adanya suatu kontribusi terhadap pendapatan negara dari sektor hasil perikanan dan kelautan. Dalam hal ini bahwa daya saing dalam negeri termasuk sub di dalamnya yakni perekonomian di dukung berbagai asset sumber daya alam termasuk halnya hasil-hasil pengelolaan perikanan dan kelautan yang memberikan dukungan dalam hal peningkatan nilai ekspor dalam negeri. Hal ini bahwa sinergitas antara Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat pesisir



sangat dibutuhkan untuk melakukan berbagai upaya dan menyusun program-program kerja terkait dengan upaya pengelolaan wilayah pesisir serta membangun fasilitas sarana dan prasarana yang memberikan daya dukung untuk kemudahan akses bagi pengunjung wisatawan baik dari dalam maupun dari luar sehingga dalam hal ini dengan upaya kegiatan tahap pembangunan yang ada di sekitar wilayah pesisir sehingga dalam hal ini bahwa dapat mendorong nilai tambah tersendiri untuk meningkatkan adanya pendapatan masyarakat pesisir sehingga pajak yang diterima dapat di gunakan untuk melakukan tahap pembangunan selanjutnya yang akan datang di gunakan.

Namun dalam perkembangannya bahwa hampir wisata-wisata yang ada di Indonesia berhasil menarik para pengunjung wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sebagaimana hal tersebut dapat memberikan kesempatan untuk Indonesia dalam hal menaikan pendapatan negara serta memberikan dorongan peningkatan perekonomian daerah serta juga menjadikan perekonomian daerah tersebut semakin berkembang dan memberikan adanya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Wisata-wisata di Indonesia berhasil menarik berbagai pengunjung di penjuru dunia dan Indonesia mendapatkan keuntungan dari pengeluaran wisatawan asing yang ada di Indonesia. Dalam hal ini bahwa berdasarkan catatan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional tercatat penerimaan Indonesia dari wisatawan asing yakni dipaparkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Data penerimaan wisatawan mancanegara menurut Tempat Tinggal

Penerimaan dari Wisatawan Mancanegara Menurut Negara Tempat Tinggal (Juta US\$), 2010-2014

Negara Tempat Tinggal	2010	2011	2012	2013	2014
Brunei Darussalam	34,83	36,43	26,53	17,31	18,29
Malaysia	864,34	930,85	972,16	1 002,53	1 053,89
Filipina	161,97	175,90	195,50	206,31	212,90



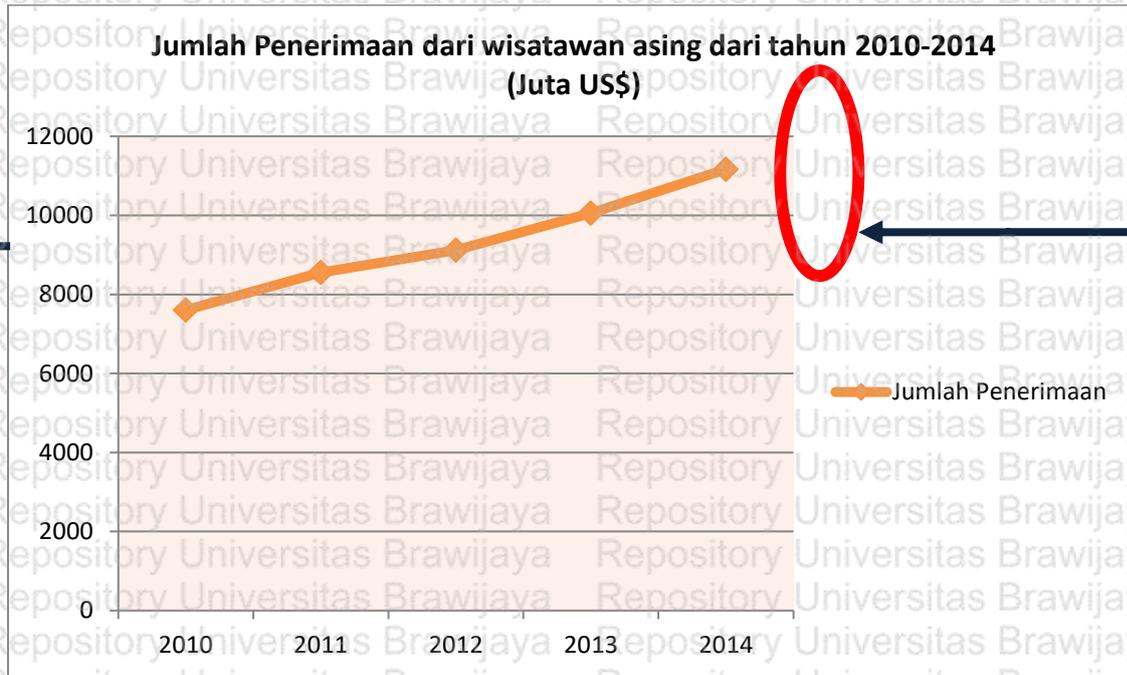
Singapura	927,97	1 054,21	1 000,36	1 049,41	1 145,83
Thailand	97,46	127,92	144,39	139,10	127,13
Hong Kong	75,39	91,53	91,19	119,47	125,24
India	147,29	175,13	171,40	221,62	254,95
Jepang	409,87	419,80	477,80	558,85	597,67
Korea	251,05	295,82	290,37	381,83	420,89
Pakistan	6,72	5,06	12,97	6,15	7,42
Bangladesh	10,49	13,71	13,49	9,53	8,74
Srilanka	7,65	6,73	11,75	9,33	11,04
Taiwan	184,76	188,15	204,52	231,09	254,66
Cina	433,38	520,61	714,51	810,79	981,46
Arab Saudi	170,03	211,06	135,63	178,73	198,20
Austria	24,26	24,01	28,88	31,74	35,66
Belgia	40,38	32,73	40,20	52,12	48,08
Denmark	26,99	29,48	38,45	39,48	37,27
Perancis	244,25	229,33	273,63	316,26	345,96
Jerman	217,38	229,41	245,07	251,54	312,27
Italia	49,63	68,66	70,76	105,19	101,17
Belanda	269,20	263,02	243,16	280,64	320,03
Spanyol	47,44	35,99	46,34	61,07	75,20
Portugal	18,75	15,74	23,84	32,07	36,57
Swedia	40,94	48,51	37,24	51,76	49,78
Swiss	55,46	61,11	64,75	69,97	93,50
Inggris	277,14	269,61	321,92	349,20	401,48
Finlandia	23,07	21,80	21,89	34,07	28,79
Norwegia	21,22	27,78	33,20	29,32	26,60
Rusia	136,80	178,64	170,00	191,97	176,91
Amerika Serikat	252,23	317,28	312,55	363,91	406,57
Kanada	67,70	80,97	80,95	96,35	122,12
Amerika Tengah	3,20	4,28	2,22	1,82	5,80
Amerika Selatan	42,64	41,00	46,31	49,27	54,05
Australia	1 171,87	1 502,10	1 452,31	1 470,89	1 802,85
Selandia Baru	43,25	60,27	93,56	82,80	120,73
Mesir	4,02	5,18	5,17	6,35	10,80



Negara lainnya	742,39	754,56	1 005,85	1 144,32	1 135,61
Jumlah	7 603,45	8 554,39	9 120,89	10 054,15	11 166,13

Sumber :Badan Pusat Statistika Indonesia

Dalam hal ini bahwa jika digambarkan secara statistik terkait dengan penerimaan yang didapat Indonesia dari wisatawan asing yakni sebagai berikut :



Penerimaan dari wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia mengalami kenaikan di hitung mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dan dalam hal ini bahwa tercatat untuk tahun 2010 penerimaan negara dari wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia mencapai sekitar 7603,45 Juta US\$ dan terakhir pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi sekitar 11.166,13 Juta US\$. Dalam hal ini bahwa potensi wisata Indonesia berhasil menarik pengunjung dari wisatawan asing dari seluruh peniuru dunia dan hal ini akan menambah devisa negara sebagai

Dalam catatan di atas bahwa kunjungan wisatawan asing ke Indonesia memang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun diikuti dengan perkembangan penerimaan yang diperoleh negara dari wisatawan asing yang ada di Indonesia. Jika di tinjau berdasarkan penerimaan negara yang didapat dari pengunjung tersebut bahwa data dari Badan Pusat Statistik yang disurvei oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa sebenarnya

dapat dilihat secara keseluruhan mengalami kenaikan dan terus stabil penerimaan dari sektor pariwisata. Dalam catatan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa untuk tahun 2010 penerimaan negara dari wisatawan asing sekitar 7603,45 Juta US\$, mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 8554,39 Juta US\$, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 9120,89 Juta US\$. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir pun bahwa untuk pendapatan yang di dapat oleh negara dari wisatawan asing terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2014. Dalam catatan Badan Pusat Statistika yang merupakan sumber dari survey yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa untuk catatan penerimaan dari tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 10.054,15 Juta US\$ dan mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi sekitar 11.166,13 Juta US\$ hal ini bahwa bisa dikatakan untuk penerimaan Indonesia dari para wisatawan asing terus mengalami kenaikan dan mengalami stabil dalam hal penerimaan dari sektor pariwisata. Dalam hal ini bahwa dengan semakin meningkatnya penerimaan yang diperoleh dari sektor pariwisata dalam hal ini akan dijadikan suatu kesempatan dalam hal mendongkrak perekonomian terutama yang ada di daerah serta juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk juga investor yang berperan penting dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pengelolaan potensi wisata yang ada di dalam negeri sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di dalam negeri dan meningkatkan adanya daya saing daerah.

Tabel 3. Data wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia

Data Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan dari tahun 2008-2014

Kebangsaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Asia Pasifik	4 888 203	4 917 083	5 527 342	6 050 406	6 376 166	6 943 413	7 475 049
Brunei Darussalam	10 536	13 668	35 874	38 679	16 423	16 932	19 078
Malaysia	1 009 722	1 041 053	1 171 737	1 173 351	1 269 089	1 380 686	1 418 256



Filipina	195 675	196 429	171 181	210 029	236 866	247 573	248 182
Singapura	1 197 267	1 138 071	1 206 360	1 324 839	1 324 706	1 432 060	1 559 044
Thailand	66 012	93 381	111 645	115 036	114 867	125 059	114 272
Vietnam ⁵	19 710	20 785	24 929	31 106	33 598	43 249	48 018
Hongkong	58 260	63 801	73 658	84 985	81 782	95 258	94 560
India	155 391	156 545	159 373	181 791	196 983	231 266	267 082
Jepang	559 888	488 320	416 151	423 113	463 486	497 399	505 175
Korea	331 409	260 314	296 060	320 596	328 989	351 154	352 004
Pakistan ¹	7 273	5 880	5 772	6 598	5 330	6 281	7 057
Bangladesh	6 155	6 347	5 557	6 394	5 998	8 132	13 891
Srilanka	6 774	6 715	6 195	7 019	8 786	8 288	8 760
Taiwan	218 146	204 794	214 192	228 922	217 708	247 146	220 328
Tiongkok / Cina	354 641	444 598	511 188	594 997	726 088	858 140	1 052 705
Australia	418 899	571 541	769 585	933 376	952 717	983 911	1 145 576
Selandia Baru	36 291	37 704	45 335	52 458	59 606	67 852	79 380
Asia Pasifik Lainnya	236 154	167 137	302 550	317 117	333 144	343 027	321 682
Amerika	249 968	237 670	255 465	293 306	312 525	343 573	361 220
Amerika Serikat	174 547	165 098	177 677	203 205	217 599	236 375	246 397
Kanada	45 408	43 948	48 349	57 129	58 245	65 385	68 432
Amerika Lainnya	30 013	28 624	29 439	32 972	36 681	41 813	46 391
Eropa	989 854	1 028 405	1 048 543	1 110 871	1 174 079	1 285 097	1 337 553
Austria	16 855	17 399	16 889	17 374	19 120	21 645	20 599
Belgia	22 854	25 781	24 493	24 579	28 243	34 414	33 601
Denmark	18 434	20 062	17 565	19 950	21 168	22 890	22 577
Perancis	129 446	165 656	160 913	171 736	184 273	201 917	208 537
Jerman	142 767	133 032	144 411	149 110	158 212	173 470	184 463
Italia	40 006	38 028	39 211	42 256	46 651	56 705	62 265
Belanda	141 202	154 932	158 957	163 268	152 749	161 402	168 494
Spanyol ²	30 278	28 200	30 574	30 657	34 991	39 383	47 376
Portugal	11 368	11 331	11 629	13 661	15 406	18 194	17 675
Swedia ³	21 806	22 166	24 603	26 504	26 097	29 281	32 308
Norwegia	16 468	16 261	16 226	17 803	17 118	18 174	17 253
Finlandia	9 819	15 591	11 566	13 137	15 035	15 074	15 332
Swiss	34 024	39 510	35 334	38 704	37 756	43 906	45 567



Inggris	184 604	183 262	192 335	201 221	219 726	236 794	244 594
Rusia	74 483	77 018	83 836	96 438	99 448	99 872	94 345
Eropa Lainnya	95 440	80 176	80 001	84 473	98 086	111 976	122 566
Lainnya (Timur Tengah dan Afrika)	106 472	140 572	171 594	195 148	181 692	230 046	261 589
Jumlah/Total	6 234 497	6 323 730	7 002 944	7 649 731	8 044 462	8 802 129	9 435 411

Sumber : Badan Pusat Statistik, di Olah dari Dokumen Imigrasi, Ditjen Imigrasi

Dalam gambaran detail dan jelasnya terkait dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia bisa digambarkan yakni sebagai berikut :



Dalam paparan yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang diolah dari Dokumen Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bahwa untuk jumlah pengunjung wisata asing Ke Indonesia dari tahun 2008-2014 terus mengalami kenaikan dan bisa dikatakan bahwa kenaikan tersebut terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam hal untuk jumlah pengunjung wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Berdasarkan paparan data yang dipaparkan oleh BPS bahwa untuk jumlah pengunjung wisatawan asing/ mancanegara yang datang ke Indonesia di tahun 2008 mencapai sekitar 6.234.497. Sedangkan di tahun 2009 mengalami kenaikan untuk jumlah wisatawan asing yang mencapai sekitar 6.323.730 jumlah wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2010 bahwa jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia cukup signifikan yakni



mencapai sekitar 7.002.944 dan untuk tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 7.649.731. Sedangkan untuk tahun 2012 bahwa Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia mencapai sekitar 8.044.462 sedangkan di tahun 2013 mencapai sekitar 8.802.129. Sedangkan dalam data terakhir di tahun 2014 bahwa untuk jumlah wisatawan asing mencapai sekitar 9.435.411. Dalam hal ini bahwa dengan meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia diharapkan mendorong adanya terhadap peningkatan penerimaan dari wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia serta juga mendorong adanya upaya peningkatan pendapatan dari APBN maupun APBD. Hal ini bahwa upaya pengembangan pariwisata dalam negeri dalam hal sebagai potensi lokal adalah sebagai bentuk upaya untuk mendorong adanya kegiatan perekonomian dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini bahwa berbagai upaya peran sebuah kebijakan sangat dibutuhkan bukan hanya pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah namun juga masyarakat terutama yang tinggal di wilayah tempat-tempat wisata atau tempat seperti halnya wilayah pesisir untuk bersama-sama berperan dalam melakukan pengelolaan terhadap wisata yang ada di daerah. Melihat penerimaan dari wisatawan asing dan jumlah pengunjung yang selalu meningkat dalam hal ini bahwa memberikan kesempatan terutama bagi masyarakat, Perangkat Desa dan Pemerintah Daerah untuk berusaha dan komitmen dalam melakukan pembangunan pariwisata untuk potensi lokal sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini bahwa dengan berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini bahwa peran semua aktor di daerah sangat dibutuhkan yang sebagaimana bisa bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait dengan pembangunan pariwisata sehingga dalam hal ini akan berupaya untuk menarik para pengunjung wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia.



Dalam hal ini bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah sebagai upaya untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan-keuntungan yang dapat mendorong adanya kesejahteraan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga hal ini menjadi hal penting dari masyarakat dan pemerintah untuk mengelola wisata sebagai potensi lokal yang ada di dalam negeri khususnya untuk yang ada di daerah. Dalam skala nasional bahwa sebenarnya ditinjau dari dokumen Laporan Kinerja Pariwisata dari Kementerian Pariwisata bahwa sebenarnya untuk pembangunan pariwisata sangat dibutuhkan adanya daya dukung yang lainnya seperti halnya pembangunan infrastruktur, sumber daya, listrik, Layanan air bersih dan sebagainya yang sebagaimana hal tersebut mendukung adanya sebuah pembangunan wisata yang ada di daerah serta juga mendorong adanya pembangunan wisata yang ada di daerah. Dalam hal ini bahwa paparan informasi data terkait dengan kontribusi wisata-wisata di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto di paparkan yakni sebagai berikut :

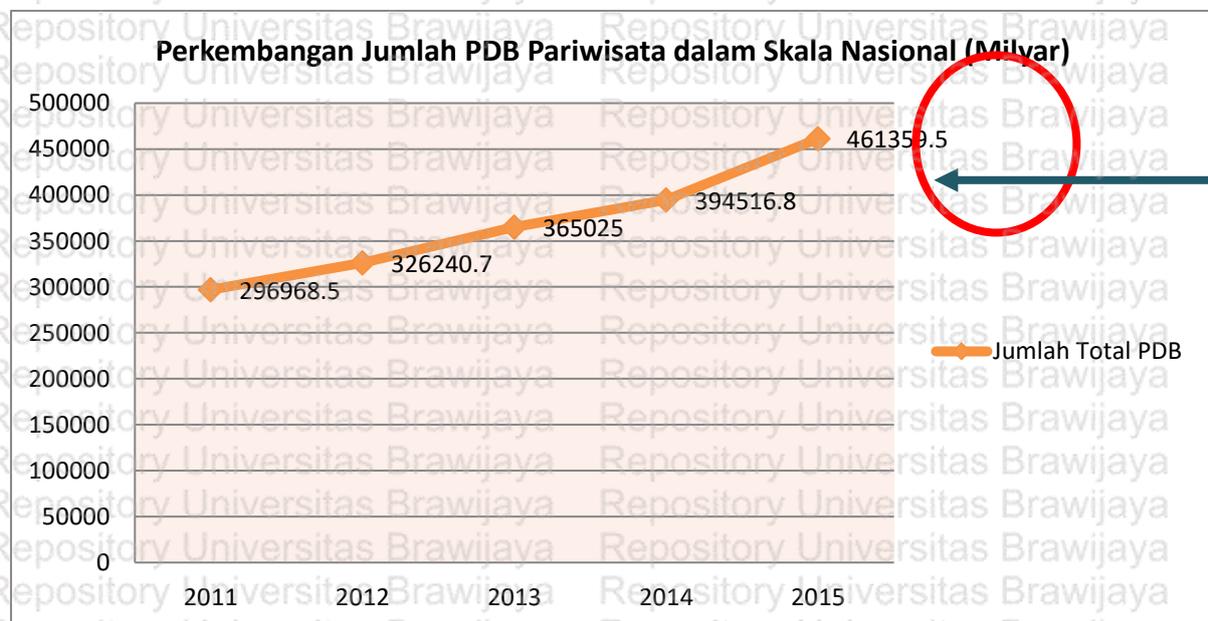
Tabel 4. Produk Domestik Bruto Pariwisata

No.	Sektor	PDB Pariwisata (Milyar Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	30.467,30	32.512,3	36.391,1	39.331,3	45.995,1
2	Pertambangan & Penggalian	14.938,50	16.347,0	18.304,8	19.783,7	23.135,7
3	Industri	75.562,40	84.191,0	94.091,1	101.639,1	118.922,8
4	Listrik, Gas dan Air	1.757,20	1.930,3	2.119,3	2.290,6	2.678,7
5	Konstruksi	32.990,80	35.369,3	37.020,7	40.011,8	46.790,9
6	Perdagangan	18.192,00	19.640,6	21.671,8	23.422,8	27.391,3
7	Restoran	26.409,00	24.904,6	26.375,7	28.506,7	33.336,6
8	Hotel	24.320,40	30.023,3	36.894,3	39.875,1	46.631,2

9	Angkutan Darat	17.576,10	21.898,1	25.471,4	27.471,0	32.125,4
10	Angkutan Air	3.050,00	3.142,6	2.021,5	2.184,8	2.555,0
11	Angkutan Udara	14.771,90	14.529,9	17.502,6	18.916,7	22.121,8
12	Jasa Penunjang Angkutan	5.696,20	6.090,3	6.981,5	7.448,3	8.710,2
13	Komunikasi	6.144,40	7.202,6	7.743,3	8.369,0	8.710,2
14	Jasa Lainnya	25.092,30	28.458,5	32.579,8	35.212,0	41.177,9
	Total	296.968,50	326.240,7	365.025,0	394.516,8	461.359,5
	PDB Nasional Harga Berlaku (Trilyun Rp)	7.427,09	8.241,86	9.083,97	9.765,27	10.898,69
	Persentase Kontribusi	4,00%	3,96%	4,02%	4,04%	4,23%

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Diambil dari Dokumen Laporan Kinerja Pariwisata)

Dalam hal ini bahwa jika dirangkum dan digambarkan secara statistik yakni sebagai berikut :



Melihat perkembangan terkait PDB pariwisata dalam skala nasional bahwa dilihat dari data dari dokumen Laporan Kinerja Pariwisata untuk PDB sektor pariwisata terus



mengalami adanya kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan paparan data yang ada di atas bahwa untuk tahun 2011 PDB dalam sektor pariwisata mencapai sekitar Rp.296968,5 Milyar, Rp.326240,7 Milyar di tahun 2012 mengalami kenaikan PDB yang cukup signifikan, Sedangkan untuk di tahun 2013 bahwa berdasarkan data di atas untuk PDB mengalami kenaikan mencapai sekitar Rp365.025 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2014 untuk PDB sektor pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp.394516,8 Milyar dan untuk tahun yang terakhir bahwa PDB sektor pariwisata mencapai sekitar Rp.461359,5 Milyar. Hal ini bahwa sebenarnya kontribusi untuk sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sangatlah meningkat serta memberikan adanya kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini bahwa sebenarnya pariwisata telah menyumbang APBN/APBD sehingga hal ini bahwa akan menjadikan perekonomian menjadi lebih berkembang dan maju disokong dan didukung dengan kegiatan pariwisata. Dalam hal ini diharapkan peran semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di daerah termasuk juga halnya antara Pemerintah dan Masyarakat untuk melakukan halnya pengelolaan terhadap potensi-potensi lokal yang ada di daerah serta juga untuk berusaha dalam hal menggerakkan perekonomian daerah melalui pengelolaan potensi lokal termasuk potensi pariwisata yang ada di daerah. Dalam hal ini bahwa tidak hanya sebuah peran dari pemerintah pusat saja yang berperan untuk melaksanakan berbagai pengelolaan potensi yang ada di lokal tetapi perlu adanya pelaksanaan daerah yang mandiri dengan pengoptimalan berbagai suatu kegiatan-kegiatan dan program kerja yang ada di Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan potensi lokal.

Sektor pariwisata menjadi potensi penting dalam hal meningkatkan daya saing daerah serta dapat menjadi sektor yang bisa dikatakan sangat strategis untuk membangun sebuah perekonomian daerah yang maju dan berkembang pesat. Sebagai sektor yang strategis bahwa Pariwisata menjadi potensi lokal yang bisa memberikan kontribusi besar terutama terhadap



APBD baik dalam lingkup Kabupaten/Kota serta mendorong adanya pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata adalah bahwa sangat dibutuhkan peran dari pemerintah daerah dan para investor sebagai upaya untuk melakukan optimalisasi sektor pariwisata sebagai destinasi wisata serta dapat menari para wisatawan dari luar untuk datang ke wisata tersebut. Dalam hal ini dengan melakukan upaya optimalisasi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah melalui kinerja sektoral pada pariwisata yang ada di daerah baik Kabupaten/Kota. Dalam hal ini bahwa sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dirumuskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekonomi darat, laut dan serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beraskan pada : Keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, Keterbukaan, Desentralisasi, Akuntabilitas dan Keadilan. Jika digambarkan dalam sebuah konseptual dari regulasi atau undang-undang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil maka akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Regulasi dalam Pengelolaan Pariwisata.

SEKTOR PARIWISATA

Integrasi

- A. Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- B. Antar Pemerintah Daerah
- C. Antar Sektor
- D. Antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Rakyat.
- E. Antar Ekosistem darat dan ekosistem Laut; dan
- F. Antar Ilmu Pengetahuan dan Prinsip-prinsip manajemen.

Asas-asas

- A. Keberlanjutan
- B. Konsistensi
- C. Keterpaduan
- D. Kepastian hukum
- E. Kemitraan
- F. Pemerataan
- G. Peran serta masyarakat
- H. Keterbukaan
- I. Desentralisasi
- J. Akuntabilitas
- K. Keadilan

Namun dalam perkembangannya bahwa secara normatif regulasi yang digunakan untuk mengatur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut diatur dalam undang-undang baru Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa diatur dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan pengertian secara substansi bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini bahwa berdasarkan pengertian tersebut bahwa terkait dengan inti substansi yang ada dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap pesisir-pesisir yang sebagaimana dalam amanah undang-undang baik UUD maupun Undang-undang yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah dan juga investor selain digunakan untuk menarik para wisatawan yang merupakan sebagai destinasi wisata tetapi juga digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta juga digunakan untuk melakukan



peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat dan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah dalam hal melakukan adanya pengelolaan terhadap wisata pantai yang ada di Kabupaten/Kota. Pengelolaan Pantai serta wilayah-wilayah pesisir memiliki daya tarik tersendiri serta bisa dilakukan upaya pengoptimalisasian terhadap wisata pantai yang ada di berbagai daerah yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah serta memberikan jasa terhadap para pelanggan/pengunjung/wisatawan yang ada di daerah maupun di luar daerah.

Namun secara makro terkait dengan adanya pengelolaan potensi wisata yang ada di daerah bahwa dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa secara substansi di jelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dalam Bab 1 bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam hal menyelenggarakan sebuah kepariwisataan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat maupun juga Pengusaha/Investor dalam hal melakukan upaya untuk mengelola sektor pariwisata tersebut berdasarkan adanya asas-asas dalam hal melakukan penyelenggaraan asas-asas dalam melakukan sebuah pengelolaan pariwisata yakni sebagai berikut :

1. Manfaat
2. Kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan
5. Kemandirian
6. Kelestarian
7. Partisipatif
8. Berkelanjutan



9. Demokratis

10. Kesetaraan ;dan

11. Kesatuan

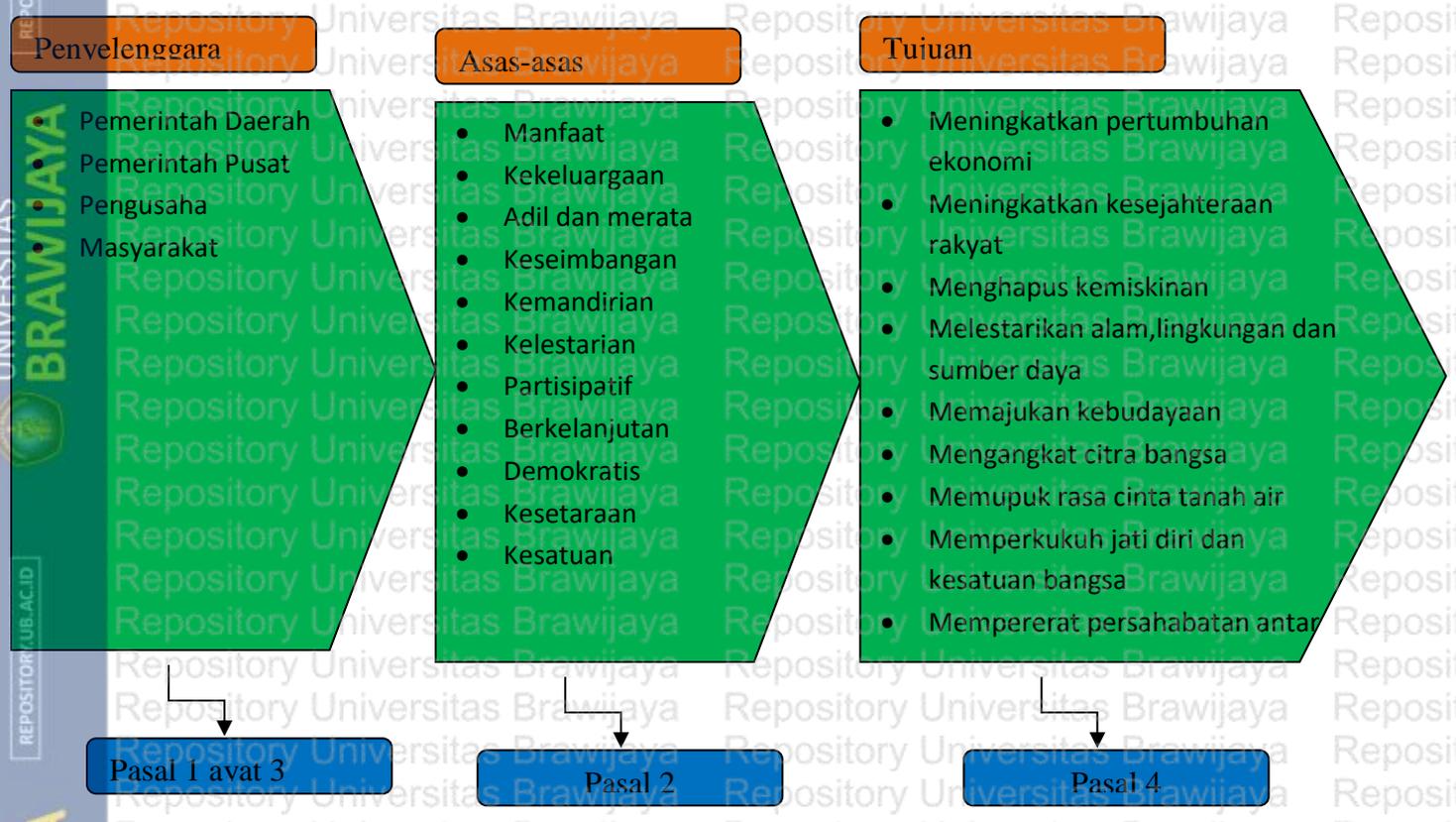
Sedangkan dalam pasal 4 bahwa terkait dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan kepariwisataan bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
5. Memajukan kebudayaan
6. Mengangkat citra bangsa
7. Memupuk rasa cinta tanah air
8. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
9. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Jika digambarkan dalam sebuah konsep terkait dengan substansi yang ada dalam kegiatan pariwisata tersebut yakni sebagai berikut :

Gambar 3. Substansi Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan



Dalam substansi yang ada pasal tersebut terutama dalam hal pasal 4 bahwa tujuan adanya penyelenggaraan dari pariwisata sangatlah penting terutama terkait dengan upaya peningkatan daya saing daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta juga melakukan upaya penghapusan kemiskinan yang ada di daerah sehingga diharapkan upaya pengelolaan dari pariwisata tersebut memberikan adanya nilai tambah terhadap daerah. Nilai tambah tersebut bisa diambil dari pengelolaan hal apa saja yang menjadi sebuah potensi lokal untuk dikelola yang sebagaimana dalam kajian ini terkait dengan pengelolaan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak sekali potensi wisata yang sangat memberikan kontribusi terhadap daerah Kabupaten Tulungagung. Secara ekonomi bahwa perekonomian daerah Tulungagung memang berjalan cukup produktif dan di dukung dengan adanya kegiatan usaha seperti halnya marmer dan juga potensi usaha yang lainnya seperti halnya wisata yang ada di daerah Kabupaten

Tulungagung. Terkait dengan upaya tersebut bahwa sebenarnya peran dari pemerintahan daerah dan investor serta masyarakat sangat memiliki peran penting untuk memberikan upaya dalam hal optimalisasi potensi pariwisata yang ada di Daerah yang sebagaimana dalam hal tersebut akan memberikan sebuah upaya untuk peningkatan daya saing daerah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Tulungagung adalah sebagai wilayah atau kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar bahkan dalam kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa wisata terutama pantai yang masih tersembunyi yang sebagaimana pantai-pantai tersebut menjadi sasaran kegiatan eksplorasi pantai wisata yang ada di wilayah Kabupaten serta juga menjadi hal dalam melakukan upaya meningkatkan perekonomian daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015 bahwa terdapat beberapa wisata yang ada sementara ini di wilayah Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar wisata di Kabupaten Tulungagung.

Daftar tempat wisata menurut nama dan alamat di wilayah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Tempat Wisata Menurut Nama dan Alamat di wilayah Kabupaten Tulungagung, 2015		
I.	Wisata Alam	Nama kecamatan/Wilayah/Desa
1	Bendungan Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
3	Coban Kromo (indah)	Dsn. Jambu, Ds. Pelem Kec. Campurdarat
4	Telaga Buret	Ds. Sawo, Kec. Campurdarat
5	Telaga Baran	Ds. Banyuurip, Kec. Kalidawir
6	Telaga Ngambal	Ds. Winong, Kec. Kalidawir
7	Pesanggrahan Argo Wiliis	Ds. Sendang, Kec. Sendang
8	Taman Kusuma Wicitra	Jl. R.A. Kartini No. 1 Tulungagung
II.	Wisata Purbakala	



1	Candi Gayatri	Ds. Boyolangu, Kec.Boyolangu
2	Candi Cungkup	Ds. Sraggahan, Kec.Boyolangu
3	Candi Dadi	Ds.Wajak Kidul, Kec.Boyolangu
4	Candi Gambar	Ds.Mirigambar, Kec.Sumbergempol
5	Candi Ampel	Ds.Ngampel, Kec.Sumbergempol
6	Candi Tuban	Ds.Domasan, Kec.Kalidawir
7	Candi Nilosuwarna	Ds.Aryojeding, Kec.Rejotangan
8	Candi Asmoro Bangun	Ds.Geger, Kec.Sendang
9	Makam Mbah Mlinjo	Ds.Ngepoh, Kec.Tanggunggunung
10	Makam Srigading	Ds.Bolo, Kec.Kauman
11	Makam Setono Gedong	Ds.Sukodono, Kec.Karangrejo
12	Makam Sunan Kuning	Ds.Macanbang, Kec.Pakel
13	Makam Patih	Ds.Tiudan, Kec.Gondang
14	Makam Ngadirogo	Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Ds.Bangunmulyo, Kec.Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Ds.Ndemuk, Kec.Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Ds.Rejotangan, Kec.Rejotangan
18	Makam Soka	Ds.Karangsari, Kec.Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Ds.Mulyosari, Kec.Pagerwojo
20	Makam Majan	Ds.Majan, Kec.Kedungwaru
21	Makam Mbedalem	Ds.Besole, Kec.Besuki
22	Makam Surontani I	Ds. Tanggung ,kec.Campurdarat
23	Makam Surontani II	Ds.Wajak Kidul, Kec.Boyolangu
24	Goa Selomangleng	Ds.Sanggrahan, Kec.Boyolangu
25	Goa Tan Tik syu	Ds.Sumber Agung, Kec.Rejotangan
26	Goa Tan Tik syu	Ds.Sendang, Kec.Sendang
27	Goa Banyu	Ds.Banyuurip, Kec.Kalidawir
28	Goa pasir	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
29	Goa Pasetran Gondamayit	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
30	Goa Tritis	Ds.Tanggung,Kec. Campurdarat
31	Situs Mbah Bodho	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
32	Situs Mbah Bodho	Ds.Kalidawir, Kec.Kalidawir
33	Situs Mbah Bodho	Ds.Gondang, Kec.Gondang
34	Situs Gembrong	Ds.Domasan, Kec.Kalidawir



35	Situs Kanigoro	Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol
36	Situs Lemah Duwur	Ds.Bantengan, Kec.Bandung
37	Situs Alas Kebutan	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
38	Situs Watu Garit	Ds.wateskroyo, Kec.Besuki
39	Situs Song Gentong I	Ds.Besole, Kec.Besuki
40	Situs Song Gentong II	Ds.Besole, Kec.Besuki
41	Situs Omben Jago	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
42	Situs Punden Gedong	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
43	Situs Kucur Sanga	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
44	Penemuan Fosil	Ds.Gamping, Kec.Campurdarat
45	Balai penyelamat (Museum Daerah)	Jl.Raya Popoh, Kec.Boyolangu
46	Dwarapala (Reco Pentung)	Ds.Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar
47	Monumen Wajakensis	Ds. Gamping Kec. Campurdarat
48	Prasasti Lawadan	Ds. Besole Kec. Besuki
49	Wisata Pantai	
1	Pantai Sine	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
2	Pantai Dlado	Ds.Rejosari, Kec.Kalidawir
3	Pantai Popoh	Ds.Besuki, Kec.Besuki
4	Pantai Klatak	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
5	Pantai Sidem	Ds.Besuki, Kec.Besuki
6	Pantai Nglarap	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
7	Pantai Brumbum	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
8	Pantai Molang	Ds.Pucanglaban, Kec.Pucanglaban
9	Pantai Gerangan	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
10	Pantai Bayem	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
11	Pantai Coro	Ds.Besuki, Kec.Besuki
12	Wisata Sanggar	Kec. Tanggunggunung
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung		

Namun sebenarnya berdasarkan informasi dari komunitas *explore Tulungagung* yang dilansir dari media informasi saat ini bahwa sebenarnya masih banyak wisata Pantai yang tersembunyi di wilayah Kabupaten Tulungagung yang belum di handle atau di explore oleh Pemerintahan Kabupaten melalui Dinas Pariwisata.Berdasarkan data mentah sementara

sekarang yang saat ini bahwa terdapat beberapa Pantai yang ternyata masih belum diketahui oleh banyak wisatawan yakni sebagai berikut :

Tabel 6.Data tentang tabel tersembunyi yang ada di Kabupaten Tulungagung

Daftar-daftar pantai yang Tersembunyi yang ada di Kabupaten Tulungagung (Pantai yang belum Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata)

No.	Nama-nama Pantai di Kab.Tulungagung yang belum diketahui.
1.	Pantai Sanggar
2.	Pantai Patok Gebang
3.	Pantai Ngalur
4.	Pantai Molang
5.	Pantai Lumbang
6.	Pantai Nglinci
7.	Pantai Pucang Sawit
8.	Pantai Kedung Tumpang
9.	Pantai Dlodo
10.	Pantai Dadap
11.	Pantai Sioro
12.	Pantai Godeg
13.	Pantai Gerangan
14.	Pantai Sawah Ombo
15.	Pantai Wedi Putih

Sumber : diambil dari Media Explore Tulungagung

Keterangan :
 Pantai Sioro Kabupaten Tulungagung di Kenal dengan sebagai pantai yang sangat potensial dan secara pesona destinasi memiliki keindahan alam namun dengan ombak yang cukup besar.Pantai Sioro sebagai pantai yang satu paket dengan wisata-wisata yang lainnya seperti halnya Laut Sioro, Pantai Segoro Alas, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Godeg, Batu Godeg, Pantai Branjang, Pantai Ceplukan yang merupakan sebagai destinasi wisata yang satu paket dengan pantai Sioro.Namun pantai ini masih cukup tersembunyi dan juga belum memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya jalan yang untuk menuju ke pantai tersebut, fasilitas toilet, Pajak Retribusi, Tempat Peneduhan, Pedagang dan lain sebagainya.Bahkan untuk menuju pantai harus berjalan atau bahkan ada yang menggunakan kendaraan roda 2 sepanjang ± 5 km dengan jalanan yang kurang memadai dan ekstrim serta sering mengalami kerusakan terutama di musim penghujan.



Dalam data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut bahwa jika di lihat secara keseluruhan bahwa terdapat beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung dan merupakan sebagai potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik dari Kabupaten Tulungagung bahwa terdapat beberapa wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung yakni Wisata Alam, Wisata Purbakala dan Wisata Pantai. Berdasarkan data dan catatan dari BPS Kabupaten Tulungagung bahwa terdapat tahun 2015 untuk wisata alam terdiri dari 8 tempat wisata yakni Bendungan Wonorejo, Bendungan Bumi Kandung, Coban Kromo, Telaga Buret, Telaga Baran, Telaga Ngambal, Pesanggrahan Argo Wilis dan Taman Kusuma Wicitra. Sedangkan untuk wisata Purbakala terdiri dari 48 wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari Candi Gayatri, Candi Cungkup, Candi Dadi, Candi Gambar, Candi Ampel, Candi Tuban, Candi Nilosuwarna, Candi Asmoro Bangun, Makam Mbah Mlinjo, Makam Srigading, Makam Setono Gedong, Makam Sunan Kuning, Makam Patih, Makam Patih, Makam Ngadirogo, Makam Petung Ulung, Makam Astonopraloyo, Makam Sengguruh, Makam Soka, Kuburan Wangi, Makam Majan, Makam Mbedalem, Makam Surontani I, Makam Surontani II, Goa Selomangleng, Goa Tan Tik syu, Goa Banyu, Goa Pasir, Goa Pesatren Gondomayit, Goa Tritis, Situs Mbah Bodho, Situs Gembrong, Situs Kanigoro, Situs Lemah Duwur, Situs Alas Kebutan, Situs Watu Garit, Situs Song Gentong I Situs Gentong II Situs Embon Jago, Situs Punden Gedong, Situs Kucur Sanga, Penemuan Fosil, Balai Penyelamat, Dwarapala, Monumen Wajakensis dan Prasasti Lawadan. Sedangkan yang terakhir adalah wisata Pantai yang sering banyak di kunjungi oleh banyak wisatawan dan bahkan dari luar. Dalam catatan Dinas Pariwisata yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung yakni terdapat beberapa nama-nama pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung yakni sebagai



berikut : Pantai Sine, Pantai Dlodo, Pantai Popoh, Pantai Klatak, Pantai Sidem, Pantai Nglarap, Pantai Brumbum, Pantai Molang, Pantai Gerangan, Pantai Bayem, Pantai Coro dan Wisata Sanggar.

Namun berdasarkan pra riset lapangan untuk di wisata pantai Sioro yang terletak Di Desa Ngrejo Kabupaten Tulunggaung bahwa pantai Sioro dikenal sebagai pantai yang berpotensi dan juga memiliki destinasi lain yang satu paket dengan pantai Sioro. Namun dalam pengelolaannya sekarang masih dalam bentuk proses serta sekarang masyarakat untuk wilayah Desa Ngrejo yang harus benar-benar melakukan pengelolaan untuk Pantai Sioro yang terletak di desa Ngrejo Kabupaten Tulunggaung. Pantai Sioro adalah sebuah pantai yang di kenal terutama pada masyarakat Desa Ngrejo tersebut yang satu paket dengan wisata pantai lainnya seperti halnya Laut Sioro, Pantai Segoro Alas, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Godeg, Batu Godeg, Pantai Branjang, Pantai Ceplukan yang merupakan sebagai destinasi wisata yang satu paket dengan pantai Sioro. Hal ini bahwa begitu potensialnya untuk Pantai Sioro yang memiliki beberapa destinasi yang satu paket dengan Pantai-pantai yang lainnya sehingga dalam hal ini bahwa menjadi potensi lokal tersendiri untuk masyarakat Desa Ngrejo. Namun pantai ini masih cukup tersembunyi dan juga belum memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya jalan yang untuk menuju ke pantai tersebut, fasilitas toilet, Pajak Retribusi, Tempat Peneduhan, Pedagang dan lain sebagainya. Bahkan untuk menuju pantai harus berjalan atau bahkan ada yang menggunakan kendaraan roda 2 sepanjang ± 5 km dengan jalanan yang kurang memadai dan ekstrim serta sering mengalami kerusakan terutama di musim penghujan. Selain itu juga bahwa untuk Pantai Sioro dikenal sebagai pantai yang sebenarnya cukup banyak pengunjung namun rata-rata pengunjung berdasarkan informasi dari masyarakat kedatangan pengunjung dari Kota Kediri dan Surabaya, namun untuk wilayah Blitar dan Malang masih sangat jarang kedatangannya dalam hal untuk mengunjungi wisata pantai Sioro tersebut. Memang berdasarkan kegiatan observasi



yang ada di lapangan bahwa untuk pantai Sioro yang berada di Desa Ngrejo tersebut dikenal sebagai pantai yang masih tersembunyi belum semua masyarakat yang berada di luar Kabupaten Tulungagung mengetahui keberadaan pantai tersebut karena sangat tersembunyi berada di wilayah perbukitan serta untuk menuju pantai tersebut harus berjalan di bukit-bukit yang cukup curam dan ekstrim dengan jalan yang belum begitu memadai sehingga untuk berjalan di wisata tersebut memang harus dengan ekstra hati-hati terutama pada pengunjung yang dari luar Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga untuk mengunjungi wisata pantai tersebut memang harus membutuhkan fisik yang ekstra dan harus benar-benar membawa bekal terutama bagi pengunjung yang ingin mendatangi Pantai tersebut karena cuaca yang begitu cukup ekstrim terutama pada musim kemarau dari mulai jam 09.00-15.00 sehingga pengunjung pun harus membawa bekal untuk berjalan menuju di Pantai Sioro. Memang sepanjang perjalanan menuju pantai Sioro di penuh dengan perkebunan pisang sehingga hal ini bukan hanya potensi keindahan dari Pantai Sioro sendiri tetapi juga perkebunan pisang adalah sebagai perkebunan yang sebagaimana hal tersebut menjadi perkebunan masyarakat terutama untuk Desa Ngrejo sehingga dalam hal ini bahwa menjadi kesempatan bagi masyarakat Desa Ngrejo dalam hal mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung. Namun meskipun jalanan di penuh dengan perkebunan pisang tetapi berdasarkan obeservasi yang berada di Lapangan bahwa seperti yang dikatakan penulis di atas bahwa jalanan sangat curam dan ekstrim dan jalan raya masih belum dibangun terutama untuk menuju adanya obyek wisata yang ada di Pantai Sioro sehingga pengunjung diharapkan benar-benar ekstra hati-hati terutama pada musim penghujan serta juga perlu melakukan upaya dalam hal perbaikan-perbaikan terutama infrastruktur yang ada di Desa Ngrejo Pantai Sioro untuk Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini bahwa berdasarkan obeservasi di lapangan menurut Informasi dari masyarakat yakni sebagai berikut :



“Rencana Pantai Sioro Ke depan akan mulai di bangun berbagai sarana dan prasarana seperti halnya Jalan untuk menuju pantai Sioro dan juga wisata-wisata pantai yang lainnya seperti pantai Cengger, Pantai Sioro, Laut Sioro, Pulau Songkalong, Pantai Godeg, Pantai Mbranjang, wisata Batu Godeg, Pantai Ceplukan dan Segoro Alas.Jalan raya ini akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terutama pada akses ke Pantai Sioro dan juga destinasi wisata lainnya.Selain di bangun Jalan raya yang memudahkan akses akan dibangun bandara di sekitaran atas bukit oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung” (Sumber : Pak Yanto Warga Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung)

Dalam hal informasi dari masyarakat seperti keterangan di atas bahwa memang berdasarkan Informasi dari masyarakat Ngrejo sekitar bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan adanya upaya untuk melakukan perbaikan fasilitas terutama untuk jalan raya menuju di obyek wisata pantai Sioro wilayah Desa Ngrejo serta upaya untuk melakukan adanya pemberian sarana dan prasarana dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang ada di Desa Ngrejo untuk meningkatkan fasilitas umum yang ada di sekitaran wisata pantai Kabupaten Tulungagung.Namun sampai saat ini bahwa keadaan terutama sarana dan prasarana untuk menunjang ke obyek wisata pantai sioro masih sangat memprihatinkan serta untuk menuju jalan tersebut sangatlah curam dan membutuhkan hal yang sangat ekstra hati-hati untuk berjalan di sepanjang pantai Sioro.Berdasarkan hasil observasi di Lapangan bahwa untuk di pantainya sendiri masih kosong dalam artian belum ada fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti halnya toilet umum, tempat untuk berjualan, tempat untuk beristirahat dan juga tempat untuk berteduh sehingga dalam hal ini dalam hal fasilitas masih hanya tempat sampah dan juga kursi yang digunakan untuk duduk para pengunjung.Selain itu juga untuk masuk ke Pantai tersebut masih belum



adanya retribusi serta untuk saat ini pantai dikelola seadanya oleh masyarakat sekitar setempat. Dan dalam hal ini bahwa termasuk pantai yang satu paket dengan pantai-pantai yang lainnya pun juga seperti halnya dengan Pantai Sioro bahwa dalam hal ini Pantai tersebut masih dalam kondisi yang belum memadai dalam hal sarana dan prasarana yang semestinya serta dalam hal ini bahwa untuk melakukann adanya suatu akses menuju wisata tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan begitu panjangnya perjalanan untuk menuju obyek wisata yang ada di sekitaran pantai Sioro. Namun sebenarnya dalam perjalanan bukit untuk menuju di Pantai Sioro tersebut dipenuhi dengan perkebunan pisang yang sebagaimana bahwa perkebunan di sekitaran bukit yang berada di Desa Ngrejo tersebut sebagai sumber mata pencaharian yang ada di sekitaran warga desa Ngrejo. Namun dalam hal ini bahwa untuk potensi perkebunan tersebut adalah sebagai potensi besar sebagai potensi untuk menghidupi masyarakat di sekitaran warga Desa Ngrejo. Untuk pendapatan pun rata-rata juga didapat dari hasil perkebunan pisang yang menjadi mata pencaharian warga desa Ngrejo dan dalam hal ini bahwa potensi perkebunan pisang yang berada di Desa Ngrejo sangatlah besar dan menjadi sebuah potensi tersendiri untuk Desa Ngrejo dalam menggerakkan kegiatan perkebunan yang berada di Desa Ngrejo di dalam perjalanan untuk menuju Pantai Sioro. Dalam hal ini bahwa menjadi potensi besar bagi warga yang ada di Desa Ngrejo dalam hal untuk mengelola potensi lokal secara mandiri yang merupakan sebagai sumber perekonomian lokal atau desa serta juga di tambah dengan potensi wisata pantai yang ada di wilayah Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung. Namun dalam hal ini bahwa memang perlu adanya upaya dari pihak lain untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait dengan adanya pengetahuan tentang adanya pariwisata serta juga bagaimana strategi dalam hal melakukan strategi pengelolaan pariwisata sehingga dalam hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomis yang dapat meningkatkan adanya nilai ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Hal ini bahwa agar potensi yang ada di dalam daerah hal ini bahwa peran masyarakat adalah menjadi



hal yang penting serta juga perlu adanya gerakan-gerakan dan pelopor untuk menggerakkan warga dalam hal melakukan adanya suatu pengelolaan potensi wisata yang ada di suatu daerah termasuk juga warga desa Ngrejo yang memiliki wisata yang sangat potensial seperti halnya pantai Sioro.

Hal ini bahwa berdasarkan kegiatan di lapangan di Pantai Sioro tersebut bahwa banyak hal-hal penemuan-penemuan persoalan-persoalan yang ada di obyek wisata tersebut termasuk juga petunjuk arah yang ada di Pantai tersebut dan dalam hal ini bahwa termasuk juga dengan pantai-pantai yang satu paket dengan Pantai Sioro dalam hal ini bahwa berdasarkan perjalanan di lapangan bahwa banyak persoalan-persoalan terkait dengan akses untuk menuju pantai tersebut yakni seperti halnya arah-arah untuk menuju di pantai Sioro dan juga dengan wisata-wisata pantai yang merupakan satu paket dengan pantai Sioro. Hal ini bahwa pentingnya petunjuk arah untuk memberikan petunjuk terhadap pengunjung terutama pengunjung dari luar Kabupaten Tulungagung yang masih belum mengetahui keberadaan pantai Sioro yang dikatakan masih tersembunyi. Hal ini agar memudahkan para pengunjung lebih mengetahui keberadaan Pantai Sioro yang berada di dalam dengan melewati berbagai perbukitan sehingga dalam hal ini bahwa dengan upaya untuk memberikan petunjuk terhadap para pengunjung untuk mengunjungi pantai Sioro yang dikatakan masih tersembunyi. Hal ini bahwa peran aktif terutama dari warga Ngrejo bahwa diharapkan untuk berupaya terus mengeksplorasi wisata Kabupaten Tulungagung yang masih tersembunyi dan juga masih terus berupaya untuk mempromosikan wisata-wisata pantai yang tersembunyi seperti halnya wisata Pantai Sioro yang menjadi sebuah obyek wisata berpotensi. Hal ini bahwa sebenarnya bukan hanya Pemerintahan Kabupaten saja yang berperan dalam hal upaya untuk mengelola potensi lokal namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal untuk mengelola potensi wisata yang ada di daerah termasuk di Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung serta juga berupaya untuk melakukan optimalisasi yang ada di wisata pantai Desa Ngrejo Kabupaten

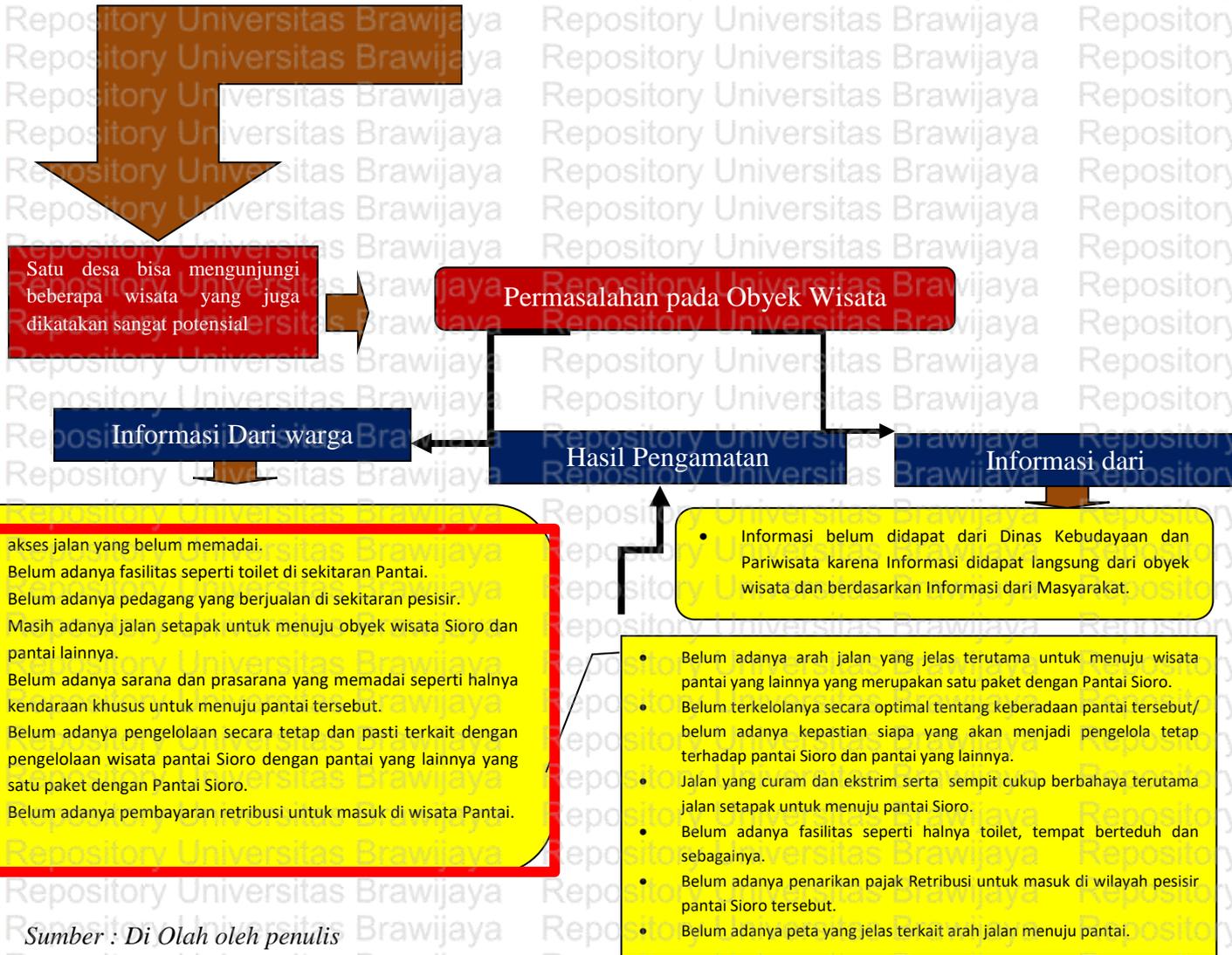


Tulungagung. Dengan adanya sebuah peran aktif dari masyarakat ini bahwa diharapkan untuk terus mengoptimalkan potensi alam yang ada di daerah seperti halnya wisata Pantai Sioro dengan pantai lainnya yang satu paket sehingga dapat menggerakkan adanya perekonomian lokal khususnya di wilayah Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Ngrejo memang dikatakan sebagai Desa cukup berpotensi untuk mendongkrak sebuah perekonomian lokal serta juga meningkatkan nilai tambah dalam hal memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat lokal khususnya untuk warga Desa Ngrejo serta juga meningkatkan kegiatan perekonomian lokal khususnya untuk warga Desa Ngrejo.

Terkait dengan wisata pantai Sioro bahwa secara akses masih mengalami kerusakan terutama yang masih berupa tanah terutama untuk menuju pantai Sioro meskipun sebagian jalan yang sudah dibangun yang berukuran kecil namun dalam hal ini bahwa masih banyak jalan terutama di jalan-jalan sekitaran perkebunan pisang tersebut masih mengalami kerusakan terutama di musim penghujan sehingga terkadang sulit untuk melakukan perjalanan di wisata Pantai Sioro Kabupaten Tulungagung sehingga dalam hal ini masih sangat membutuhkan adanya sebuah pembangunan infrastruktur yang memadai terutama jalan untuk menuju obyek wisata. Dalam hal ini bahwa jika digambarkan secara konseptual terkait dengan persoalan untuk wisata Pantai Sioro Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut:

Gambar 4. Persoalan potensi Pengelolaan Wisata Pantai Sioro





Sedangkan berdasarkan kegiatan observasi lapangan di Pantai Sioro yang terletak di Desa Ngrejo jika digambarkan yakni sebagai berikut :

Tabel 7.Observasi Lapangan Pantai Sioro

HASIL OBSERVASI LAPANGAN SEMENTARA DI PANTAI SIORO DESA NGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG.



No.	Kategori Pengelolaan Wisata	Keterangan
1.	Data Pendapatan Masyarakat	Pendapatan masyarakat sementara diperoleh dari hasil perkebunan pisang. Sedangkan untuk wisata pantai masih belum ada penarikan retribusi yang di dapat karena pengelolaan masih dikatakan belum pasti dan belum tetap. Namun untuk sementara bahwa seperti halnya pantai Sioro sebagian dikelola masyarakat meskipun belum seoptimal mungkin seperti halnya pantai-pantai yang lainnya.
2.	Kegiatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak mengelola sektor perkebunan yakni perkebunan pisang seperti halnya perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan bukit untuk menuju wisata Pantai Sioro dan pantai-pantai yang lainnya.
3.	Jumlah Pengunjung	Belum ada data yang pasti, namun berdasarkan informasi masyarakat bahwa setiap minggu dan musim kemarau pengunjung banyak yang berdatangan terutama di wisata Pantai Sioro. Pengunjung didominasi dari Surabaya dan Kediri, sedangkan pengunjung dari wilayah lainnya seperti halnya Malang dan Blitar masih sedikit.



4. Keadaan Sarana dan prasarana pantai

a. Jalan untuk menuju wisata yang masih belum memadai.

b. Belum adanya petunjuk jalan yang jelas terutama untuk petunjuk jalan di pantai-pantai yang satu paket dengan pantai Sioro seperti halnya pantai Godeg, Laut Sioro, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Mbranjang, Ceplukan dan Segoro alas.

c. Belum adanya fasilitas toilet umum.

d. Belum adanya tempat untuk berteduh atau masih kosong.

e. Belum adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar pesisir pantai.

f. Banyaknya jalan yang rusak terutama di musim penghujan sehingga tidak semua kendaraan roda dua dapat melewati jalan yang untuk menuju wisata pantai Sioro.

g. Belum adanya petugas pengamanan dan alat pantau untuk memantau keadaan obyek wisata yang ada di sekitaran pantai Sioro.

h. Belum adanya pedagang di sepanjang jalan untuk menuju pantai Sioro seperti pedagang makanan dan minuman.



5.	Peran Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> a. membangun sebagian jalan setapak yang dibangun oleh petani sekitar perkebunan pisang untuk memudahkan pengunjung menuju obyek wisata. b. Lebih banyak melakukan pengelolaan terhadap perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan untuk menuju obyek wisata pantai Siro dan pantai yang lainnya. ❖ Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya pengelolaan secara optimal namun sudah adanya upaya dari pemerintah Kabupaten yakni Bupati langsung mengunjungi obyek wisata di sekitaran pantai Siro. b. Bupati menggelontorkan dana untuk membantu petani perkebunan pisang dalam membangun sebagian jalan setapak untuk menuju obyek wisata pantai Siro.
6.	Strategi Ke depan	Berdasarkan Informasi dari warga Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :



	<p>A. Strategi Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Infrastruktur Jalan untuk menuju wisata Pantai Sioro. • Membangun bandara di sekitaran perbukitan sebagai sarana transportasi udara untuk wilayah Kabupaten Tulungagung. • Menjadikan Pantai Sioro sebagai tujuan wisata para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tulungagung yang telah mendapatkan persetujuan/ACC dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung).
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Informasi Warga Desa Ngrejo Di Olah Oleh Penulis (Hasil Observasi Lapangan)

Dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Tulungagung bahwa sangat mendorong adanya perekonomian serta juga memberikan adanya sebuah dorongan terhadap daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini bahwa dalam Gambaran data yang dipaparkan di atas Kabupaten Tulungagung adalah sebagai Kabupaten yang sangat berpotensi dalam sektor Pariwisata serta juga merupakan sebagai Kabupaten yang sangat berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Namun penelusuran yang dilakukan oleh Komunitas dan masyarakat yang di publikasikan oleh media bahwa sebenarnya banyak pantai-pantai yang masih tersembunyi dan belum masih di ketahui oleh banyak pengunjung dan wisatawan terutama wisatawan dari luar Kabupaten Tulungagung sehingga dalam hal ini memang perlu adanya upaya optimalisasi yang



dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini bahwa termasuk Pantai Coro dan Pantai Kedung Tumpang adalah sebagai pantai yang memiliki daya tarik tersendiri dan merupakan sebagai pantai yang amat sangat memiliki keindahan yang sebenarnya dapat menarik para wisatawan baik dari wilayah kabupaten itu sendiri maupun dari luar kota. Hal ini bahwa sektor pariwisata diukur melalui kinerja sektoral dan merupakan sebagai sektor penting yang berpotensi besar untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini peran dari Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dan juga dibutuhkan adanya para investor untuk melakukan pengelolaan terhadap sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja sektoral pada sektor Pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung serta memberikan adanya kesempatan terhadap wilayah Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah yang memiliki ciri khas dari sektor pariwisata sebagai sektor penting dalam hal upaya untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai daerah yang memiliki daya saing tinggi dan mampu bersaing dengan daerah lain termasuk Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Bali, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri termasuk juga dengan Kabupaten Blitar. Namun dalam hal ini bahwa perlu upaya pengoptimalan SDM (Sumber Daya Manusia) serta meningkatkan adanya sinergitas antara Pemerintah dengan pihak lain untuk melakukan pengelolaan terhadap potensi Pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Jika ditinjau dari Matriks Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/189/031/2015 tanggal 3 Agustus 2015 bahwa terdapat bahwa terdapat

beberapa perencanaan dan misi Pembangunan ke depan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

GAMBARAN UMUM UNTUK PERENCANAAN DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN

- 1) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan Pembangunan sektor-sektor lain.
- 2) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata serta Perkebunan melalui Kewirausahaan.
- 3) Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan terpadu.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan budaya.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis

PENJELASAN SECARA SPESIFIKASI TERKAIT DENGAN PERENCANAAN DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Tabel 8. Daftar Paparan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Paparan Kebijakan	Uraian Kebijakan Pemerintah
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berbasis Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sektor-sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti jalan, banjir, permukiman, sampah, air minum dan lain-lain



	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim • Mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu
<p>Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan Kewirausahaan</p>	<p>Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif</p>
<p>Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Pola Terpadu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan • Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial • Meningkatkan kualitas hidup



		perempuan dan anak
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas Serta Pelestarian/Pengembangan Kebudayaan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,Transparan,Akuntabel,Responsif dan Demokratis		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional,bersih dan transparan • Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat • Mewujudkan tatanan politik yang harmonis • Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum • Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama/kepercayaan

Sumber; Situs Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Namun terkait dengan sektor pariwisata adalah sektor sekunder dan merupakan sebagai sebuah sektor yang memberikan adanya perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Tulungagung.Dalam hal ini juga bahwa sebenarnya bahwa kalau kita lihat secara menyeluruh terkait dengan mapping atau matrik dalam misi ke depan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa jika dipaparkan sebagai berikut :

Gambar 5.Uraian sasaran Kebijakan



Uraian dalam sasaran Kebijakan

- Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah.
- Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif
- Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder
- Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah.

Indikator

- Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional
- 1. Jumlah Lumbung Pangan Terbangun
- 2. Persentase kecamatan rawan gizi
- 3. Angka kematian ternak akibat penyakit.
- Nilai ekspor bersih perdagangan
- Pertumbuhan KSP/USP sehat

Target Tahun mulai 2014-2018

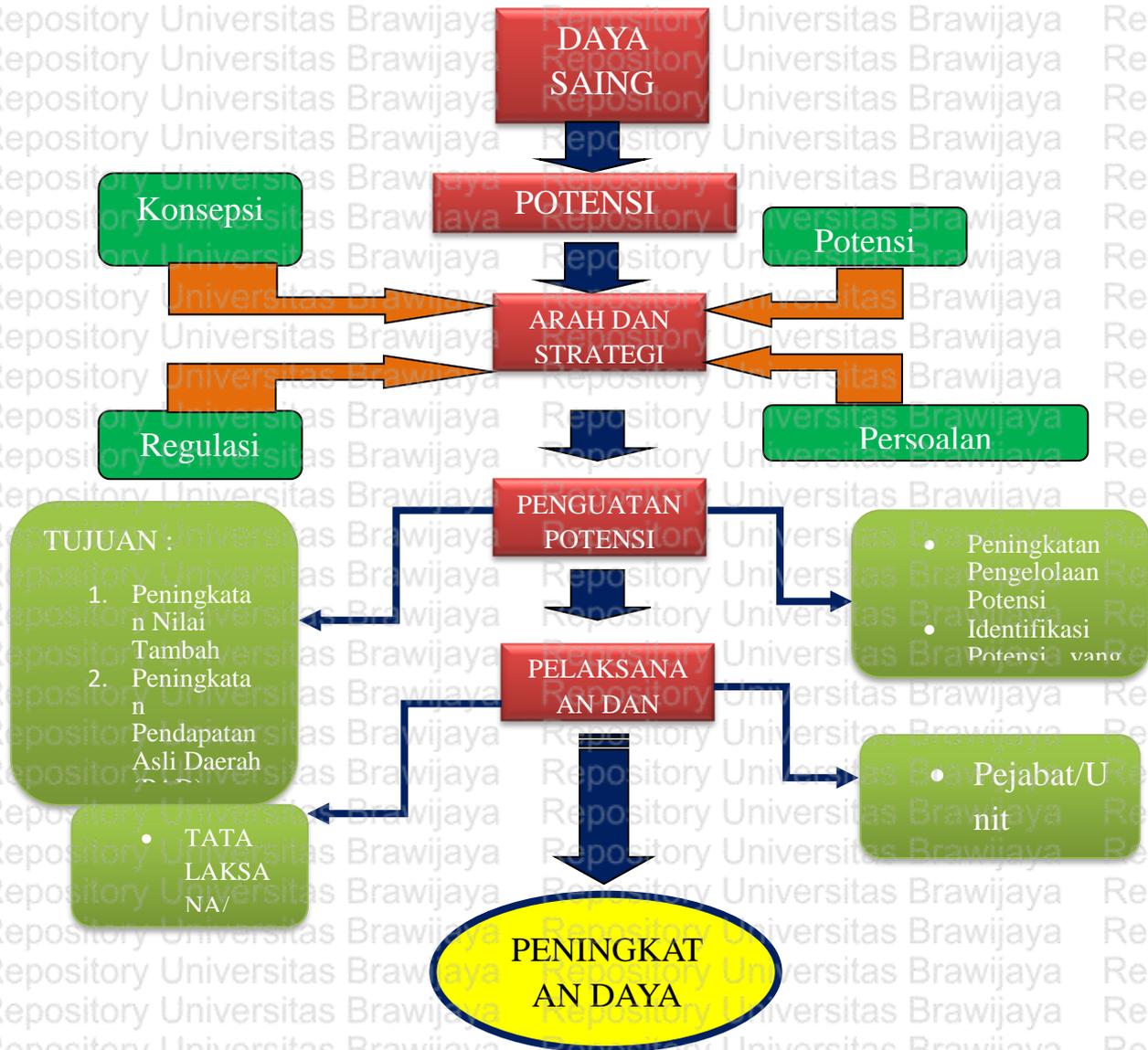
Kabupaten Tulungagung peng... yang juga masuk dalam program-program pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Namun dalam hal dalam dokumen matriks yang menjadi misi pemerintahan Kabupaten Tulungagung tersebut belum terlalu fokus pada sektor Pariwisata atau bisa dikatakan sangat dibutuhkan adanya dokumen renstra terutama dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam melakukan pengelolaan terhadap wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Namun dalam gambaran matriks tersebut masih digambarkan secara keseluruhan terutama jika dilihat misi nomor 5 yang dipaparkan di matriks misi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung jika disambungkan dengan uraian sasaran dan juga dengan indikator yang ada dalam uraian kebijakan tersebut bahwa antara Pariwisata dengan UKM, Pertanian, Perikanan dan Peternakan akan menjadi satu dan menjadi sebuah sektor satu paket yang semuanya akan didorong kepada uraian sasaran kebijakan yang sama dan dijadikan indikator yang sama untuk menjadi program kerja pemerintahan Kabupaten Tulungagung ke depan sampai dengan tahun 2018. Namun dalam hal ini juga bahwa sebenarnya dalam matriks tersebut memang tidak di jelaskan secara fokus terutama arah kebijakan dalam sektor pariwisata yang akan di buat oleh Pemerintahan Kabupaten Tulungagung akan diarahkan ke mana sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan acuan



dokumen legal oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang benar-benar khusus menangani persoalan terkait dengan pengelolaan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Namun terkait dengan upaya untuk melakukan pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam hal ini bahwa sebenarnya menjadi peran pemerintahan kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan sebagai sebuah dinas yang sangat berperan penting dalam hal melakukan pengelolaan terhadap sektor pariwisata yang masih belum di kenal dan tersembunyi yang seharusnya di eksplorasi dan di kelola oleh Pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang sebagaimana dalam hal ini sangat memberikan adanya sebuah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini bahwa untuk upaya melakukan berbagai keterlibatan dengan pihak lain misalnya dengan pemerintahan Kabupaten seperti halnya Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam hal melakukan upaya untuk mengeksplorasi wisata-wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung dan dalam hal ini bahwa sebenarnya dengan adanya eksplorasi serta manajemen yang baik akan memungkinkan Kabupaten Tulungagung dapat menarik para wisatawan dan investor untuk mengunjungi wilayah Kabupaten Tulungagung serta dalam hal ini bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang sangat besar dari sektor pariwisata yang sebagaimana dalam hal ini akan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini bahwa secara konsep terkait seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap daya saing daerah maka akan digambarkan sebagai berikut:

.Gambar 6. Konsep dalam daya saing daerah

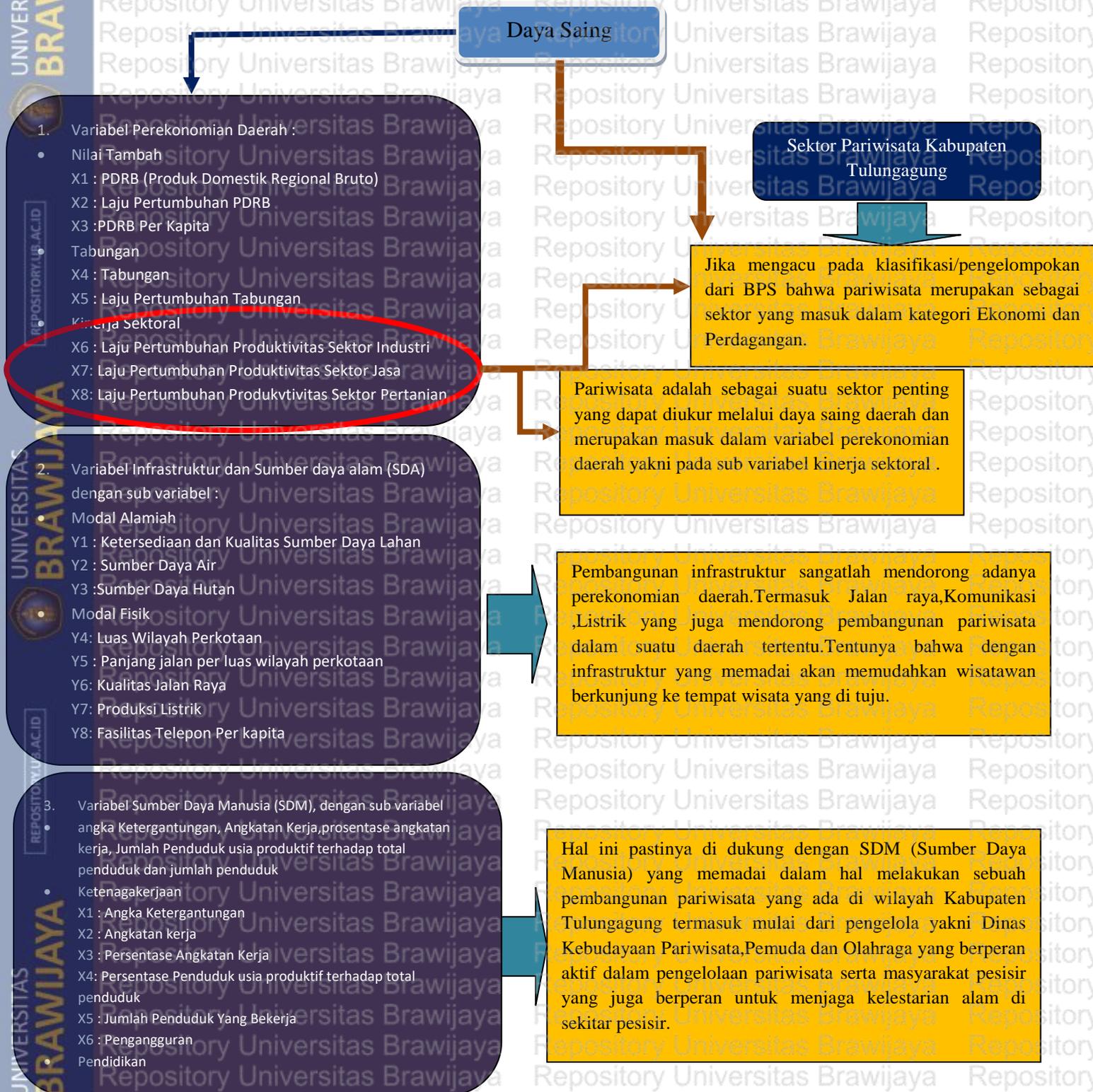


Dalam gambar Grand Design yang di rancang oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara yang akan menjadi bahan paparan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Provinsi Banten bahwa dalam gambaran Di atas sebagai sebuah gambaran yang sebagaimana daya saing daerah akan di dukung dan di sokong oleh potensi daerah itu sendiri dan juga merupakan sebagai potensi yang dapat menambah adanya nilai tambah terhadap perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota itu sendiri maupun juga dengan wilayah Provinsi.Namun dalam hal ini seperti halnya potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai salah satu potensi yang sangat mendukung perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga dalam hal ini

akan menjadikan daerah tersebut dapat terus memacu daya saing dan juga meningkatkan adanya kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Namun dari

gambaran konsep yang ada di atas jika di jabarkan maka akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 7 .Konsep Pariwisata sebagai Daya Saing Daerah





Dalam konsep gambaran yang ada di atas baik masuk dalam konsep yang ada di daya saing daerah maupun juga dengan konsep yang kedua yang memetakan keterkaitan antara sektor pariwisata dengan daya saing daerah bahwa hal ini secara konseptual berdasarkan acuan-acuan tertentu baik dari referensi yang berkaitan dengan daya saing daerah maupun juga dengan acuan dari Badan Pusat Statistika bahwa sebenarnya pariwisata sangat mendukung adanya perekonomian daerah yakni masuk dalam kelompok sub variabel kinerja sektoral yang sebagaimana telah digambarkan di atas. Termasuk juga dengan potensi-potensi wisata yang di eksplere oleh masyarakat melalui media dan merupakan sebagai wisata tersembunyi yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai sebuah wilayah yang saat ini ditemukan wisata-wisata baru yang masih tersembunyi dan belum di kenal oleh banyak masyarakat terutama masyarakat yang berada di luar Kabupaten Tulungagung.

Dalam kunjungan wisata berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa terdapat beberapa pantai yang lebih di sorot oleh masyarakat luar yakni seperti halnya pantai popoh, Sidem dan Pantai Coro. Namun sebenarnya masih banyak pantai yang belum di kenal oleh banyak orang seperti pantai Kedung Tumpang, Pantai Molang dan Pantai Pucang Sawit yang merupakan sebagai sebuah pantai wisata yang belum di kenal oleh banyak orang dan merupakan sebagai sebuah pantai wisata yang baru-baru ini di sebutkan oleh berbagai sukarelawan yang melakukan eksplorasi dengan memanfaatkan media massa. Namun sebenarnya wisata-wisata tersebut sangat berpotensi besar dan merupakan sebagai sebuah asset penting yang memang perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat dan yang sebagaimana dalam hal ini dapat menjadikan asset tersebut meningkatkan nilai tambah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hal ini menjadikan perekonomian daerah semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan daya saing daerah terutama untuk Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Dalam hal ini bahwa dalam outline yang saya rumuskan sebagai persiapan kegiatan skripsi dengan berjudul **“Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sioro**



berbasis *Local Community* di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung”(Study pada Wisata Pantai Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran warga Desa Ngrejo dalam pengembangan wisata Pantai Sioro sebagai potensi lokal ?
2. Bagaimana program-program ke depan dalam melakukan pengembangan wisata pantai Sioro sebagai wisata baru di wilayah Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana strategi ke depan dalam melakukan kegiatan pengelolaan potensi wisata pantai Sioro yang berada di Desa Ngrejo Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran tentang bagaimana peran warga desa Ngrejo dalam mengembangkan wisata Pantai Sioro sebagai potensi lokal yang berada di dekat kawasan Desa Ngrejo.
2. Mengetahui tentang bagaimana program-program ke depan baik dari pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan masyarakat terkait dengan pengembangan wisata pantai Sioro sebagai wisata baru Kabupaten Tulungagung.
3. Memberikan upaya rekomendasi terutama terhadap masyarakat sekitar, perangkat desa dan termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait bagaimana strategi kebijakan ke depan dalam hal melakukan pengelolaan potensi wisata Sioro yang berada di Kabupaten Tulungagung.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN



Terkait dengan kegiatan penelitian yang penulis lakukan, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yang meliputi sebagai berikut :

1. Secara Akademis

- a) Sebagai pisau analisis untuk mengkaji hasil penelitian lapangan terkait dengan pengelolaan wisata Sioro Desa Ngrejo di kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
- b) Sebagai alat untuk melakukan kajian komparasi antara indikator-indikator dalam sebuah pendekatan tertentu dengan kejadian yang ada di lapangan sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk merumuskan suatu rekomendasi yang akan ditujukan kepada *stakeholder* baik masyarakat maupun pemerintah daerah.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan pemaparan terkait dengan peran terutama warga Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan wisata Sioro sehingga bisa dijadikan bahan untuk merumuskan masukan-masukan alternatif untuk meningkatkan terus produktivitas warga beserta perangkat desa dalam melakukan pengelolaan terhadap wisata Sioro yang berada di Desa Ngrejo.
- b) Hasil riset yang telah dilakukan sebagai bahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi-rekomendasi yang disusun dalam bentuk *policy paper* atau paper kebijakan atau bisa jadi dalam perumusan rencana strategis/renstra baik hal tersebut direkomendasikan kepada masyarakat desa Ngrejo melalui perangkat desa seperti halnya kepala desa maupun Pemerintah Kabupaten.

E. SISTEMATIKA PEMIKIRAN PENULISAN



Terkait dengan penyusunan proposal penelitian yang disusun oleh penulis, bahwa akan membahas masing-masing bab yang sebagaimana hal tersebut akan dijelaskan yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Sebagai bab yang terdiri dari berbagai subbab yang mengupas dan membahas terkait dengan

- 1) **Latar Belakang Masalah** yang menjelaskan berbagai rangkaian persoalan yang terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas dengan diawali dengan ruang lingkup yang makro hingga merucut pada ruang lingkup yang mikro yang sebagaimana dalam hal tersebut dipaparkan dengan berbagai data empiris yang memaparkan persoalan-persoalan yang ada di lapangan.
- 2) **Rumusan Masalah** memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan terjawab dari hasil penelitian yang ada di Lapangan baik berdasarkan observasi lapangan/terjun lapangan ke masyarakat dan perangkat desa maupun Pemerintah Daerah/ Instansi Dinas terkait.
- 3) **Tujuan Penelitian** menjelaskan dengan dilakukan tujuannya penelitian yang dilakukan oleh penulis/perumus dokumen skripsi atau roadmap yang merupakan sebagai kumpulan dari latar belakang persoalan, kajian pendekatan, hasil pembahasan hingga menuju kesimpulan dan saran rekomendasi yang merupakan sebagai bentuk sistematika pada karya dokumen skripsi.
- 4) **Kontribusi Penelitian** menjelaskan tentang kontribusi/sumbangan dari peneliti terhadap hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan baik kontribusi akademis maupun kontribusi praktis yang sebagaimana hal tersebut sebagai bahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi yang akan ditawarkan terhadap perangkat desa maupun pemerintah daerah.



- 5) **Sistematika Pembahasan** menjelaskan tentang adanya sistematika bab yang akan dipaparkan dalam proposal penelitian yang terdiri dari bab Pendahuluan, Kajian Pendekatan/Pustaka maupun Metode Penelitian yang akan dituangkan dalam proposal penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/PENDEKATAN

Sebagai bab yang menjelaskan dan memaparkan adanya pendekatan-pendekatan dan konsep-konsep yang terkait yang sebagaimana hal tersebut digunakan untuk pisau analisis terhadap suatu kejadian empiris/*empirical problem* yang merupakan sebagai hasil kegiatan lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Sebagai bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam hal kegiatan penelitian lapangan yang sebagaimana menjelaskan :

- a) Jenis penelitian.
- b) Fokus penelitian
- c) Lokasi dan situs penelitian
- d) Sumber data
- e) tehnik pengumpulan data
- f) Analisis data



BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara/Publik

1. Pengertian Administrasi

Mengulas pentingnya sedikit sejarah tentang adanya ilmu administrasi bahwa ilmu administrasi lahir di abad ke 19 dengan karya yang pertama dari Henry Fayol (1841-1925), seorang sarjana Prancis pertama yang melihat adanya prinsip universal yang berlaku dalam administrasi secara umum berlaku yang ada di daratan Eropa (Eropa Kontinental), di kalangan bangsa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Secara etimologis bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* artinya intensif sedangkan *ministrare* yang artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi Pengertian Administrasi adalah melayani secara intensif. Administrasi juga berasal dari kata *administravius* dalam bahasa Inggrisnya adalah *administration*. Administrasi adalah sebagai suatu proses, organisasi dan individu berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu instansi atau lembaga tertentu. Dalam pernyataan lain bahwa administrasi adalah diartikan sebagai sebuah pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan kata lain juga bahwa administrasi adalah sebagai sebuah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (personel maupun material) secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya suatu tujuan.

Namun dalam pernyataan lain bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber, sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dari semua pengertian yang telah dipaparkan di atas bahwa diambil sebuah kesimpulan bahwa administrasi merupakan



totalitas sistem yang terdiri atau subsistem dengan berbagai atribut yang berkaitan, saling ketergantungan, saling berhubungan dan saling memengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan sebagai sebuah kebulatan yang utuh dan mempunyai peranan serta tujuan tertentu. Dalam administrasi diperbincangkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dengan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa konsep administrasi mempunyai konotasi yang luas antara lain sebagai berikut :

- Berusaha mempengaruhi dan menyuruh orang agar bekerja secara produktif
- Memanfaatkan manusia, material, uang dan metode secara terpadu untuk mencapai tujuan institusional
- Mencapai tujuan melalui orang lain, fungsi eksekutif pemerintah, dan memanfaatkan sistem kerja interaktif yang efisien dan efektif.

Dalam pengertian luas dapat dilihat dari 3 sudut, hingga mencakup tiga pengertian yaitu sudut proses , fungsi dan kelembagaan . Dalam penjelasannya yakni bisa dikatakan sebagai berikut :

1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.



2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas kerja.

3. Dari sudut kelembagaan, ilmu administrasi mempelajari orang-orang bertindak sebagai administrator, baik secara perseorangan maupun secara kolektif yang menjalankan kegiatan administratif yaitu sebagai berikut :

- a. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan.
- b. Manajer : orang yang langsung memimpin pekerjaan ke arah tercapainya hasil yang nyata.
- c. Pembantu ahli (staf) : terdiri atas para ahli dalam bidang masing-masing, selaku penasihat (brain-trust) dan berfungsi di bidang pemikiran.
- d. Karyawan : yaitu para pelaksana dan para pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk menghasilkan sesuai dengan tujuan.

2. Administrasi Publik/Negara

Dalam referensi yang di tulis oleh Dr.H.Rahmat.M.Si dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi bahwa administrasi publik (Inggris : Public Administration) atau administrasi negara yang mempelajari 3 elemen kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, Lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif yang sebagaimana lembaga tersebut menjalankan sebuah administrasi negara. Namun dalam hal ini bahwa administrasi negara memiliki berbagai sebuah cakupan yang terkait dengan adanya administrasi pembangunan, manajemen publik, tujuan negara serta juga etika dalam penyelenggaraan sebuah negara. Namun intinya bahwa kedudukan dan locus ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik (public interest) dan urusan public (public affairs), dan sedangkan fokus pembahasannya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen. Sedangkan jika melihat tantangan-

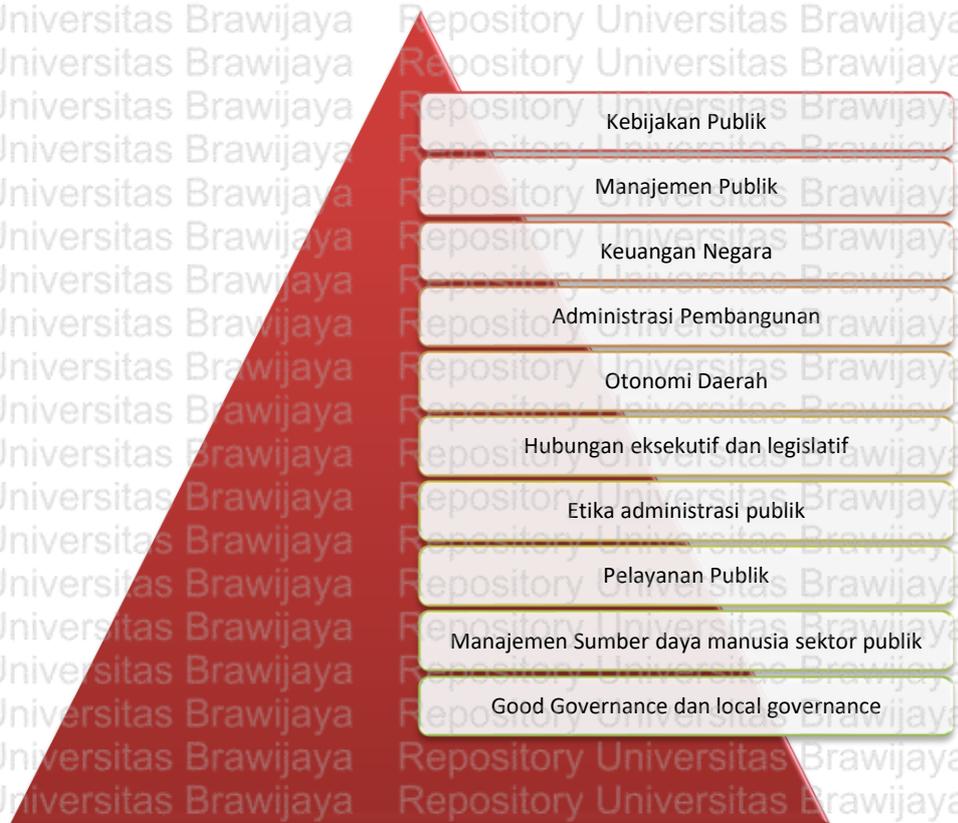


tantangan ke depan, bahwa ilmuwan administrasi publik harus memahami hal sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik untuk melakukan restrukturisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta.
2. Bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis menguntungkan dengan mempelajari public choices theory, Principal/agent theory dan transactions cost theory.
3. Perubahan-perubahan lingkungan dalam sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan globalisasi.
4. Terjadinya perubahan teknologi informasi yang dapat membantu manajer publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka sehingga ilmuwan manajemen publik harus belajar perkembangan teknologi informasi untuk diadopsi menjadi e-government.

Kajian administrasi publik adalah sebagai berikut :

Gambar 8. Kajian-kajian dalam Administrasi Publik





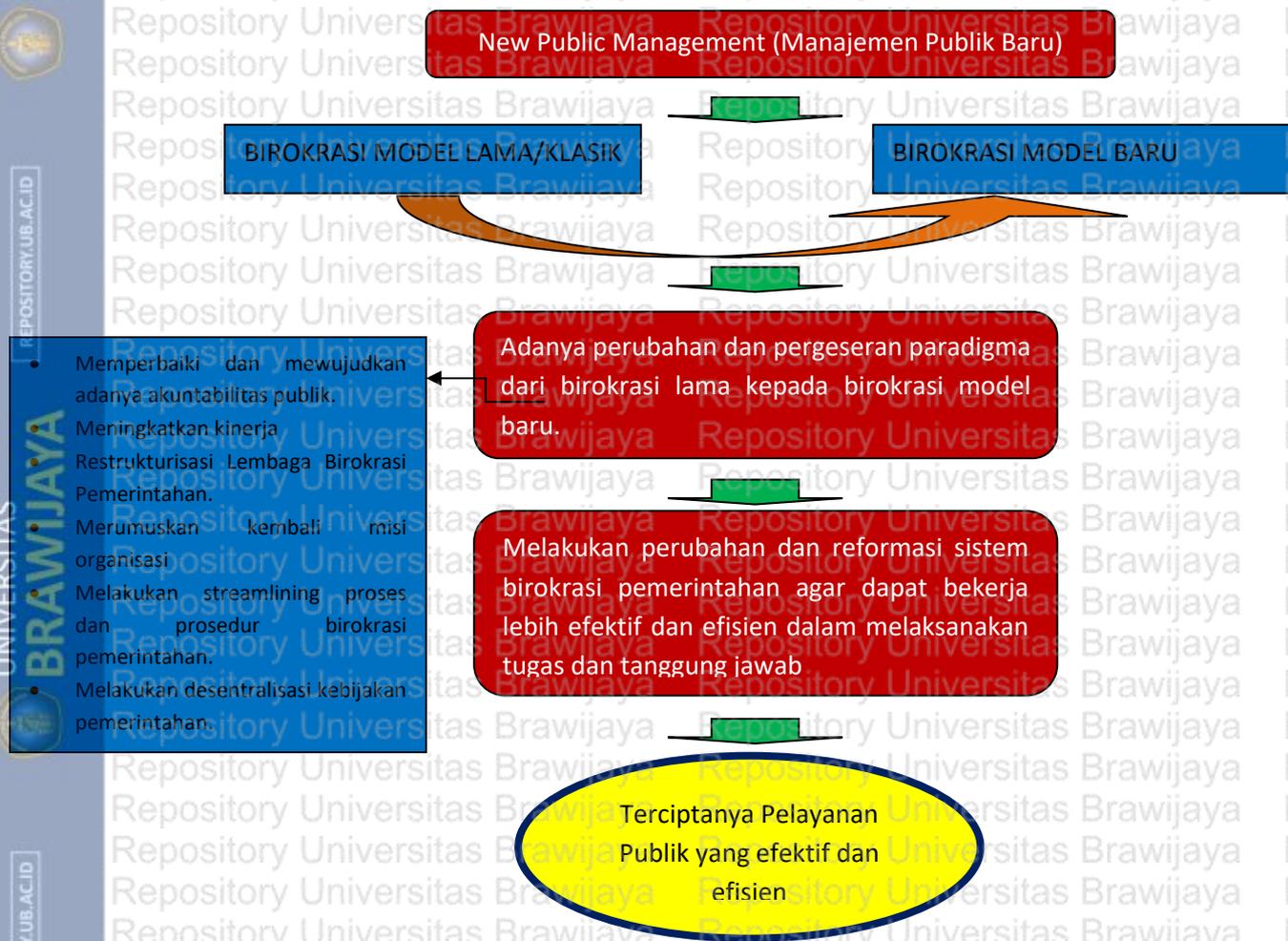
3. Teori NPM (New Public Management)

Pendekatan dalam *New Public Management* /Manajemen Publik Baru ini antara lain adalah bagaimana menggunakan adanya suatu mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik. Gambaran dalam *New Public Management* adalah untuk melakukan adanya transformasi kinerja pasar seperti ini dengan kata lain mengganti atau melakukan adanya reformasi kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi yang berlandaskan dengan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (*authority-driven process*) menjadi orientasi pasar (Market-Based) dan dipacu untuk berkompetisi sehat (*competition-driven Tactics*). Dalam sebuah konsep *New Public Management* semua pimpinan/manajer didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan sebuah privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan demikian bahwa kunci dari *New Public Management* adalah sangat menitik beratkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dikutip dari Buku Miftha Thoha yakni *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* dituliskan tentang pernyataan Christopher Hood dari London School Of Economics (1995) mengatakan bahwa *New Public Management* mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar.

Untuk lebih mewujudkan adanya konsep NPM (New Public Management) dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi publik meningkatkan produktivitas dan menemukan adanya alternatif cara-cara pelayanan publik dalam perspektif ekonomi. Birokrasi Publik/Pemerintah di dorong untuk

memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* proses dan prosedur birokrasi dan melakukan desentralisasi proses pengambilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini bahwa jika digambarkan dalam sebuah konsep akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 9. Konsep dalam New Public Management





Donal Kettl (2000) menyebutnya dengan “the global public management Reform” yang memfokuskan pada 6 hal berikut ini :

- 1) Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil
- 2) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando-kontrol” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat.
- 3) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik/ Paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya atau masyarakat.
- 4) Bagaimana pemerintah bisa membuat sebuah program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan sebuah pelayanan.
- 5) Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan sebuah kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya.
- 6) Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (*output and outcome*) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa menggantikan sistem yang menekankan pada alur atas-bawah (top-down) dan sistem yang berorientasi pada aturan (rule-Driven System) kepada suatu sistem



yang berorientasi pada sistem yang berorientasi pada bawah atas (bottom-up) dan juga sistem yang berorientasi pada hasil.

4. Reinventing Government/Bureaucracy

Dalam Buku Miftha Thoha yang Berjudul *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* terkait dengan adanya Reinventing Government/Bureaucracy atau mewirausahakan sebuah birokrasi yang tertulis dalam buku ini adalah bahwa adanya sebuah pembaharuan-pembaharuan di bidang birokrasi pemerintahan. Pembaruan dalam Reinventing Government dapat pula dikatakan sebagai mewirausahakan pemerintah dalam menjalankan sebuah tugas-tugas dan tanggungjawab penting dalam sebuah pemerintahan. Mewirausahakan birokrasi pemerintahan bukan berarti setiap pejabat atau petugas diharuskan berdagang atau berusaha seperti halnya pengusaha atau mengajari pejabat-pejabat pemerintahan untuk berusaha seperti halnya para pengusaha. Melainkan adanya upaya para pejabat disertai dengan komponen instansi publik itu senantiasa bekerja keras untuk meningkatkan agar supaya sumber-sumber yang berpotensi ekonomi yang di punyai oleh instansi pemerintah dari tidak produktif bisa berproduktif dari yang produksinya rendah di tingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Sehingga Prinsip dari Reinventing Government itu adalah mentransformasikan suatu kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah. Pandangan Osborne menyatakan bahwa Reinventing Government itu pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (enterpreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa Enterpreneurship itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang di punyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif dari produksi yang rendah menjadi produksi yang tinggi.



Terdapat beberapa 10 prinsip dalam hal melakukan kegiatan mewirausahakan pemerintah itu uraiannya sebagai berikut :

a) Pemerintahan sebagai katalis

Hal ini bahwa pemerintah berperan untuk melakukan adanya suatu pengarahan, sebagai pembuat kebijakan, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Dan dalam hal ini bahwa pemerintah juga berperan menggunakan berbagai metode seperti kontrak, voucher, hadiah, insentif, pajak dan sebagainya, dan dalam hal ini juga bahwa untuk membantu adanya organisasi publik mencapai suatu tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai suatu efisiensi, efektifitas, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas.

b) Pemerintah Milik Masyarakat

Dalam hal ini bahwa, pemerintah mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dengan adanya suatu kontrol masyarakat, maka pegawai negeri, dan juga pejabat-pejabat yang terpilih, termasuk juga politisi akan memiliki adanya komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan adanya suatu persoalan.

c) Pemerintah Kompetitif

Pemerintah mensyaratkan adanya suatu persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan, dalam hal ini untuk melakukan adanya suatu persaingan berdasarkan kinerja dan harga.

d) Pemerintah berorientasi misi

Dalam hal ini bahwa pemerintah melakukan adanya suatu deregulasi dan debirokrasi. Artinya bahwa pemerintah melakukan adanya penghapusan terhadap semakin banyaknya aturan yang menjadi pelayanan tersebut tidak efektif, dan secara radikal melakukan adanya penyederhanaan terhadap sistem administratif yang terlampaui panjang dan menghambat, misalnya berkaitan di bidang anggaran, perizinan, kepegawaian dan pengadaan barang. Dalam hal ini juga bahwa, memberikan adanya kebebasan kepada



pimpinan (manajer) untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas-batas yang legal dan sah.

e) Pemerintah yang berorientasi pada hasil

Dalam hal ini bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak lagi berdasarkan adanya suatu input atau proses, namun sudah berorientasi kepada hasil dan dampak (*output and outcomes*) dan dalam hal ini meningkatkan adanya akuntabilitas dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan sektor publik. Dalam hal ini bahwa pimpinan organisasi pemerintah melakukan adanya suatu pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah, menetapkan target, memberi imbalan-imbalan kepada instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi suatu target yang telah ditetapkan, dengan menggunakan adanya suatu sumber daya anggaran yang telah ditetapkan oleh para birokrat. Dalam hal ini bahwa kinerja pemerintah yang seperti ini merupakan suatu ciri khas pemerintahan yang berbasis *enterpreneurship* atau wirausahawan yang selalu berorientasi terhadap seberapa besar hasil yang telah dicapai.

f) Pemerintah yang berorientasi pelanggan

Dalam hal ini bahwa pelayanan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, dan dalam hal ini bahwa pemerintah tersebut melakukan adanya survei untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan dalam hal terkait pelayanan yang didapat oleh pelanggan atau customer tersebut. Dalam hal ini terkait pelayanan seperti pengurusan KTP, KK, SIM, Pembayaran pajak, listrik, air, dan juga pelayanan yang lain sebagainya. Dalam hal ini bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut berorientasi kepada pelanggan ini bahwa pelayanan itu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan apa yang dikerjakan atau yang dilayani sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan



g) Pemerintah Wiraswasta

Dalam hal ini seperti halnya yang dijelaskan di atas mengenai konsep reinventing government, bahwa pemerintah selalu bertindak dan bekerja seperti halnya para wirausahawan, dalam hal ini bahwa melakukan adanya suatu transformasi nilai-nilai bisnis ke dalam pelayanan sektor publik. Hal ini juga bahwa pemerintah terus meningkatkan adanya kualitas kinerjanya, meningkatkan produktifitas serta selalu mencari adanya suatu peluang-peluang terhadap adanya sumber-sumber produksi untuk meningkatkan keuntungan di sektor pemerintahan. Dalam hal ini bahwa pemerintah tidak hanya melakukan adanya penggunaan anggaran saja, tetapi juga berupaya bagaimana mendapatkan keuntungan itu kembali sebagai dana pembangunan, dana inovasi dalam arti untuk meningkatkan adanya produktifitas terhadap para pejabat publik dalam melaksanakan adanya tugas-tugas pemerintahan.

h) Pemerintah Antisipatif

Dalam hal ini bahwa pemerintah selalu berfikir ke depan. Hal ini bahwa pemerintah melakukan adanya suatu tindakan preventif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dan selalu berupaya untuk menyusun rencana-rencana strategis, memberikan visi untuk ke depan dan juga menggunakan berbagai cara atau metode yang lain dalam hal agar sebagai pencegahan timbulnya berbagai suatu persoalan dalam hal proses penyelenggaraan suatu pemerintahan tersebut, dalam hal ini bahwa agar dengan adanya suatu sifat yang antisipatif tersebut akan memberikan adanya suatu kelancaran dalam hal penyelenggaraan pelayanan sehingga dalam hal ini agar terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai kepuasan pelanggan atau masyarakat.

i) Pemerintah Desentralisasi

Merupakan suatu pemerintahan yang mendorong adanya suatu wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui adanya suatu organisasi atau sistem yang ada. Dalam hal ini bahwa pemerintahan desentralisasi selalu memberikan kesempatan terhadap pemerintahan yang ada dibawahnya untuk menyelenggarakan adanya suatu pelayanan dan mengambil suatu



keputusan dan membuat kebijakan yang disesuaikan dengan wilayah yang dia pimpin, dan dalam hal ini dapat mengurangi beban pimpinan yang paling atas dalam melaksanakan adanya tugas pemerintahan.

j) Pemerintahan yang berorientasi pasar

Dalam hal ini bahwa pemerintahan yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif. Dalam hal ini bahwa antara pemerintah dan swasta menciptakan insentif keuangan, pajak, pajak hijau, affluentfess. Dalam hal ini bahwa pemerintah melakukan adanya suatu mitra terhadap pasar atau sektor swasta dalam hal menyelenggarakan adanya suatu pelayanan publik, dan dalam hal ini juga dapat meningkatkan adanya efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam hal melakukan penyelenggaraan suatu pelayanan.

B. Governance/Sound Governance/Meta Governance

1. Gambaran Umum Governance

Di dalam buku Dr. Abidarini Rosidi dan R. Anggraeni Fajriani dalam bukunya REINVENTING GOVERNMENT, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik, bahwa government merupakan suatu nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan governance merupakan berasal dari akar govern dengan suatu definisi yang relevan di jelaskan bahwa *governance is rule with authority and conduct the policy, actions, and affairs (of state.subject) constitutional*. Dalam hal ini artinya bahwa governance merupakan suatu hal yang mengambil peran besar yang terdiri dari suatu proses aturan, dan suatu lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Terkait dengan pengertian tersebut bahwa governance tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sekumpulan aktor yang sangat penting dalam hal memiliki suatu peranan dalam memecahkan adanya suatu persoalan-persoalan di dalam suatu masyarakat, dan juga melibatkan adanya lembaga-lembaga yang berada diluar pemerintahan dalam hal melakukan adanya suatu pengelolaan dan pengendalian dalam suatu



wilayah atau negara. Dalam buku ini juga dijelaskan pengertian berdasarkan oleh Osborne dan Gaebler (1992:24) bahwa *governance* sebagai adanya suatu proses di mana kita memecahkan adanya suatu permasalahan kita bersama dan memenuhi suatu kebutuhan masyarakat (*the process in which we solve our problem collectively and meet the society*)

. Dalam hal ini bahwa suatu aktor-aktor di dalam *governance* memiliki adanya suatu peranan yang sangat penting dan memiliki adanya suatu kontribusi yang sangat penting, di dalam memecahkan adanya suatu persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam suatu masyarakat.

Terkait dengan apa yang dijelaskan pengertiannya di atas bisa saya simpulkan bahwa *governance* merupakan suatu perspektif pemerintahan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait yang bersinergi dan membentuk sistem kerjasama dalam hal memecahkan adanya suatu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini bahwa sebenarnya *governance* sebagai bentuk adanya suatu sinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta sebagai bentuk untuk memecahkan suatu persoalan-persoalan yang terkait termasuk

masalah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam hal ini bahwa *governance* sebagai bentuk untuk meningkatkan partisipasi bukan hanya pemerintah dalam memecahkan suatu persoalan tetapi juga masyarakat dan sektor swasta juga sangat berperan penting, dalam hal untuk memberikan suatu dukungan serta ikut terlibat dalam hal proses pembangunan di dalam suatu negara. Dalam hal ini bahwa benang merah atau inti dari *governance* merupakan sinergi dan pembagian tugas. Dalam hal ini masyarakat dan swasta memiliki suatu peranan yang

penting dalam melaksanakan suatu pembangunan dan memecahkan adanya suatu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun, sebenarnya konsep dari *governance* terkandung dalam unsur demokratis, adil, transparan, supremasi hukum, partisipatif, dan kemitraan

(Dr. Abidarin Rosidi dan R. Anggraeni Fajriani SE, dalam bukunya *REINVENTING GOVERNMENT, Demokrasi dan Informasi Pelayanan Publik, "the process whereby elements in society wield power and authority and influences and enact policy and concerning public life, economic and social development* ; kalau misalnya diterjemahkan bahwa proses di mana

berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan memengaruhi dan mengesahkan adanya suatu kebijakan serta keputusan tentang kehidupan publik, serta

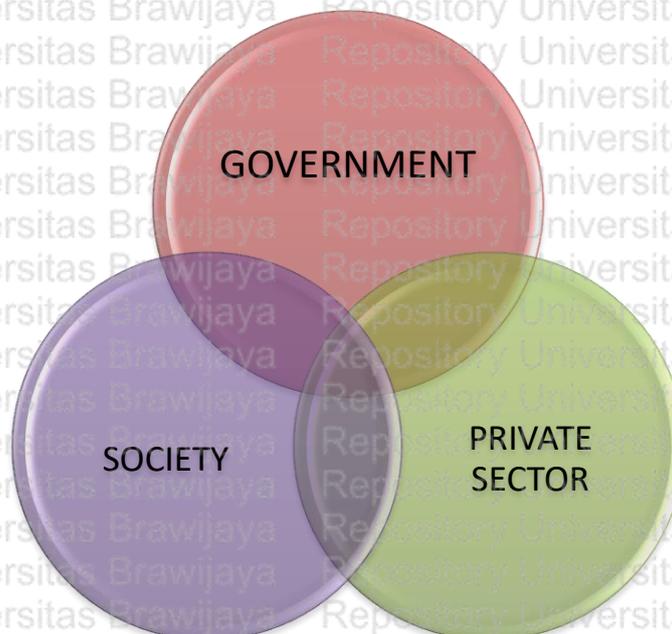


pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini bahwa peran komunitas dalam suatu masyarakat, bisnis dan juga komunitas yang lainnya dalam hal ini memiliki adanya suatu peranan penting dan juga sangat memengaruhi dalam proses pembuatan suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang diharapkan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kepentingan umum. Praktek dari governance disebut dengan *good governance* atau disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini bahwa *good governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik menjadi suatu trend pada saat ini dan sudah dilaksanakan di negara-negara maju seperti negara anglo saxon dan negara-negara lainnya dalam hal praktek *good governance*.

2. Aktor-aktor dalam Pendekatan Governance

Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa dalam hal ini governance memainkan tiga aktor yang merupakan domain dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

Gambar 10. Gambaran dalam Konsep Governance





Dari gambar di atas bahwa merupakan suatu konsep dan merupakan suatu gambaran bagaimanakah suatu governance itu terbentuk dan siapakah aktor-aktor di dalam suatu governance. Berdasarkan suatu konsep di atas bahwa governance merupakan suatu sinergi antara tiga aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan juga swasta dalam hal memecahkan adanya suatu persoalan-persoalan di dalam suatu masyarakat, dalam hal ini ketiga aktor tersebut memiliki adanya suatu peranan yang sangat penting dalam hal melaksanakan suatu pembangunan dalam suatu negara. Dalam hal ini bahwa dengan adanya suatu persoalan yang semakin kompleks, dalam hal ini bahwa pemerintah semakin menyadari akan kelemahan-kelemahan terhadap suatu sumber daya yang dipunya baik itu sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini juga bahwa akan memberikan adanya ruang kesempatan terhadap pihak-pihak yang lain yang juga harus wajib berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam mensukseskan suatu program-program yang terkait dengan pembangunan. Namun sebelum ke penjelasan selanjutnya bahwa akan saya kaji tentang pengertian pemerintah, masyarakat dan swasta yaitu sebagai berikut :

- a) Pemerintah; secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti itu sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini ada 2 hal yaitu pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah berarti suatu badan atau organ elite yang melaksanakan suatu pekerjaan yang mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan suatu cara, hal atau suatu perbuatan atau suatu urusan badan yang berkuasa dan memiliki adanya legitimasi, dalam hal ini bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perintah antara lain : 1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah. 2. Ada wewenang untuk memberi perintah. 3. Keharusan, yaitu suatu kewajiban melaksanakan perintah yang sah. 4. Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Menurut Mac Iver, bahwa pemerintah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai suatu kekuasaan, bagaimana manusia itu dapat diperintah sedangkan menurut CF. Strong bahwa pemerintahan dalam arti luas memiliki adanya



suatu kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar.

Sedangkan bahwa pemerintahan juga sebagai sistem menurut M.Ryad Rasyid; bahwa

- Aturan main (konstitusi,hakim,etika) di mana masyarakat dan pemerintah harus taat
- Lembaga-lembaga (yang berwenang atau memiliki) adanya suatu otoritas melaksanakan aturan main seperti eksekutif legislatif dan yudikatif

Dalam hal ini bahwa pemerintah berfungsi sebagai :

- Regulasi/ sebagai pembuatan kebijakan
- Pengendalian dan pengawasan publik
- Perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta
- Fasilitas kepentingan negara dan publik
- Pelayanan kepentingan publik

b) Swasta ;Dalam hal ini bahwa swasta sebagai lembaga yang memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai lembaga yang membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam suatu negara.Hal ini termasuk perusahaan,corporate,bank dan organisasi non pemerintah lainnya termasuk juga karyawan yang bekerja di sektor swasta atau juga dengan wirausahawan.Dalam hal ini bahwa swasta sebagai pihak lembaga yang berfungsi

- Penggerakan aktivitas bidang ekonomi
- Penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa,penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan juga perdagangan
- Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat



c) Civil Society

Dalam hal ini masyarakat dalam konteks negara demokrasi bahwa masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara seperti halnya yang didalam UUD 1945 Pasal 1. Dalam konsep masyarakat madani bahwa masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan adanya suatu intervensi. Dalam konsep masyarakat madani, pemerintah diharapkan untuk :

- Menjamin hak-hak asasi warga negara
- Menghormati eksistensi ruang dan wacana publik
- Melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sebagai batas kewenangan masing-masing

Dalam hal ini bahwa masyarakat berfungsi sebagai :

- Posisinya sebagai subjek sekaligus sebagai obyek (partisipator) bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dan swasta
- Pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta

Dalam hal ini bahwa perlu adanya pihak-pihak yang lain yang membantu dan juga ikut serta dalam hal pembuatan suatu kebijakan yang akan diformulasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini didefinisikan oleh World Bank, dalam buku Reinventing Government, Tentang Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik, dalam bukunya Dr. Abidarin Rosidi dan R. Anggraeni Fajriani, SE bahwa good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan adanya suatu kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas suatu usaha.



C. Teori dan Pendekatan dalam Strategi.

1. Pengertian Umum Strategi

Secara pengertian dikutip dalam sebuah referensi dari makalah yang dipublikasikan oleh e-prints.ac.id yang diambil dalam buku Ali Hasan yakni *Marketing Bank Syariah* dan Husein Umar tentang *Desain Penelitian Manajemen*

Stratejik bahwa terdapat beberapa pengertian tentang adanya strategi yakni sebagai berikut :

a) John A.Byrne mendefinisikan sebagai suatu strategi adalah sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan.

b) Dua pakar strategi yaitu Hamel dan Prahalad (1995), mendefinisikan strategi merupakan merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Namun terkait dengan adanya sebuah gambaran strategi bahwa hal ini juga diungkapkan oleh para pakar yang dikutip dari makalah/naskah akademik yakni sebagai berikut :

a) Menurut Ansoff, Strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.Strategi juga disebut dengan konsep bisnis perusahaan.

b) Menurut Chistensen, strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai suatu tujuan tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang.



c) Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert, Jr (1995) bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yakni sebagai berikut :

- 1) Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (intends to do), yaitu strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan sebuah organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi
- 2) Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does) yaitu pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Terkait dengan adanya gambaran sebuah strategi terdapat beberapa karakteristik dari masalah-masalah strategik adalah sebagai berikut :



- Berorientasi pada masa depan
- Biasanya berhubungan dengan unit basis yang sangat kompleks



- Memerlukan perhatian dari manajemen puncak
- Akan mempengaruhi kemakmuran jangka panjang dari perusahaan



- Melibatkan pengalokasian sejumlah besar sumber daya perusahaan

2. Tipe-tipe dalam Sebuah Strategi



Sedangkan dalam sebuah strategi terdapat sebuah tipe-tipe yang ada di dalam strategi yakni sebagai berikut :

a) Strategi Integrasi

Dalam hal ini bahwa strategi ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok dan pesaing.

- Integrasi ke depan, yakni memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali pada distributor atau pengecer. Strategi ini dipilih jika distributor sebuah organisasi sangat mahal, mutu distributor terbatas, organisasi bersaing dalam industri yang sedang bertumbuh, organisasi yang mempunyai modal dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola bisnis baru, keunggulan produk stabil sangat tinggi, distributor memperoleh laba yang besar.
- Integrasi ke belakang, yaitu menunjuk pada strategi mencari kepemilikan atau kendali besar pada perusahaan pemasok. Strategi ini terutama tepat bila perusahaan pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.
- Integrasi horisontal, yaitu merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari atau kendali besar atas perusahaan pesaing. Hal ini dilakukan jika organisasi dapat memperoleh karakteristik monopolistic atau dalam bidang atau wilayah tertentu, organisasi bersaing dalam industry yang sedang bertumbuh, meningkatnya skala ekonomis memberikan keunggulan bersaing yang besar, organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang berbakat yang diperlukan untuk perluasan perusahaan, pesaing ragu karena tidak ada kemampuan manajerial.

b) Strategi Intensif



Kelompok strategi ini disebut sebagai intensif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan adanya posisi yang kompetitif perusahaan dengan produk yang sudah ada. Kelompok strategi ini meliputi tiga strategi yaitu sebagai berikut :

- Penetrasi pasar, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sudah ada di pasar lewat usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi ini banyak dilakukan sendiri atau kombinasi dengan strategi lain.
- Pengembangan pasar, yaitu memasarkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografi yang baru.
- Pengembangan produk, yaitu mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan produk atau jasa baru.

c) Strategi Diversifikasi

Ada tiga tipe umum dari strategi diversifikasi, yaitu konsentrik (terfokus), horizontal dan konglomerat. Dalam hal ini bahwa jika dijelaskan yakni sebagai berikut :

- Diversifikasi Konsentrik, yaitu menambah produk atau jasa baru tetapi berkaitan. Hal ini dilakukan jika penambahan produk baru berkaitan secara signifikan akan memperkuat penjualan yang sudah ada.
- Diversifikasi konglomerat, yakni menambah produk atau jasa baru tetapi tidak berkaitan. Strategi ini tepat dilakukan jika laba menurun.
- Diversifikasi Horizontal, yaitu menambah produk atau jasa baru tetapi tidak berkaitan dengan pelanggan yang sudah ada. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan.



d) Strategi Defensif

Strategi defensive adalah strategi yang bertujuan untuk bertahan. Adapun jenis dari strategi Defensif adalah sebagai berikut :

- Retrenchment (Penciutan), yaitu mengubah pengelompokan lewat penghematan biaya dan asset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.
- Divestasi, yaitu menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Strategi ini dilakukan apabila organisasi telah melakukan penciutan dan gagal menghasilkan yang dibutuhkan.
- Likuidasi, yaitu menjual seluruh asset perusahaan. Strategi ini dilakukan apabila Organisasi telah melakukan strategi penciutan dan divestasi, namun tidak berhasil.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian umum Kebijakan Publik

Dalam hal ini bahwa untuk administrasi negara atau publik selalu mencakup adanya sebuah kebijakan publik yang di rumuskan oleh pemerintah yang sebagaimana untuk melakukan upaya penyelesaian suatu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan adanya persoalan yang dihadapi oleh negara. Kebijakan Publik bahwa secara umum digambarkan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng atau melakukan hubungan relasi kerjasama dengan pihak lain seperti halnya dengan investor/swasta dan masyarakat dalam hal untuk merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan negara seperti halnya bidang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan keamanan sehingga dengan adanya suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan adanya penyelesaian persoalan



yang terukur dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dan masuk dalam dokumen legal pemerintah yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan suatu kebijakan.

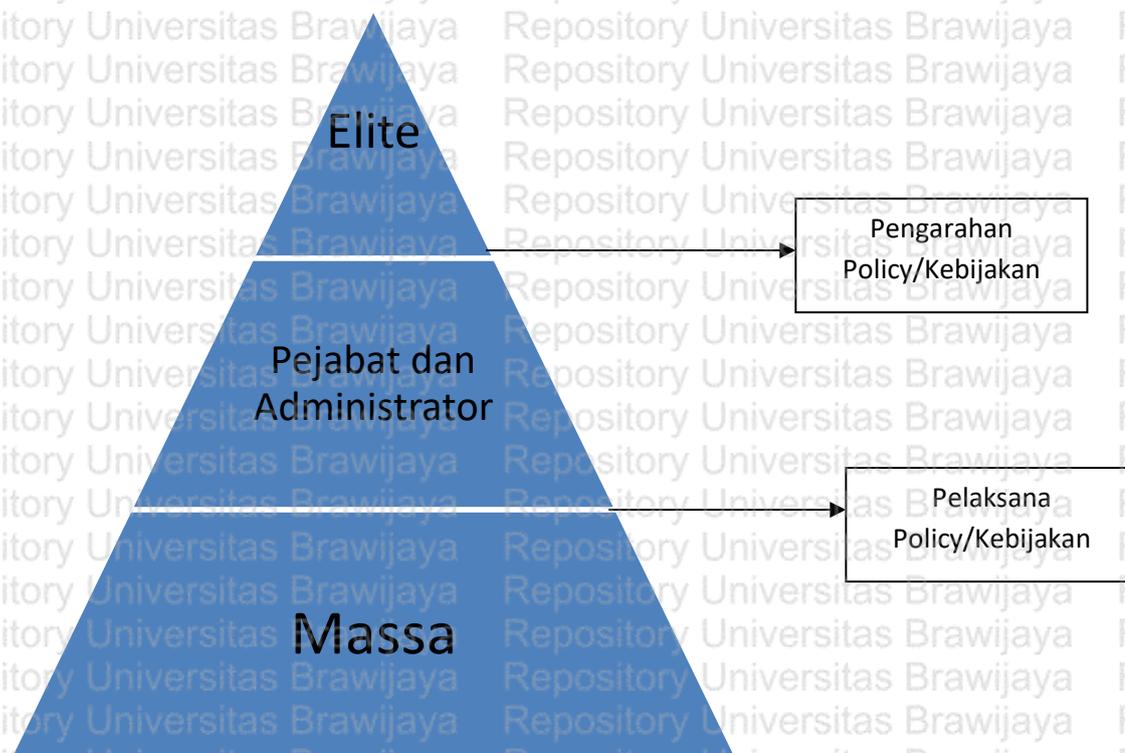
2. Model-model dalam Kebijakan Publik

Terkait dengan kebijakan publik bahwa terdapat beberapa model-model dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

1. Model Elite (Policy sebagai Preferensi Elite)

Elite dalam kamus sebagai bagian yang terpilih atau tersaring. Elite merupakan sebagai suatu bagian superior dalam masyarakat. Dan dalam kehidupan politik bahwa elite merupakan suatu bagian atau kelompok tertentu dari suatu masyarakat yang sedang berkuasa. Public Policy dalam model elite ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Public Policy yang dianutnya adalah merefleksi dari tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Hal tersebut tampaknya lebih memancarkan sebagai suatu mitos dibandingkan dari kenyataan yang sesungguhnya. Dalam hal ini bahwa teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan public policy hendaknya dibuat apatis atau dibuat akan miskin akan informasi. Elite secara pasti lebih banyak dan sering membentuk opini masyarakat dalam persoalan-persoalan policy dibandingkan dengan membentuk opini elite. Dengan demikian public policy adalah hasil preferensi elite. Pejabat-pejabat pemerintah, administrator-administrator adalah sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh para elite tersebut. Namun dalam hal ini bahwa jika di gambarkan dalam sebuah konsep akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 11. Konsep kebijakan Model elite



Teori model elite ini secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Masyarakat dalam suatu negara tertentu dibagi atas dua bagian yakni bagian yang mempunyai kekuasaan dan bagian yang tidak mempunyai kekuasaan. Bagian masyarakat yang mempunyai suatu kekuasaan jumlahnya sedikit sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan memiliki jumlah yang banyak.
- b) Sekelompok kecil atau beberapa orang memerintah adalah bukan mewakili secara tipikal dari massa yang diperintah. Policy mengalir dari kehendak elite melalui para pejabat dan administrator yang melaksanakan suatu kebijakan tersebut dengan tepat sasarannya rakyat banyak. Dalam hal ini bahwa rakyat banyak sebagai suatu obyek dari keinginan-keinginan elite.



- c) Untuk mencapai stabilitas dan menghindari adanya revolusi maka gerakan-gerakan non elite yang membahayakan adanya suatu posisi elite harus dikendalikan secara kontinu. Hanya non elite yang sudah menerima konsensus dasar dari elite yang diperkenankan masuk lingkaran pemerintahan elite.
- d) Elite membagi konsensus atas nama nilai-nilai dasar dari suatu sistem sosial yang ada dan perlindungan dari sistem tersebut. Di Amerika dasar dari konsensus elite adalah diharganya milik pribadi, adanya batas-batas pemerintahan dan kemerdekaan pribadi. Di Indonesia dasar konsensus Elite adalah falsafah dan dasar negara Pancasila yang dikenal dengan asas tunggal pancasila.
- e) Public policy bukanlah merefleksi dari tuntutan-tuntutan masyarakat pada umumnya, melainkan agak menonjolkan nilai-nilai sekelompok orang yang berkuasa. Perubahan-perubahan dalam public policy lebih bersifat tambal sulam (Incremental) jika dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat revolusioner.
- f) Elite yang aktif adalah relatif kecil menjadi suatu sasaran dari pengaruh langsung massa yang apatis. Dalam hal ini bahwa elite lebih banyak mempengaruhi massa dari pada massa yang mempengaruhi adanya elite.

Implikasi akan suatu teori elite dalam kebijakan publik akan menjadi sebagai berikut

- I. Dalam elitisme bahwa kebijakan publik atau public policy lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elite dibandingkan dengan memerhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Perubahan dan Inovasi di dalam public Policy hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai elite



tersebut yang dilakukan oleh elite sendiri. Jika terjadi suatu perubahan dalam public policy atau dalam suatu kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan bersifat tambal sulam dibandingkan dengan adanya suatu sifat yang revolusioner. Dalam bentuknya yang realistis bahwa public policy atau kebijakan publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang melakukan pergantian.

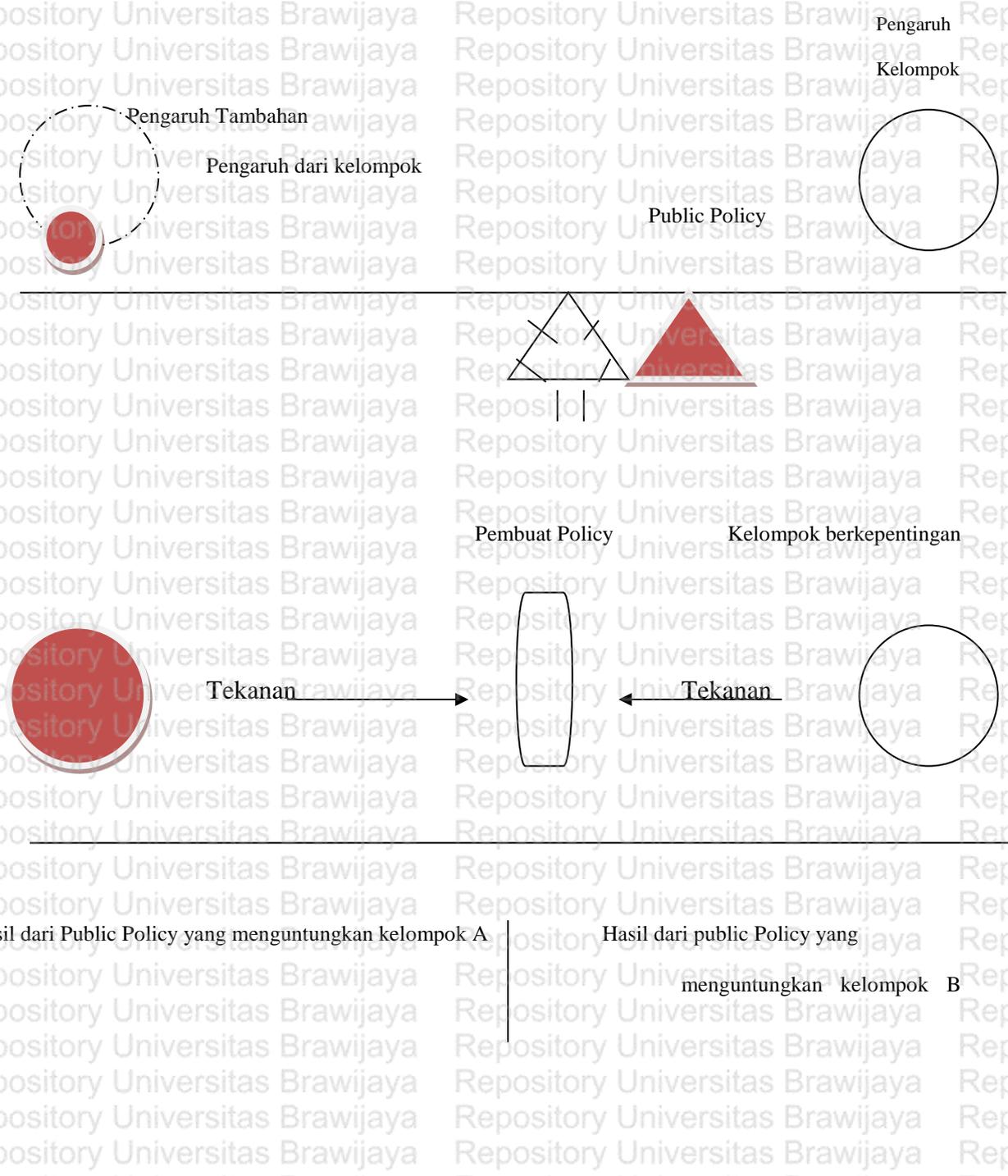
- II. Pandangan kaum elite bahwa massa sebagian besar adalah bersifat pasif, apatis dan miskin informasi. Sentimen-sentimen rakyat acap kali dimanipulasikan oleh elite, bukannya sebaliknya nilai-nilai elite dipengaruhi oleh adanya sentimen rakyat. Dan hampir pada semua bagian komunikasi antara elite dan rakyat arusnya mengalir secara deras ke bawah. Dalam hal ini bahwa masalah-masalah suatu kebijakan atau policy dalam kebijakan publik jarang diputuskan oleh rakyat lewat lembaga-lembaga pemilihan dan perwakilan atau melalui hadirnya alternatif-alternatif policy atau suatu kebijakan yang diajukan oleh partai-partai politik. Hampir seluruh lembaga-lembaga demokrasi misalnya : pemilihan umum dan partai politik dirasakan penting hanya untuk simbol nilai-nilai elite.

2. Model Kelompok (Policy sebagai keseimbangan kelompok)

Pandangan dalam teori kelompok adalah suatu ungkapan bahwa interaksi di antara kelompok adalah suatu fakta dan juga bersifat sentral dari politik dan public policy atau kebijakan publik. Menurut ahli Ilmu Politik David Trauman suatu kelompok berkepentingan adalah suatu kelompok yang ikut membagi sikap dengan mengajukan tuntutan-tuntutan tertentu atas kelompok lainnya dalam suatu masyarakat untuk kemantaban, pemeliharaan dan kesenangan dari suatu bentuk perilaku yang terdapat dalam sikap-sikap yang dibagikan tersebut. Dalam hal ini jika digambarkan dalam sebuah konsep maka akan menjadi sebagai berikut :



Gambar 12. Gambaran dinamika dalam proses kebijakan



Pengaruh dari kelompok-kelompok berkepentingan tersebut sebenarnya ditentukan oleh :

- Jumlah Keanggotaannya
- Kesejahteraannya
- Kekuatan organisasinya



- Kepemimpinannya
- Ekses-ekses terhadap pembuatan keputusan
- Kohesif ke dalam organisasinya

Semua sistem kelompok berkepentingan itu yakni suatu sistem partai politik itu sendiri, diikat bersama di dalam keseimbangan (equilibrium) oleh beberapa faktor berikut ini :

☒ Ada sekelompok besar bahkan dapat dikatakan mendekati universal bahwa di masyarakat Amerika Serikat terdapat kelompok laten yang mendukung sistem konstitusi dan yang mengutamakan untuk memenangkan aturan bermain. Kelompok ini tidak selalu tampak, tetapi dapat diaktifkan untuk mengelola perlawanan dari kelompok yang akan menyerang sistem yang ada dan berkeinginan mengancurkan suatu keseimbangan.

☒ Adanya suatu keanggotaan kelompok yang tumpang asuh (overlapping group membership). Anggota semacam ini dapat menolong untuk memelihara keseimbangan dengan cara mencegah setiap kelompok untuk bergerak terlampaui jauh dari nilai-nilai yang dipertahankan. Individu yang menjadi anggota satu kelompok dan menjadi anggota kelompok yang lain, merupakan kenyataan yang dapat melembutkan tuntutan-tuntutan dari kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

☒ Check dan balance yang dihasilkan dari adanya persaingan kelompok dapat juga membantu untuk memelihara suatu keseimbangan dari suatu sistem. Tidak ada kelompok tunggal yang merupakan suatu mayoritas di masyarakat Amerika Serikat. Kekuasaan dari tiap kelompok di cek oleh kekuasaan dari kelompok-kelompok yang sedang bersaing. Pusat-pusat perimbangan fungsi kekuasaan dipergunakan untuk mengecek pengaruh dari tiap kelompok tunggal dan untuk melindungi individu dari suatu tindakan yang bersifat sewenang-wenang.



3. Model Proses (Policy sebagai suatu aktivitas Politik)

Model proses ini memunculkan adanya suatu perilaku politik yang tergolong Modern sejak perang dunia II telah mempelajari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pemilih, kelompok-kelompok berkepentingan, pembuat undang-undang, presiden, birokrat, badan-badan peradilan dan pelaku-pelaku politik lainnya. Hasilnya ialah adanya suatu serangkaian proses policy atau kebijakan yang biasanya mengikuti pola umum sebagai berikut :

I. Identifikasi persoalan-persoalan

Tuntutan-tuntutan untuk kegiatan pemerintah

II. Perumusan Usul-usul Policy atau kebijakan

Prakarsa dan pengembangan usulan-usulan program pemerintah

III. Pengesahan Policy atau kebijakan

Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut dan mengesahkan itu suatu undang-undang hukum

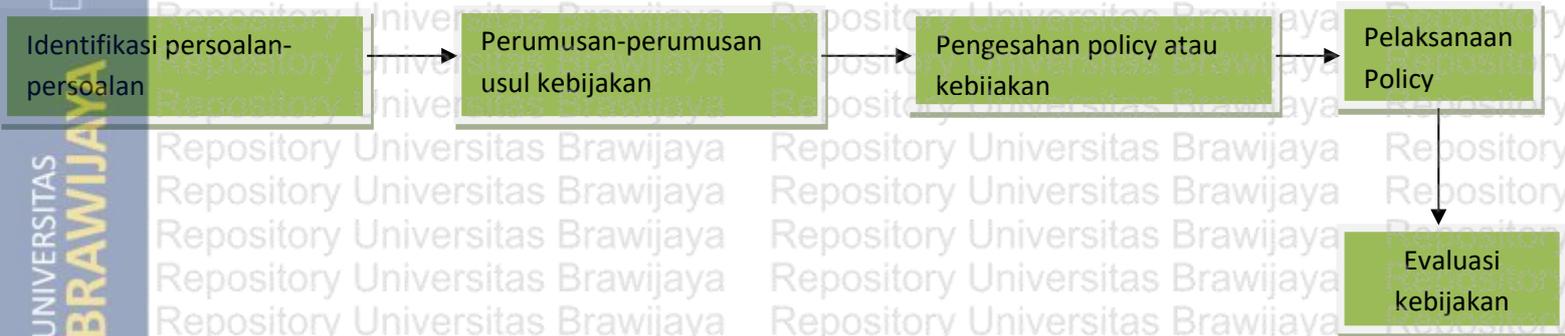
IV. Pelaksanaan Policy

Penataan birokrasi, penyediaan gaji dan pelayanan-pelayanan dan penetapan-penetapan pajak

V. Evaluasi Policy

Penganalisisan tentang suatu program-program, evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya dan menyarankan adanya suatu perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.

Kalau diringkas dan digambarkan dalam sebuah alur maka akan menjadi sebagai berikut :



4. Model Rasionalisme (Policy atau kebijakan sebagai pencapaian suatu tujuan yang efisien)

Model rasional ini adalah di rancang secara tepat untuk memaksimalkan hasil nilai bersih (net value achievement). Dalam hal ini bahwa setiap pengorbanan di dalam satu atau lebih nilai yang dikehendaki oleh policy atau kebijakan adalah lebih besar dibandingkan dengan kompensasi mencapai nilai-nilai lainnya. Pemikiran tentang adanya suatu efisien di sini termasuk kalkulasi mengenai semua nilai sosial, politik dan ekonomi yang dikorbankan atau dicapai oleh *public policy* dan bukan semata-mata diukur oleh rupiah dan dollar. Dalam hal ini dijelaskan dalam tabel mengenai proses policy-suatu kerangka analisis sebagai berikut :

Tabel 8. Proses Policy suatu Kerangka Analisis

Proses Policy-Suatu kerangka Analisis

Aktivitas-aktivitas fungsional	Pengelompokan di dalam pemerintahan	Sebagai suatu sistem	Hasil
Persepsi Definisi	Persoalan-persoalan	Identifikasi suatu	Persoalan untuk tuntutan



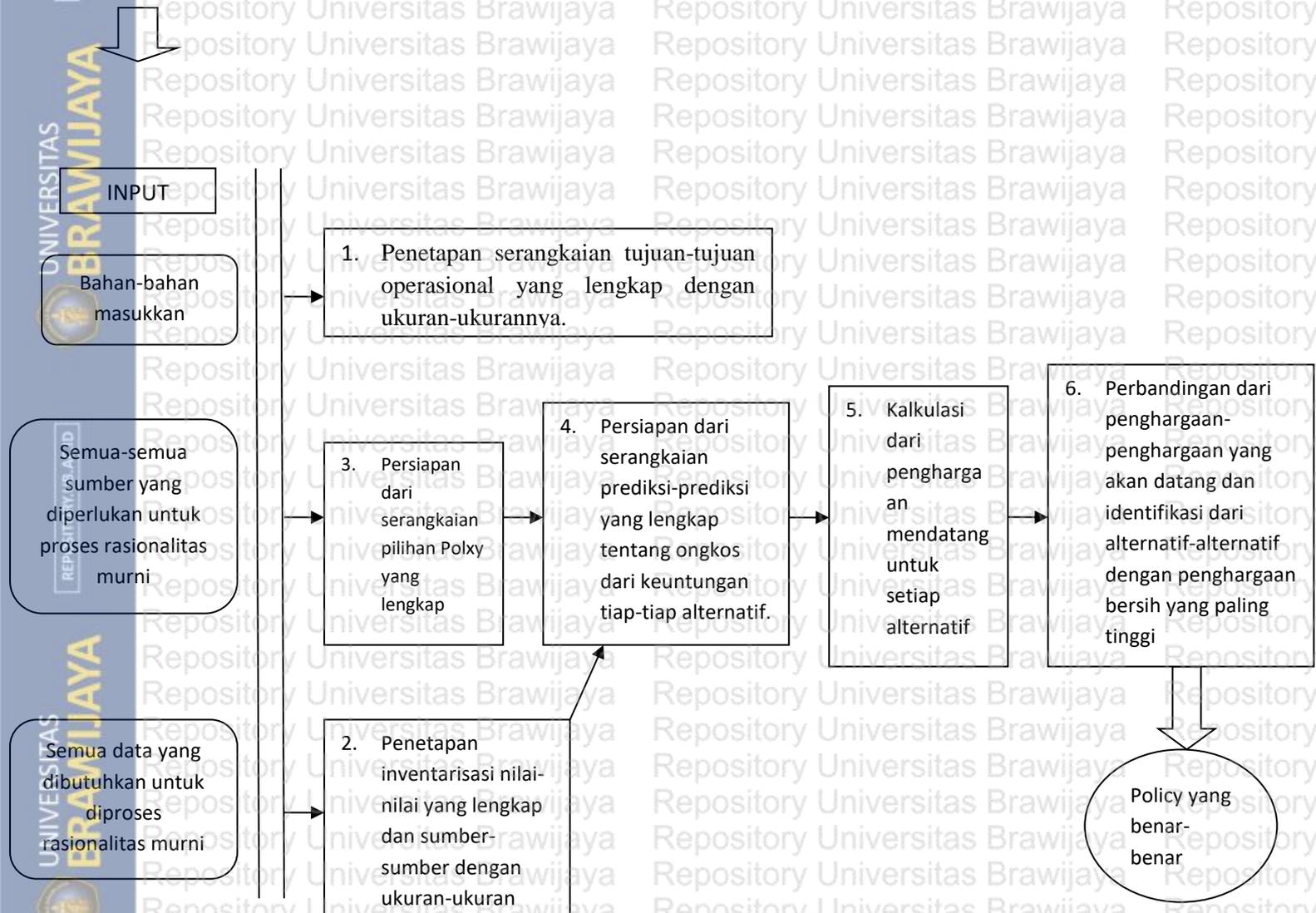
agrogasi Representasi	Organisasi	untuk Pemerintah	persoalan	
Formulasi Apropriasi	Legitimasi	Tindakan-tindakan dalam pemerintah	Pengembangan Program	Usul-usul untuk Program Anggaran
Organisasi Aplikasi	Interpretasi	Dari Pemerintahan untuk masalah	Pelaksanaan Program	Bermacam-macam (antara lain:Pelayanan,Gaji,fasilitas ,kontrol dan sebagainya
Spesifikasi Pengukuran Analisis		Program untuk Pemerintah	Evaluasi Program	Bermacam-macam (antara lain :Justifikasi,rekomendasi dan lain-lain.
Resolusi Terminasi		Masalah Resolusi Perubahan	Terminasi Program	Pemecahan atau perubahan

Untuk Memilih Policy yang rasional, maka pembuat policy atau suatu kebijakan harus

- a. Mengetahui semua preferensi nilai-nilai dalam masyarakat dan tekanan kecenderungannya.
- b. Mengetahui semua pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif (policy) yang tersedia
- c. Mengetahui semua konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan policy atau kebijakan
- d. Memperhitungan suatu ratio yang dicapai bagi setiap nilai-nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif policy
- e. Memilih alternatif policy atau suatu kebijakan yang paling efisien.

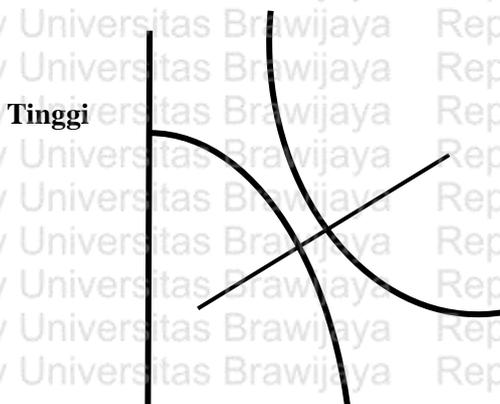
Dalam hal ini jika di gambarkan dalam sebuah konsep dan alur maka akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 13. Proses dalam Kebijakan



Selain itu juga bahwa model rasionalitas ini akan menggambarkan bagaimana adanya suatu model alokasi sumber yang rasional yaitu sebagai berikut :

Gambar 14. Model Alokasi Sumber yang Rasional





Public Policy yang rasional

Kurva Indifferent

Kurva Value Achievement

Rendah

Achievement dari semua

Rendah

Nilai-nilai lainnya

Tinggi

Dalam penjelasannya bahwa setiap titik kurva itu dipertimbangkan menjadi sama kepuasan dalam masyarakat. Sudah barang tentu semua kombinasi pada kurva indifferent yang paling rendah. Akan tetapi dapat pula diduga bahwa masyarakat tidak mempunyai sumber-sumber yang memadai untuk mencapai tingkat tinggi dalam nilai A dan tinggi pada nilai-nilai yang lain. Berdasarkan asumsi ini kemudian dapat dirancangan dengan suatu kurva value achievement yang menyajikan adanya suatu kombinasi nilai-nilai yang memungkinkan adanya pemerintah untuk menghasilkan suatu keterbatasan-keterbatasan sumber tertentu. Kurva Value Achievement ini melengkung pada bagian yang dalam dari atas kiri ke bawah kanan. Titik atas kiri ini sebagai suatu achievement yang rendah dari nilai A, tetapi merupakan suatu achievement yang tinggi daripada nilai-nilai lainnya.

Namun dalam pembuatan suatu kebijakan tertentu terdapat beberapa suatu halangan yang merintangi tercapainya pembuatan suatu kebijakan yang rasional yakni sebagai berikut :

- a. Pada umumnya tidak ada nilai-nilai sosial yang disetujui, nilai-nilai khusus dari individu dan kelompok yang saling berselisih.



b. Nilai-nilai yang saling berselisih tersebut sulit dibandingkan dan ditimbang contoh adalah sangat sulit membandingkan dan mengukur nilai harga diri individu yang dibandingkan dengan kenaikan pajak.

c. Lingkungan pembuatan policy atau kebijakan terutama suatu kekuasaan dan sistem pengaruh, memberikan adanya suatu ketidakmungkinan baginya untuk melihat atau mengukur secara tepat semua nilai-nilai sosial yang ada terutama nilai-nilai dari mereka yang tidak aktif atau tidak berkuasa mendukungnya.

d. Pembuat policy atau suatu kebijakan tidak terdorong untuk membuat adanya suatu keputusan-keputusan yang berdasarkan tujuan masyarakat. Sebagai gantinya ia cenderung untuk meningkatkan kekuasaan ganjaran (reward power), status, pemilihan ulang, uang dan lain sebagainya.

e. Pembuat kebijakan atau suatu policy tidak terangsang untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang bersih (net goal achievement) tetapi hanya tergoda untuk memuaskan tuntutan-tuntutan untuk kemajuan. Mereka tidak berusaha mencari sampai benar-benar mendapatkan suatu cara yang terbaik, akan tetapi mereka akan berhenti mencari jika dilihatnya ada satu alternatif yang kelihatannya bisa bekerja.

f. Tabungan-tabungan besar di dalam program-program dan policy atau suatu kebijakan yang ada menghalangi pembuat policy mempertimbangkan alternatif-alternatif yang telah diajukan oleh keputusan-keputusan yang mendahuluinya.

g. Terdapat banyak halangan-halangan yang tidak bisa dihitung dalam rangka mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif-alternatif policy atau suatu kebijakan dan akibat-akibat dari alternatif tersebut. Termasuk di dalamnya biaya untuk mengumpulkan informasi, tersedianya informasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi tersebut.



h. Baik kemampuan prediktif dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku maupun kemampuan prediktif dari ilmu-ilmu fisik dan biologi tidaklah cukup memadai untuk meningkatkan adanya suatu kemampuan pembuat policy atau suatu kebijakan di dalam memahami akibat-akibat yang ditimbulkan dari setiap alternatif policy atau kebijakan.

i. Pembuat policy atau suatu kebijakan walaupun telah menggunakan teknik analisis komputer tidak juga cukup trengginas untuk menghitung secara tepat untung rugi ketika sejumlah besar nilai-nilai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berbeda menjadi kaku.

j. Pembuat policy atau suatu kebijakan membuat kebutuhan-kebutuhan pribadi, kekurangan-kekurangan dan ketidakmampuan yang semuanya dapat menghalanginya untuk melaksanakan keputusan secara rasional.

k. Akibat-akibat yang serba tidak pasti dari aneka suatu policy atau kebijakan yang dibuat akan memaksa pembuat policy bersikap lebih kaku mempertahankan keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi datangnya gangguan dan akibat-akibat yang tidak diharapkan

l. Tabiat pembuatan suatu policy yang sudah dibakukan di dalam birokrasi menyulitkan koordinasi dalam proses pembuatan suatu keputusan.

5. Model Inkrementalis (Kebijakan atau policy sebagai kelanjutan masa lalu)

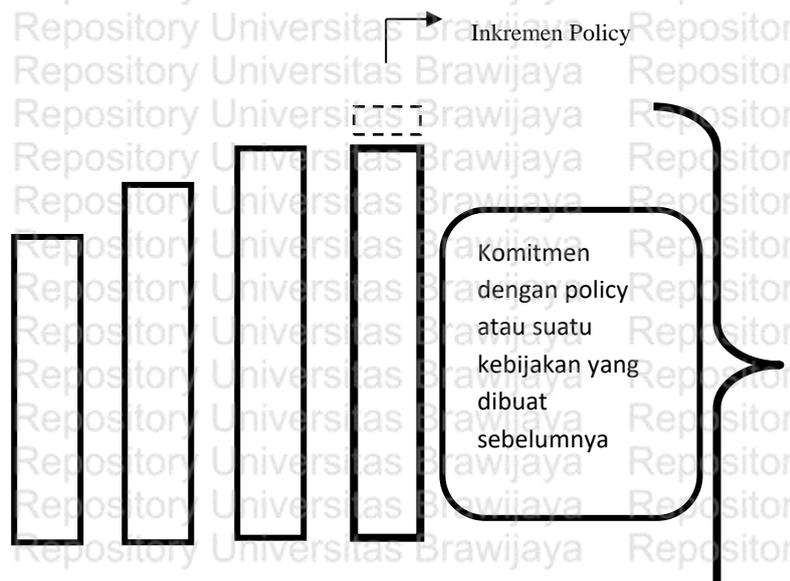
Ahli Ilmu Politik Charles E. Lindblom yang pertama kali mengemukakan model inkremental di dalam suatu serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan suatu keputusan yang bersifat rasional. Menurut Lindblom bahwa pembuat suatu keputusan tidak mau melakukan peninjauan secara ajek dari seluruh policy atau suatu kebijakan yang telah dibuatnya. Demikian pula tidak mau melakukan

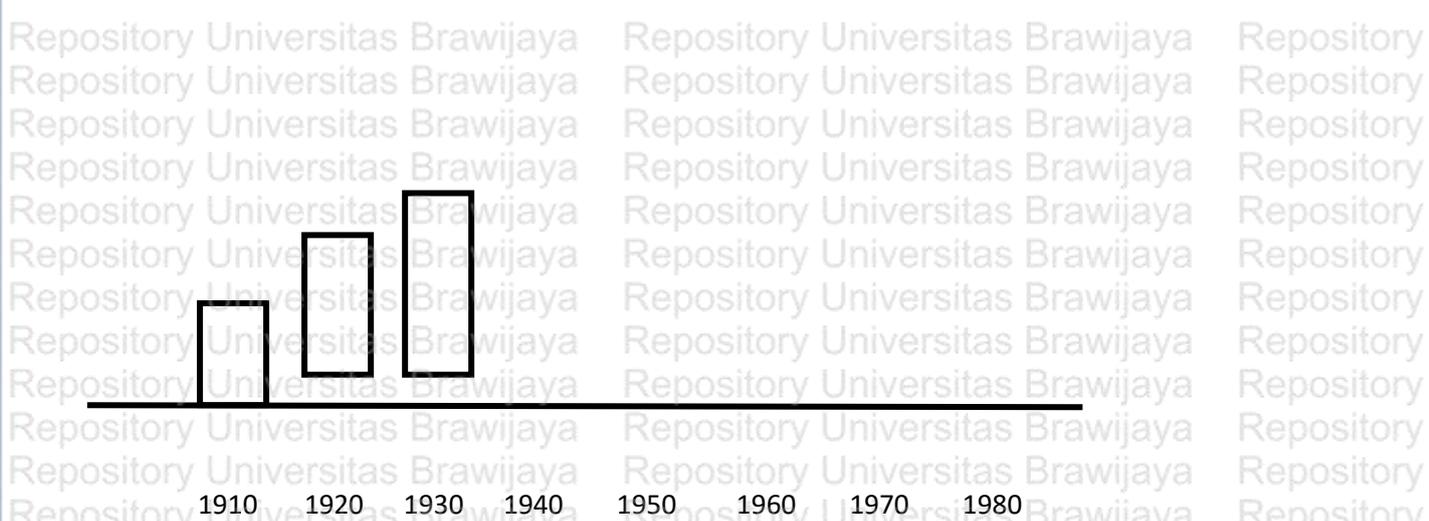


identifikasi tujuan-tujuan sosial,meneliti untung rugi dari alternatif-alternatif policy atau suatu kebijakan yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan sosial tersebut,mengklasifikasi preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan perhitungan untung rugi dan menyeleksi suatu informasi yang relevan.Sementara itu,hambatan-hambatan waktu,kecermatan, dan biaya dapat mencegah pembuatan suatu policy atau kebijakan mengidentifikasi alternatif-alternatif policy dan konsekuensinya.

Model inkremental memperkenalkan adanya suatu kebiasaan yang tidak praktis dari pembuatan suatu kebijakan yang menggunakan cara yang bersifat comprehensive yang rasional (rational-comprehensive).Dan model ini berusaha menjelaskan proses pengambilan suatu keputusan yang lebih bersifat konservatif.Inkrementalisme di dalam usahanya menciptakan program,policy dan pembiayaan dasar pemikirannya adalah bersifat konservatif.Dan perhatiannya terhadap program baru dipusatkan untuk menambah,mengurangi dan menyempurnakan suatu program-program yang telah ada sebelumnya.Dalam konsep Incremental jika digambarkan akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 15.Konsep Kebijakan Incremental





Ada beberapa alasan mengapa pembuat policy atau suatu kebijakan lebih bersifat incrementalis. Alasan-alasan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Mereka tidak mempunyai waktu, kecerdasan atau biaya untuk melakukan penelitian dari semua kemungkinan alternatif dari suatu policy atau kebijakan yang ada. Waktu mereka disita untuk memecahkan masalah-masalah rutin dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga usaha untuk mengadakan suatu penelitian dalam merancang policy atau kebijakan baru yang bisa menggantikan kebijakan yang bisa mendahuluinya tidak sempat dilakukan. Kecerdasan, kemampuan dan keterampilan tidak pula mampu menjangkau untuk mengadakan pergantian suatu kebijakan atau policy yang ada. Dalam hal ini bahwa teknik dan informasi tidak tersedia. Kecakapan dan keterampilan tidak memadai. Sehingga dengan demikian keadaan status quo dipertahankan. Atau paling sedikit dengan melakukan sedikit perubahan. Selain itu biaya untuk mengumpulkan informasi terlalu besar. Pembuat policy atau kebijakan tidak mempunyai suatu kemampuan untuk menghitung secara rasional untung rugi dari setiap alternatif-alternatif policy.
- b. Mereka menerima suatu keabsahan dari policy atau kebijakan sebelumnya karena ketidakketentuan akibat-akibat yang bakal ditimbulkan dari policy atau suatu kebijakan yang baru atau sama sekali berbeda dari yang mendahuluinya. Usaha



mempertahankan program yang ada lebih selamat dan menguntungkan dibandingkan membuat policy atau kebijakan yang baru atau yang sama sekali dengan berbeda dari yang mendahuluinya. Usaha mempertahankan suatu program yang ada lebih selamat dan menguntungkan dibandingkan membuat policy atau suatu kebijakan atau program baru yang akibat-akibatnya tidak bisa di ramalkan. Dalam keadaan yang tidak menentu tersebut, pembuat policy atau suatu kebijakan lebih menguntungkan melanjutkan suatu policy atau program-program yang lalu.

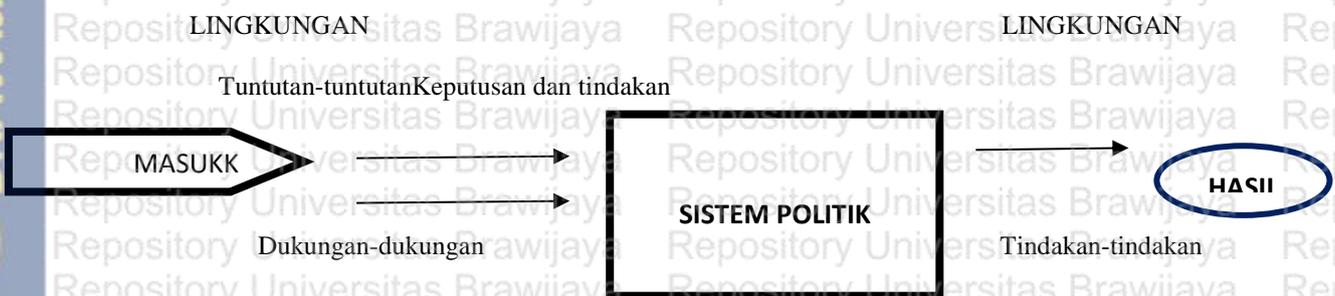
- c. Barang kali karena terdapat tabungan-tabungan yang menari dalam program-program yang dapat menghalangi suatu perubahan-perubahan yang bersifat radikal. Tabungan-tabungan tersebut mungkin berupa uang, gedung atau suatu perangkat keras lainnya (Other heard Items). Atau dapat pula berupa suatu tindakan-tindakan yang bersifat psikologi, praktika administratif atau struktur organisasi.
- d. Inkrementalisme merupakan suatu tindakan politik yang tepat. Persetujuan dalam proses pembuatan policy akan datang lebih mudah ,jika hal-hal dipersoalkan adalah mengenai suatu kebaikan atau penurunan anggaran , atau hanya penyempurnaan policy atau suatu kebijakan yang ada. Konflik akan meninggi, jika pembuatan suatu keputusan dipusatkan pada suatu policy atau suatu kebijakan utama untuk mengubah hal-hal yang melibatkan keuntungan dan kerugian besar atau samaunya akan sama-sama kehilangan besar atau dapat pula berupa suatu keputusan policy atau kebijakan yang “ya-tidak”. Oleh karena pembuat suatu kebijakan menginginkan adanya suatu ketegangan politik yang timbul tiap tahun menurun, maka ketika melibatkan diri ke dalam penyusunan program-program policy baru yang dihindarkan tindakan-tindakan perubahan yang radikal.

6. Model Sistem (Policy adalah sebagai suatu hasil dari suatu sistem)



Model sistem terdapat beberapa unsur penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan yakni inputs, proses dan output serta juga lingkungan yang memengaruhi suatu proses kebijakan. Desakan atau tekanan dari suatu lingkungan tersebut yang amat sangat memengaruhi sistem politik dipandang sebagai suatu masukan (inputs). Lingkungan adalah setiap kondisi atau suatu situasi tertentu yang dirumuskan sebagai faktor luaran (external factor) dari batas-batas suatu sistem politik. Sistem politik adalah suatu saling ketergantungan antara suatu struktur dan proses suatu kelompok yang berfungsi mengalokasikan nilai-nilai yang otoritatif untuk suatu masyarakat. Adapun suatu hasil atau output dari suatu sistem politik adalah alokasi nilai-nilai yang otoritatif dari suatu sistem dan alokasi-alokasi yang dinyatakan sebagai public policy. Kalau digambarkan konsep dari kebijakan model sistem yakni sebagai berikut :

Gambar 16. Kebijakan dalam Model Sistem



Model sistem ini adalah sebagai sebuah model dalam kebijakan publik yang sangat dipakai untuk era sekarang terutama dalam melakukan transformasi birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia terkait dengan adanya sebuah pembuatan-pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sebagaimana bahwa upaya pembuatan dan perumusan tersebut diawali dengan agenda setting yang disusun oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Jika dilihat dalam gambaran yang ada pada pendekatan sistem di atas bahwa digambarkan sebagai



sebuah model kebijakan yang selalu melakukan upaya untuk mencari sebuah permasalahan-permasalahan yang merupakan sebagai dasar langkah selanjutnya untuk dibuatkannya sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Dalam proses sebuah keputusan politik yang ada pada kebijakan pemerintahan bahwa upaya pemerintah tersebut untuk mengupayakan dengan melakukan penerimaan respon dari pihak luar dan juga dukungan-dukungan baik bersifat substansif maupun administratif untuk memperkuat dalam hal perumusan sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga menghasilkan adanya sebuah kebijakan yang benar-benar terukur. Dalam hal ini bahwa tuntutan-tuntutan dan dukungan yang ada dalam model suatu sistem bahwa sebenarnya pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak dan aktor yang terkait dengan melakukan sebuah perumusan suatu kebijakan yang dibuat dan disusun oleh pemerintah.

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan

Dalam hal ini bahwa tuntutan-tuntutan tersebut dapat datang dari siapa saja termasuk dari partai politik, masyarakat, legislatif atau dari manapun yang merupakan sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang ada di lingkaran pemerintahan tersebut dalam hal untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Termasuk juga dalam hal ini bahwa bukan hanya dari kalangan masyarakat saja yang berperan dalam perumusan suatu kebijakan tersebut termasuk kalangan dari orang-orang terdidik dan konsultan sangatlah berperan penting dalam upaya melakukan suatu perumusan sebuah kebijakan yang sebagaimana peran konsultan dan akademisi berperan untuk melakukan upaya pemberian sebuah terobosan-terobosan penting untuk melakukan berbagai rekomendasi sebuah kebijakan-kebijakan penting terkait dengan urusan-urusan pemerintahan. Termasuk juga dengan dukungan-dukungan yang digambarkan di atas adalah dukungan yang dibawakan dari pemikiran-pemikiran para konsultan atau staff ahli dalam sebuah lembaga atau kementerian terkait dalam hal upaya untuk melakukan urusan pemerintahan atau berkaitan dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat atau di



rumuskan oleh pemerintah. Dukungan dari konsultan atau staf ahli tersebut sangat berperan dalam proses sistem politik atau keputusan politik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam artian bahwa peran konsultan dan juga staff ahli di sini sangat berperan penting untuk memberikan suatu terobosan-terobosan dan juga berbagai pembaharuan dalam sebuah kebijakan tersebut yang menjadi sebuah susunan kebijakan pemerintah. Dengan berbagai proses yang telah dirumuskan bersama melalui proses tuntutan dan dukungan yang telah dilalui maka sebuah kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah beserta jajarannya yang sebagaimana dilaksanakan oleh para pejabat pelaksana yang ada di lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam hal untuk melaksanakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan puncak dan dalam hal ini bahwa sebuah kebijakan tersebut akan diimplementasikan sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal ini bahwa sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sekian panjang diharapkan akan memberikan dampak dan hasil yang benar-benar memberikan manfaat terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam hal upaya untuk menjalankan sebuah urusan-urusan pemerintahan sehingga dalam hal ini juga bahwa masyarakat adalah sebagai aktor utama yang berperan penting untuk membantu pemerintah dalam perumusan sebuah kebijakan.

Sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah bersifat sangat berkelanjutan dan dalam hal ini bahwa dengan adanya suatu sifat yang berkelanjutan tersebut bahwa pemerintah harus benar-benar melibatkan banyak aktor untuk mendapatkan dukungan sekaligus mengetahui tuntutan-tuntutan dari masyarakat atau komunitas terkait persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga dengan adanya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini adalah sebagai upaya untuk menjadikan bahan-bahan utama dalam merumuskan sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat tersusun, terencana dan terukur dengan baik dan



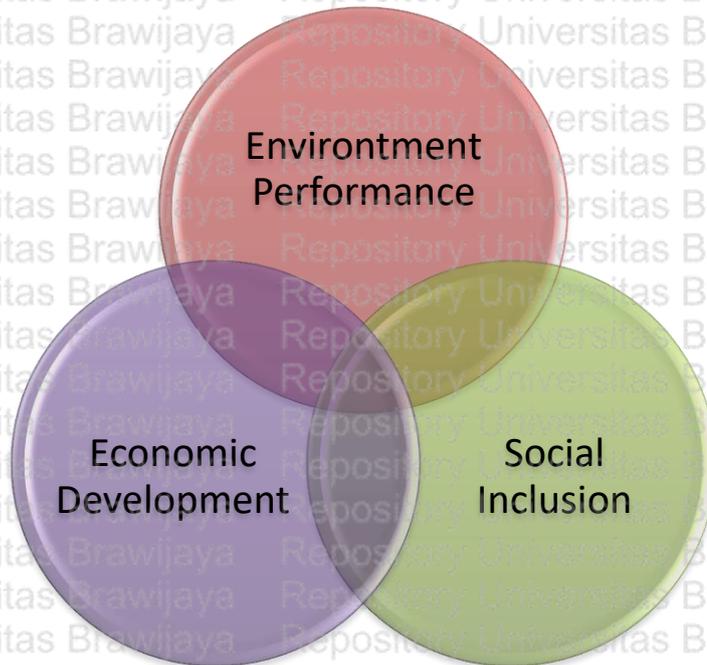
hasilnya yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat bagi banyak orang termasuk masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam hal perumusan suatu kebijakan.

E. Teori Sustainability

1. PENGERTIAN SUSTAINABILITY

Secara umum bahwa sebenarnya teori Sustainability lebih banyak di gunakan dalam hal berkaitan dengan *Development*/Pembangunan sehingga dalam hal ini banyak disebut dengan *sustainable development* atau dalam bahasa indonesia dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bahwa berkelanjutan dipahami sebagai bagaimana sebuah pembangunan tersebut di laksanakan namun tetap memperhatikan dengan adanya keadaan yang ada di lingkungan serta tidak merusak alam dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dikutip dalam handbook Kumpulan Makalah Seminar Isu-isu Lingkungan bahwa pandangan tentang adanya berkelanjutan muncul saat isu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer. Dalam makalah ini bahwa tertulis tentang pendapat dari Brown (1981), menunjukkan adanya sebuah penilaian terhadap adanya sebuah konsep pembangunan berkelanjutan dari beberapa sudut pandang seperti tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian) ancaman perubahan iklim (Polusi, dampak rumah kaca) dan kurangnya bahan pangan (dalam Kuncoro, 1997:13). Dalam hal terkait dengan pandangan pembangunan yang berkelanjutan bahwa pentingnya menerapkan adanya strategi eco-development yang intinya menyatakan bahwa masyarakat dan ekosistem yang ada di suatu daerah harus berkembang secara bersama-sama untuk mencapai suatu produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi namun tetap pada strategi pembangunan yang berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial. Dalam hal ini bahwa jika digambarkan dalam sebuah konsep tentang adanya *Sustainability* atau berkelanjutan maka akan digambarkan menjadi sebagai berikut :

Gambar 17. Konsep Pembangunan Berkelanjutan



Dikutip pernyataan Martono (1995;2) dalam kumpulann-kumpulan makalah seminar isu lingkungan yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang didasari yakni sebagai berikut :

- I. Proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber-sumber dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang.
- II. Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, sehingga pemanfaatan secara berlebihan dapat mengurangi adanya kualitas dan kuantitas sumber daya alam sehingga mengurangi kemampuannya dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan adanya sebuah gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya.



III. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan adanya kualitas hidup, semakin baik mutu lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, turunnya tingkat kematian dan lain-lain.

IV. Pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih peluang lain pada masa depan dalam menggunakan adanya sumber alam.

V. Pembangunan ini memungkinkan adanya sebuah generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan meningkatkan kesejahteraannya.

Pandangan dalam sisi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) muncul pada saat itu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer untuk saat ini dan merupakan sebuah konsep di gunakan hampir di seluruh penjuru dunia termasuk di negara Indonesia.

2. PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep ini adalah bagaimana suatu pembangunan yang dilaksanakan tetap menjaga adanya suatu prinsip-prinsip lingkungan yang sebagaimana bahwa suatu pembangunan tersebut diharapkan tetap harus melestarikan adanya suatu lingkungan yang ada di sekitarnya. Brown (1981) menunjukkan adanya suatu penilaian terhadap pembangunan berkelanjutan dari beberapa sudut pandang seperti tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut, hutan, lahan pertanian) ancaman perubahan iklim (polusi dampak rumah kaca) dan kurangnya lahan pangan (Kuncoro, 1997:13). Berikut ini bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi RIO (UNCED, 1992 dalam Mitchel Bruce, Dkk, 2007) :

Tabel 9. Prinsip-prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan pilihan dari deklarasi Rio



No.	Prinsip-prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan	Uraian Prinsip
1.	Prinsip 1	Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.
2.	Prinsip 2	Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan The Charter of The United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumber daya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.
3.	Prinsip 3	Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.
4.	Prinsip 4	Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
5.	Prinsip 5	Semua negara dan masyarakat harus



		<p>bekerja sama memerangi suatu kemiskinan yang merupakan suatu hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan.</p>
6.	Prinsip 6	<p>Untuk mencapai suatu pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.</p>
7.	Prinsip 7	<p>Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.</p>
8.	Prinsip 8	<p>Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui adanya suatu peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu</p>



	pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Kajian Makalah Seminar isu-isu Lingkungan

3. AKSI AGENDA 21 DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terkait dengan adanya suatu pembangunan berkelanjutan bahwa terdapat beberapa aksi yang dinamakan dengan adanya “Agenda 21” yang merupakan program aksi pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar aksi agenda dalam Program Pembangunan Berkelanjutan

AKSI “AGENDA 21” DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

No.	Agenda dalam Pembangunan Berkelanjutan	Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan
1.	Social and Economics Dimension	1. Kerjasama internasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan negara berkembang serta kebijakan domestiknya.



		<p>2. Memerangi kemiskinan</p> <p>3. Merubah pola konsumsi</p> <p>4. Dinamika demografi dan sustainabilitas</p> <p>5. Proteksi dan peningkatan kesehatan manusia</p> <p>6. Promosi pembangunan permukiman manusia berkelanjutan</p> <p>7. Integrasi lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan.</p>
2.	<p>Conservations and Management of Resources for Development</p>	<p>8. Proteksi atmosfer</p> <p>9. Pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya lahan.</p> <p>10. Memerangi deforestasi</p> <p>11. Pengelolaan ekosistem yang rawan, memerangi desertifikasi dan kekeringan</p> <p>12. Pengelolaan ekosistem yang rawan, pembangunan pegunungan berkelanjutan</p> <p>13. Mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan pembangunan pedesaan.</p>



		<p>14. Konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>15. Pengelolaan bioteknologi berwawasan lingkungan</p> <p>16. Proteksi samudera, keanekaragaman kelautan, termasuk lautan dan semi tertutup, kawasan pesisir serta proteksi dan penggunaan secara rasional berikut pengembangan sumber daya alam hayati.</p> <p>17. Proteksi kualitas dan supply air</p> <p>18. Pengelolaan kimia toksik dan bahaya</p> <p>19. Pengelolaan limbah beracun dengan berwawasan lingkungan.</p> <p>20. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair berwawasan lingkungan</p> <p>21. Pengelolaan yang aman dan berwawasan lingkungan dari limbah radio aktif.</p>
3.	Strengthening the Role of Major Group	<p>22. Aksi Global bagi perempuan mengembangkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan</p> <p>23. Anak dan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan.</p>



		<p>24. Mengakui dan memberdayakan peranan organisasi non-pemerintah, mitra dalam pembangunan berkelanjutan.</p> <p>25. Prakarsa otoritas lokal menunjang agenda 21</p> <p>26. Memberdayakan peranan buruh serta serikat buruh</p> <p>27. Memberdayakan peranan bisnis dan industri</p> <p>28. Komunitas ilmuwan dan teknologi</p> <p>29. Memberdayakan peranan petani</p>
<p>4. Meanf of Imlementations</p>		<p>30. Sumber keuangan dan mekanismenya</p> <p>31. Pengalihan teknologi berwawasan lingkungan, kerjasama serta pengembangan kapasitas</p> <p>32. Ilmu pengetahuan bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>33. Mempromosikan pendidikan, kesadaran publik dan latihan.</p> <p>34. Mekanisme nasional dan kerjasama internasional untuk mengembangkan kapasitas dalam negara berkembang.</p>



		<p>35. Pengaturan kelembagaan internasional, instrumental hukum dan mekanisme internasional.</p> <p>36. Informasi bagi pengambilan keputusan.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Kajian Makalah Seminar isu-isu Lingkungan

Terkait dengan aksi “Agenda 21” yang merupakan sebagai suatu program pembangunan berkelanjutan bahwa terdapat beberapa cakupan-cakupan penting di dalamnya yakni sebagai berikut :



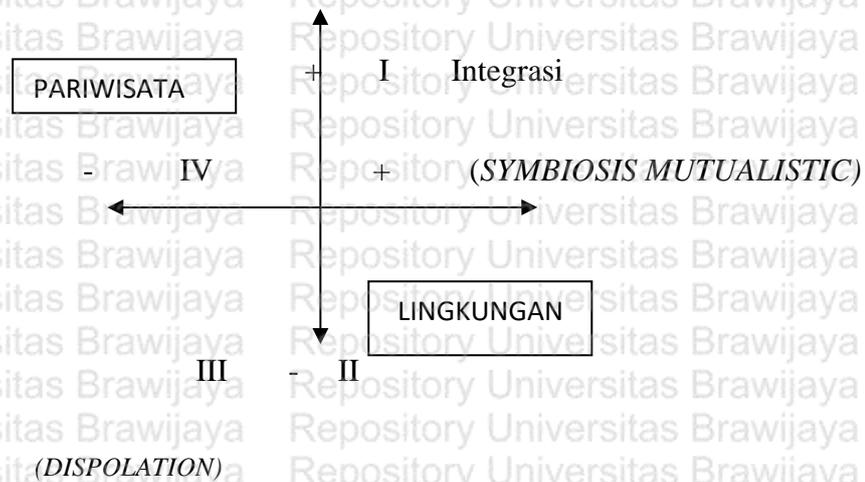
Upaya Pengelolaan Pesisir diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 pengganti atas undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Diambil dalam sumber *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* yang ditulis oleh Drs. Bambang Sunaryo.M.Sc.MS dalam hal ini bahwa sebenarnya dalam pembangunan suatu pariwisata sangat keterkaitan dengan adanya lingkungan sekitar. Secara teoritik bahwa pola interaksi antara aktivitas kepariwisataan dan lingkungan sekitar yang ada di suatu destinasi akan dapat menimbulkan berbagai dampak. Terkait dengan adanya hubungan antara pariwisata dengan lingkungan bahwa secara hipotetik variasi kemungkinan dampak yang akan dihasilkan dari hubungan antara kepariwisataan dan lingkungan tadi dapat digambarkan dalam model empat kuadran sebagai berikut :

Gambar 18. Model 4 kuadran hubungan antara kepariwisataan dan lingkungan



Berdasarkan referensi yang dikutip dalam buku tersebut bahwa terkait dengan kuadran yang digambarkan keterhubungan antara pariwisata dan lingkungan dijelaskan kondisi ideal yang paling diharapkan bisa terjadi adalah terjadinya suatu keadaan atau kondisi sebagaimana digambarkan pada kuadran 1 yaitu “Kepariwisataan mendapatkan adanya dukungan yang positif dari lingkungan dan kondisi lingkungan mendapatkan dampak positif dari



kepariwisataan". Kondisi ini disebut dengan kondisi yang *symbiosis mutualistic* atau terjadinya suatu integrasi antara lingkungan dan kepariwisataan. Terkait dengan hal tersebut dapat digambarkan dalam kuadran negatif bahwa suatu kondisi ekstrim yang tidak diinginkan terjadi adalah suatu kondisi konflik atau yang disebut dengan *dispolation* sebagaimana bahwa diilustrasikan yang terjadi di kuadran III; Yaitu terjadinya suatu keadaan di suatu destinasi wisata yang menggambarkan suatu fenomena : “ Kepariwisataan tidak dikehendaki keberadaannya oleh lingkungan setempat dan aktivitas kepariwisataan yang ada juga menimbulkan dampak negatif terhadap adanya lingkungan setempat”.

Dalam hal perspektif pembangunan berkelanjutan atau yang dinamakan dengan *Sustainable Development* terkait dengan adanya suatu pembangunan pariwisata yang merupakan sebuah potensi lokal bahwa sebenarnya dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata memang sangat perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti halnya juga pertimbangan dari faktor lingkungan yang sebagaimana di gambarkan dalam kuadran di atas bahwa baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat maupun investor harus mempertimbangkan adanya faktor lingkungan dalam hal untuk membangun dan mengembangkan suatu destinasi wisata dalam suatu daerah. Dalam sumber buku tentang *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata* yang ditulis oleh Drs. Bambang Sunaryo.M.Sc.MS bahwa yang mendasarkan kepada elaborasi dan penjabaran makna konsepsi di atas, akhirnya World Tourism Organization (WTO) telah menerapkan pendekatan tadi di lingkungan sektor kepariwisataan, sehingga akhirnya mendefinisikan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut (*Sustainable Tourism Development/STD*) melalui adanya batasan pengertian sebagai berikut :

“Sustainable Tourism Development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs



can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity and life support system”.

Terkait dengan pengertian di atas bahwa STD (Sustainable Tourism Development) bahwa sebenarnya terkait dengan masalah manajemen pariwisata melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia seperti halnya ekonomi, sosial dan juga sumber daya yang lain namun dalam hal ini terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan adanya suatu perawatan integritas , melihat aspek lingkungan dan juga aspek biologis sehingga sehingga dalam hal ini dapat dijadikan upaya untuk keanekaragaman hayati serta memerhatikan adanya aspek-aspek lingkungan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wisata. Terkait dengan pengembangan wisata dalam hal ini bahwa kunci keberhasilan implementasi pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang harus memenuhi paling tidak ada 3 indikator sebagai berikut :

positive socio-economic change

- pembangunan kepariwisataan harus mampu membawa keadaan sosial dan ekonomi sekitar menjadi lebih baik.

Does not undermine the ecological and social system

- pembangunan kepariwisataan haruslah menghindari penggunaan sumber daya alam dan buatan secara gegabah dan tanpa perhitungan serta mendegradasikan sistem sosial yang ada.

Integrated policy, planning and social learning processes

- Keberhasilan implementasi pembangunan kepariwisataan yang berlanjut sangat tergantung kepada keterpaduan mulai dari suatu perumusan kebijakan, perencanaan sampai dengan proses belajar sosial dari segenap pemangku kepentingan.

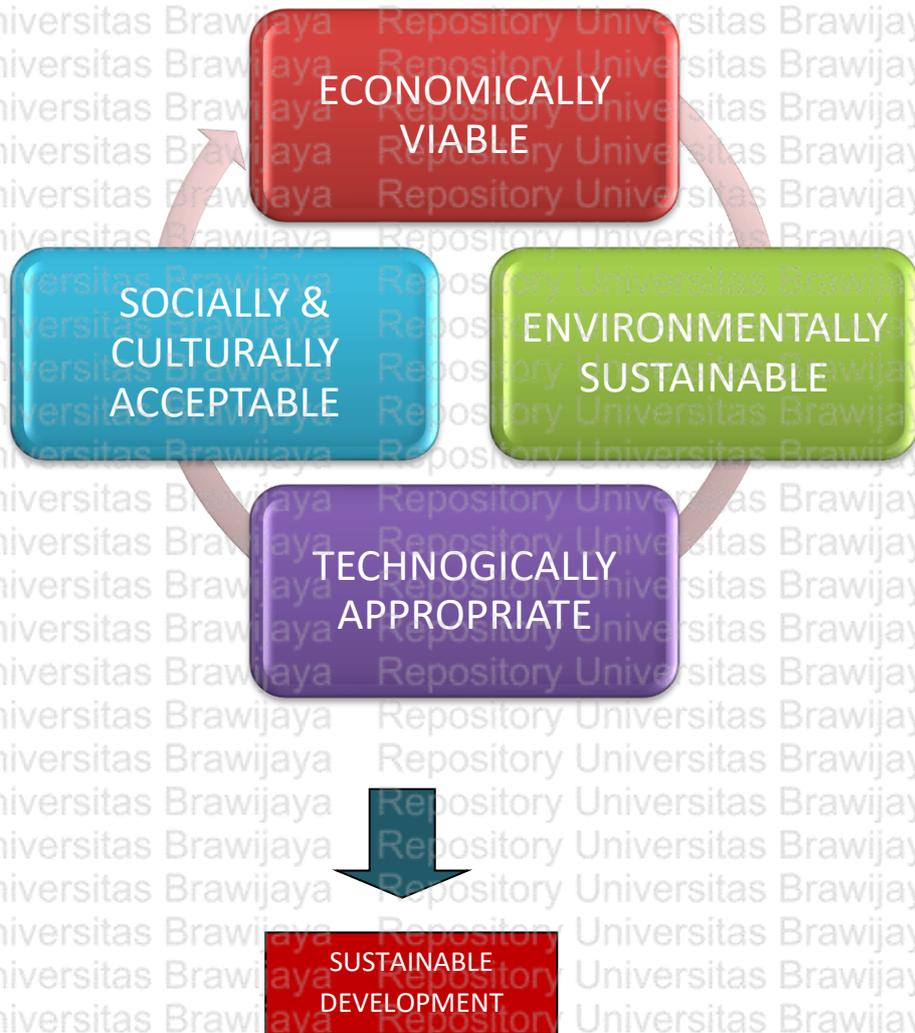


Dalam referensi buku *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata* bahwa secara ringkas wawasan pembangunan kepariwisataan secara berlanjut tadi pada prinsipnya merekomendasikan untuk menakar keberhasilan kinerja pembangunan kepariwisataan harus paling tidak melalui 4 parameter utama yakni sebagai berikut :

- a. Mampu berlanjut secara lingkungan (environmentally sustainable)
- b. Dapat diterima oleh lingkungan sosial dan budaya setempat (socially and culturally acceptable)
- c. Layak dan menguntungkan secara ekonomi (economically viable) dan
- d. Memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di wilayah lingkungan tersebut (technologically appropriate).

Terkait dengan adanya suatu, bahwa secara ilustratif konstruksi suatu pemahaman mengenai kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan (STD) beserta parameter serta prinsip pengukurannya sebagaimana telah banyak diuraikan di atas dapat digambarkan dalam suatu model ilustrasi yakni sebagai berikut :

Gambar 19. Ilustrasi Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan



Terkait dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang digambarkan ilustrasi parameter STD (Sustainable Tourism Development) bahwa setiap parameter yang digambarkan di atas memiliki suatu penjelasan-penjelasan yakni sebagai berikut :

- Prinsip *environmentally sustainable* dalam model diatas menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi dan budaya) dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.
- Prinsip *Socially and Culturally Acceptable* menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan di suatu destinasi haruslah dapat diterima secara sosial dan budaya oleh

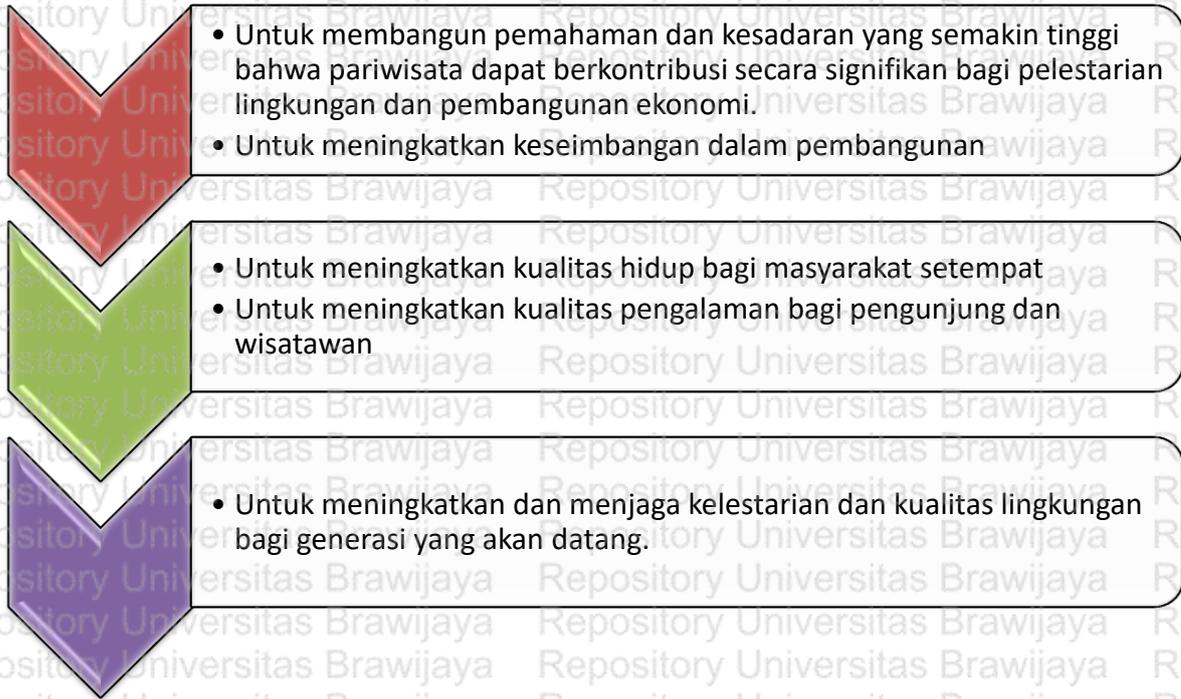


masyarakat setempat. Upaya pembangunan yang dilaksanakan harus mampu memperhatikan, mengapresiasi nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang ada di destinasi.

- Prinsip *Economically Viable* menekankan bahwa setiap rencana dan program kegiatan pembangunan kepariwisataan yang akan diselenggarakan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan baik bagi negara, daerah maupun masyarakat. Pembangunan kepariwisataan yang akan diselenggarakan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel agar dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Prinsip *technologically appropriate* dalam pemahaman di atas memberikan penekanan bahwa dalam proses pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan, jenis teknologi yang digunakan haruslah sesuai dengan lingkungan, efisien dan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal dan dapat diadopsi oleh masyarakat setempat secara mudah serta harus berorientasi pada jangka panjang.

(Sumber : Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)

Dalam hal ini bahwa terkait dengan adanya pariwisata terdapat 5 sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang utama adalah sebagai berikut (Fennel,1999) :



(Sumber : Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*)

Dalam hal ini bahwa terkait dengan adanya ilustrasi indikator kepariwisataan berkelanjutan bahwa digambarkan yakni sebagai berikut :

Gambar 20. Indikator Kepariwisataan Keberlanjutan





5. Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan

Terkait dengan adanya paradigma dan strategi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan bahwa digambarkan dalam tabel yakni sebagai berikut.

Tabel II. Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

PERGESERAN PARADIGMA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN

No.	Karakteristik	Orientasi Paradigma Pembangunan Kepariwisata	
		Pertumbuhan (Growth)	Berlanjut (Sustainable)
1.	Fokus	Growth : Mass Tourism	Development
2.	Nilai yang dikejar	Devisa & Investasi	Community Based & Green Tourism
3.	Indikator	Jumlah kunjungan Lama tinggal & Pembelanjaan wisatawan	Dampak multi Ganda dari Kepariwisata
4.	Peran Pemerintah	Enterprenaur Developer	& Fasilitator
5.	Peran Masyarakat		
	Akses	Tertutup	Terbuka
	Peran	Pasif	Aktif-partisipatif
	Karakter	Beneficiaries	Enterpreneur



	Posisi	Marginal	Stakeholder
6.	Tuntutan kualitas	Standart lokal	Standart universal

(Sumber : Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan*

Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)

6. Aspek-aspek Indiaktor dalam Kinerja Pembangunan Kepariwisataaan

Beberapa pakar dibidang analisis dampak lingkungan dari aktivitas kepariwisataan seperti halnya Alister Matheieson dan Geoffrey Wall (1982) ; Wright (1977) telah mengedepankan bahwa prinsip dari model pembangunan kepariwisataan berlanjut dan berwawasan lingkungan pada intinya adalah akan mengukur kinerja pembangunan kepariwisataan melalui beberapa hal yakni sebagai berikut :

Tabel 12.Aspek Indikator dalam Kinerja Pembangunan Kepariwisataaan

ASPEK-ASPEK INDIKATOR DALAM KINERJA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

No.	Aspek-aspek Indikator dalam Pembangunan Kepariwisataaan	Uraian penjelasan
1.	Aspek Indikator Lingkungan Fisik	Ada dua kategori indikator lingkungan dari komponen fisik yang memerlukan adanya suatu pengamatan dan pengukuran secara periodik yakni sebagai berikut : 1) Lingkungan fisik yang bersifat <i>fixed</i> : yaitu berupa sumber daya alam/ekologi bukan



		<p>buatan manusia, seperti lanskap, hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara, terumbu karang, flora dan fauna dan sebagainya.</p> <p>2) Lingkungan fisik yang bersifat flexible : yaitu berupa sumber daya alam buatan manusia, seperti : sistem infrastruktur, <i>water supply</i> , pembuangan limbah, jaringan listrik, transportasi, pos dan telekomunikasi, layanan kesehatan, perbankan, restoran, cinderamata dan sebagainya.</p>
2.	Aspek Indikator Sosial Budaya	<p>Beberapa indikator yang harus selalu dimonitor dan ditakar kondisi dan kapasitasnya pada aspek sosial budaya adalah :</p> <p>1) Jumlah wisatawan dan tipe kegiatan rekreasi serta perilaku wisatawan yang dapat diserap oleh destinasi tanpa harus memengaruhi identitas, gaya hidup dan kehidupan sosial budaya serta adat istiadat dari masyarakat setempat.</p> <p>2) Lama Tinggal dan tipe kepariwisataan yang tidak mengubah budaya lokal secara signifikan baik langsung maupun tak langsung utamanya dalam hal seni,</p>



		<p>kerajinan, sistem kepercayaan, upacara, adat dan tradisi.</p> <p>3) Tipe kepariwisataan yang tidak ditolak oleh penduduk setempat, terutama yang tidak menghalangi mereka untuk menggunakan layanan dan fasilitas masyarakat/umum yang ada di destinasi.</p> <p>4) Jumlah pengunjung dan tipe interaksi antara wisatawan dan lingkungan di destinasi, tanpa harus menimbulkan penurunan pengalaman dan kenyamanan pengunjung secara drastis.</p>
3.	Aspek Indikator Ekonomi	<p>Beberapa indikator yang harus selalu dipantau keadaannya dari aspek ekonomi pada model kepariwisataan berlanjut adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Derajat spesialisasi dalam kepariwisataan yang sudah berpengaruh pada hilangnya peluang kerja dan usaha masyarakat setempat.</p> <p>2) Angka dislokasi tenaga kerja atau tingkat kehilangan tenaga kerja manusia di sektor-sektor lain yang disebabkan oleh industri kepariwisataan yang ada.</p> <p>3) Keadilan distribusi pendapatan dari</p>



	<p>kegiatan kepariwisataan dan dampak penguatannya pada masyarakat maupun kelembagaan setempat.</p> <p>4) Tingkat penyerapan tenaga kerja dari aktivitas kepariwisataan di destinasi terhadap sumber daya manusia pariwisata yang ada.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER :Drs.Bambang Sunaryo.M.Sc, MS, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

F. Local Governance

1. Gambaran Umum Tentang Local Governance

Local Governance adalah sebuah pendekatan yang juga tertuang dalam kajian Ilmu administrasi Negara/Publik yang sebagaimana sebuah tujuan dari pemerintah daerah untuk membangun sebuah kapasitas yang ada di pemerintah lokal dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur yang ada di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Selain itu juga bahwa upaya peningkatan kapasitas yang ada di kelembagaan adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan demi hal untuk melakukan sebuah penyelesaian problematika terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pendekatan Local Governance sangat berkaitan erat dengan adanya sebuah desentralisasi dan otonomi daerah yang sebagaimana memberikan adanya sebagian wewenang terhadap daerah dalam hal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah sesuai dengan kearifan lokal dan budaya yang ada di daerah masing-masing.Dengan begitu kompleksnya persoalan yang ada di daerah terkait dengan adanya pembangunan bahwa dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya peran dari



Pemerintah Daerah beserta SKPD dalam melakukan penyelesaian problematika persoalan-persoalan yang ada di daerah terkait dengan masalah-masalah pembangunan yang ada di daerah.

Terkait dengan local governance bahwa sebuah kegiatan yang dilakukan adalah untuk melakukan pengembangan sebuah kapasitas kelembagaan yang ada di setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dalam hal meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan adanya sebuah persoalan-persoalan yang ada di daerah terkait dengan masalah pembangunan dan kesejahteraan sosial. Local Governance juga merupakan sebuah pendekatan yang sebagaimana dalam hal ini dapat dijadikan sebagai upaya membangun sebuah kepercayaan dalam menjalin sebuah kerjasama dan hubungan dengan partner yakni dengan masyarakat dan swasta atau dengan pemerintah daerah lainnya serta juga dalam hal pembuatan keputusan bersama dalam hal membahas persoalan-persoalan pembangunan yang sangat kompleks. Hal ini bahwa keterlibatan antar *stakeholder* seperti halnya pemerintah lokal atau daerah, masyarakat dan juga swasta sangat berperan penting dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penting dan juga pembangunan serta menjalankan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Konseptual Perspektif *Local Governance* dan hubungan lokal pusat

Terkait dengan pendekatan perspektif local governance dan juga terkait dengan upaya tata kelola lokal bahwa secara umum diterimanya pendekatan, teori dan konsep tersebut adalah sebuah kekuatan yang rasional untuk melakukan desentralisasi pengambilan keputusan dan juga kekuatan aturan-aturan untuk pemerintah lokal atau pemerintah daerah dalam hal untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kemampuan manajerial dan juga otonomi. Terdapat beberapa penjelasan terkait dengan adanya



perspektif *Local Governance* yang menjadi sebuah hubungan lokal dan pusat yakni digambarkan dan jelaskan sebagai berikut :

Prinsip-prinsip fiskal

- Olson (1969) berpendapat bahwa jika suatu keputusan politik dan manfaat mengalami suatu overlap, maka permasalahan yang akan muncul adalah masalah pengoptimalan dalam pelayanan publik. Sehingga adanya suatu kesamaan antara politik hukum dengan manfaat yang sering disebut dengan The Principle of fiscal equivalency dan membutuhkan pemisahan hukum untuk setiap pelayanan publik

The Correspondence Principle (kesesuaian prinsip)

- Hubungan konsep diusulkan oleh Oates (1972) : bahwa Hukum ditentukan adanya suatu ketentuan level setiap barang-barang publik harus memasukkan dengan tepat yang mengatur terkait individu-individu yang mengkonsumsi suatu barang-barang tersebut.

Teorema Desentralisasi

- Pemerintah daerah memahami persoalan-persoalan yang ada di daerah.
- Perumusan keputusan lokal harus responsif untuk kegiatan pelayanan, dimaksudkan untuk sebuah pelayanan publik, demikian menyetatkan tanggungjawab dan efisiensi fiskal terutama jika suatu keuangan tersebut didesentralisasikan.
- Tidak perlu menghapuskan lapisan-lapisan hukum.
- Aturan hukum terkait dengan kompetisi dan inovasi yang terus di tingkatkan

3. Perbandingan antara Local Governance dengan Desentralisasi

Terkait dengan perbandingan antara Local Governance dengan Desentralisasi, bahwa sebenarnya terkait dengan fokus antara Local Governance dengan Desentralisasi yakni perlu adanya pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang merupakan memegang peran penting dalam hal pengambilan suatu keputusan untuk melakukan pengelolaan terhadap adanya yang ada di daerah atau potensi-potensi penting seperti halnya sumber daya alam yang menjadi potensi daerah yang untuk dikelola oleh perangkat-perangkat daerah termasuk juga dengan Pemerintahan Daerah termasuk juga Bupati, Walikota dan Gubernur yang merupakan sebagai pimpinan puncak daerah. Namun dalam hal ini bahwa terdapat perbedaan antara Desentralisasi dan Local Governance yakni sebagai berikut :



Tabel13.Perbandingan Antara Desentralisasi dan Local Governance :

PERBANDINGAN ANTARA DESENTRALISASI DAN LOCAL GOVERNANCE

No.	Desentralisasi	Local Governance
1.	Mendukung adanya element sektor publik formal dalam hal melakukan upaya reformasi desentralisasi.	Mendukung adanya masyarakat, NGOs, dan sektor privat untuk membangun sebuah hubungan kerja dan juga memonitoring kerja pemerintah daerah.
2.	<p>Examples Include</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah pusat untuk merespon terkait dengan reformasi kebijakan dan undang-undang baru. • Pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk improvisasi perencanaan, manajemen keuangan dan sebagainya. • Dana pembangunan dari pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan air bersih, jalan raya, fasilitas kesehatan dan sebagainya. 	<p>Example Include</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu kontraktor dari sektor privat dalam hal untuk mendesentralisasikan kontrak kerja. • Mendukung dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam hal memegang akuntabilitas pemerintah daerah. • Mendukung adanya keadilan dan pemberdayaan gender.

Hans Bjorn Olsen.2007.Dalam Paper Desentralitations And Local Governance

Berdasarkan referensi yang di tulis oleh Anwar Shah dan Sana Shah dalam bukunya yang berjudul *The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Goverments* bahwa terkait dengan pendekatan Framework atau kerangka kerja Local Governance terkait dengan prinsip yang diterapkan sering dipanggil dengan pendekatan



Citizen-Centered Governance yang sebagaimana bahwa terdapat beberapa hal terkait dengan pendekatan tersebut yakni sebagai berikut :



- Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berdasarkan hak (Ketentuan demokrasi, Piagam Masyarakat)



- Akuntabilitas/pertanggungjawaban untuk hasil



- Evaluasi kinerja pemerintah sebagai fasilitator penyedia jaringan oleh masyarakat, pembayar pajak dan juga pelanggan/pengguna pelayanan publik

4. Elemen-elemen Kunci dalam Hal Citizen-Centered Governance

Terkait dengan adanya prinsip *Local Governance* seperti halnya yang disebutkan di atas yaitu *Citizen-Centered Governance* bahwa terdapat beberapa Kunci Elemen-element dalam hal *Citizen-Centered Governance* yakni sebagai berikut :

Tabel14. Daftar Elemen Kunci dalam Citizen-Centered Governance

ELEMEN-ELEMEN KUNCI DALAM HAL CITIZEN-CENTERED GOVERNANCE

Responsive Governance	Responsible Governance	Accountable Governance
<ul style="list-style-type: none"> • Aturan dalam subsidiaritas • Ketentuan demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip dalam hal kompetensi general atau tata kelola 	Lets The Sunshine in : <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran rumah tangga



<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi dan memenuhi standar untuk akses pelayanan lokal. • Improvisasi dampak sosial tawaran keamanan kehidupan dan barang. • Tawaran untuk perlindungan dan makanan untuk semua. • Adanya pelayanan air bersih, keamanan air dan juga sanitasi. • Bebas dari pencemaran suara dan juga pengawetan lingkungan. • Tawaran untuk jalan bebas lubang atau bebas dari adanya kerusakan jalan. • Adanya pembangunan sekolah utama dengan jarak tempuh berjalan. • Pelayanan pemadaman kebakaran dan ambulans dengan respon tanggap. • Adanya akses perpustakaan dan internet. • Adanya fasilitas taman dan 	<p>komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur anggaran rumah tangga. • Penetapan daerah anggaran rumah tangga dan regulasi. • Mandat pengelolaan keuangan. <p>Is fiscally prudent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoperasikan anggaran seimbang. • Aturan keemasan untuk dalam hal peminjaman. • Proyek modal baru spesifikasi perawatan harga dan bagaimana hutang untuk dilunasi. • Konservasi aturan keuangan memastikan adanya level hutang berkelanjutan. • Proyek modal utama sebagai subjek referendum. • Perawatan positif yang bernilai. • Komersial pengauditan pernyataan keuangan. <p>Earns Trust :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme dan 	<p>pemerintah daerah adalah suatu hak masyarakat untuk diketahui (transparansi anggaran yang dipublikasikan kepada masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan anggaran dan laporan kinerja harian yang dipublikasikan ke internet/website yang merupakan milik pemerintah daerah misalnya Dinas Pendapatan Daerah. • Semua keputusan, termasuk konsensus harga di publikasikan melalui internet/website yang merupakan milik instansi atau pemerintahan daerah. • Nilai audit kinerja keuangan bersifat independent. • Terbukanya informasi dan penilaian publik. <p>Works to strengthen citizen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piagam masyarakat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>program rekreasi.</p> <p>integritas staff/karyawan/pekerja/pegaw</p> <p>ai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kejahatan • Efisiensi proses dan penerapan e-government. • Aktif dalam hal pengaduan dan juga umpan balik. • Jujur dan adil dalam hal kegiatan administrasi perpajakan. • Pemenuhan ketat dengan pelayanan standar. • penerapan adanya laporan kinerja anggaran dan pelayanan siap sedia • partisipasi anggaran dan perencanaan. <p>Works Better and cost less :</p> <ul style="list-style-type: none"> • semua tugas dikenakan alternatif pelayanan siap sedia, ketentuan kompetitive dengan melibatkan pemerintah dan entitas luar pemerintah. • Sektor publik sebagai penjual 	<p>ai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kejahatan • Efisiensi proses dan penerapan e-government. • Aktif dalam hal pengaduan dan juga umpan balik. • Jujur dan adil dalam hal kegiatan administrasi perpajakan. • Pemenuhan ketat dengan pelayanan standar. • penerapan adanya laporan kinerja anggaran dan pelayanan siap sedia • partisipasi anggaran dan perencanaan. <p>Works Better and cost less :</p> <ul style="list-style-type: none"> • semua tugas dikenakan alternatif pelayanan siap sedia, ketentuan kompetitive dengan melibatkan pemerintah dan entitas luar pemerintah. • Sektor publik sebagai penjual 	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pelayanan • Persyaratan untuk masyarakat yang bersuara dan memilih. • Hak dalam mengeluarkan pendapat. • Hak untuk bersuara terkait dengan program-program pemerintah. • Kinerja keuangan antar pemerintah berbasis hasil dan keadilan. • Kinerja keuangan berorientasi kepada masyarakat. • Harga dan hasil pelayanan yang siap sedia. • Kartu laporan masyarakat pada kinerja pelayanan siap sedia. • Merapatkan laporan anggaran, kinerja dan kontrak di aula pertemuan. • Semua dokumen dikenakan sebagai kebutuhan masyarakat. • Membuka proses untuk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>melalui kinerja kontrak tetapi tidak perlu sebagai penyedia pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajerial yang fleksibel tetapi akuntabilitas/pertanggungjawaban untuk hasil. • Adanya perjanjian kekal. • Spesialisasi tugas/pekerjaan. • Alokasi anggaran dan kinerja kontrak berbasis hasil. • Biaya berbasis aktivitas. • Pengisian untuk penggunaan modal. • Akuntansi akrual. • Benchmarking dengan baik. • Administrasi umum dikenakan harga pengawasan publik. • Batas keseimbangan manfaat dan harga, dalam hal skala dan cakupan ekonomis, eksternal dan pembuatan sebuah keputusan. • Batas konsistensi dengan keberlanjutan fiskal • Brawijaya 	<p>tawaran kontrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih berhak memilih setidaknya 50% • Menyediakan papan di depan masyarakat sebagai penghitungan score card dan umpan balik pada kinerja pelayanan siap sedia. • Ketentuan untuk penarikan dan inisiatif populer terhadap keresmian publik. • Anggaran rumah tangga adalah hak pembayar pajak. 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



G. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Beberapa pengertian dipakai oleh beberapa praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sebagai contoh untuk pengertiannya yakni digambarkan sebagai berikut :

“Tourism comprises the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourists, locals and services personel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions” (Leiper, 1995 dalam Richardson & Flickers, 2004 :6)

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourists, bussines supplier, host government, host communities origin government, universites community colleges and non governmental organisations in the process of attracting, transporting, hosting and managing these tourists and other visitors” (Weaver and Opperman, 2000:3)

“Tourism comprises the activites of persons, travelling to and staying in place outside their usual environtment for not more than one consecutive year for leisure, bussines and other purposes” (UNWTO, dikutip dari Richardson dan Fluker, 2004:7)

Seperti halnya yang disebutkan pengertian di atas bahwa maksud dari pengertian pertama adalah bahwa pariwisata merupakan sebagai sebuah ide dan opini dari seseorang yang akan melakukan suatu perjalanan dengan menentukan di



manakan seseorang akan pergi, dan apa yang seseorang lakukan dalam kegiatan pariwisata, bagaimana membangun relasi dengan wisatawan yang lainnya, wisatawan lokal dan juga petugas pelayanan tempat wisata. Dalam hal ini bahwa sebenarnya seperti yang diungkapkan dalam pengertian yang pertama bahwa berwisata tersebut terdapat dari opini dan ide seseorang dan merupakan sebagai suatu keputusan seseorang untuk melakukan kegiatan perjalanan dalam hal untuk berwisata dan juga dalam hal ini agar bisa menikmati tempat yang baru dan juga merupakan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berhubungan antar wisatawan, alam, lingkungan dan juga dengan petugas di tempat wisata.

Sedangkan dalam pengertian kedua penjelasan maksudnya adalah bahwa pariwisata merupakan sebagai suatu fenomena dan hubungan dari interaksi antar wisatawan, bussines supplier/penyedia usaha, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah dalam proses untuk bertindak, menggerakkan dan juga mengelola para wisatawan dan pengunjung-pengunjung lainnya.

Sedangkan untuk pengertian yang ketiga adalah bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan seseorang untuk melakukan suatu perjalanan dalam hal untuk melihat tempat baru atau lingkungan baru dengan tujuan berwisata, tujuan untuk berbisnis dan tujuan yang lainnya.

Dari 3 pengertian yang dijelaskan di atas bahwa di simpulkan untuk pengertian pariwisata merupakan sebagai suatu kegiatan yang berasal dari opini dan ide seseorang dalam hal melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat, melakukan hubungan dengan wisatawan lain, petugas wisata dan juga dengan lingkungan di mana kita berwisata yang sebagaimana para wisatawan tersebut mendatangi tempat wisata yang telah dikelola oleh para *stakeholder*/pemangku kepentingan seperti halnya pemerintah, masyarakat, investor, perguruan tinggi maupun juga dengan

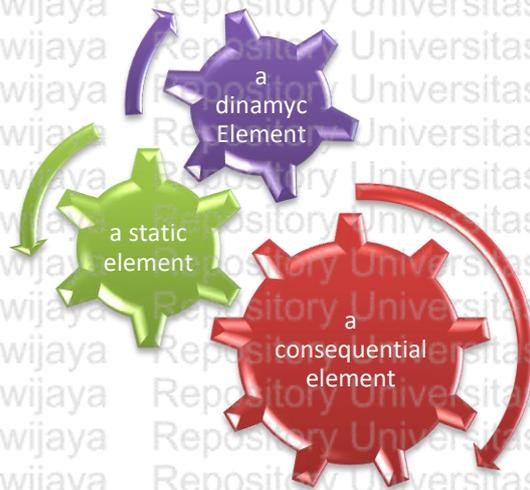


organisasi non pemerintah yang merupakan sebagai tempat untuk berwisata dan menikmati keindahan alam yang dilakukan oleh para wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan manca negara. Ada beberapa komponen pokok yang secara umum di sepakati di dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut :

- I. Traveler, yaitu orang yang melakukan suatu perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
- II. Visitor, adalah orang yang melakukan suatu perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan atau kehidupan di tempat tujuan.
- III. Tourist, yakni bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang di kunjungi (WTO,1995).

Selanjutnya, Mathieson dan Wall (1982) mengatakan bahwa pariwisata mencakup adanya suatu 3 elemen utama yakni sebagai berikut :

Gambar 21. Elemen-elemen dalam Pariwisata



Dalam hal ini bahwa jika di jelaskan terkait elemen di atas yakni sebagai berikut :

A. *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.

B. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.

C. *A consequential element* , yaitu akibat dari dua hal yang ada di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal) yang meliputi dampak ekonomi, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

2. Sumber Daya Pariwisata

Perjalanan suatu industri pariwisata sangat didukung dengan adanya sumber-sumber daya yang sangat mendukung kegiatan berlangsungnya pariwisata dalam suatu daerah. Dalam hal ini bahwa sebenarnya sumber daya tersebut bisa berasal dari alamiah maupun buatan yang itu merupakan sebagai sebuah daya dukung untuk mendorong adanya kegiatan pariwisata di suatu negara atau daerah. Hal ini bahwa termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan sebagainya adalah sebagai sumber daya yang sangat mendorong adanya suatu kegiatan pariwisata yang ada di daerah dan juga mendorong adanya tata kelola pelayanan pariwisata yang baik (*Good Tourism Services Governance*) yang



sebagaimana agar dapat memberikan suatu kenyamanan dan keamanan serta keselamatan terhadap wisatawan baik dalam negeri maupun juga mancanegara. Terkait dengan pengertian sumber daya hal ini di nyatakan oleh salah satu pakar yaitu Zimmerman (1951, dalam Wilkinson, 1994:42) bahwa sumber daya di artikan sebagai berikut :

“Resources are not, They Become, They are not static but expand and contract in response to human wants and human actions, Resources are attributes of the natural world that are no more than ‘neutral stuff’ until a combinations of increased knowledge, expanding technology, and changing individual and societal objectivities result in their presence being perceived, their capacity to satisfy human wants”
(Zimmerman, 1951 dalam Wilkinson, 1994:42).

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas oleh ahli yakni bahwa sumber daya adalah merupakan sebagai hal yang tidak statis dan selalu dinamis dan merupakan sebagai suatu kebutuhan oleh setiap makhluk. Dalam hal ini bahwa suatu sumber daya tersebut adalah suatu kekuatan untuk dikelola dan juga di tindak oleh setiap orang dalam hal untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pengelolaan suatu sumber daya sangat dibutuhkan adanya suatu pengetahuan dan wawasan tertentu dengan menggunakan adanya teknologi yang tepat guna, dan merubah pola pikir individu dan masyarakat dalam hal untuk berorientasi pada hasil guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai pemenuhan kepuasan yang diinginkan oleh seseorang. Hal ini bahwa dalam melakukan adanya suatu pengelolaan terhadap sumber daya sangat dibutuhkan adanya suatu pengetahuan dan juga keahlian yang ada pada pengelola dan dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan proses untuk melatih suatu pengalaman di lapangan agar terus meningkatkan kualifikasi diri dalam hal untuk mengelola suatu



sumber daya tertentu. Termasuk dalam hal sektor pariwisata adalah suatu sektor yang juga membutuhkan adanya sumber daya yang mendukung adanya kegiatan pariwisata dalam suatu daerah. Sumber daya yang terkait dengan adanya pariwisata umumnya adalah berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus di samping sumber daya manusia. Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2007) bahwa argumentasi tentang adanya sumber daya pariwisata dapat diperluas termasuk juga dalam hal berbagai faktor yang tidak tercakup dalam konseptualisasi secara tradisional yang selalu dihubungkan dengan sumber daya alam. Salah satu karakteristik dari sumber daya pariwisata adalah dapat dirusak dan dihancurkan oleh pemakaian yang tidak terkendali dan kesalahan pengaturan (*mismanagement*).

A. SUMBER DAYA ALAM

Elemen dari sumber daya alam adalah adanya suatu pepohonan, air, udara, hamparan pegunungan, pantai, bentang alam dan sebagainya, tidak akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata kecuali semua elemen tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. Unsur-unsur alam sebenarnya bersifat netral sampai manusia mentransformasikannya menjadi sumber daya. Dalam hal ini menurut pandangan dari ahli yakni dipaparkan sebagai berikut :

“Natural resources are defined by human perception and attitudes wants, technological skills, legal, financial and institutional arrangement, as well as by political system, Resources are subjective, relative and functional” (Mitchell, 1989 dalam Fennel 1999:67 dan Wilkinson, 1998 : 43).

Namun terkait dengan adanya sumber daya alam dalam pariwisata hal ini juga disebutkan oleh Damanik dan Weber (2006:2), sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah :



Tabel 15. Daftar Pengembangan Sumber Daya Alam sebagai Pariwisata

**SUMBER DAYA ALAM YANG DIKEMBANGKAN UNTUK MENJADI ATRAKSI
WISATA ALAM MENURUT DAMANIK DAN WEBER (2006:2)**

No.	SUMBER DAYA ALAM YANG DAPAT DI KEMBANGKAN.
1.	Keajaiban dan keindahan alam (topografi)
2.	Keragaman flora
3.	Keragaman fauna
4.	Kehidupan satwa liar
5.	Vegetasi alam
6.	Ekosistem yang belum terjamah manusia
7.	Rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun dan pantai)
8.	Lintas alam (trekking, rafting dan lain- lain)
9.	Objek Megalitik
10.	Suhu dan Kelembapan udara yang nyaman
11.	Curah hujan yang normal dan lain sebagainya

Sumber : DAMANIK DAN WEBER (2006:2), dalam Buku Pengantar Ilmu

Pariwisata

Sedangkan menurut Fennel (1999:68) bahwa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Daftar faktor pendorong dalam Pengembangan Pariwisata

No.	Sumber Daya	Uraian Penjelasan
	Alam	
1.	Lokasi Geografis	Hal ini bahwa menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok untuk di kembangkan atraksi wisata air es.
2.	Iklim dan cuaca	Ditentukan oleh <i>latitude</i> dan <i>elevation</i> diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin dan sebagainya
3.	Topografi dan Landforms	Bentuk umum dari permukaan bumi (topografi) dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik (landform). Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah/benua dengan wilayah/benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata.
4.	Surface Materials	Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak dan sebagainya yang sangat unik dan menarik



		sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi alam.
5.	Air	Air memegang peran penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, sungai dan sebagainya (sailing, cruises, fishing, snorkeling dan sebagainya)
6.	Vegetasi	Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam/hutan lindung.
7.	Fauna	Beragam binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi (misalnya wisata berburu dan mancing) maupun non konsumsi (misalnya <i>birdwarching</i>)

Sumber : *Pengantar Ilmu Pariwisata*

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah sebagai sumber yang sangat berperan untuk melakukan dalam hal pengelolaan pariwisata yang ada di suatu daerah. Sumber daya manusia adalah sebagai sumber yang sangat penting karena di sinilah sumber daya manusia dibutuhkan terutama dari kekuatan fisik dan fikiran dalam hal mengembangkan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam sebuah pariwisata, McIntosh, et al (1995: 54-65), memberikan gambaran atas berbagai peluang karier dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel dan

sebagainya. Secara garis besar bahwa karier yang bisa ditekuni di sektor pariwisata yakni sebagai berikut :

Tabel 17. Daftar Peluang Karir dalam Sektor Pariwisata

PELUANG KARIER DALAM SEKTOR PARIWISATA

No.	PELUANG KARIER	PENJELASAN
1.	Airlines (maskapai penerbangan)	Merupakan sebagai salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah yang paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai dengan level manajer. Contohnya agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makanan dan minuman pesawat (catering), pemasaran, ahli komputer, staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam sampai dengan tenaga pembersih (<i>cleaning services</i>) dan sebagainya.
2.	Bus Companies	Memerlukan adanya suatu manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen



		pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus staf pelatihan, administrasi, akuntansi dan sebagainya.
3.	Cruise Companies	Peluang karier terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntansi dan sebagainya.
4.	Railroad	Diperlukan adanya suatu tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional/wilayah dan sebagainya.
5.	Rental car companies	Agen penjualan/reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi, administrasi, pelatihan, manajer wilayah/regional dan sebagainya.
6.	Hotel, motel dan resort.	Memerlukan tenaga general manager, resident manager, controller, akuntan, management trainee, direktur penjualan, direktur riset direktur SDM, room clerk, reservasi clerk, front offices manager, housekeeper,



		bellboy, lobby porter, washer, waiter, bartender, engineer dan seterusnya.
7.	Travel agencies	Tenaga administrasi, penasehat travel, peneliti, pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer dan seterusnya.
8.	Tour Companies	Tenaga tour manager, tour coordinator, tour planner, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, group tour specialist, hotel coordinator dan sebagainya.
9.	Food services	Tenaga <i>waiter</i> dan <i>waitress</i> , <i>chef</i> , <i>cooks</i> , <i>bartender</i> ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan, pemasaran, kasir dan seterusnya.
10.	Tourism education	Memerlukan adanya suatu tenaga administrasi, pengajar, professor, dosen, guru, peneliti, litbang, pemasaran dan seterusnya
11.	Tourism research	Memerlukan adanya tenaga analisis untuk melakukan riset pasar, survai konsumen dan tenaga peneliti di masing-masing seperti adanya tenaga libang di airlines departemen pariwisata dan sebagainya.



12.	Tourism Journalism	Misalnya sebagai editor, staf penulis, humas, public speaking, kampanye perusahaan, dan sebagainya
13.	Recreation and leisure	Misalnya direktur aktivitas, <i>ski instructor</i> , penjaga taman wisata, <i>museum guide</i> , tenaga penjaga hutan, <i>camping director</i> , <i>lifeguards</i> , <i>golf and tennis instructor</i> , manajemen, <i>supervisory</i> , <i>clerk</i> , administrasi dan sebagainya.
14.	Attractions	Atraksi wisata seperti halnya Sea World, Disney Land dan yang lainnya memerlukan adanya tenaga mulai dari klerikal sampai dengan top manager, akuntan, pemandu, trainer, tenaga keamanan, reservasi, agen penjualan tiket dan sebagainya.
15.	Tourist Offices and information centre	Peluang kariernya misalnya sebagai direktur, asisten direktur, economic development specialist, analis, peneliti, humas, marketing coordinator, travel editor, media coordinator, photographer, administrasi dan sebagainya.
16.	Conventions and visitors bureaus	Memerlukan adanya tenaga manajer,



		asisten manajer, riset, pemasaran, information specialist, marketing manager, humas, sales, sekretaris, clerk, keamanan, transportasi dan sebagainya.
17.	Meeting planners	Bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan suatu pertemuan.
18.	Gaming	Memerlukan tenaga manajerial, humas, pemasaran, promosi, reservasi, akuntan, pengamanan dan sebagainya.
19.	Other opportunities	Seperti halnya club management, percetakan dan penertiban, asosiasi profesional dan sebagainya.

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata

C. SUMBER DAYA BUDAYA

Budaya adalah merupakan sebagai sumber daya yang menggambarkan bagaimana suatu kebiasaan hidup terutama masyarakat lokal yang ada di sekitar. Hal ini bahwa terkait dengan suatu kebiasaan hidup yang dipraktekkan oleh banyak orang terutama masyarakat yang ada di daerah dan merupakan menjadi hal yang penting untuk halnya di kenal oleh masyarakat terutama masyarakat asli daerah itu sendiri. Hal ini bahwa dengan adanya suatu kebiasaan yang ada di masyarakat lokal akan menjadi suatu hal yang akan dikenal banyak orang terutama dari para wisatawan baik wisatawan asli daerah maupun wisatawan asing yang merupakan sebagai pengunjung yang ada di tempat wisata tersebut. Istilah budaya bukan

hanya merujuk pada sastra dan seni, tetapi juga pada keseluruhan cara hidup yang dipraktikkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang di transmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Serta mencakup pengertian yang lebih luas dari *lifestyle* dan *folk heritage*. Jenis pariwisata budaya memberikan adanya suatu variasi yang luas, menyangkut budaya mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia dan cara hidup yang lain. Sumber budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit dan sebagainya.
3. Seni pertunjukkan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival dan even khusus lainnya.
4. Peninggalan keagamaan seperti halnya pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya.
5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja dan sistem kehidupan setempat.
6. Perjalanan (trekking) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cekar dan sebagainya)
7. Mencoba kuliner (masakan setempat).Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan dan menyantapnya merupakan sebagai atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.

D. SUMBER DAYA PARIWISATA MINAT KHUSUS

Salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesialisasi pasar pariwisata adalah karena adanya suatu kecenderungan wisatawan dengan minat khusus baik dalam jumlah wisatawan maupun area minatnya. Pariwisata dengan minat khusus ini diperkirakan akan menjadi suatu *trend* perkembangan pariwisata ke depan sebab calon wisatawan telah menginginkan adanya jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi suatu kebutuhan spesifik wisatawan. Jenis-jenis sumber

daya pariwisata minat khusus yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklasifikasikan sebagaimana dalam tabel yakni sebagai berikut :

Tabel 18.Sumber Daya Pariwisata Minat Khusus

SUMBER DAYA PARIWISATA MINAT KHUSUS

NO.	Klasifikasi	Contoh
1.	Active adventure (petualangan aktif)	<ul style="list-style-type: none"> • Caving • Parachute jumping • Trekking • Off-road adventure • Mountain climbing
2.	Natural and wildlife	<ul style="list-style-type: none"> • Birdwarching • Ecotourism • Geology • National parks • Rainforest
3.	Affinity	<ul style="list-style-type: none"> • Artist's workshop • Senior tour • Tour for the handicapped
4.	Romance	<ul style="list-style-type: none"> • Honeymoon • Island vacation • Nighlife • Single tour • Hot spring
5.	Family	<ul style="list-style-type: none"> • Amusemen park



		<ul style="list-style-type: none"> • Camping • Shopping trips • Whalewatching
6.	Soft adventure	<ul style="list-style-type: none"> • Backpacking • Bicycle touring • Canoeing/kayaking • Scuba diving/snorkelling • Walking tours
7.	History/culture	<ul style="list-style-type: none"> • Agriculture • Art/architecture • Art festival • Film/film history
8.	Hobby	<ul style="list-style-type: none"> • Antique • Beer festival • Craft tour • Gambling • Videography tour
9.	Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Pilgrimage/mytology • Religion/spiritual • Yiga and spiritual tours
10.	Sports	<ul style="list-style-type: none"> • Basketball • Car racing • Olympic games • Soccer



Sumber : *Pengantar Ilmu Pariwisata*

3. PENGELOLAAN PARIWISATA

A. PENGERTIAN MANAJEMEN

Manajemen adalah suatu aktivitas untuk melakukan pengelolaan terhadap potensi sumber daya yang ada di sekitar dalam hal untuk meningkatkan adanya suatu nilai ekonomis dari pengelolaan tersebut serta juga meningkatkan adanya suatu efisien dan efektivitas dari kegiatan pengelolaan suatu lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Leipher (1990:256) adalah merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 22. Fungsi-fungsi dalam Manajemen



B. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN PARIWISATA



Dalam kegiatan suatu pariwisata haruslah adanya suatu prinsip yang diterapkan agar suatu pariwisata tersebut dapat berlanjut. Termasuk dalam hal prinsip keseimbangan dalam hal melakukan pengelolaan terhadap wisata sangat dibutuhkan dalam hal untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga lingkungan sekitar agar dapat terus meningkatkan kualitas ekosistem yang ada di sekitaran lingkungan tempat wisata. Prinsip-prinsip keseimbangan yang perlu mendapat suatu perhatian adalah sebagai berikut (Liu, 1994: 10-11, Buckley, 2004:5-13) :

1. Pembangunan Versus Konservasi

Pariwisata tidak hanya mengangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi obyek wisata, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi suatu faktor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata.

2. Penawaran versus permintaan

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Penawaran mewakili adanya produk pariwisata, seperti halnya taman wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana rekreasi, aktivitas budaya dan sebagainya. Sedangkan permintaan mengacu kepada pasar pariwisata yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang akan berwisata, di mana mereka akan menginap, berapa uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan



permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata.

Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa masalah masa yang akan datang.

3. Keuntungan Versus Biaya

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada suatu keseimbangan dalam distribusi keuntungan (benefit) dan biaya (cost), hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri (economically self-sufficient) perlu di susun adanya suatu kebijakan finansial dan fiskal yang wajar dan di samping itu memperhatikan adanya faktor non ekonomi seperti halnya biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan.

4. Manusia versus lingkungan

Tantangan pengelolaan pariwisata adalah mencari keseimbangan antara *traditional ways* dengan *modern practices*. Di beberapa kawasan wisata, penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan adanya suatu metode konservasi dalam hal mengelola sumber daya yang dimilikinya. Keberadaan pariwisata di sini adalah sebagai suatu penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan adanya metode untuk mengelola suatu lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang dan sebagainya. Melalui adanya suatu proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan kebiasaan



komunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti halnya pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang, dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta adanya praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian perlu diakui.

C. FUNGSI-FUNGSI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA

Secara lebih detail, Liu (1994:6) dan Western (1993:9) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut :

Tabel 19. Fungsi-fungsi dalam Pengelolaan Pariwisata Strategis

FUNGSI-FUNGSI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA STRATEGIS

No.	FUNGSI-FUNGSI	URAIAN PENJELASAN
1.	Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.	Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya



		alam dan lingkungan.
2.	Keberlanjutan ekonomi	<p>Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang menguras adanya devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan produk ekspor yang tidak lari ke mana-mana yang merupakan menjadi sumber devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.</p>
3.	Peningkatan integritas budaya	<p>Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun maka lambat laun akan</p>



		ditinggalkan.
4.	Nilai pendidikan dan pembelajaran	Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan suatu pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman tata nilai (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

Sumber : Dalam buku *Pengantar Ilmu Pariwisata*

Terkait dengan adanya manajemen pariwisata bahwa menurut Richardson dan Flucker (2004:178) yang harus dicakup dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep *value tourism* yang diluncurkan pada tahun 1995 oleh The Pacific Asia Travel Association (PATA) yakni sebagai berikut :

- I. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan)
- II. Meningkatkan adanya kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional negara yang bersangkutan.
- III. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan
- IV. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata.
- V. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Dalam hal untuk melakukan pengelolaan terhadap sektor pariwisata yang ada di dalam negeri, bahwa memang perlu adanya *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk

mengelola sektor pariwisata dalam hal meningkatkan kontribusi dari sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Terkait dengan pemangku kepentingan yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Gambar 23. Stakeholder dalam Pariwisata



Dalam hal ini bahwa terkait dengan adanya suatu upaya untuk melakukan manajemen pariwisata, bahwa dinyatakan oleh Bramwell dan Lane (2004 dalam Cater, 2003:44) ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari pelibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) ini yaitu sebagai berikut :

- 1. Pelibatan beragam *stakeholder*/ pemangku kepentingan termasuk dari kepentingan non ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.**
- 2. Keterlibatan stakeholder dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya**



pendekatan integratif dan holistik proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership* juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas yang lainnya.

3. Beragamnya *stakeholder* yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi juga memicu suatu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

4. Partisipasi yang luas dalam hal pembuatan suatu kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasikan pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building* dan *skill acquisition* bagi mereka yang diwakili.

D. METODE PENGELOLAAN PARIWISATA

Berdasarkan WTO (dalam Richardson dan Fluker, 2004:183) bahwa metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut :

Tabel 20. Metode dalam Pengelolaan Pariwisata

METODE-METODE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA

No.	METODE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA	URAIAN PENJELASAN
1.	Pengkonsultasian dengan semua kepentingan	Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, peninjauan dan survay, konsultasi kebijakan dengan



		beragam kelompok kepentingan dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai dengan subjek yang ditentukan.
2.	Pengidentifikasian isu	Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata, misalnya penyebaran dan ketimpangan pendapatan antar wilayah : pembangunan infrastruktur termasuk juga dengan transportasi, akomodasi, dan atraksi; investasi termasuk akses kepada modal dan investasi asing; kompetisi internasional dan pemantauan pasar; promosi pariwisata; riset dan statistik pariwisata; pendidikan dan pelatihan pariwisata; dampak pariwisata; regulasi pemerintah; pajak; hubungan industrial dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat khusus (MICE, pariwisata pedesaan, <i>cruise shipping</i> , ekowisata dan sebagainya)
3.	Penyusunan kebijakan	Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak



		<p>langsung dengan pariwisata. Kebijakan terkait dengan adanya pariwisata adalah upaya untuk mewujudkan visi dan misi dalam pembangunan pariwisata.</p>
4.	Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus	<p>Agen ini bertujuan untuk menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah sebagai tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan riset pasar, penawaran daerah tujuan wisata dan mendorong adanya suatu pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.</p>
5.	Penyediaan fasilitas dan operasi	<p>Hal ini terutama berkaitan dengan di mana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberikan modal usaha, pemberian subsidi kepada hal fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penerima keberhasilan pembangunan pariwisata.</p>
6.	Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi dan lingkungan sosial yang kondusif	<p>Hal ini diperlukan sebagai persyaratan bagi organisasi/perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan.</p>
7.	Penyelesaian konflik kepentingan	<p>Hal ini merupakan sebagai peran yang</p>



dalam masyarakat	sulit, tetapi menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era di mana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Pengantar Ilmu Pariwisata

E. MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA

Terkait dengan pengelolaan pariwisata bahwa kegiatan manajemen tersebut memang harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya termasuk yang paling penting adalah faktor lingkungan yang merupakan sebagai faktor penting di lingkungan tempat dalam hal berwisata. Hal ini bahwa terkait dengan upaya untuk melakukan manajemen pariwisata dibutuhkan adanya pendekatan-pendekatan dan model-model yang cocok dan sesuai dengan kondisi lapangan sebagaimana mestinya suatu model pengelolaan pariwisata yang seharusnya dipakai. Namun terkait dengan pelaksanaan strategi manajemen sumber daya manusia bahwa di sini dikatakan menurut Liu (1994:45), bahwa harus memerhatikan prinsip-prinsip yakni sebagai berikut :

Tabel 21. Prinsip-prinsip dalam Penerapan Strategi Manajemen Sumber Daya

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA

PRINSIP-PRINSIP DALAM STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA	URAIAN PENJELASAN DALAM PRINSIP
1. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (renewable resources)	Pemakaian sumber daya yang dapat diperbaharui, misalnya energi matahari, pemanfaatan ikan dan sumber daya laut yang tidak langka dan tidak di larang dan sebagainya, perlu mendapat perhatian



	lebih karena sudah semakin terbatasnya sumber daya yang tersedia.
2. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan (multiple uses)	Pemakaian sumber daya untuk berbagai kepentingan, yang bisa berjalan bersamaan. Misalnya sumber daya pantai dan kawasan pesisir dapat dijadikan kawasan budidaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan sekaligus sebagai tempat rekreasi pantai dan perairan. Pemanfaatan bendungan irigasi untuk pertanian, olahraga, perikanan, pembangkit tenaga listrik, wisata dan sebagainya.
3. Daerah zona (designated areas/zonasi)	Pembatasan kawasan tertentu (core areas) dan kawasan pembatas (corridor areas) dalam rangka meminimalisasi dampak terhadap lingkungan secara keseluruhan. Pembagian kawasan harus jelas dengan peruntukan masing-masing
4. Konservasi dan preservasi sumber daya (conservation and preservation of resources)	Perlindungan dan pelestarian semua sumber daya mendekati kondisi aslinya dengan memelihara proses alaminya.

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata

Dengan mengacu prinsip-prinsip di atas maka manajemen sumber daya pariwisata harus memperhatikan hal-hal yang ada di bawah ini :

Tabel 22. Prinsip-prinsip dalam Manajemen Sumber Daya Pariwisata



PRINSIP-PRINSIP DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA PARIWISATA

PRINSIP-PRINSIP DALAM STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA PARIWISATA	URAIAN PENJELASAN PRINSIP MANAJEMEN SUMBER DAYA PARIWISATA
1. Flora dan Fauna	Flora dan fauna menjadi atraksi kunci bagi pariwisata. Keberadaan pariwisata menjadi inspirasi dan motivasi bagi komunitas lokal yang secara tradisional memanfaatkannya. Mereka bisa mengubah cara pemanfaatannya menjadi lebih bijak sekaligus di saat yang sama melakukan upaya konservasi. Pengawasan terhadap masuknya spesies baru menjadi sangat penting mengingat hal itu akan menyebabkan terganggunya suatu keseimbangan ekosistem. Spesies asing berpotensi mengancam habitat asli dan pada gilirannya akan mengancam sumber daya yang menjadi potensi utama tetap berjalannya pariwisata.
2. Sumber daya air	Upaya konservasi sumber daya air sebut sangat esensial karena sangat vital perannya dalam menunjang pengembangan pariwisata. Tanpa suplai sumber daya air tidak akan ada pengembangan pariwisata.



<p>3. Sanitasi dan Limbah</p>	<p>Kontrol terhadap pembuangan limbah sangat penting bagi kelangsungan pariwisata. Tantangannya adalah bilamana komunitas lokal secara tradisional menjadikan kawasan wisata sebagai tempat pembuangan limbah. Penting untuk mengintroduksi pendaur-ulangan dan pengelolaan limbah yang bersahabat dengan lingkungan. Sebaiknya tempat pembuangan dan pengolahan sampah diletakkan jauh dari lokasi wisata agar tidak mencemari kawasan sekitarnya.</p>
<p>4. Kualitas udara</p>	<p>Kondisi udara yang bebas polusi adalah sebagai salah satunya. Industri yang berpotensi sebagai sumber polusi udara sebaiknya dipisahkan jauh-jauh dari lokasi wisata. Demikian juga pembuangan sampah yang menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan hendaknya tidak terletak terlalu dekat dengan kawasan wisata.</p>
<p>5. Kawasan pesisir dan pantai</p>	<p>Salah satu atraksi menarik dari ekowisata pantai dan rekreasi perairan adalah kawasan pesisirnya. Konfirugasi karang, hutan bakau, batu pantai, rumput dan perdu pantai, sangat menarik bagi wisatawan tetapi keberadaannya</p>



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository

	<p>sangat rawan. Pembuatan program konservasi dan aturan pemanfaatan menjadi sangat penting. Pengelolaannya harus melibatkan komunitas lokal karena mereka yang bersentuhan langsung dengan sumber daya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Komunitas lokal harus dilibatkan mulai dari perencanaan pemanfaatan kawasan pesisir sampai tahap pengawasannya.</p>
<p>6. <i>Zoning</i></p>	<p>Begitu tekanan pemanfaatan kawasan pesisir dan pantai untuk rekreasi perairan meningkat, keberadaan manajemen pemanfaatan sumber daya perairan menjadi sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya suatu konflik. Misalnya <i>jet ski</i> dan <i>boat</i> kecil sering berada di atas tertumbu karang di perairan dangkal yang dapat merusak ekosistem pantai. Kerusakan umumnya terjadi jika air laut surut sehingga kapal dapat kontak dengan terumbu karang dan tumbuhan laut.</p> <p>Zona pemanfaatan kawasan perairan sangatlah penting untuk menghindari adanya konflik pemakaian di masa yang akan datang. Menurut Thompson dan Foster (2003), bahwa Biosphere dapat dibagi menjadi empat</p>

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository



	<p>zona berkaitan dengan aktivitas manusia yakni sebagai berikut :</p> <p>a. Core Area. Di tandai dengan proteksi yang sangat ketat yang melarang pemakaian tanah untuk tujuan apapun. Tujuannya adalah untuk menjamin keanekaragaman biologi dan sumber daya alam untuk tujuan dan kepentingan regional, nasional dan internasional.</p> <p>b. Buffer area. Kawasan ini dapat dimanfaatkan. Tujuannya adalah konservasi kawasan dengan pola pemanfaatan tradisional dan unik yang telah berlangsung berabad-abad.</p> <p>c. Transitions area. Kawasan ini merupakan sebagai kawasan yang bisa dimanfaatkan menjadi suatu kawasan ekonomi tetapi tetap harus diletakkan dalam kerangka pemanfaatan kawasan secara lestari.</p> <p>d. Rehabilitation area. Kawasan ini merupakan kawasan yang mengalami adanya kerusakan berat yang perlu mendapatkan penanganan dan regenerasi.</p>
<p>7. Kepedulian Lingkungan</p>	<p>Wisatawan harus diberi pemahaman untuk</p>



tetap ikut serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem dengan menghindari perbuatan yang tidak perlu. Sebaliknya atraksi harus dibangun untuk melibatkan wisatawan justru sebagai penyelamat ekosistem. Wisatawan bisa saja disuguhi film tentang kawasan konservasi sebelum memasuki kawasan wisata itu, hal-hal yang boleh dan dilarang dilakukan selama berwisata di kawasan tersebut dan pesan-pesan mendidik lainnya.

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata

4. KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA

Dalam hal merealisasikan suatu sektor sangat dibutuhkan adanya suatu kebijakan-kebijakan yang dirumuskan termasuk halnya suatu kebijakan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk dalam halnya untuk pengembangan sektor pariwisata bahwa sangat dibutuhkan adanya rancangan strategi suatu kebijakan yang sebagaimana hal tersebut untuk mengukur seberapa besar keberhasilan suatu kebijakan tersebut direalisasikan sehingga dalam hal ini juga dapat menjadikan suatu realisasi kebijakan tersebut terukur dan tercapai. Hal ini bahwa termasuk sektor pariwisata adalah menjadi suatu sektor yang penting dan merupakan sebagai suatu sektor untuk meningkatkan pendapatan negara yang merupakan hasil dari pengeluaran para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Hal ini bahwa sebuah kebijakan sangat dibutuhkan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mengembangkan sektor pariwisata agar ke depan dapat menarik para pengunjung untuk



datang ke wisata terutama di daerah yang ada di Indonesia. Termasuk dalam hal untuk keberhasilan dalam melakukan pengelolaan terhadap sektor pariwisata bahwa keberhasilan suatu pengelolaan tersebut di ukur dari suatu kebijakan yang dibuat terutama oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Termasuk kebijakan dalam hal sektor pariwisata merupakan sebagai suatu kebijakan yang sangat penting terutama menjadi sektor yang sangat potensial termasuk di negara Indonesia, sehingga dalam hal ini bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan harus benar-benar dipertimbangkan dan juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Terkait dengan suatu kebijakan (policy), adalah merupakan sebagai suatu arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai adanya tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun adanya suatu tindakan dari para pelaksana, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan dalam mewujudkan suatu harapan yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan terkait dengan sebuah kebijakan pariwisata dalam hal ini dijelaskan oleh pendapat ahli yakni menurut (Akehurst, 1992) bahwa dijelaskan suatu kebijakan pariwisata jauh lebih detail yakni sebagai berikut :

“A Strategy for development of the tourism sector, that establishes objectives and guidelines as a basis for what needs to be done. This placing in a community context the roles on national governments, national tourist organization, local government and private sector bussines, establishing possible co-ordination and implementation of agreed programmes to solve indentified problems with monitoring and evaluations of these programs” (Akehurst, 1992)

Namun terkait dengan adanya suatu kebijakan pariwisata bahwa hal ini dijelaskan oleh Fayos-Sola (1996), terkait dengan adanya perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda yaitu sebagai berikut :



Tabel 23.Paradigma Kebijakan Pariwisata

PARADIGMA KEBIJAKAN PARIWISATA

NO.	PARADIGMA KEBIJAKAN PARIWISATA	URAIAN PENJELASAN
1.	Paradigma kebijakan pariwisata massal	Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar-besarnya dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
2.	Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial	Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk halnya pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai diredefinisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.
3.	Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik)	Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran



	<p>menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan sehingga mendorong adanya hubungan simbiotik antar sektor.</p> <p>Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional seperti halnya pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi dan transportasi dalam hal untuk menuju suatu isu yang lebih holistik yang berkaitan dengan lingkungan, dampak sosial, pemerataan (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana) serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata

Merupakan sebagai suatu paradigma yang digunakan diwaktu sekarang terkait dengan upaya perumusan, implementasi hingga pada evaluasi kebijakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pemangku kepentingan dalam hal untuk mewujudkan suatu produk kebijakan yang benar-benar berkualitas dan juga mempertimbangkan banyak hal termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan juga budaya sehingga hal ini diharapkan suatu kebijakan tersebut dapat sama-sama saling menguntungkan.

5. PROSES PERENCANAAN PARIWISATA

Dalam mewujudkan suatu produk yang benar-benar maksimal dan juga terukur hal ini bahwa diawali dengan sebuah perencanaan yang benar-benar matang dan terukur



sehingga mewujudkan suatu kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Termasuk dalam halnya untuk membuat suatu rencana strategis terkait dengan kebijakan pariwisata bahwa hal ini sangat dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang matang dan terukur dan sesuai dengan realitas yang ada di lapangan sehingga hal ini bahwa agar suatu pengelolaan potensi wisata yang ada di daerah benar-benar optimal. Umumnya bahwa perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan yakni sebagai berikut :

1. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki. Misalnya sebuah perhotelan yang tidak dengan tegas mengatakan kata hotel dalam misi perusahaannya tetapi “memaksimalisasi pengembalian aset dan menciptakan suatu kesejahteraan yang berkelanjutan untuk para pemegang saham”.
2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan sebagai tujuan utama organisasi, seperti halnya pengasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru. Dalam hal ini bahwa memang sangat dibutuhkan adanya kerangka waktu, menetapkan jangka pendek, dan strategi pencapaian serta tindakan yang diperlukan.
3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Kualitas keputusan suatu organisasi yang diambil sangatlah tergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. Sumber informasi mungkin berasal dari instansi pemerintah, industri atau suatu sumber yang lainnya. Pengetahuan dan informasi yang didapat harus diolah secara sistematis berdasarkan tujuan yang dicapai.
4. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan halnya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari suatu organisasi. Dalam hal ini bahwa informasi yang di kumpulkan dan dianalisis di kelompokkan menjadi 2 hal yakni sebagai berikut :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan masa kini, baik yang



<p>menyangkut organisasi itu sendiri maupun lingkungan di luar organisasi yang dapat memengaruhi adanya kehidupan organisasi.</p> <p>b. Informasi yang dapat membantu perencana memberikan adanya suatu perkiraan masa depan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT.</p>
<p>5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.</p>
<p>6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah di tentukan.</p>
<p>7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.</p>
<p>8. Mengimplementasikan rencana</p>
<p>9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan</p>

6. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA.

Dalam hal kegiatan untuk melakukan pengelolaan pariwisata, bahwa peran pemerintah sangatlah penting baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Hal ini bahwa tidak hanya masyarakat lokal dan investor saja yang bergerak untuk melakukan pengelolaan potensi wisata, namun peran dan tanggungjawab dari pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah sangat dibutuhkan apalagi peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dan juga memberikan dukungan terhadap masyarakat lokal dan investor untuk melakukan pengelolaan pariwisata yang ada di dalam negeri. Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggungjawab terhadap beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 24. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Manajemen Pariwisata

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM SEKTOR PARIWISATA



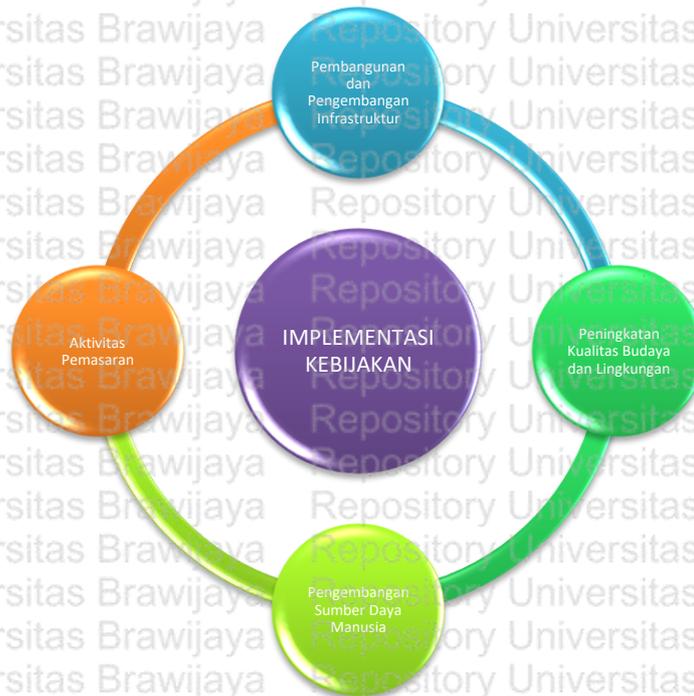
NO.	STRATEGI PEMERINTAH DALAM SEKTOR PARIWISATA
1.	Membangun kerangka (framework) operasional di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.
2.	Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
3.	Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya.
4.	Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
5.	<p>Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang di susun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya. b) Identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai adanya keunggulan komparatif dan kompetitif. c) Menentukan prasyarat dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (performance) pariwisata. d) Mengebalorasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata



Terkait dengan kerangka implementasi kebijakan pariwisata bahwa menurut Liu (1994:18) bahwa membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh empat aspek yakni sebagai berikut

Gambar 24.Aspek Kebijakan Pariwisata



Terkait dengan kerangka aspek kebijakan pariwisata yang ada di atas bahwa hal ini dapat dijabarkan yakni sebagai berikut :

Tabel 25.Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata

KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA

No.	Aspek Perencanaan	Implementasi
1.	Penentuan tujuan pembangunan pariwisata	a. Tentukan tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan faktor sosial budaya.



		<p>b. Konsultasikan tujuan tersebut kepada komunitas</p>
		<p>c. Rancang area pembangunan dan pengembangan beserta aktivitas yang diperlukan untuk memperlancar proses keberhasilannya.</p>
		<p>d. Identifikasi kepentingan secara individual dan kolektif dari pemangku kepentingan sehingga dapat diakomodasikan dalam aktivitas dan bisnis pariwisata tersebut.</p>
<p>2.</p>	<p>Inventarisasi</p>	<p>a. Lakukan survai dan analisis karakteristik kawasan pembangunan dan pengembangan termasuk lingkungan, sejarah, budaya, masyarakat, ekonomi, sumber daya, pola penguasaan dan pemilikan tanah dan perairan.</p>
		<p>b. Lakukan identifikasi dan evaluasi atraksi dan aktivitas pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.</p>



		<p>c. Lakukan identifikasi dan evaluasi sarana dan prasarana akomodasi yang tersedia dan fasilitas serta pelayanan pariwisata.</p>
		<p>d. Evaluasi atas akses transportasi ke kawasan pengembangan pariwisata termasuk halnya kondisi infrastruktur pendukungnya saat ini dan pengembangannya di masa depan.</p>
		<p>e. Review dan pastikan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan dari pemerintah setempat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama cetak biru program pengembangan pariwisata.</p>
<p>3.</p>	<p>Infrastruktur dan fasilitas</p>	<p>a. Sediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata</p>
		<p>b. Bangun mekanisme untuk membantu sektor informal membangun usaha yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan cari cara membantu mereka</p>



		agar bisa memenuhi standar baru yang ditetapkan.
7.	Pasar	<p>a. Analisis kondisi pasar pariwisata nasional dan internasional, tetapkan tujuan dan target pemasaran, analisis akomodasi, fasilitas, pelayanan yang dibutuhkan.</p> <p>b. Ketahui target pasar sehingga harapan dan tujuan realistis dan dapat diwujudkan. Target pasar harus bisa diakses oleh fasilitas komunikasi dan transportasi</p> <p>c. Bantu usaha perseorangan dengan menyediakan riset pasar yang berpotensi membantu pemasaran dan program promosi.</p>
5.	Daya dukung	<p>a. Tentukan batas ambang (carrying capacity) kawasan pengembangan pariwisata melalui adanya analisis lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.</p> <p>b. Tentukan batas standar yang dapat ditoleransi untuk aktivitas dan kegiatan ekonomi oleh operator</p>



		<p>pariwisata, termasuk di dalamnya adalah batas maksimal pengunjung dan wilayah yang dapat dijelajahi.</p>
		<p>c. Implementasikan prosedur yang dapat menentukan kapan kawasan pengembangan dan dalam kondisi mengalami kerusakan bagaimana kondisi tersebut dapat dipulihkan.</p>
6.	Pengembangan	<p>a. Buat rencana pengembangan struktur pariwisata di kawasan tersebut termasuk adanya atraksi dan aktivitas utama, pengembangannya secara regional, disertai akses dan jaringan transportasinya.</p> <p>b. Buat rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan adanya fasilitas, pelayanan dan infrastruktur yang terkait.</p> <p>c. Bantu pemodal dan pengembang lokal mengenai apa yang dibutuhkan agar memenuhi adanya suatu kelayakan menurut standar yang ditentukan.</p> <p>d. Buat rencana kontingensi untuk</p>



		<p>tantangan potensial di masa depan untuk menjaga stabilitas pemasaran termasuk kemungkinan pengaruh adanya bencana alam.</p>
7.	Ekonomi	<p>a. Lakukan analisis ekonomi untuk kondisi sekarang dan perkiraan masa depan dari pengembangan pariwisata.</p> <p>b. Buat strategi untuk meningkatkan keuntungan ekonomis dari kegiatan pariwisata.</p> <p>c. Pastikan manajemen finansial bekerja dengan baik sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh keuntungan, pengunjung membayar kewajibannya, penduduk lokal mendapat pembagian keuntungan secara adil</p>
8.	Lingkungan	<p>a. Evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan dan cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorongnya ke arah yang positif.</p> <p>b. Buat sinergi antara pembangunan</p>



		<p>dan pengembangan pariwisata dengan usaha konservasi lainnya, termasuk pembangunan wilayah lindung, manajemen kawasan lindung, pengelolaan limbah, energi, air, zone pesisir, terumbu karang, bencana alam dan sebagainya.</p>
9.	Budaya	<p>a. Dampak sosial budaya pariwisata, cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorong ke arah dampak positif.</p> <p>b. Berdayakan komunitas lokal sebagai pemilik dan pemangku kepentingan pariwisata dengan menerapkan manajemen yang konsisten dengan nilai lokal</p> <p>c. Buat audit sosial dalam hal bagaimana komunitas lokal, penduduk desa dan masyarakat sekitarnya dipengaruhi oleh pariwisata.</p>
10.	Standar kualitas	<p>a. Buat desain untuk pengukuran standar kualitas bagi fasilitas dan</p>



		<p>akomodasi untuk memenuhi persyaratan pariwisata.</p>
		<p>b. Lakukan penilaian standar kualitas untuk akomodasi dan fasilitas pariwisata</p>
		<p>c. Mediasi dan pacu komponen pendukung pariwisata yang belum memenuhi stgandar kualitas dengan menyediakan insentif finansial dan pajak serta akses kepada spesialis.</p>
<p>11.</p>	<p>Sumber daya manusia</p>	<p>a. Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan promosi dan degradasi jabatan serta kewirausahaan di bidang pariwisata.</p>
		<p>b. Sediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggara pariwisata termasuk halnya sertifikasi dan program pelatihan, serta transfer teknologi dan skill</p>
		<p>c. Jalankan program kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga turut berperan positif terhadap kesuksesan pariwisata.</p>



12.	Organisasi	Bangun hubungan kerjasama antara organisasi publik, swasta, dan pemerintah untuk menjamin koordinasi yang efektif.
13.	Investasi	Sediakan insentif investasi bagi pemodal luar sehingga merangsang keterlibatan investor lokal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata.
14.	Regulasi dan pengawasan	<p>a. Bangun mekanisme legislasi dan regulasi untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui adanya suatu dukungan organisasi pariwisata nasional, agen biro perjalanan, akomodasi dan sektor-sektor lain dalam pariwisata.</p> <p>b. Buat standar fasilitas, insentif investasi dan zoning.</p> <p>c. Buat prosedur penilaian dan pengawasan.</p>
15.	Sistem data dan informasi	Bangun sistem data dan informasi pariwisata secara terintegrasi untuk menjamin kontinuitas operasional yang juga berfungsi sebagai informasi pasar.



16.	Implementasi	<p>a. Identifikasi berbagai teknik untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan pariwisata</p> <p>b. Kolaborasikan dengan dunia industri dan dunia akademik untuk menjamin adanya pertanggungjawaban implementasi tersebut.</p>
-----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : di Adopsi dari Liu (1994)

7. MEKANISME KONTROL DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA

1. Regulasi

Regulasi menjadi hal yang penting dalam hal mengatur kegiatan pariwisata dalam suatu negara. Hal ini adalah menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk mengatur dan mengelola suatu kegiatan pariwisata melalui adanya suatu regulasi yang merupakan sebagai produk yang dirancang oleh pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun daerah. Menurut Goodall (1994, dalam Fennel, 1999:148), bahwa audit lingkungan pada dasarnya merupakan alat manajemen yang didesain untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah organisasi dikelola untuk menjamin suatu perlindungan terhadap lingkungan. Kebijakan pemerintah mengenai lingkungan, misalnya sebagai berikut :

1.	Kepatuhan terhadap peraturan mengenai konservasi lingkungan
2.	Penurunan atau penghilangan dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan atau aktivitas yang sedang berjalan maupun aktivitas di masa depan.
3.	Pengembangan produk yang bersahabat dengan alam dan lingkungan



4.	Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya peningkatan efisiensi dari penggunaan sumber daya, meminimalisasi limbah, penggunaan input dan peralatan yang bersahabat dengan lingkungan dan pemakaian metode pembuangan limbah yang aman.
5.	Mendorong semua pihak untuk memahami isu-isu lingkungan.

Berdasarkan kebijakan lingkungan yang digariskan oleh pemerintah, bahwa audit lingkungan yang dilakukan ditujukan untuk yakni sebagai berikut :

1.	Memastikan apakah manajemen lingkungan dari sebuah organisasi telah dilaksanakan secara memuaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2.	Memverifikasikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan tentang adanya perlindungan dan konservasi lingkungan.
3.	Memverifikasikan kepatuhan terhadap adanya kebijakan organisasi yang telah digariskan
4.	Meminimalisasi resiko akibat interaksi dengan lingkungan dan memastikan suatu perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan
5.	Mengidentifikasi dan menilai resiko akibat kesalahan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi.
6.	Menilai adanya dampak aktivitas, proses dan produk organisasi terhadap lingkungan.
7.	Memberi nasehat dan bantuan teknis kepada organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam perlindungan dan konservasi lingkungan.
8.	Me-review prosedur internal organisasi untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuannya dalam perlindungan dan konservasi lingkungan.

2. Sertifikasi, Akreditasi dan Profesionalisme

Dalam hal untuk melakukan peningkatan pengelolaan pariwisata sangat dibutuhkan adanya suatu sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga atau aktor penting dalam melakukan suatu pengelolaan terhadap wisata yang ada di berbagai daerah di dalam suatu negara. Menurut Morrison, et al (dalam Fennel,1999:152) bahwa istilah sertifikasi dan akreditasi memiliki suatu pengertian yang berbeda. Untuk sertifikasi didefinisikan yakni sebagai berikut :

“A process by which an individual is tested and evaluated in order to determine his or her mastery of a specific body of knowledge or some portion of a body of knowledge” (Morrison et al dalam Fennel, 1999:152)

Sedangkan akreditasi didefinisikan sebagai berikut :

“A Process by which an association or agency evaluates and recognises a programme of study or an institution as meeting certain predetermined standards or qualification. It applies only to institutions and their programme of study or their services” (Morrison et al dalam Fennel, 1999:152)

Intinya bahwa untuk sertifikasi adalah terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang mendorong adanya suatu profesionalisme dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan untuk akreditasi adalah terkait dengan adanya program dan institusi/kelembagaan. Terkait dengan adanya suatu sertifikasi dan akreditasi dalam program pariwisata. Bahwa dalam hal ini dijelaskan oleh

Menurut Gass dan Wiliiamson (1995, Fennel, 1999:153). Bahwa akreditasi program dalam pariwisata yaitu sebagai berikut :

Tabel 26. Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Pariwisata

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK DALAM PARIWISATA

No.	KEGIATAN POKOK DALAM	URAIAN PENJELASAN
-----	----------------------	-------------------



PARIWISATA		
1.	<i>Self-assesment and documentation stage</i> (evaluasi diri dan tahap dokumentasi)	Berkaitan dengan adanya operator pariwisata untuk melakukan suatu penilaian, evaluasi tentang organisasi dan kegiatannya berkaitan dengan petunjuk dan standar yang telah ditetapkan secara nasional oleh asosiasi di mana organisasi tersebut bernaung.
2.	<i>Verivication Stage</i> (Tahapan verivikasi)	Berupa suatu kunjungan dua sampai empat orang reviewer ke organisasi atau operator pariwisata tersebut. Reviewer melakukan adanya sesi wawancara, inspeksi dan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan, serta mengobservasi aktivitas organisasi jika memang diperlukan.
3.	<i>Follow-Up Stage</i> (tahap tindak lanjut)	Berkaitan dengan tindak lanjut hasil kegiatan dari temuan dan verivikasi sebelumnya. Hasil yang diperoleh diteruskan ke lembaga penyelenggara akreditasi yang diberi wewenang atau otorisasi untuk menilai dan memutuskan apakah



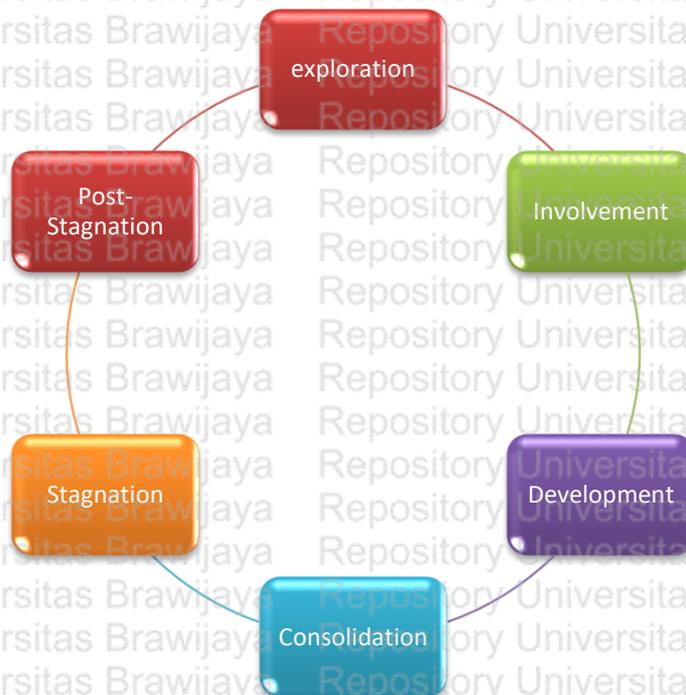
	sebuah program yang diteliti mendapat suatu akreditasi atau tidak.
--	--------------------------------------------------------------------

Sumber ; Pengantar Ilmu Pariwisata

8. SIKLUS HIDUP DESTINASI

Dalam hal suatu destinasi pasti akan adanya suatu siklus yang sebagaimana hal tersebut berputar seiring dengan adanya perkembangan dan perjalanan waktu. Hal ini bahwa sebenarnya destinasi sangat membutuhkan adanya waktu untuk memenuhi tahap-tahap perkembangan dan seiring dengan berkembangnya waktu hal tersebut akan terus berjalan dan berkembang. Siklus Hidup Destinasi (Destination Lifecycle Model) jika digambarkan terdiri dari beberapa *stage* atau tahap yang akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 25. Siklus Destinasi Pariwisata



Dalam hal ini bahwa jika dijelaskan yakni sebagai berikut :

Tabel 27. Penjelasan Tahapan Destinasi Wisata



NO.	Tahapan Siklus	Uraian Penjelasan
1.	Exploration	Kunjungan terbatas dan sporadic dari orang yang berpetualang. Terjadi suatu kontak yang intensif dengan penduduk lokal dan menggunakan fasilitas yang dimiliki dengan penduduk dengan dampak sosial dan ekonomi yang sangat kecil.
2.	Involvement	Meningkatnya pengunjung yang mendorong penduduk lokal menawarkan fasilitas secara eksklusif kepada pengunjung. Kontak dengan penduduk lokal tetap tinggi dan beberapa dari mereka mulai menyesuaikan pola sosialnya untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi akibat keberadaan wisatawan. Promosi destinasi wisata mulai diinisiasi.
3.	Development	Investor luar mulai tertarik untuk menanamkan modalnya guna membangun berbagai fasilitas pariwisata di destinasi tersebut seiring dengan berkembangnya pemasaran destinasi. Aksesibilitas mengalami perbaikan <i>advertising</i> semakin intensif dan fasilitas lokal mulai diisi dengan fasilitas modern dan terbaru. Hasilnya adalah semakin menurunnya partisipasi dan kontrol penduduk lokal. Atraksi buatan mulai muncul, khusus diperuntukkan wisatawan. Tenaga kerja dan fasilitas import mulai dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang begitu cepat.
4.	Consolidation	Porsi terbesar dari ekonomi lokal berhubungan dan bersumber dari pariwisata. Level kunjungan tetap meningkat namun dengan rata-rata kenaikan yang semakin menurun. Usaha pemasaran yang semakin diperluas untuk menarik wisatawan yang bertempat tinggal semakin jauh dari sebelumnya. Fasilitas yang sudah tua sekarang



		menjadi ketinggalan jaman dan kurang diminati.
5.	Stagnasi	Kapasitas maksimal dari faktor penunjang telah mencapai batas maksimum atau terlampaui, menyebabkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Jumlah puncak kunjungan wisata tercapai. Atraksi buatan menggantikan atraksi alam dan budaya dan destinasi tidak lagi dianggap menarik.
6.	Post stagnation	
	Decline	Wisatawan tertarik dengan destinasi lain yang baru. Fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non-pariwisata. Atraksi wisata menjadi semakin kurang menarik dan fasilitas pariwisata menjadi kurang bermanfaat. Keterlibatan masyarakat lokal mungkin meningkat seiring penurunan harga fasilitas pariwisata dan penurunan pasar wisatawan. Daerah destinasi menjadi terdegradasi kualitasnya, kumuh dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penunjang aktivitas pariwisata.
	Rejuvenation	Terjadi perubahan dramatis dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Terjadi halnya penciptaan seperangkat atraksi wisata artifisial baru atau penggunaan sumber daya alam yang tidak tereksplorasi sebelumnya.

Sumber :Butler (1980, dalam Richardson dan Fluker, 2004 :53)

Namun terkait dengan pengembangan destinasi bahwa terdapat beberapa peluang/kesempatan dalam hal untuk melakukan pengembangan terhadap destinasi dalam suatu daerah yang dilakukan oleh *stakeholder*/pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan yang ada pada potensi wisata tersebut.



Tabel 28. Peluang Pengembangan Destinasi Wisata

PELUANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

NO.	Setting Destinasi	Deskripsi Peluang Pengembangan
1.	Primitive	Bagian terpencil dan terisolasi dari sebuah wilayah (misalnya area konservasi). Daerah ini secara alami, terbentuk oleh proses ekologis, tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan dan ekosistem alam mendominasi setting dan mengontrol adanya pengalaman rekreasi/wisata pengunjung. Cocok bagi wisatawan yang menginginkan wisata alam, pemandangan alami, isolasi, ketidakpastian, beresiko dan petualangan. Kemampuan hidup di hutan dan alam sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan berekreasi/berwisata.
2.	Semi-Primitive	Terdapat adanya jalan setapak dan non-permanen yang tidak mudah dilalui yang menembus adanya kawasan (misal hutan konservasi). Beberapa bagian kawasan terlarang bagi atau tidak dapat diakses dengan kendaraan bermotor, tetapi kuda dan sepeda dayung diperbolehkan. Tingkat resiko dan isolasi cukup besar karena larangan penggunaan kendaraan bermotor. Fasilitas penunjang tidak tersedia bagi kepuasan dan kenyamanan pengunjung tetapi sangat tergantung pada kemampuan individu untuk mencapainya.
3.	<i>Roaded natural</i>	Sepanjang atau dekat kawasan pengembangan/konservasi jalan dapat ditemukan. Umumnya dibuat dengan memodifikasi sebagian kawasan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Pembangunan dibatasi hanya untuk jalan, rel kereta api



		<p>dan beberapa rumah pengawas. Lingkungan alam masih mendominasi, walaupun beberapa kegiatan seperti halnya pembibitan dan pengelolaan kehidupan luar diijinkan. Regulasi dan kontak dengan dunia luar sudah ada. Keperluan sehari-hari tidak tersedia sehingga orang harus memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Peluang pendakian, penjelajahan kawasan, bersepeda dan <i>camping</i> dapat dilakukan di bawah adanya pengawasan. Dibangun adanya fasilitas wisata dengan <i>campground</i>, <i>Picnicground</i> dan <i>visitor information center</i> dan sebagainya dalam setting ini.</p>
4.	Rural	<p>Setting ini berupa pertanian dengan peternakan, lahan terbuka komunitas kecil, fasilitas komersial, lahan <i>campground</i> yang luas. Mudah menemukan pengunjung lain dalam bagian lain kawasan. Area ini menyediakan lokasi untuk <i>hiking</i> yang nyaman, <i>camping</i> dan <i>cross</i> dekat dengan toko yang menjual keperluan sehari-hari serta pom bensin.</p>
5.	Urban	<p>Setting ini mungkin di mana kita hidup. Terdapat begitu banyak bangunan, jalan telah diaspal atau dibeton dan begitu banyak orang di kawasan tersebut. <i>Hiking</i> dan jalur sepeda yang melewati taman kota merupakan sebagai contoh peluang rekreasi/wisata dalam setting urban ini.</p>

Sumber : Pengantar Ilmu Pariwisata



BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam hal ini data penelitian dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, serta dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini bahwa sebenarnya terkait dengan penelitian yang digunakan tergantung dari kebutuhan penelitian itu sendiri dan juga berdasarkan adanya obyektifitas dalam hal kegiatan penelitian.

Terkait dengan kegiatan penelitian yang dilakukan bahwa topik penelitian ini menggunakan rencana strategi kebijakan sebagai instrumen utama terkait bagaimana strategi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Yang kedua bahwa selain renstra atau rencana strategi pemerintah daerah yakni adanya rencana strategis perangkat desa dan juga masyarakat dalam hal mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan sebagaimana dijelaskan yaitu kualitatif atau biasa juga dikenal dengan penelitian kualitatif format deskriptif. Terkait dalam hal penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai suatu hal untuk melihat fenomena persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan serta melakukan adanya penjelasan-penjelasan terhadap persoalan yang ditemukan dari lapangan. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif merupakan suatu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu mengenai keadaan serta gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89, diambil dari penelitian skripsi Said Muhammad Zulfitri).



Penelitian Kualitatif sendiri menurut Moleong merupakan sebagai penelitian yang berupaya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik melalui cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong,2007:6, diambil dari penelitian skripsi Said Muhammad Zulfitri). Williams (1995) dalam Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007:5).

B. Fokus Penelitian.

Terkait dengan fokus penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Pengelolaan wisata Pantai Soro sebagai *tourism place new* di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh stakeholder seperti halnya warga desa Ngrejo dan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Kabupaten :

- a. Rencana strategi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan wisata Pantai Soro sebagai wisata baru di Kabupaten Tulungagung.
- b. Strategi kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan adanya pengembangan wisata Pantai Soro sebagai tempat wisata baru di Kabupaten Tulungagung.
- c. Strategi pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pengembangan wisata Pantai Soro sebagai wisata baru di Kabupaten Tulungagung.

Masyarakat Desa Ngrejo :



a. Inisiatif masyarakat dalam hal melakukan pengembangan wisata Pantai Sioro di Kabupaten Tulungagung sebagai kegiatan perekonomian lokal.

b. Strategi pelaksanaan masyarakat Desa Ngrejo dalam hal pengembangan wisata Pantai Sioro di Kabupaten Tulungagung.

2. Alternatif-alternatif dan inovasi ke depan dari masyarakat desa Ngrejo dan pemerintah daerah dalam hal pengembangan wisata Sioro sebagai tempat wisata baru di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

C. Lokasi dan Situs Kegiatan Penelitian

Untuk lokasi kegiatan penelitian :

1. Dalam skala makro : Kabupaten Tulungagung
2. Dalam skala mikro : Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

Penelitian situs untuk kegiatan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung , selaku instansi atau pihak yang mengelola wisata Kabupaten Tulungagung.
2. Masyarakat Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
3. Kantor Kepala Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.
4. Pantai Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung



D. SUMBER DATA

Tabel 29. Sumber Data Penelitian

<u>NO.</u>	<u>JENIS DATA</u>	<u>VARIABEL</u>	<u>SUMBER DATA</u>
1.	Data primer	Strategi kebijakan pemerintahan kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan wisata pantai Sioro sebagai pantai baru.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
		peran masyarakat dalam pengembangan wisata pantai sioro di Desa Ngrejo.	2. Masyarakat Desa Ngrejo.
		Penilaian dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.	3. Wisatawan Pantai Sioro.
2.	Data sekunder	1. Potensi wisata di Kabupaten Tulungagung	Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung
		2. Jumlah pengunjung wisatawan manca negara di Indonesia (makro)	Badan Pusat Statistik Nasional
		3. Produk Domestik Bruto Satelit Pariwisata Nasional.	Kementerian Pariwisata
		4. Sasaran pertumbuhan pariwisata nasional	Badan Perencanaan Pembangunan



			Nasional (Deputi Ekonomi)
--	--	--	------------------------------

Sumber : Di olah oleh Penulis

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Interview/ wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti membutuhkan informasi-informasi yang mendalam dari pihak responden, dalam hal ini jumlah responden relatif lebih sedikit. Sutrisno Hadi (1986) menyatakan bahwa dalam menggunakan metode interview dan juga kuisioner peneliti perlu memegang anggapan bahwa apa yang dinyatakan oleh responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, dan interpretasi subyek tentang pertanyaan dari peneliti keppada responden adalah sama dengan maksud peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data atau informasi berupa catatan atau tulisan, maupun laporan. Selain mengambil informasi berupa catatan dan laporan yang diambil dari instansi terkait, dokumentasi yang dilakukan adalah mengambil data-data yang telah di olah baik dari Dinas terkait maupun juga Lembaga Statistik seperti halnya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga melakukan dokumentasi dengan menggunakan media video yang melakukan dokumentasi terhadap obyek yang ada di lapangan sebagai bahan bukti yang mungkin akan dipaparkan serta sebagai bahan analisis nantinya. Data yang ada dalam dokumen lebih bersifat pada data masa lalu, sehingga dalam hal ini akan dicantumkan mengenai informasi tentang hal-hal yang pernah terjadi atau dilakukan pada masa silam, ini



dibutuhkan sebagai bahan analisis dan juga sebagai patokan dalam menganalisis terhadap rencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh institusi tempat penelitian.

3. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan sebagai pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki (Kusuma, 1987:25 diambil dari penelitian skripsi Said Muhammad Zulfitri). Definisi lainnya adalah bahwa observasi merupakan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir, 2012:37 diambil dari penelitian skripsi Said Muhammad Zulfitri). Terkait dengan penjelasan kegiatan observasi adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengamati, menyelidiki dan melihat secara kasat mata terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan serta suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok, individu dan sebagainya sebagai obyek untuk diteliti dan diselidiki.

Pada penelitian ini, bahwa observasi lapangan dilakukan langsung pada obyek wisata Pantai Sioro yang merupakan sebagai pantai baru yang tepatnya di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini bahwa observasi yang dilakukan untuk meneliti dan menyelidiki dari 3 aspek yang akan dipaparkan nantinya yakni :

- a. Aspek sosial yang merupakan bagaimana kegiatan masyarakat di desa Ngrejo,
- b. Aspek ekonomi yakni nilai ekonomis yang didapat dari pengelolaan potensi lokal
- c. Aspek lingkungan yakni terkait dengan keadaan ekologis yang ada di sekitaran pesisir Pantai Sioro Desa Ngrejo Kecamatan Tanggung Gunung Kabupaten Tulungagung.

F. Metode Analisis

Analisis data adalah proses untuk melakukan penelaahan dan melakukan kajian secara dalam dan juga melakukan suatu pendalaman terhadap data yang telah diperoleh. Secara umum bahwa analisa data merupakan suatu proses untuk penelaahan, pengurutan dan



pengelompokkan data dengan tujuan untuk menyusun adanya suatu hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian (Referensi dari Proposal Penelitian Bp.Dr Suryadi,MS, dalam proposalnya *Respon Birokrasi dalam Menanggapi Keluhan Publik*).Terkait dalam hal ini bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dalam kualitatif deskriptif adalah melihat dan mengamati suatu obyek dan fenomena tertentu serta juga melakukan adanya upaya-upaya untuk melakukan terjun langsung di lapangan melihat kondisi di lapangan yang ada baik oleh orangnya langsung maupun obyek yang akan di teliti.Namun berdasarkan pernyataan diungkapkan oleh Moleong,2002 dalam referensi Proposal Penelitian Bp.Dr Suryadi, MS dalam proposalnya yang berjudul *Respon Birokrasi dalam Menanggapi Keluhan Publik* bahwa data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskripsi rinci tentang adanya situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang diamati atau nukilan-nukilan langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap, dan keyakinannya atau petikan-petikan dokumen dan rekaman lainnya.

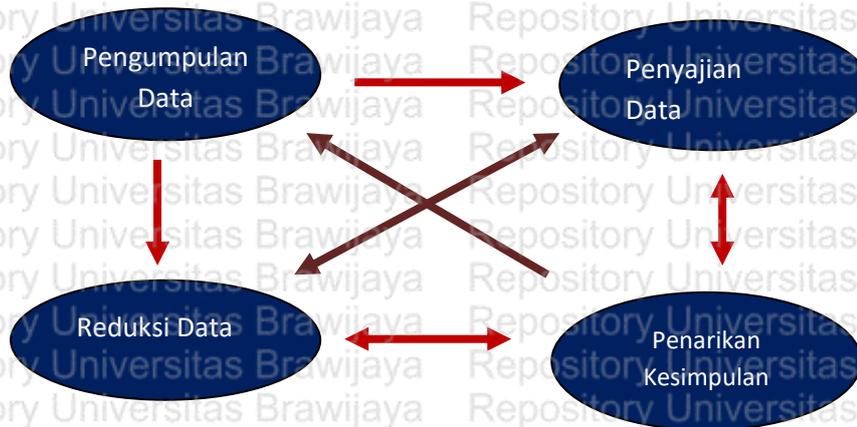
Terkait dengan metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode menurut Miles and Huberman dan Saldana (2014;14) yang meliputi berbagai kegiatan yakni sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan

Dalam hal ini bahwa jika digambarkan untuk alurnya yakni sebagai berikut :



Gambar 26. Alur Analisis data Miles and Huberman

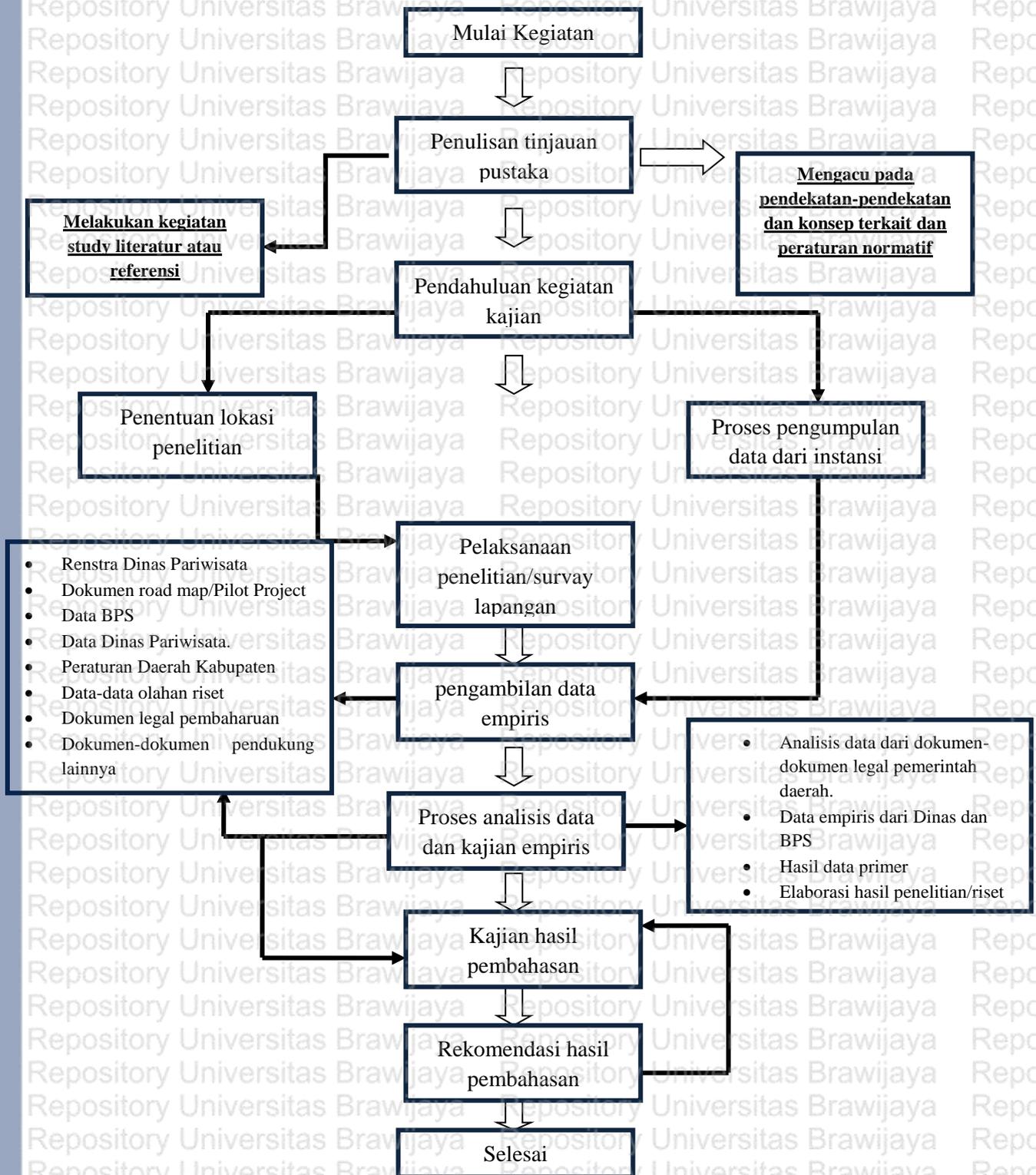


Keterangan :

1. Pengumpulan Data (Data Collection)
2. Kondensasi Data (Data Condensation)
3. Penyajian Data (Data Display)
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions: Drawing/Verifying)

Frame Work (Kerangka Kerja) Penelitian Skripsi

Gambar 27. Kerangka Kerja Penelitian Skripsi

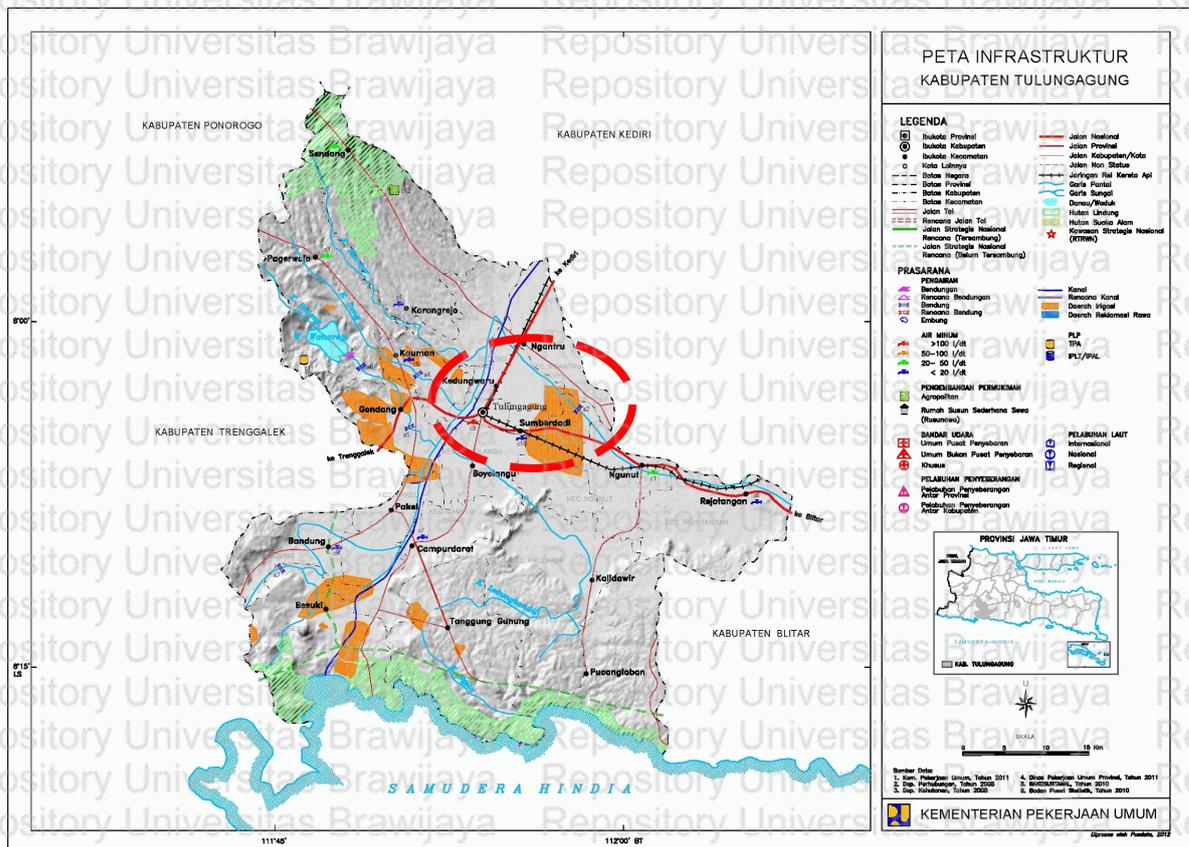


BAB IV PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM

A. PROFIL DAN PETA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Gambar 28. Peta Kabupaten Tulungagung



GAMBAR PETA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tulungagung adalah sebagai suatu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang sebagaimana merupakan sebagai Kabupaten yang memiliki adanya potensi yang sangat potensial dalam hal untuk UMKM dan Pariwisata yang dapat mendorong adanya perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung secara wilayah administratif terletak di tiga kecamatan yakni kecamatan Kedungwaru dan sebagian kecamatan yang ada di Boyolangu. Tulungagung terletak pada jalur primer yang menghubungkan kota Tulungagung dengan Kediri arah ke utara, ke timur menuju Blitar dan ke barat menuju Trenggalek. Adapun pola pergerakan kabupaten Tulungagung



merupakan sebagai jalur pergerakan 2 arah tanpa jalur pembagi. Dalam hal ini bahwa sebenarnya Kabupaten Tulungagung adalah sebagai suatu kabupaten yang memang satu karesidenan dengan wilayah-wilayah kabupaten yang lainnya seperti halnya Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, Trenggalek yang merupakan suatu wilayah yang dikatakan satu karesidenan. Dalam hal ini bahwa sebenarnya orientasi wilayah hal ini dapat dijelaskan dan digambarkan yakni sebagai berikut:

Secara Astronomis bahwa kabupaten Tulungagung terletak di antara $111^{\circ}43' - 112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}51' - 8^{\circ}18'$ Lintang Selatan. Untuk batas-batas administrasinya adalah :

- Batas wilayah utara : Sungai Brantas, Desa Gendingan dan Desa Ngujang (Kecamatan Kedungwaru)
- Batas wilayah Timur : Kecamatan Sumbergempol (Desa Sawah Ketanon, Desa Subontoro, Desa Ringinpitu dan Desa Tanjungsari)
- Batas wilayah selatan : Desa Tanjung, Desa Serut dan Desa Subontoro (Kecamatan Boyolangu)
- Batas wilayah barat : Sungai Ngrowo, Kecamatan Kauman (Desa Mangunsari)

Wilayah kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian ± 85 m di atas adanya permukaan laut. Daerah ini merupakan suatu daerah yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Tulungagung berada pada suatu cekungan/wadah yang menampung adanya curahan hujan yang mengalir di daerah sekitarnya. Kabupaten Tulungagung berada pada suatu cekungan DAS Brantas, yang mempunyai jenis tanah *Alluvial Hidromorf*. Dalam hal ini bahwa jika untuk melihat profil dalam wilayah kabupaten Tulungagung secara detail dapat dilihat di bawah ini dari berbagai sisi yakni sebagai berikut :



a) Fisiografi

Kabupaten Tulungagung memiliki adanya fisiografi lahan dari dataran rendah, sehingga dataran tinggi dengan konfigurasi datar hingga perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah merupakan sebagai suatu daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi adanya semua kecamatan tetapi tidak semua desa, untuk kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi adanya kecamatan Pagerwojo, sebanyak enam desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 Sendang. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Secara garis besar bahwa wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut :

- Bagian utara (barat daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis, mencakup areal seluas $\pm 25\%$
- Bagian selatan merupakan sebagai daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan sebagai bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur, mencakup areal seluas $\pm 40\%$.
- Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas $\pm 35\%$

b) RELIEF

I. KETINGGIAN TEMPAT

Berdasarkan ketinggian tempat dari atas permukaan laut (dpl), wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan yakni sebagai berikut :



- Wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl, meliputi wilayah seluas 38.527,23 Ha atau mencakup 36,76% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 m dpl, meliputi wilayah yang seluas 64.216,89 Ha atau mencakup 55,82% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 m dpl, meliputi wilayah yang seluas 9.479,38 Ha atau mencakup 7,67% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 1000 m dpl yang meliputi wilayah seluas 3.474,24 Ha atau mencakup 3,02 % dari keseluruhan luas.

II. KEMIRINGAN TANAH

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Dalam hal ini bahwa dipaparkan data terkait dengan kemiringan tanah di Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

Tabel 30. Data luas kemiringan tanah Kabupaten Tulungagung

Data Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah di wilayah Kabupaten Tulungagung

No.	Wilayah	Keterangan (%)	Luasan (Hektar)	Persentase Total
1.	Datar	0-2	46.971,24	40,8
2.	Datar-Landai	2-8	5.637,01	4,9
3.	Landai-Berombak	8-15	8.317,46	7,2
4.	Berombak- Bergelombang lemah	15-25	15.875,66	13,8
5.	Bergelombang lemah-kuat	25-40	22.985,19	19,98



6.	Bergelombang kuat	>40	15.254,44	13,26
----	-------------------	-----	-----------	-------

SUMBER : *Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung*

B. ASPEK KEPENDUDUKAN

Hampir rata-rata untuk aspek kependudukan terutama untuk wilayah Kabupaten sekitaran

1 jutaan termasuk juga dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Wilayah Kabupaten

Tulungagung berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistika tahun 2014 terakhir

mencapai penduduk sekitar 1.015.974 jumlah populasi penduduk jika dibandingkan

dengan tahun 2013 yang mencapai sekitar 1.009.411 jumlah penduduk untuk wilayah

kabupaten Tulungagung. Untuk melihat perkembangan populasi penduduk di Kabupaten

Tulungagung bisa di lihat dalam data tabel sebagai berikut :

Tabel 31. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014

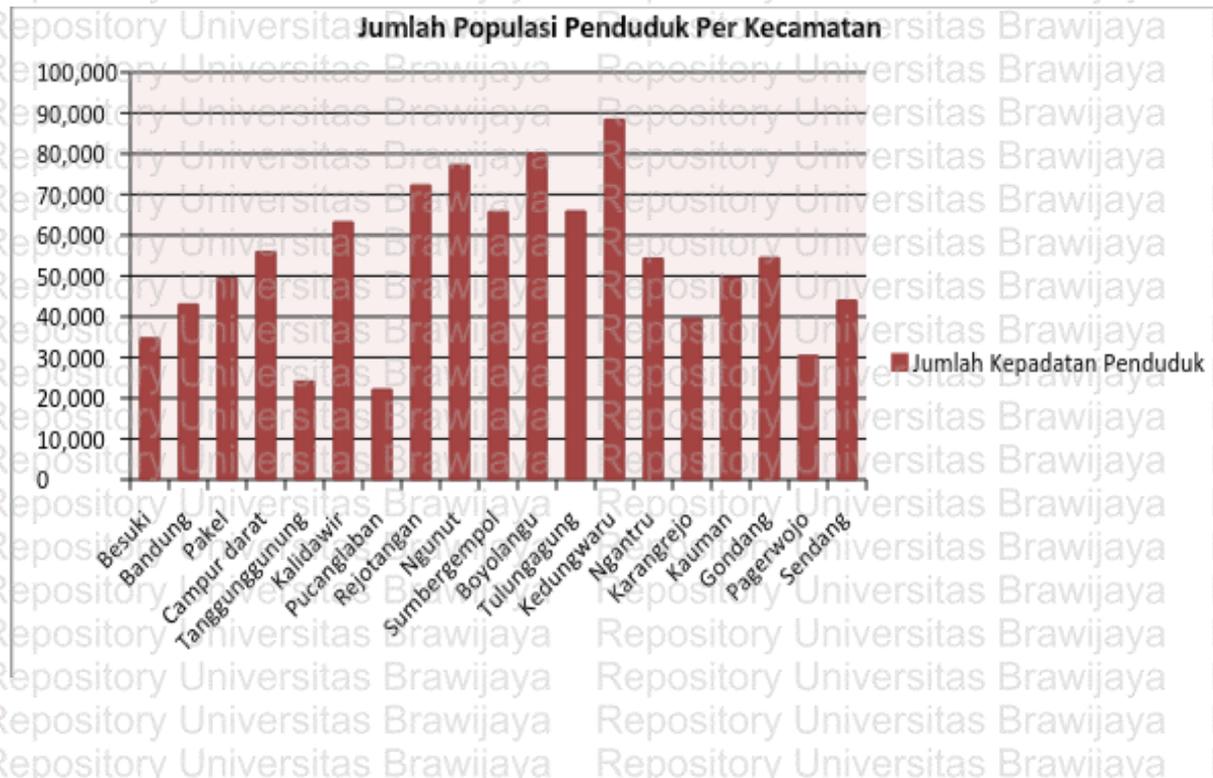
No.	Kecamatan	LUAS WILAYAH KM ²	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
	Besuki	82.16	7.78	34.724	423
	Bandung	41.96	3.97	43.048	1.026
	Pakel	36.06	3.42	49.473	1.372
	Campur darat	39.56	3.75	55.929	1.414
	Tanggunggunung	117.73	11.15	24.136	205
	Kalidawir	97.81	9.27	63.232	657
	Pucanglaban	82.94	7.86	22.157	267



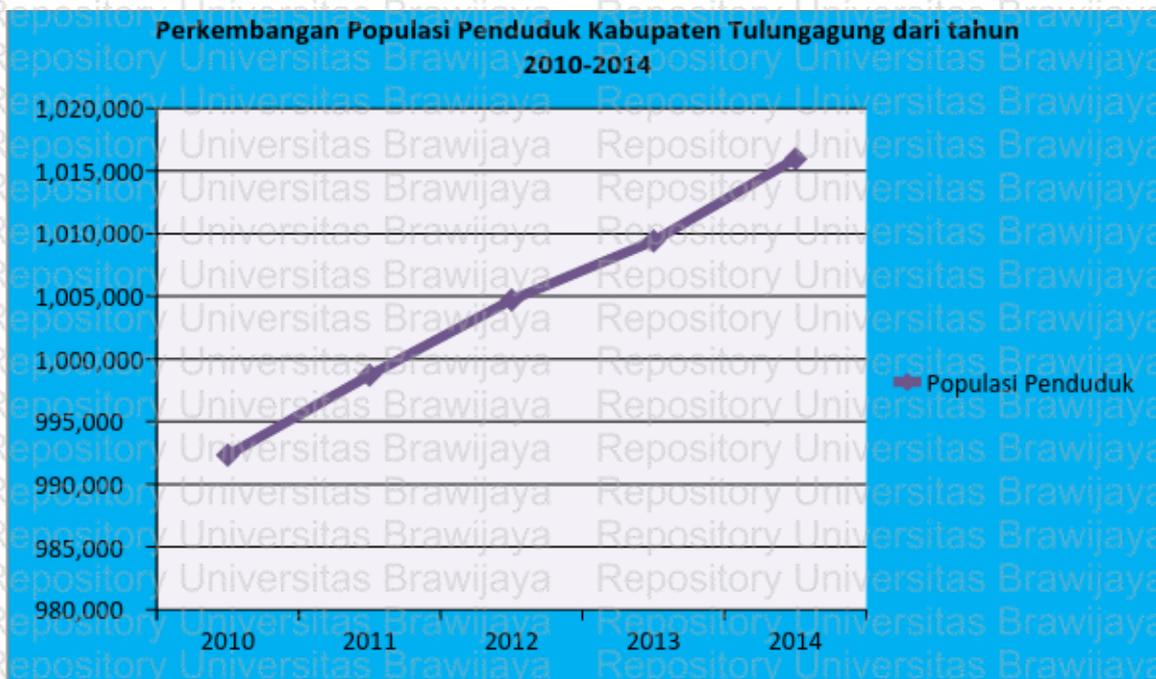
Rejotangan	66.49	6.30	72.300	1.087
Ngunut	37.70	3.57	77.259	2.049
Sumbergempol	39.28	3.72	65.822	1.676
Boyolangu	38.44	3.64	80.099	2.084
Tulungagung	13.67	1.29	65.915	4.822
Kedungwaru	29.74	2.82	88.440	2.974
Ngantru	37.03	3.51	54.323	1.467
Karangrejo	35.54	3.37	39.524	1.112
Kauman	30.84	2.92	49.688	1.611
Gondang	44.02	4.17	54.493	1.238
Pagerwojo	88.22	8.36	30.427	345
Sendang	96.46	9.14	43.985	456
Jumlah/total				
2014	1.055,65	100,00	1.015.974	962
2013	1.055,65	100,00	1.009.411	956
2012	1.055,65	100,00	1.004.711	952
2011	1.055,65	100,00	998.707	946
2010	1.055,65	100,00	992.317	940

Sumber/Source : Proyeksi Sensus Penduduk 2010/ diambil dari Dokumen Tulungagung dalam Angka tahun 2014

Jika digambarkan dan di rangkum dalam statistik terkait dengan perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Tulungagung di lihat dari per kecamatan yakni sebagai berikut :



Sedangkan untuk perkembangan jumlah penduduk kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut :



Jika dilihat perkembangan penduduk untuk kabupaten Tulungagung memang mengalami pesat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Ditinjau dari data per kecamatan bahwa terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki populasi penduduk



yang sangat besar yakni Kecamatan Ngunut, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru. Untuk kecamatan Ngunut populasi penduduk mencapai sekitar 77.259 jumlah penduduk. Kecamatan Ngunut mencapai sekitar 77.259 jumlah penduduk sedangkan untuk kecamatan Kedungwaru mencapai sekitar 88.440 jumlah penduduk. Tiga Kecamatan tersebut termasuk sebagai kecamatan yang hampir berada di tengah kota termasuk juga kecamatan Ngunut yang merupakan sebagai jalur utama menuju Kota Blitar dan Kota Malang yang sebagaimana hal tersebut sering di gunakan untuk para pengguna jalan dari dalam maupun luar kota. Sedangkan untuk kecamatan Boyolangu juga merupakan sebagai kecamatan yang berada di tengah kota dan hal tersebut cukup dekat dengan kecamatan Tulungagung dan juga bisa di gunakan untuk penghubung ke arah kota maupun ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga dalam hal ini menjadi jalur perdagangan terutama untuk wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan untuk melihat perkembangan penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung itu sendiri perkembangan penduduk mengalami kenaikan dari tahun 2010-2014. Berdasarkan catatan dari dokumen Kabupaten Tulungagung dalam Angka bahwa untuk tahun 2010 tercatat jumlah penduduk mencapai sekitar 992.317 jumlah penduduk, mengalami kenaikan di tahun 2011 mencapai sekitar 998.707 jumlah penduduk. Dalam perkembangan 3 tahun terakhir kenaikan penduduk Tulungagung mengalami cukup signifikansi. Catatan Tulungagung dalam Angka tahun 2015 bahwa untuk tahun 2012 mencapai sekitar 1.004.711 jumlah penduduk, mengalami kenaikan menjadi sekitar 1.004.411 jumlah penduduk di tahun 2013 dan tahun terakhir yakni tahun 2014 mengalami kenaikan penduduk mencapai sekitar 1.015.974 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung. Perkembangan penduduk tersebut dapat mendorong adanya perubahan-perubahan sektor tertentu yang berpotensi termasuk sektor pariwisata, ekonomi, pemerintahan, budaya, pendidikan dan sebagainya yang sebagaimana hal tersebut peran masyarakat Tulungagung mendorong kegiatan-kegiatan

sektor penting di daerah.

C. LUAS WILAYAH PER KECAMATAN

Kabupaten Tulungagung merupakan sebagai kabupaten yang memiliki 19 kecamatan dengan memiliki luas wilayah yang sangat berbeda-beda dan juga memiliki adanya potensi alam yang berbeda-beda per kecamatan. Meskipun Kabupaten Tulungagung di kenal sebagai kabupaten yang sangat terkenal akan wisatanya namun dalam hal ini bahwa Tulungagung setiap kecamatan di Kabupaten ini memiliki potensi yang berbeda-beda terutama dalam hal potensi wisata yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Untuk melihat dari segi luas wilayah bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung tahun 2015 bahwa terdapat beberapa kecamatan berdasarkan luas wilayah yakni sebagai berikut :

Tabel 32. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

Luas Wilayah menurut Kecamatan, 2015	
	Luas Wilayah (Km ²)
Besuki	82,16
Bandung	41,96
Pakel	36,06
Campurdarat	39,56
Tanggunggunung	117,73
Kalidawir	97,81
Pucanglaban	82,94
Rejotangan	66,49
Ngunut	37,7



Sumbergempol	39,28
Boyolangu	38,44
Tulungagung	13,67
Kedungwaru	29,74
Ngantru	37,03
Karangrejo	35,54
Kauman	30,84
Gondang	44,02
Pagerwojo	88,22
Sendang	96,46
Jumlah	1 055,65
<i>Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung</i>	

Jika melihat luas wilayah per kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung kecamatan Tanggunggunung adalah kecamatan yang paling terluas dengan luas wilayah 117,73 KM² sedangkan untuk kecamatan yang paling terendah adalah 13,67 KM². Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tersebut bahwa untuk kecamatan Tanggunggunung adalah suatu wilayah dengan kecamatan yang sangat terluas di banding dengan kecamatan-kecamatan yang lain dibanding yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bahwa Kecamatan Tanggunggunung memang di kenal dengan kecamatan yang sangat berpotensi termasuk salah satunya adalah di Desa Ngrejo dengan potensi wisata dan perkebunan yang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk meningkatkan potensi perekonomian desa yang ada di Kecamatan Tanggunggunung. Meskipun sebenarnya secara infrastruktur masih ada beberapa desa yang



belum memadai terutama untuk menuju obyek wisata seperti halnya desa Ngrejo, namun potensi pariwisata dan juga perkebunan serta pertanian sangat tinggi dan lebih banyak masyarakat berpencaharian sebagai petani dan juga nelayan terutama untuk wilayah yang ada di pantai Brumbun. Namun karena dengan infrastruktur terutama jalan raya dan sarana prasarana yang belum memadai belum begitu memadai untuk menuju di obyek wisata yang ada di Kecamatan Tanggunggunung masyarakat di berbagai desa lebih banyak mengembangkan produk-produk unggulan pertanian dan perkebunan seperti halnya perkebunan pisang, durian, jagung dan sebagainya yang digunakan untuk mengembangkan agrowisata sebagai bentuk upaya mengoptimalkan potensi perekonomian desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dengan luas wilayah yang sangat besar dan juga potensi desa yang sangat tinggi hal ini bahwa masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk bercocok tanam dan mengelola ladang perkebunan pisang dan juga jagung untuk di olah dan sebagian besar lebih banyak di jual di pasaran bahkan sampai ke luar kota sebagai sumber penghasilan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanggunggunung.

D. POTENSI DAERAH

Kabupaten Tulungagung merupakan sebagai kabupaten yang berpotensi dan memiliki kemampuan dan potensi yang sangat mendukung adanya kegiatan perekonomian daerah untuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Namun untuk potensi daerah Kabupaten Tulungagung lebih banyak di dominasi wisata termasuk pantai, museum, candi dan wisata-wisata yang lain termasuk wisata religi yang sebagaimana dalam hal ini sebagai tempat yang sering di kunjungi oleh banyak para wisatawan bahkan dari luar kota Tulungagung itu sendiri. Hal ini bahwa potensi daerah untuk wisata di Kabupaten Tulungagung dapat di jadikan sebagai untuk meningkatkan potensi perekonomian daerah dan juga untuk di jadikan penarik para wisatawan dan investor yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga wisata



adalah sebagai potensi untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Potensi wisata kabupaten Tulungagung sangat memberikan perhatian dan dapat menarik para pengunjung atau wisatawan yang ada di sekitar Kabupaten Tulungagung dan juga wisatawan dari luar kota yang sebagaimana dalam hal ini dengan adanya suatu potensi wisata tersebut dapat menarik para pengunjung dan wisatawan yang dapat mendongkrak dan meningkatkan pendapat asli daerah Kabupaten Tulungagung dari sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Tulungagung meliputi seperti wisata religi, wisata purbakala, wisata pantai dan sebagainya yang sebagaimana bahwa wisata-wisata yang ada di Kabupaten tersebut merupakan sebagai wisata yang dapat menarik berbagai pengunjung terutama dari kota yang ada di Jawa Timur.

Namun dalam akhir-akhir ini bahwa banyak wisata pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung yang sangat berpotensi termasuk juga pantai sioro, Kedung Tumpang, Pantai Coro dan Pantai Gemah yang merupakan sebagai wisata pantai yang sangat berpotensi dan juga dapat menarik wisatawan-wisatawan yang ada di dalam maupun dari luar kota meskipun masih sebagian wisata pantai yang ada di Tulungagung belum terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah setempat karena masih belum adanya pantai yang terjamah sehingga dalam hal ini fasilitas masih belum terpenuhi dan juga belum adanya penarikan retribusi untuk masuk ke wisata pantai tersebut. Namun berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistika tahun 2015 yang diambil dalam dokumen Tulungagung dalam angka bahwa terdapat beberapa potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung yang sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 33. Daftar wisata Di Kabupaten Tulungagung

Tempat Wisata menurut Nama dan Alamat di wilayah Kabupaten Tulungagung



No.	Nama Tempat Wisata	Alamat
1	A. WISATA ALAM	
	1. Bendungan Wonorejo	Ds.Mulyosari Kec.Pagerwojo
	2. Bumi Kandung	Ds.Tanen Kec.Rejotangan
	3. Coban Kromo (Indah)	Dsn.Jambu, Ds.Pelem, Kec.Campur Darat
	4. Telaga Buret	Ds.Sawo Kec.Campur Darat
	5. Telaga Baran	Ds.Banyuurip, Kecamatan Kalidawir
	6. Telaga Ngambal	Ds.Winong, Kec.Kalidawir
	7. Pesanggarahan argo willis	Ds.Sendang, Kec.Sendang
	8. Taman kusuma wicitra	Jl.R.A. Kartini No.1 Tulungagung
2	B. WISATA PURBAKALA	
	1. Candi Gayatri	Ds.Boyolangu, Kec.Boyolangu
	2. Candi Cungkup	Ds.Sanggarahan, Kec.Boyolangu
	3. Candi Dadi	Ds.Mirigambar, Kec.Sumbergempol
	4. Candi Ngambar	Ds.Mirigambar, Kec.SumberGempol
	5. Candi Ampel	Ds.Ngampel, Kecamatan Sumbergempol
	6. Candi Tuban	Ds.Domasan, Kecamatan Kalidawir
	7. Candi Nilosuwarna	Ds.Aryojeding, Kecamatan Rejotangan
	8. Candi Asmoro Bangun	Ds.Geger, Kecamatan Sendang
	9. Makam mbah Mlinjo	Ds.Ngepoh, kecamatan Tanggunggunung
	10. Makam Srigading	Ds.Bolo, Kecamatan Kauman.
	11. Makam Setono Gedong	Ds. Sukodono, Kec Karangrejo
	12. Makam sunan kuning	Ds.Macanbang, Kec Pakel
	13. Makam patih	Ds Tindan, Kecamatan Gondang
	14. Makam Ngadirojo	Ds Podorejo, Kecamatan Sumbergempol
	15. Makam Petung Ulung	Ds.Bangunmulyo, Kecamatan Pakel
	16. Makam Astronopraloyo	Ds.Demuk Kecamatan Kalidawir
	17. Makam Sengguruh	Ds.Rejotangan, Kecamatan Rejotangan



18. Makam Soka	Ds.Karangsari, Kecamatan Rejotangan
19. Kuburan Wangi	Ds.Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo
20. Makam Majan	Ds.Majan, Kecamatan Kedungwaru
21. Makam Bedalem	Ds. Besole Kecamatan Besuki
22. Makam Surontani I	Ds.Tanggung Kecamatan Campurdarat
23. Makam Surontani II	Ds.Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu
24. Goa Selomangleng	Ds.Sanggarahan, Kecamatan Boyolangu
25. Goa Tan Tik Syu	Ds.Sumberagung Kecamatan Rejotangan
26. Goa Tan Tik Syu	Ds.Sendang Kecamatan Sendang
27. Goa Banyu	Ds.Banyuurip Kecamatan Kalidawir
28. Goa Pasir	Ds.Junjung kecamatan Sumbergempol
29. Goa Pasetran Gondomayit	Ds.Kalibatur Kecamatan Kalidawir.
30. Goa Tritis	Ds.Tanggung, Kecamatan Sumbergempol
31. Situs mbah Bodho	Ds.Junjung, Kecamatan Sumbergempol
32. Situs Mbah Bodho	Ds.Kalidawir, Kecamatan Kalidawir
33. Situs Mbah Bodho	Ds.Gondang, Kecamatan Gondang
34. Situs Gembrong	Ds.Domasan Kecamatan Kalidawir.
35. Situs Kanigoro	Ds.Podorejo Kecamatan Sumbergempol
36. Situs lemah duwur	Ds.Bantengan, Kecamatan Bandung
37. Situs alas kebutan	Ds.Keboireng, Kecamatan Besuki
38. Situs watu garit	Ds.Wateskroyo ,Kecamatan Besuki
39. Situs song gentong I	Ds.Besole Kecamatan Besuki
40. Situs Song Gentong II	Ds.Besole Kecamatan Besuki
41. Situs Omben Jago	Ds.Nyawangan, Kecamatan Sendang
42. Situs Punden Gedong	Ds.Nyawangan, Kecamatan Sendang
43. Situs Kucur Sanga	Ds.Nyawangan, Kecamatan Sendang
44. Penemuan fosil	Ds.Gamping Kecamatan Campurdarat
45. Balai penyelamat (museum daerah)	Jalan Popoh, Kecamatan Boyolangu
46. Dwarapala (Reco Pentung)	Ds.Kedungwaru, Jepun, Tamanan,



	47. Monumen Wajakensis 48. Prasasti Lawadan	Kutoanyar Ds.Gamping, Kecamatan Campurdarat Ds.Besole, Kecamatan Besuki
3	C. WISATA PANTAI	
	1. Pantai Sine 2. Pantai Dlado 3. Pantai Popoh 4. Pantai Klatak 5. Pantai Sidem 6. Pantai Nglarap 7. Pantai Brumbun 8. Pantai Molang 9. Pantai Gerangan 10. Pantai Bayem 11. Pantai Coro 12. Wisata Sanggar	Ds.Kalibatur, kecamatan Kalidawir Ds.Rejosari, kecamatan Kalidawir Ds.Besuki Kecamatan Besuki Ds.Keboireng Kecamatan Besuki Ds.Besuki Kecamatan Besuki Ds.Keboireng Kecamatan Besuki Ds.Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Ds.Pucanglaban kecamatan Pucanglaban Ds.Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Ds.Keboireng, Kecamatan Besuki Ds.Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Tanggunggunung

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung diambil dari Tulungagung dalam Angka Badan Pusat Statistik 2015

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2015 bahwa terdapat 12 wisata pantai saat ini berdasarkan versi Badan Pusat Statistika yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Pantai Sioro belum masuk dalam data Badan Pusat Statistika dan merupakan sebagai suatu pantai yang masih belum di jamah dan di kelola oleh pemerintah termasuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa dalam paparan data yang ada di atas untuk wisata pantai di



Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 12 Pantai yang sekarang di kelola dan di jajah oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data yang dipaparkan di atas bahwa terdapat 12 pantai yang terdiri dari pantai Sine, Pantai Dlado, Pantai Popoh, Pantai Klatak, Pantai Sidem, Pantai Nglarap, Pantai Brumbun, Pantai Molang, Pantai Gerangan, Pantai Bayem, Pantai Coro, Wisata Sanggar. Hal ini bahwa wisata pantai yang ada di atas merupakan sebagai suatu wisata yang memberikan adanya kontribusi terhadap perekonomian daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Wilayah Kabupaten Tulungagung memang di kenal sebagai wilayah yang sangat berpotensi untuk wisata dan memiliki jumlah wisata yang cukup banyak yang merupakan sebagai suatu potensi wisata yang dapat menarik pengunjung dari berbagai kota khususnya di wilayah Jawa Timur dan juga dapat memberikan adanya kontribusi dan sumbangan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung.

Melihat potensi wisata tersebut akhirnya pemerintah melakukan berbagai kegiatan seperti halnya mulai melakukan pembangunan infrastruktur sampai dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut dalam hal untuk melakukan pengelolaan terhadap potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung dan juga merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengelolaan terhadap potensi wisata dan juga dapat mengembangkan adanya upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain itu di tambah dengan adanya wisata-wisata baru yang belum terjamah oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung sehingga dalam hal ini peran dari seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan termasuk juga pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat yang sebagaimana peran tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan optimalisasi potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi dari Media Explore Tulungagung yang di kelola oleh komunitas masyarakat sekitar terkait dengan pantai-pantai yang merupakan sebagai wisata pantai baru yang ada di Kabupaten



Tulungagung yang sebagaimana di paparkan data sebagai berikut :

Tabel 34. Wisata Pantai yang belum di ketahui

No.	Nama-nama Pantai di Kab.Tulungagung yang belum diketahui.
1.	Pantai Sanggar
2.	Pantai Patok Gebang
3.	Pantai Ngalur
4.	Pantai Molang
5.	Pantai Lumbang
6.	Pantai Nglinci
7.	Pantai Pucang Sawit
8.	Pantai Kedung Tumpang
9	Pantai Dadap
10	Pantai Sioro
11	Pantai Godeg
12	Pantai Sawah Ombo
13	Pantai Wedi Putih

Sumber : Media Explore Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan paparan informasi di atas yang di publikasikan oleh Media Explore wisata Kabupaten Tulungagung bahwa terdapat 13 Pantai yang ada di wilayah Kabupaten yang masih perawan atau baru jika di bandingkan dengan pantai-pantai yang lain seperti halnya pantai Sidem, Pantai Sine dan Pantai Popoh yang merupakan sebagai pantai yang telah lama dan di kunjungi oleh para wisatawan dan pengunjung yang dari luar kota. Seperti halnya Pantai Sioro merupakan sebagai pantai yang masih baru dan belum adanya fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan wisatawan termasuk juga jalan raya

yang digunakan untuk akses kepada pantai tersebut sehingga hal ini masih adanya fasilitas pantai yang seadanya dan juga belum adanya kegiatan fasilitasi termasuk dagang, fasilitas toilet, Mushola, dan perlengkapan yang lainnya yang digunakan untuk memberikan fasilitas terhadap pengunjung baik dari dalam maupun dari luar kota Kabupaten Tulungagung. Sehingga hal ini bahwa menjadi peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk berupaya mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung.

E. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

Tabel 35.PDRB Kabupaten Tulungagung

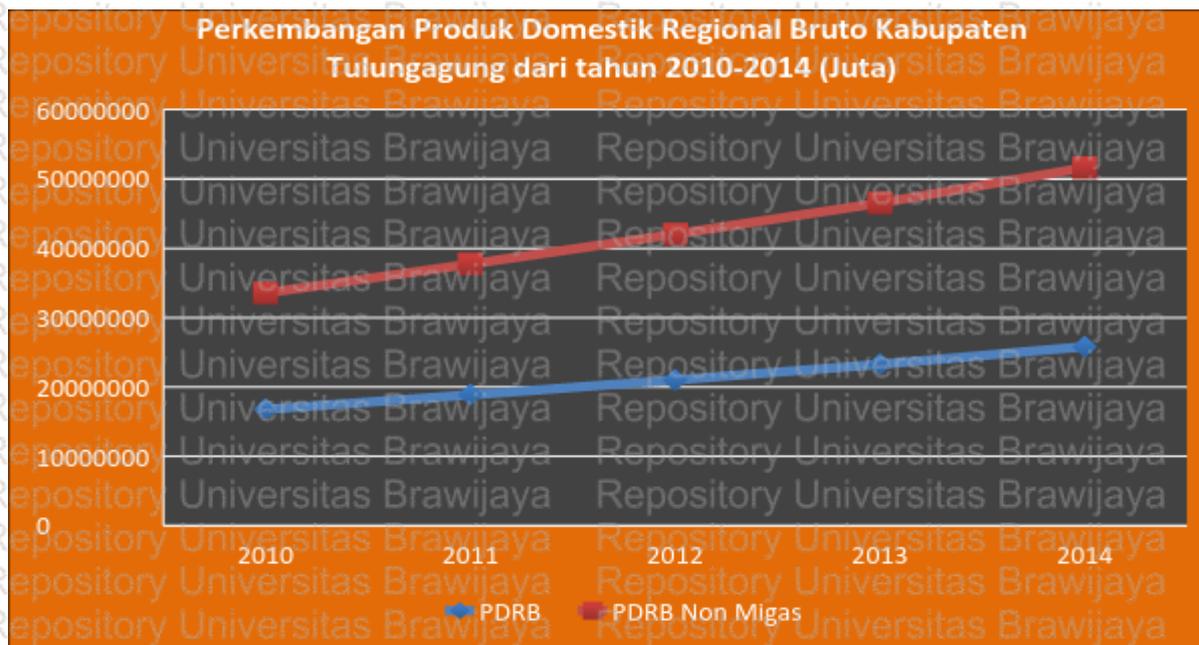
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2010-2014 (Juta)

1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan jasa Pertanian	3 663 428,61	4 097 201,27	4 606 644,45	5 111 555,16	5 788 063,68
2	Pertambangan dan Penggalian	736 706,29	806 499,35	827 736,52	872 775,35	1 036 450,67
3	Industri Pengolahan	3 503 679,48	3 968 207,93	4 414 253,17	4 796 303,50	5 281 704,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7 758,50	8 346,03	8 939,42	8 574,91	8 673,20
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16 112,77	17 424,96	18 854,52	20 710,03	21 622,00
6	Konstruksi	1 501 620,23	1 707 453,70	1 941 584,85	2 194 799,16	2 476 897,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	3 391 077,98	3 863 058,14	4 247 532,63	4 741 449,42	5 111 966,92
8	Transportasi dan Pergudangan	320 850,54	350 469,20	382 751,49	439 465,25	512 821,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278 432,30	311 772,28	355 244,64	398 296,28	463 957,93
10	Informasi dan Komunikasi	925 003,96	1 026 492,29	1 151 740,06	1 289 061,79	1 385 338,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	316 637,78	373 914,56	447 089,45	520 695,32	585 597,70
12	Real Estate	339 292,96	379 513,03	410 157,87	460 867,41	497 997,82
13	Jasa Perusahaan	61 047,27	67 651,58	75 455,98	84 992,46	94 673,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	653 421,33	705 276,94	799 598,43	836 099,72	857 997,31
15	Jasa Pendidikan	664 071,52	735 392,93	856 922,46	971 533,15	1 093 376,15

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152 096,16	179 394,30	206 182,48	230 985,65	268 989,02
17	Jasa Lainnya	245 081,47	261 460,27	267 990,41	286 170,63	324 166,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16 776 319,14	18 859 528,77	21 018 678,84	23 264 335,19	25 810 296,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		16 776 319,14	18 859 528,77	21 018 678,84	23 264 335,19	25 810 296,01

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung

jika di rangkum dalam upaya gambaran statistika yakni sebagai berikut :



Jika melihat perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal untuk melihat dari Produk Domestik Regional Bruto baik migas maupun yang non migas bahwa terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan data yang ada di atas bahwa baik PDRB Migas maupun non migas selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistika yang dijelaskan di atas bahwa untuk tahun 2010 PDRB mencapai sekitar 16.776.319,14 Milyar baik untuk PDRB Migas maupun non migas. Sedangkan untuk tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi sekitar 18.859.528,77 Milyar. Dalam tahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi sekitar 21.018.678,84 Milyar dan ini merupakan sebuah angka PDRB yang mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2012. Sedangkan di



tahun 2013 untuk angka PDRB mengalami kenaikan lagi menjadi sekitar 23.264.335,19 Milyar dan di susul dengan tahun 2014 untuk angka PDRB yang mengalami kenaikan menjadi sekitar 25.810.296.01 Milyar. Melihat perkembangan PDRB yang ada di Kabupaten Tulungagung yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2010-2014 bahwa dapat dikatakan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tulungagung berkembang pesat cukup baik dan optimalisasi potensi yang ada di Kabupaten Tulungagung dapat berkembang dengan baik. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung hal ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung dan juga dapat meningkatkan PDRB serta juga pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga hal ini akan menjadikan daerah tersebut dapat menjalankan adanya roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya roda ekonomi serta di dukung dengan potensi alam yang baik maka dalam hal ini akan menjadikan daerah tersebut menjadi berkembang dan dapat menciptakan adanya produk-produk unggulan yang meningkatkan nilai tambah seperti halnya Kabupaten Tulungagung yang merupakan suatu daerah yang sangat berpotensi terutama untuk bidang pariwisata dan juga di dukung dengan perkebunan yang sangat luas di sekitaran obyek wisata dalam hal ini bahwa memberikan kesempatan terhadap masyarakat yang ada di sekitaran pesisir atau obyek wisata untuk melakukan optimalisasi pengelolaan potensi perkebunan dan wisata sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan nilai tambah dari produk unggulan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga di dukung dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana dan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memberikan dukungan dalam melakukan optimalisasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Seperti halnya PDRB yang dipaparkan di data Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung bahwa untuk PDRB lebih banyak di dominasi oleh Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Selain itu juga ada juga

pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang serta adanya perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Montor. Dalam daftar PDRB tersebut bidang-bidang yang telah disebutkan bahwa di sebut sebagai bidang yang sangat memberikan adanya kontribusi terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung dan juga memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tulungagung dan dalam hal ini menjadikan bidang-bidang tersebut sebagai bidang unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Termasuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung sudah mulai melakukan pembenahan meskipun sebagian jalan raya terutama untuk menuju tempat wisata masih butuh pembangunan dan perbaikan sebagai kemudahan akses pengunjung wisatawan dan masyarakat yang ada di sekitar sehingga dalam hal ini menjadikan hal tersebut sebagai potensi desa yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian desa sebagai kesejahteraan masyarakat di berbagai desa yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Dalam Produk Domestik Regional Bruto terdapat 2 PDRB yakni PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) dan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) yang sebagaimana untuk gambaran Kabupaten Tulungagung itu sendiri yakni sebagai berikut :

Tabel 36. PDRB Kabupaten Tulungagung

PDRB Kabupaten Tulungagung Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2010-2014

(juta rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.663.428,61	4.097.201,27	4.606.644,45	5.111.555,16	5.788.063,68
1. Pertanian, Peternakan,	3.120.345,37	3.503.463,20	3.874.890,67	4.238.012,35	4.763.616,93



perburuan dan jasa pertanian					
a. Tanam an pangan	1.275.871,34	1.391.088,70	1.561.863,98	1.699.912,61	1.894.008,74
b. Tanam an hortikultura semusim	16.941,51	17.880,05	19.038,91	18.729,20	20.639,63
c. Perkebunan semusim	194.903,08	245.287,36	279.660,30	289.301,07	316.476,92
d. Tanam an hortikultura Tahunan dan lainnya	221.409,52	250.408,10	253.474,76	267.655,31	306.636,09
e. Perkebunan tahunan	362.459,86	407.057,39	459.114,96	495.188,41	574.356,13
f. Peternakan	1.003.796,31	1.142.914,45	1.249.108,57	1.409.474,43	1.5844.209,45
g. Jasa pertanian dan perburuan	44.963,77	48.827,16	52.629,19	57.751,32	67.289,97
2. Kehutanan dan penebangan kayu	109.095,69	127.239,68	174.310,18	191.923,79	217.214,00
3. Perikanan	433.987,55	466.498,38	557.443,60	681.619,02	807.232,75
Pertambangan dan Penggalian	736.706,29	806.499,35	827.736,52	827.736,52	1.036.450,67
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pertambangan Biji Logam	59.459,92	68.263,08	71.258,13	70.525,85	83.888,62
4. Pertambangan dan Penggalan Lainnya	677.246,37	738.236,27	756.478,38	802.249,52	952.562,05
Industri Pengolahan	3.503.679,48	3.698.207,93	4.414.253,17	4.769.303,50	5.281.704,92
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Industri batu bara					
b. Industri pengilangan migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Industri makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pengolahan tembakau	1.009.104,44	1.229.390,77	1.383.488,32	1.515.817,67	1.667.699,83
4. Industri tekstil dan pakaian jadi	1.015.775,95	1.099.056,57	1.261.458,99	1.400.056,38	1.564.778,35



5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	432.001,20	475.512,90	539.096,91	585.557,90	644.950,94
6. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus	2.152,60	2.345,18	2.666,77	3.182,20	3.601,24
7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan	223.066,76	252.499,94	256.080,94	277.611,48	301.523,33
8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional.	337.443,26	384.100,52	397.159,69	403.037,32	425.177,80
9. Industri karet, barang dari karet dan plastik.	10.234,77	11.628,03	397.156,69	403.037,32	425.177,80
10. Industri barang galian bukan logam.					
11. Industri logam dasar	5.446,44	5.280,07	6.239,95	6.319,84	6.530,01
12. Industri barang dari logam, komputer dan barang efek	264.979,66	291.422,35	316.468,89	338.161,93	377.844,91
13. Industri mesin	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0



dan perlengkapan					
14. Industri alat angkutan	99.416	107.054,01	124.893,16	135.203,87	147.520,42
15. Industri furnitur					
16. Industri pengolahan lainnya jasa reparasi dan pemasaran.	100,93	111,14	121,33	131,53	147,29
	19.220,02	21.122,01	21.925,86	23.086,68	23.757,80
	22.657,75	24.091,39	25.933,01	27.498,97	31.502,31
	62.079,55	64.053,06	64.848,91	65.229,71	69.577,28
Pengadaan Listrik dan Gas	7.758,50	8.346,03	8.939,42	8.574,91	8.673,20
1. Ketenagalistrikan	7.507,58	8.050,35	8.611,65	8.234,29	8.312,78
2. Pengadaan gas dan produksi es	250,19	295,68	327,77	340,63	360,42
Pengadaan air, Pengelolaan Sampah,	16.112,77	17.424,96	18.854,52	20.710,03	21.662,00



Limbah dan Daur Ulang.					
Konstruksi	1.501.620,23	1.707.453,70	1.941.584,85	2.194.799,16	2.476.897,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Montor	3.391.077,98	3.863.058	4.247.532,63	4.741.449,42	5.111.966,92
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Montor dan Reparasinya	939.900,43	1.049.284,58	1.127.723,13	1.276.283,16	1.343.979,05
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan sepeda montor	2.451.177,55	2.813.773,55	3.119.809,50	3.465.165,26	3.767.987,86
Transportasi dan Perdagangan	320.850,54	350.469,20	382.751,49	439.465,25	512.821,99
1. Angkutan Rel					
2. Angkutan darat	3.645,84	3.744,51	5.063,92	5.884,15	7.608,13
3. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	238.409,54	252.232,31	270.387,06	309.421,53	362.692,20
4. Angkutan udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



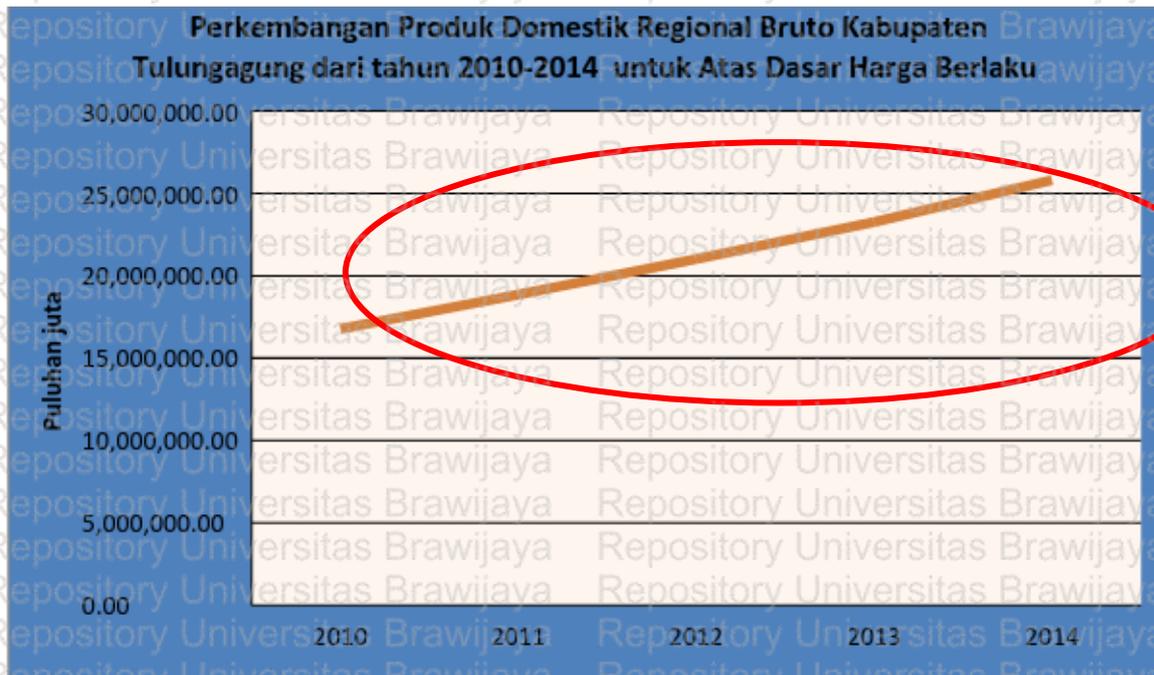
5. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.423,30	311.772,28	355.244,64	398.269,28	463.957,93
1. Penyedia Akomodasi	15.391,94	17.869,06	20.797,89	26.423,14	33.448,23
2. Penyedia makan dan minum	263.040,36	293.903,22	334.446,75	371.873,14	430.509,69
Informasi dan Komunikasi	925.003,96	1.026.492,29	1.151.740,06	1.289.061,79	1.385.338,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	316.637,78	373.814,56	447.089,45	520.695,32	585.597,70
1. Jasa Perantara Keuangan	102.735,05	114.144,39	139.112,33	167.708,44	186.938,93
2. Asuransi dan Dana Pensiunan	85.313,13	106.349,35	17.468,78	148.508,00	169.467,16
3. Jasa Keuangan Lainnya					
4. Jasa Penunjang Keuangan	128.203,71	152.967,62	179.990,86	203.876,33	228.535,66
	385,90	453,21	517,48	602,55	656,05



Real Estate	339.292,96	379.513,03	410.157,87	460.867,41	497.997,82
Jasa Perusahaan	61.047,27	67.651,58	75.455,98	84.992,46	94.673,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	653.421,33	705.276,94	799.598,43	84.992,46	94.673,92
Jasa Pendidikan	664.071,52	735.392,93	856.922,46	971.533,15	1.093.376,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152.096,16	179.394,30	206.182,48	230.985,65	268.989,02
Jasa Lainnya	245.081,47	261.460,27	267.990,41	286.170,63	324.166,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.776.319,14	18.859.528,77	21.018.678,84	23.264.335,19	25.810.296,01

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bahwa jika digambarkan secara ringkas terkait dengan perkembangan produk domestik regional bruto Kabupaten Tulungagung untuk Atas Dasar Harga Berlaku yakni sebagai berikut :



Perkembangan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) untuk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2010-2014 terus mengalami perkembangan dan kenaikan. Hal ini di pacu dari sektor-sektor yang lainnya termasuk sektor kehutanan, pertanian, industri rumah tangga, pariwisata dan sebagainya sebagai peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan daerah untuk Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto untuk ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) untuk Kabupaten Tulungagung dapat disajikan data sebagai berikut

Tabel 37. PDRB atas dasar harga konstan

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto untuk Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulungagung dari tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.663.428,61	3.830.018,07	4.018.621,09	4.142.675,68	4.274.618,11
1. Pertanian,	3.120.345,37	3.259.717,11	3.370.437,71	3.403.493,60	3.489.248,45



Peternakan, perburuan dan jasa pertanian					
a. Tanam	1.275.871,34	1.297.433,56	1.338.188,54	1.344.502,16	1.382.096,31
an pangan					
b. Tanam	16.941,51	17.044,85	17.624,37	16.576,80	16.790,15
an hortikultura semusim					
c. Perkeb unan semusim	194.903,08	233.714,48	258.870,68	264.628,75	281.761,76
d. Tanam	221.409,52	240.924,56	243.815,65	245.522,36	249.057,88
an hortikultura Tahunan dan lainnya					
e. Perkeb unan tahunan	362.459,86	374.638,51	388.462,67	395.843,56	415.519,89
f. Petern akan	1.003.793,31	1.050.472,84	1.075.684,19	1.086.570,33	1.091.889,62
g. Jasa pertanian dan perburuan	44.963,31	45.488,32	47.791,61	49.849,74	52.132,85
2. Kehutanan dan penebangan kayu	109.095	117.037,86	149.548,64	157.175,62	157.757,17
3. Perikanan	433.987,55	453.253,10	498.634,74	582.006,47	627.612,49
Pertambangan dan Penggalian	736.706	774.698,62	786.722,20	794.168,92	820.005,49
5. Pertambangan Minyak, Gas dan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Panas Bumi					
6. Pertambangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Batubara dan Lignit					
7. Pertambangan	59.459,92	65.350,77	67.591,13	66.487,84	70.973,52
Bijih Logam					
8. Pertambangan dan Penggalian	677.246,37	709.347,85	719.131,07	727.681,08	749.031,98
Lainnya					
Industri Pengolahan	3.503.679,48	3.687.103,65	3.894.067,45	4.085.892,45	4.341.579,41
1. Industri					
Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a. Industri batu bara					
b. Industri pengilangan migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Industri makanan dan minuman					
3. Pengolahan tembakau	1.009.104,44	1.098.612,00	1.201.392,65	1.311.896,74	1.382.383,29
4. Industri tekstil	1.015.775,95	1.023.902,16	1.201.392,65	1.072.062,85	1.187.331,05



dan pakaian jadi					
5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	432.001,20	452.878,20	476.455,04	507.022,02	544.085,32
6. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus	2.152,60	2.219,76	2.266,37	2.513,91	2.714,64
7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan	223.066,76	230.307,51	232.578,34	243.114,14	250.414,86
8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional.	337.443,26	363.698,03	371.924,88	373.643,17	378.717,25
9. Industri karet, barang dari karet dan plastik.	10.234,77	10.828,08	12.273,63	13.328,55	14.316,99
10. Industri barang galian bukan logam.					
11. Industri logam dasar	5.446,44	5.663,05	6.041,63	6.105,37	6.289,91
12. Industri barang dari logam, komputer dan barang efek	264.979,66	286.562,25	303.728,48	322.650,76	331.659,17



13. Industri mesin dan perlengkapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Industri alat angkutan					
15. Industri furnitur	99.416,14	105.734,44	117.356,77	124.395,68	130.670,69
16. Industri pengolahan lainnya jasa reparasi dan pemasaran.	100,93	104,12	104,59	104,88	107,19
	19.220,02	19.924,63	20.180,46	21.040,75	21.621,48
	22.657,75	23.688,63	24.010,84	24.723,97	25.655,18
	62.079,55	63.030,74	63.148,11	63.289,67	65.612,18
Pengadaan Listrik dan Gas	7.758.50	8.655,22	9.669,13	9.884,17	9.970,95
1. Ketenagalistrik	7.507,58	8.399,11	9.408,09	9.618,11	9.968,16



	an 2. Pengadaan gas dan produksi es	250,91	256,11	266,06	266,06	272,79
7	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.	16.112,77	17.201,35	17.625,53	18.651,34	18.890,82
	Konstruksi	1.501.620,23	1.595.141,14	1.695.635,03	1.821.603,76	1.938.823,96
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Montor	3.391.077,98	3.678.098,48	3.990.314,75	4.305.679,99	4.540.828,85
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Montor dan Reparasinya	939.900,43	995.529,77	1.040.756,69	1.097.465,41	1.139.608,08
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan sepeda montor	2.451.177,55	2.682.568,71	2.949.558,07	3.208.214,59	3.401.220,78
	Transportasi dan Pergudangan	320.850,54	343.015,17	367.546,15	404.591,25	443.441,75



1. Angkutan Rel					
2. Angkutan darat	3.645,84	3.664,98	3.666,63	3.671,55	4.087,53
3. Angkutan Laut	238.409,54	251.879,68	269.201,45	297.618,35	328.243,28 \
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	78.795,16	87.470,50	94.678,07	103.301,35	111.110,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.432,30	304.544,21	332.516,26	356.791,98	389.266,52
1. Penyedia Akomodasi	15.391,94	16.646,53	17.901,68	19.575,49	22.153,09
2. Penyedia makan dan minum	263.040,36	287.897,67	314.614,58	337.216,49	367.113,43
Informasi dan Komunikasi	925.003,96	1.014.821,84	1.129.496,71	1.262.777,32	1.355.193,68
Jasa Keuangan dan	316.637,78	356.037,69	401.085,37	453.690,24	480.459,24

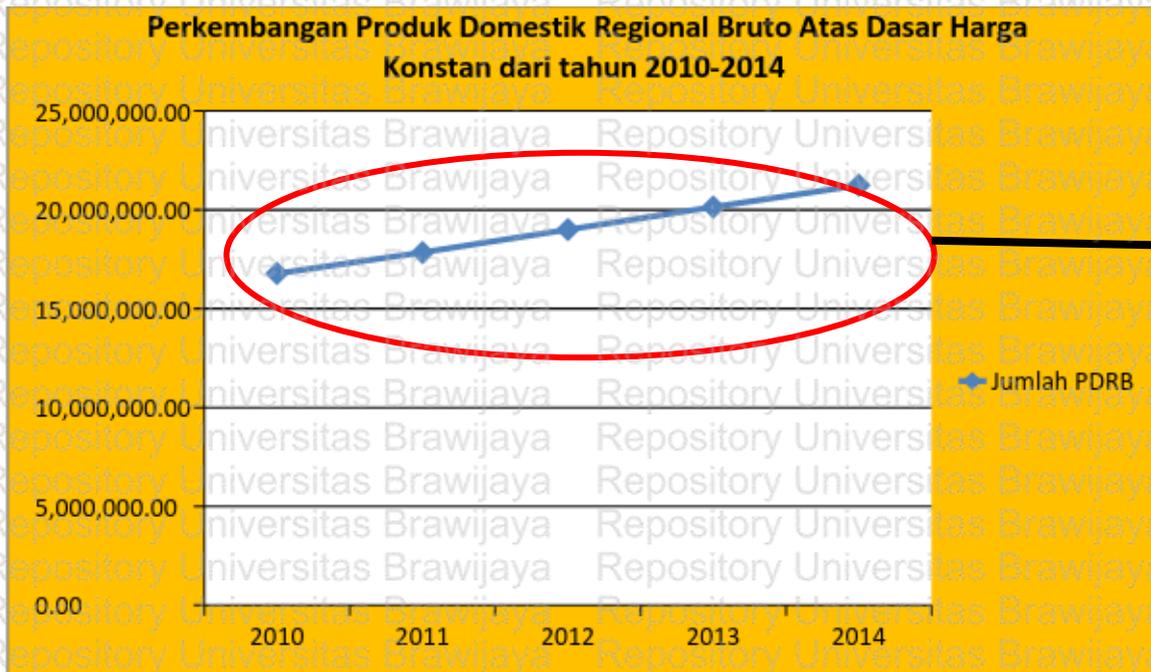


Asuransi					
1. Jasa Perantara Keuangan	102.735,05	108.981,34	119.698,56	138.852,73	148.416,21
2. Asuransi dan Dana Pensiunan					
3. Jasa Keuangan Lainnya	85.313,13	100.429,76	116.172,13	132.252,09	141.959,39
4. Jasa Penunjang Keuangan	128.203,71	146.203,51	164.753,81	182.072,73	189.555,92
	385,90	423,09	460,87	512,69	527,71
Real Estate	339.292,96	365.689,95	391.690,50	422.755,48	454.449,46
Jasa Perusahaan	61.047,27	64.058,12	66.802,37	71.588,43	78.226,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	653.421,33	673.964,90	687.490,56	687.650,19	690.332,02
Jasa Pendidikan	664.071,52	703.052,52	759.816,98	820.807,48	886.086,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152.096,16	176.644,48	197.566,26	213.039,64	233.472,28
Jasa Lainnya	245.081,47	252.475,58	257.368,55	272.131,21	286.426,27

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.776.319,14	17.845.220,98	18.999.034,89	20.144.379,54	21.242.071,93
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bahwa terkait dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan jika di gambarkan dalam bentuk grafik yakni terlihat perkembangan sebagai berikut :



Perkembangan untuk produk domestik regional bruto dalam Atas Dasar Harga Konstan jika di lihat perkembangannya sama halnya dengan Atas Dasar Harga Berlaku untuk Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bahwa untuk PDRB tersebut dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan di dukung dengan sektor lain seperti halnya infrastruktur, perkebunan, pertanian, ketenagaan listrik dan energi, perdagangan.

Untuk melihat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung melihat perkembangannya dari tahun 2010-2014 berdasarkan catatan data dari Badan Pusat Statistika

Kabupaten Tulungagung, bahwa untuk PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) untuk tahun 2010 mencapai sekitar 16.776.319,14. Mengalami



kenaikan di tahun 2011 mencapai sekitar 18.859.528,77 hal ini mengalami kenaikan cukup drastis sekitar selisih 2.000.000 dalam 2 tahun terakhir. Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami kenaikan cukup drastis menjadi 21.018.678,84 dan meningkat lagi di tahun 2013 menjadi sekitar 23.264.335,19 selisih untuk peningkatan dan penambahan dalam hal untuk PDRB menjadi sekitar 3.000.000. Sedangkan catatan untuk tahun terakhir yakni 2014 untuk PDRB ADHB mengalami kenaikan menjadi 25.810.296,01 dalam hal meningkat 2.000.000 untuk PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung di tahun 2014. Melihat perkembangan tersebut bahwa untuk PDRB ADHB kabupaten Tulungagung cukup mengalami kenaikan dan dalam hal ini bahwa Kabupaten Tulungagung sedang terus mengalami perkembangan perekonomian yang cukup baik di dukung dengan potensi-potensi yang ada termasuk juga potensi alam dan pariwisata.

Jika dilihat untuk PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) jika di lihat perkembangannya dari tahun 2010-2014 bahwa di tinjau untuk perkembangannya bahwa untuk tahun 2010 mencapai sekitar 16.776.319,14 mengalami kenaikan $\pm 1.000.000$ menjadi sekitar 17.845.220,98 di tahun 2011. Untuk tahun 2012 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan menjadi sekitar 18.999.034,89 dan di susul dengan kenaikan PDRB ADHK di tahun 2012 menjadi sekitar 20.144.379,54. Sedangkan di tahun terakhir untuk tahun 2014 PDRB ADHK mengalami kenaikan menjadi sekitar 21.242.071,93 mengalami kenaikan menjadi sekitar 1.000.000 dari tahun 2013 ke tahun 2014. Melihat perkembangan PDRB secara keseluruhan untuk Kabupaten Tulungagung baik untuk Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan bahwa terlihat untuk perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung mengalami perkembangan positif meskipun masih banyak potensi daerah yang belum teroptimal dengan baik. Termasuk dalam halnya potensi pariwisata untuk Kabupaten Tulungagung sebagai potensi yang sangat mendorong dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan



pendapatan asli daerah dan mengembangkan kampung wisata di berbagai kecamatan atau desa yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga hal ini bahwa dapat mengembangkan desa berbasis kampung wisata untuk mendorong kemandirian desa sebagai upaya untuk melakukan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan desa.

Dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah suatu ukuran penting bagaimana melihat perkembangan perekonomian daerah terutama untuk Kabupaten Tulungagung. Meskipun secara umum bahwa Kabupaten Tulungagung lebih mengembangkan sektor pariwisata terutama wisata pantai, perikanan, dan juga UMKM Marmer, namun Kabupaten Tulungagung tetap mengembangkan untuk sektor yang lainnya terutama untuk sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan karena di setiap desa di wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki potensi hutan dan perkebunan serta juga pertanian yang sangat mumpuni yang sebagaimana dalam hal ini sebagai upaya untuk pengembangan agrowisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pengembangan wisata pun yang ada di setiap kecamatan dan desa bisa diikuti dengan pengembangan agrowisata yang sebagaimana pengembangan agrowisata tersebut dengan mengembangkan produk-produk unggulan desa sehingga sebagai upaya untuk menarik pengunjung wisatawan terutama dari luar kota Tulungagung. Hal ini memberikan kesempatan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung mengembangkan potensi desanya serta juga menjadikan desa tersebut sebagai desa mandiri wisata serta memberikan kesempatan warga untuk turut berpartisipasi sebagai peningkatan kesejahteraan dan penuntasan kesenjangan sosial di desa. Selain untuk pengembangan wisata hal ini di tunjang dengan potensi hutan, perkebunan dan pertanian dalam hal ini bahwa setiap sektor tersebut juga untuk menunjang kegiatan wisata termasuk penyediaan produk-produk unggulan, produk-produk khas/oleh-oleh untuk pengunjung wisatawan sehingga dalam hal ini juga pendapatan selain dari kegiatan pariwisata juga didapat dari pengembangan agrowisata dengan melatih dan memberdayakan para petani yang



ada di desa. Sehingga dengan adanya pengembangan wisata dan juga agrowisata saat ini selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di desa-desa untuk daerah Kabupaten Tulungagung. Jika melihat untuk PDRB sebagai penunjang perekonomian daerah bahwa terdapat daftar sektor-sektor penting untuk PDRB daerah terutama Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut.

Tabel 38. Daftar sector penting untuk domestic regional Bruto Daerah

DAFTAR SEKTOR PENTING UNTUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH

DAFTAR UNTUK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
<p>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Peternakan, perburuan dan jasa pertanian <ol style="list-style-type: none"> h. Tanaman pangan i. Tanaman hortikultura semusim j. Perkebunan semusim k. Tanaman hortikultura Tahunan dan lainnya l. Perkebunan tahunan m. Peternakan n. Jasa pertanian dan perburuan 2. Kehutanan dan penebangan kayu 3. Perikanan
<p>Pertambangan dan Penggalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 2. Pertambangan Batubara dan Lignit 3. Pertambangan Bijih Logam 4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
<p>Industri Pengolahan</p>



1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
 - c. Industri batu bara
 - d. Industri pengilangan migas
2. Industri makanan dan minuman
3. Pengolahan tembakau
4. Industri tekstil dan pakaian jadi
5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
6. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus
7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan
8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional.
9. Industri karet, barang dari karet dan plastik.
10. Industri barang galian bukan logam.
11. Industri logam dasar
12. Industri barang dari logam, komputer dan barang efek
13. Industri mesin dan perlengkapan
14. Industri alat angkutan
15. Industri furnitur
16. Industri pengolahan lainnya jasa reparasi dan pemasaran.

Pengadaan Listrik dan Gas

1. Ketenagalistrikan
2. Pengadaan gas dan produksi es

Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Konstruksi

**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan sepeda motor

Transportasi dan Pergudangan

1. Angkutan Rel
2. Angkutan darat
3. Angkutan Laut
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
5. Angkutan udara
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1. Penyedia Akomodasi
2. Penyedia makan dan minum

Informasi dan Komunikasi**Jasa Keuangan dan Asuransi**

1. Jasa Perantara Keuangan
2. Asuransi dan Dana Pensiunan
3. Jasa Keuangan Lainnya
4. Jasa Penunjang Keuangan

Real Estate**Jasa Perusahaan****Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial****Jasa Pendidikan****Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial****Jasa Lainnya**

Sumber :Diringkas dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.



2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu hal penting dan sebagai sumber daya anggaran utama dari suatu daerah yang di peroleh dari pajak sebagai alokasi anggaran pembangunan. Selain itu juga pendapatan asli daerah di peroleh dari transfer dana anggaran pemerintah pusat yang di kirim kepada daerah dan dalam hal ini bahwa di masukkan dalam anggaran pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pendapatan asli daerah terdapat rencana dan realisasi terkait dengan pengelolaan untuk melaksanakan program pembangunan yang ada di Indonesia terutama untuk desa yang sebagaimana hal tersebut meningkatkan kemandirian desa untuk mengelola potensi perekonomian yang ada di daerah. Termasuk untuk Kabupaten Tulungagung adalah sebagai kabupaten yang memiliki pendapatan asli daerah yang cukup dan juga di tambah dengan pendapatan-pendapatan yang merupakan hasil pengelolaan potensi termasuk juga dengan pariwisata yang ada di kabupaten Tulungagung. Berdasarkan gambaran detailnya tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

Tabel 39. Rencana dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung

RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (JUTA Rp.)

	DAFTAR RINCIAN	RENCANA	REALISASI
	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	227.112	276.578
	Pendapatan Pajak Daerah	51.838	56.751



Pendapatan Retribusi Daerah	26.552	27.359
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.801	3.794
Lainnya	144.291	188.674
Pendapatan Transfer	1.805.899	1.837.980
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.207.425	1.228.749
Dana bagi hasil pajak	22.896	36.010
Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	26.918	35.128
Dana alokasi umum	1.083.859	1.083.859
Dana alokasi khusus	73.752	73.752
Transfer pemerintah pusat-lainnya	340.982	340.982
Dana otonomi khusus		
Dana penyesuaian	340.982	340.982
Transfer pemerintah provinsi	118.281	129.038
Pendapatan bagi hasil pajak	118.263	128.938
Pendapatan bagi hasil lainnya	18	100
Transfer pemerintah provinsi lainnya	139.211	139.211
Bantuan keuangan provinsi	139.211	139.211



	Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah		
	Pendapatan Hibah		
	Pendapatan dana darurat		
	Pendapatan lainnya		

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tulungagung

Tabel 40.Rencana dan realisasi belanja

RENCANA DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
(JUTA RP)

	DAFTAR RINCIAN	RENCANA	REALISASI
	BELANJA	2.117.036	1.967.387
	Belanja Operasi	1.772.768	1.651.278
	Belanja Pegawai	1.268.162	1.180.536
	Belanja Barang	368.320	349.775
	Belanja Bunga	550	493
	Belanja Subsidi	-	-
	Belanja hibah	119.845	105.665
	Belanja bantuan sosial	14.930	13.867
	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	961	942
	Belanja Modal	338.813	315.546
	Belanja Tanah	16.044	13.685



Belanja peralatan dan mesin	73.598	67.355
Belanja gedung dan bangunan	55.642	49.914
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	183.485	180.429
Belanja aset tetap lainnya	9.338	3.564
Belanja aset lainnya	706	599
Belanja Tidak Terduga	5.455	563
Belanja Tidak Terduga	5.455	563
TRANSFER	85.557	79.418
Transfer Bagi Hasil ke Desa	85.557	79.418
Bagi Hasil Pajak	9.716	7.275
Bagi hasil retribusi	609	353
Bagi hasil pendapatan lainnya	75.233	71.791
SURPLUS/DEFISIT	169.582	67.753
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan	181.609	181.609
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	181.609	181.609
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-



Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	12.027	11.027
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.255	5.255
Pembayaran pokok uang	5.772	5.772
Pemberian pinjaman daerah	-	-
Pembayaran titipan untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2010	-	-
Pembiayaan Netto	169.582	170.582
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	238.335

SUMBER : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tulungagung (Dalam Dokumen Kabupaten Tulungagung dalam Angka)

2. PENYAJIAN DATA

A. GAMBARAN TENTANG KECAMATAN TANGGUNGUNUNG SEBAGAI TEMPAT WISATA

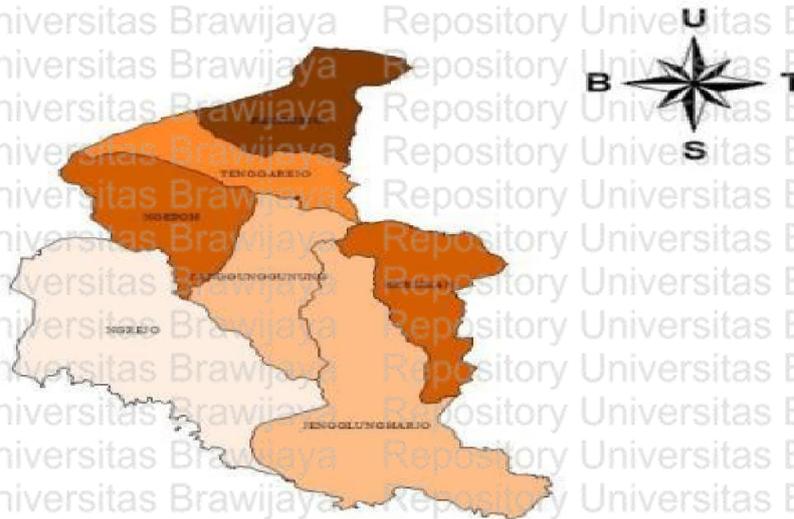
a. Gambaran Geografis Desa Ngrejo Kecamatan Tanggungunung Kabupaten



Tulungagung

Gambar 29 .Peta Kecamatan Tanggunggunung

PETA KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG



GAMBAR 2.1. PETA KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG

Secara umum bahwa kecamatan Tanggunggunung merupakan sebagai salah satu kecamatan yang ada di sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari statistik kecamatan Tanggunggunung bahwa luas wilayah kecamatan Tanggunggunung mencapai sekitar 117,73 KM² dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah kecamatan Campurdarat, sebelah timur Kecamatan Kalidawir dan sebelah selatan Samudera Hindia dan sebelah barat kecamatan Besuki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung di singgung dalam pembahasan awal bahwa Kecamatan Tanggunggunung merupakan sebagai kecamatan yang sangat luas jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Tulungagung dan juga memiliki 7 desa yakni desa Ngrejo, Jenghunharjo, Tanggunggunung, Ngepoh, Tenggerejo dan Pakisrejo. Berdasarkan data dari Monografi Desa bahwa dipaparkan tentang Luas Wilayah dan jarak ke Ibukota Kecamatan yakni sebagai berikut :



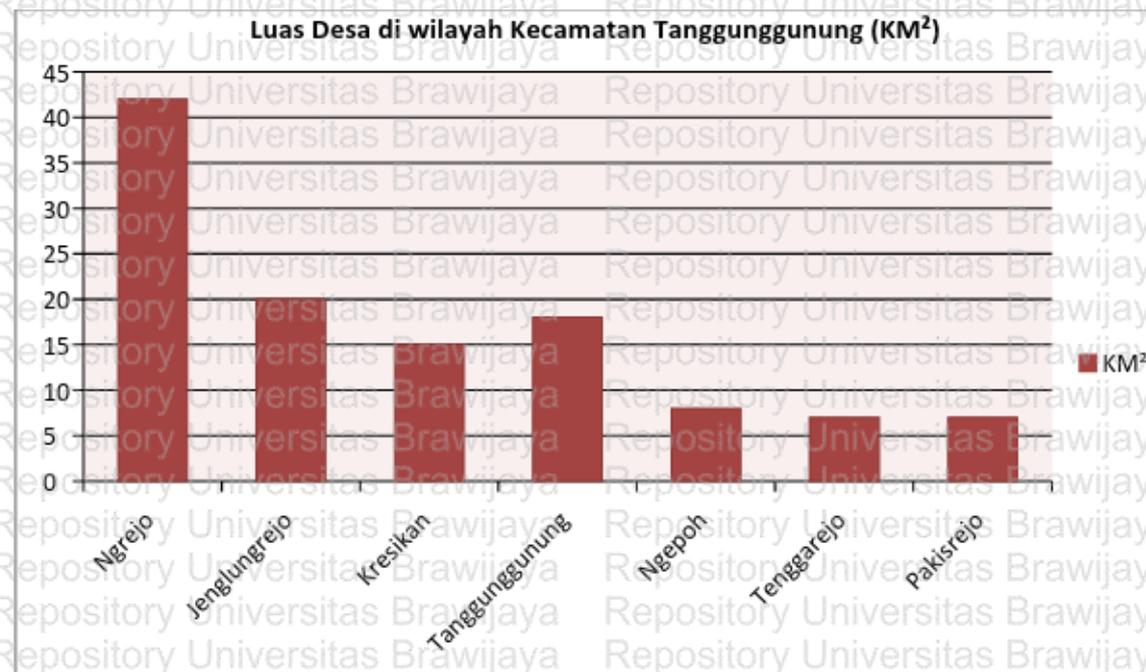
Tabel 41. Luas wilayah dan jarak kecamatan ke Kota

LUAS WILAYAH DAN JARAK KE IBU KOTA KECAMATAN

No.	Luas Wilayah		Jarak Ke Ibukota
	KM ²	%thd Kecamatan	Kecamatan (KM)
Ngrejo	42	35	5
Jenglungharjo	20	17	5
Kresikan	15	12	5
Tanggunggunung	18	16	1
Ngepoh	8	7	3
Tenggarejo	7	6	3
Pakisrejo	7	6	5
Jumlah	118	100	

Sumber : Monografi Desa di ambil dari Statistik Daerah Kecamatan Tanggunggunung 2014

Jika digambarkan dalam bentuk statistik yakni sebagai berikut :





Berdasarkan data yang dipaparkan di atas bersumber dari Monografi Desa untuk kecamatan Tanggunggunung bahwa Desa Ngrejo merupakan sebagai desa terluas dengan luas wilayah mencapai 42 KM² yang merupakan 35% terhadap kecamatan. Jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain bahwa desa tersebut merupakan sebagai desa yang sangat luas dan juga merupakan sebagai desa yang memiliki potensi perkebunan, pertanian dan wisata pantai meskipun secara infrastruktur jalan masih kurang baik. Namun dalam potensi Desa Ngrejo memiliki desa yang sangat besar terutama untuk sektor perkebunan, pertanian serta pariwisata dan bahkan hampir sebagian pengunjung dari luar kota sudah mengunjungi sebagian wisata yang ada di wilayah Desa Ngrejo itu sendiri. Desa Ngrejo juga berpotensi untuk mengembangkan kampung wisata serta agrowisata yang juga untuk menunjang kegiatan wisata yang ada di wilayah Ngrejo dan juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan terhadap para petani masyarakat untuk mengembangkan agrowisata perkebunan yang ada di Desa Ngrejo sebagai produk unggulan yang akan di jual kepada wisatawan.

b. Aspek Kependudukan Kecamatan Tanggunggunung

Dilihat dari kependudukan untuk Kecamatan Tanggunggunung bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung untuk jumlah penduduk mencapai sekitar 25.625 jiwa terbagi untuk laki-laki mencapai sekitar 12.686 jiwa dan perempuan mencapai sekitar 12.937 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai sekitar 218 jiwa/km². Berdasarkan paparan dari dokumen Statistik Daerah Kecamatan Tanggunggunung bahwa desa yang penduduk paling banyak adalah Desa Jenglungrejo sebesar 5.268 jiwa dan yang paling sedikit adalah desa Tenggarejo sebanyak 2.221 jiwa. Dalam hal ini bahwa jika di sajikan data yakni sebagai berikut :



Tabel 42. Indikator Kependudukan Kecamatan Tanggunggunung

INDIKATOR KEPENDUDUKAN KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG TAHUN 2013

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk	25.625
Luas Wilayah (KM ²)	117,73
Kepadatan (Jiwa/KM ²)	218
Sex Ratio	98
Jumlah Rumah Tangga	9.861
Rata-rata Penduduk/Rumah Tangga	3

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Jika di lihat dari piramida kependudukan untuk Kabupaten Tulungagung di tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh penduduk muda/Dewasa termasuk juga untuk wilayah Kecamatan Tanggunggunung. Jumlah penduduk dengan usia 65 ke atas jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok yang lainnya. Jumlah penduduk satu tingkat di bawah kelompok usia 65 tahun ke atas, yaitu kelompok usia 60-64 tahun jumlahnya paling sedikit baik berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan (Sumber diambil dari Dokumen Statistika Kecamatan Tanggunggunung tahun 2014).

Dalam hal untuk tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanggunggunung, bahwa untuk tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan catatan dari statistik daerah Kecamatan Tanggunggunung bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga bisa dikatakan kurang baik karena berdasarkan catatan tersebut 42,27% rumah tangganya masuk dalam kelompok pra sejahtera sedangkan untuk 57,26% masuk dalam kelompok sejahtera (Sumber : diambil dari Dokumen Statistika Kecamatan



Tanggunggunung 2014). Jika dilihat dan disajikan data terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan Tanggunggunung yakni sebagai berikut :



Sumber : Dokumen Statistik Daerah Kecamatan Tanggunggunung

c. Aspek potensi pertanian

Dilihat dari aspek potensi pertanian yang ada di Kecamatan Tanggunggunung merupakan sebagai aspek yang sangat penting dan juga merupakan sebagai potensi yang akan dikembangkan menjadi agrowisata dan juga merupakan sebagai kecamatan yang akan mengembangkan produk-produk unggulan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata yang ada di Tanggunggunung. Dalam catatan statistik Kecamatan

Tanggunggunung bahwa wilayah ini mempunyai potensi bidang pertanian terutama ubi kayu dan jagung. Produksi beberapa produk pertanian pada tahun 2013 berdasarkan catatan data statistik Kon, kecamatan Tanggunggunung yakni padi sebesar 225,16 ton, Jagung sebesar 55.960 ton, ubi kayu sebesar 35.976 ton dan kacang tanah mencapai



sekitar 160,9 ton. Pertanian yang ada di kecamatan Tanggunggunung dan juga merupakan wilayah desa bahwa hal tersebut merupakan sebagai bentuk untuk meningkatkan pengembangan potensi-potensi lokal atau produk unggulan sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomis yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Berikut ini adalah data tentang tanaman pangan untuk Kecamatan Tanggunggunung di tahun 2013 sebagai berikut :

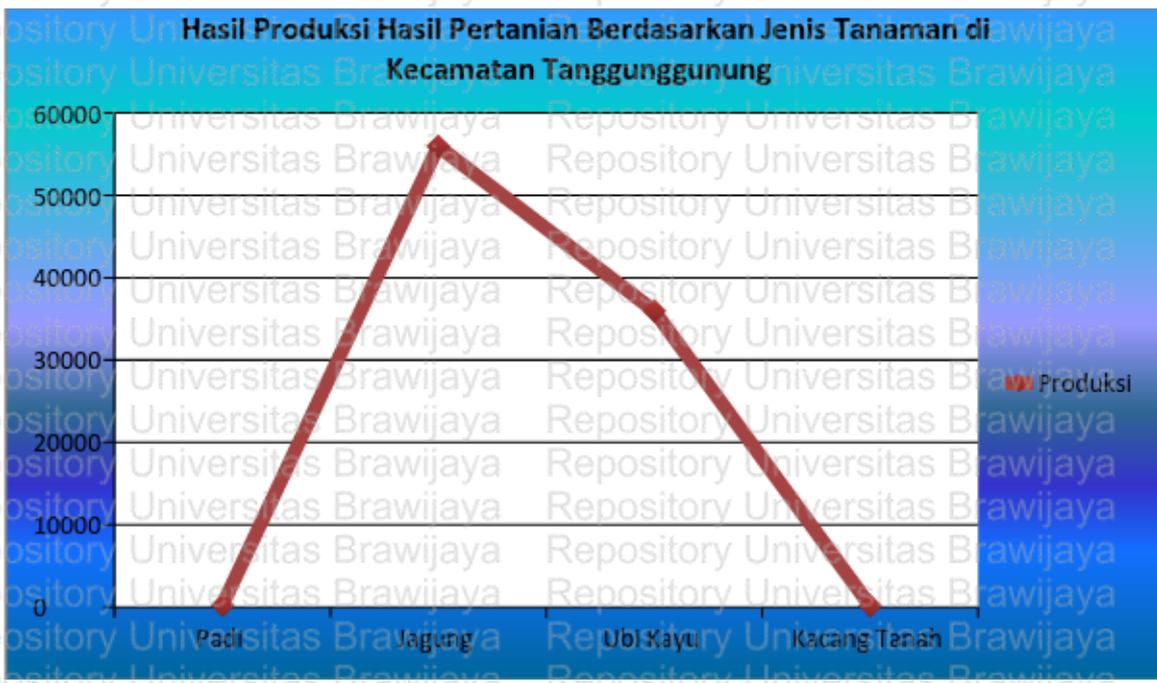
Tabel 43. Daftar statistic Tanaman Pangan Tahun 2013

STATISTIK TANAMAN PANGAN TAHUN 2013

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
Padi	57	225,16
Jagung	7.697	55.960,50
Ubi kayu	2.002	35.976,23
Kacang Tanah	69	160,90
Jumlah	9.825	92.322,79

Sumber : Cabang Dinas Pertanian

Jika digambarkan dalam statistik yakni sebagai berikut :



Selain pertanian untuk Kecamatan Tanggunggunung termasuk juga Desa Ngrejo juga mengembangkan adanya sektor peternakan yang merupakan sebagai produk unggulan peternakan yang ada di Kecamatan Tanggunggunung. Peternakan juga merupakan sebagai hasil pangan yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian serta juga perdagangan



hasil pangan yang ada di Kecamatan Tanggunggunung termasuk juga Desa Ngrejo. Terkait dengan peternakan yang ada di Kecamatan Tanggunggunung bahwa berdasarkan catatan dari statistika Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung untuk jumlah peternak sapi di Kecamatan Tanggunggunung sebanyak 3.068 orang dengan jumlah 6.004 ekor jenis ternak kambing. Jenis Ternak Kambing peternaknya sebanyak 3.064 orang dengan jumlah ternaknya 7.561 ekor. Untuk jenis unggas yang terbanyak adalah jenis ayam kampung. Berdasarkan catatan statistik Daerah Kecamatan Tanggunggunung 2014 bahwa semua rumah tangga yang ada di desa yang ada di Kecamatan Tanggunggunung memelihara ayam kampung yang disebabkan karena mudah memelihara juga dapat dijual sewaktu-waktu jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan gambaran tentang statistik Peternakan Kecamatan Tanggunggunung di Tahun 2013 yakni sebagai berikut :

Tabel 44. Data statistic peternakan Kecamatan Tanggunggunung

Statistik Peternakan Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2013

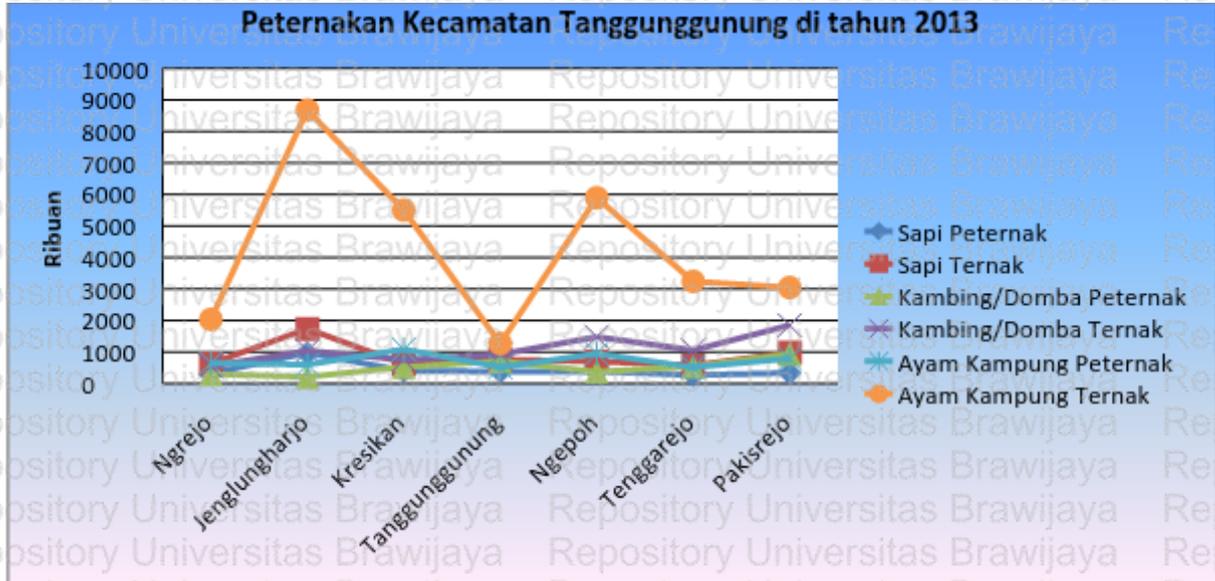
Desa	Sapi		Kambing/Domba		Ayam Kampung	
	Peternak	Ternak	Peternak	Ternak	Peternak	Ternak
Ngrejo	321	629	301	547	652	2.034
Jenglungharjo	972	1.737	211	1.042	598	8.678
Kresikan	406	617	524	751	1.087	5.503
Tanggunggunung	378	762	712	926	516	1.268
Ngepoh	386	705	373	1.479	949	5.894
Tenggarejo	269	576	541	1.057	516	3.241
Pakisrejo	336	978	942	1.849	791	3.048



Jumlah	3.068	6.004	3.604	7.651	5.109	29.666
--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Sumber : Monografi Desa

Dalam hal ini jika digambarkan dalam grafis statistik yakni sebagai berikut :



d. Aspek Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi penggerak perekonomian daerah terutama untuk



Kabupaten Tulungagung khususnya untuk Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Perdagangan menjadi suatu kegiatan penting yang sebagaimana mendukung kegiatan pariwisata termasuk juga perdagangan produk-produk lokal yang sebagaimana untuk di jual belikan ke wisatawan baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Hal ini menjadikan suatu penggerak perekonomian dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di Kecamatan Tanggunggunung termasuk juga Desa Ngrejo. Terkait dengan sektor perdagangan yang ada di Kecamatan Tanggunggunung, bahwa berdasarkan catatan statistik perdagangan Kecamatan Tanggunggunung di tahun 2014, bahwa untuk wilayah Kecamatan Tanggunggunung memiliki 3 pasar, 234 toko dan 27 warung yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Tanggunggunung. Jumlah pasar sebanyak 3 unit tersebut masing-masing terletak di desa Jengglunharjo, Desa Kresikan dan Desa Tanggunggunung. Untuk gambaran grafik statistiknya terkait dengan jumlah pasar, toko dan warung yakni sebagai berikut :



Sumber : Monografi Desa

Berdasarkan catatan dari statistik Kecamatan Tanggunggunung bahwa untuk perdagangan dibedakan menjadi pedagang besar/pengepul dan pedagang eceran, ternyata di Kecamatan Tanggunggunung hanya ada 53 pedagang, dengan jumlah tenaga kerja 106 orang. Sedangkan pedagang eceran sebanyak 355 perusahaan sedangkan tenaga kerja

terserap sebanyak 647 orang. Namun masing-masing jenis pedagang hanya menyerap sekitar 2-5 orang tenaga kerja. Terkait dengan gambaran jumlah usaha dan tenaga kerja perdagangan tahun 2013 yakni sebagai berikut :

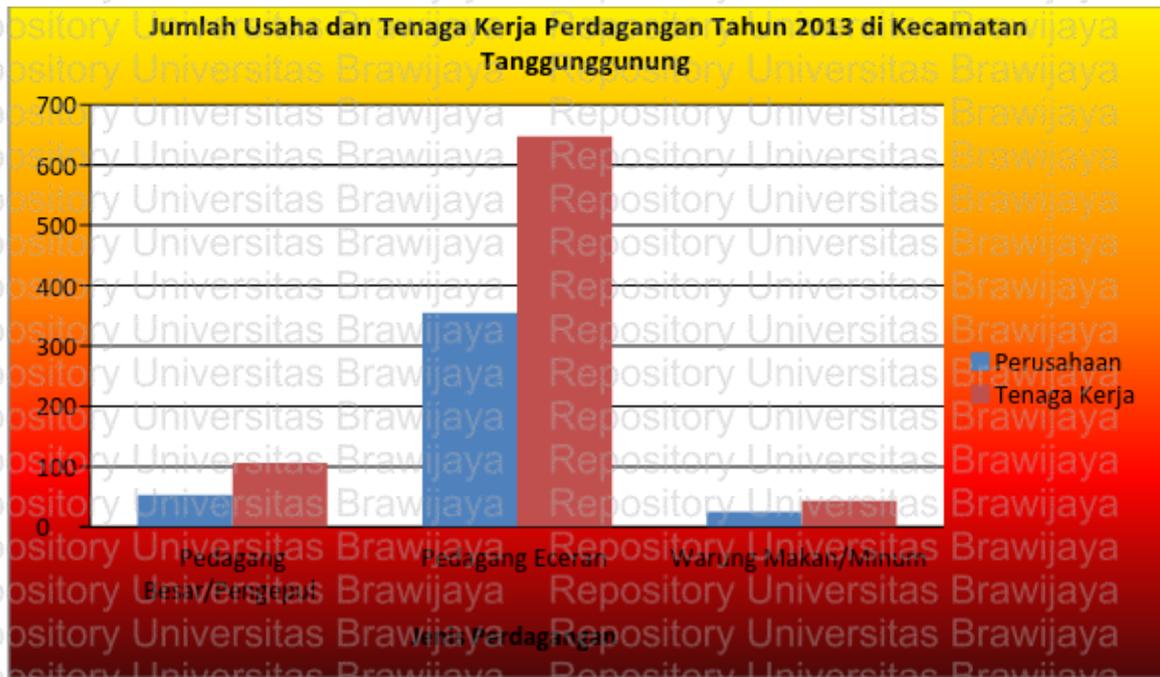
Tabel 45. Jumlah usaha dan tenaga kerja perdagangan

Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Perdagangan Tahun 2013

Kelurahan	Pedagang Besar/Pengepul		Pedagang Eceran		Warung Makan/Minum	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Ngrejo	6	12	46	84	4	6
Jenglungharjo	6	11	71	110	4	8
Kresikan	9	20	60	104	5	8
Tanggunggunung	5	12	87	161	9	14
Ngepoh	10	19	44	83	3	4
Tenggarejo	12	20	26	47	2	2
Pakisrejo	5	12	29	58	1	1
Jumlah	53	106	355	647	25	43

Sumber : Monografi Desa

Jika digambarkan dalam grafis statistik yakni sebagai berikut :



e. Transportasi dan Komunikasi

Transportasi dan komunikasi merupakan sebagai bentuk untuk mendukung adanya kegiatan pariwisata yang ada di daerah terutama di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Desa Ngrejo dan juga desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Tanggunggunung bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator perlu melakukan dukungan untuk bidang infrastruktur transportasi dan komunikasi yang sebagaimana dalam hal ini kedua bidang tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk melihat keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di Kecamatan Tanggunggunung sendiri bahwa berdasarkan catatan dari Statistika Kecamatan Tanggunggunung tahun 2014 bahwa untuk jumlah truk di Kecamatan Tanggunggunung sebanyak 112 unit, Station sebanyak 108 unit pick up sebanyak 100 unit. Berdasarkan catatan bahwa terdapat adanya ojek yang karena di sebabkan wilayah tersebut tidak dilalui angkutan umum. Desa yang ada angkutan ojeknya adalah Desa Ngrejo, Desa



Tanggunggunung dan Desa Tengharejo. Untuk melihat gambaran tentang sarana transportasi yang ada di Kecamatan Tanggunggunung yakni sebagai berikut :

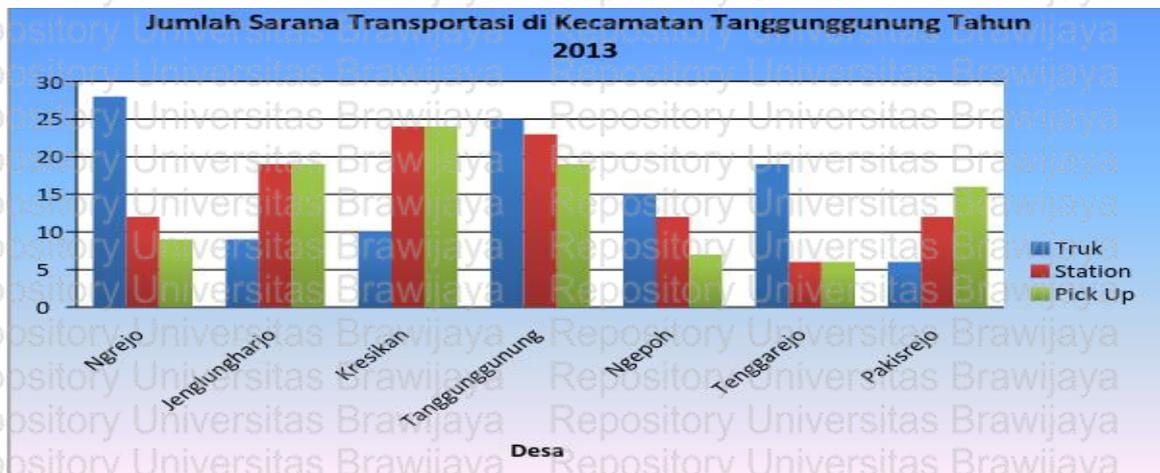
Tabel 46. Daftar Sarana Transportasi di Kecamatan Tanggunggunung.

Sarana Transportasi di Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2013

Desa	Truk	Station	Pick Up
Ngrejo	28	12	9
Jenglungharjo	9	19	19
Kresikan	10	24	24
Tanggunggunung	25	23	19
Ngepoh	15	12	7
Tengharejo	19	6	6
Pakisrejo	6	12	16
Jumlah	112	108	100

Sumber : Monografi Desa

Jika digambarkan dalam bentuk statistik yakni sebagai berikut :





Selain di dukung untuk sarana dan prasarana transportasi bahwa kegiatan pariwisata pun juga di dukung untuk kegiatan informasi dan komunikasi yang merupakan sebagai sarana penting untuk memberitahukan tentang bagaimana keadaan wisata yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung serta juga bagaimana untuk meningkatkan informasi tentang keadaan obyek wisata yang ada di Kecamatan Tanggunggunung terhadap wisatawan baik dari Tulungagung maupun luar kota Tulungagung. Berdasarkan catatan dari Statistika Kecamatan Tanggunggunung bahwa wilayah tersebut saat ini belum semuanya terjangkau oleh jaringan telepon kabel maupun handphone. Hal ini disebabkan wilayah yang berupa pegunungan dan untuk menjangkau daerah tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk melihat data tentang sarana komunikasi di Kecamatan Tanggunggunung yakni sebagai berikut :

Tabel 47. Data sarana komunikasi di Kecamatan Tanggunggunung

Sarana Komunikasi di Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2013

No.	Desa	Telp
		Pribadi
1	Ngrejo	0
2	Jenglungharjo	0
3	Kresikan	0
4	Tanggunggunung	14
5	Ngepoh	6
6	Tenggarejo	0
7	Pakisrejo	0
	Jumlah	20

Sumber : *Monografi Desa*



f. Aspek Jasa

Aspek jasa merupakan sebagai aspek penting untuk mendukung kegiatan pariwisata terutama yang ada di Kecamatan Tanggunggunung. Aspek jasa merupakan sebagai kegiatan untuk penyediaan pelayanan misalnya seperti jasa services kendaraan, alat elektronik, dan sebagainya yang sebagaimana untuk menyediakan jasa-jasa penting yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata yang ada di desa-desa Kecamatan Tanggunggunung. Untuk melihat tentang kegiatan jasa yang ada di Kecamatan Tanggunggunung itu sendiri berdasarkan catatan dari statistika Kecamatan Tanggunggunung bahwa terdapat beberapa kegiatan jasa seperti Fotocopy, Persewaan, dan Reparasi yang tersebar secara merata di Kecamatan Tanggunggunung. Berdasarkan catatan yang ada di Dokumen Statistika Kecamatan Tanggunggunung bahwa persewaan untuk alat pesta di Kecamatan Tanggunggunung secara keseluruhan berjumlah 24 usaha dengan jumlah terbanyak yang ada di Desa Tanggunggunung sebanyak 7 usaha, sedangkan yang paling sedikit adalah Desa Tenggarejo dan Desa Pakisrejo yakni masing-masing 1 usaha. Untuk jasa reparasi montor hampir ada di semua desa memiliki jasa reparasi motor tersebut karena kendaraan montor hampir dimiliki oleh semua pihak sehingga mendorong timbulnya reparasi motor yang di sediakan di setiap Desa di Kecamatan Tanggunggunung. Untuk usaha jasa-jasa yang ada di Kecamatan Tanggunggunung bisa disajikan yakni sebagai berikut :

Table 48. Data tentang jasa-jasa di Kecamatan Tanggunggunung

Usaha Jasa-Jasa di Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2013

Desa	Fotocopy	Persewaan	Reparasi			
			Mobil	Motor	Sepeda	Elektronik
Ngrejo	-	4		3		
Jenglungharjo	-	3		2		1
Kresikan	1	4		3	1	3
Tanggunggunung	5	7	2	4		2
Ngepoh	-	4		5		
Tenggarejo	-	1				1
Pakisrejo	-	1		2		1
Jumlah	6	24	2	19	1	8

Sumber : Monografi Desa

Namun selain usaha jasa-jasa seperti halnya fotocopy, persewaan dan reparasi ada juga sektor jasa lainnya seperti halnya Tambal Ban, Cuci Kendaraan, Penjahit, Pangkas, dan Salon yang merupakan sebagai sector jasa yang mendukung penyediaan pelayanan terhadap pelanggan atau masyarakat yang ada di Kecamatan Tanggunggunung. Untuk kegiatan ekonomi di sector jasa di Kecamatan Tanggunggunung berdasarkan catatan dari Statistik Daerah Kecamatan Tanggunggunung bahwa untuk kegiatan jasa lainnya seperti halnya bilyard, penjahit, tukang listrik, tukang tambal dan lainnya. Berdasarkan catatan yang ada di statistika daerah Kecamatan Tanggunggunung bahwa dari jenis kegiatan jasa tersebut bahwa Desa Tanggunggunung



mempunyai jumlah kegiatan yang paling banyak di dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Tanggunggunung. Berikut ini data di sajikan data tentang Jasa Perorangan di Kecamatan Tanggunggunung yakni sebagai berikut :

Tabel 49. Daftar perseorangan di Kecamatan Tanggunggunung

Jasa Perorangan di Kecamatan Tanggunggunung Tahun 2013

Desa	Salon	Pangkas	Penjahit	Cuci Kendaraan	Tambal Ban
Ngrejo	1	-	7	-	4
Jenglungharjo	2	-	6	-	5
Kresikan	2	1	6	-	6
Tanggunggunung	4	1	7	1	5
Ngepoh	-	1	3	-	4
Tenggarejo	-	-	5	-	2
Pakisrejo	1	-	3	-	3
Jumlah	10	3	37	1	29

Sumber : Monografi Desa

g. Keuangan

Faktor keuangan merupakan sebagai factor penting yang digunakan untuk direalisasikan ke sector pembangunan tertentu. Sektor keuangan menjadi sector penting yang digunakan untuk melakukan realisasi berbagai program-program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah serta juga dialirkan untuk mengembangkan sector-sector penting seperti halnya pertanian, pariwisata, perkebunan, kelautan dan perikanan dan sebagainya sehingga stabilisasi keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan



perekonomian suatu daerah. Untuk sector keuangan yang ada di Kecamatan Tanggunggunung berdasarkan catatan dari statistik daerah Kecamatan Tanggunggunung bahwa keseluruhan jumlah wajib pajak di daerah tersebut adalah sebesar 9.813 wajib pajak, yang terbanyak adalah di desa Jenglungharjo yaitu sebesar 1.981 wajib pajak dan yang terendah ada di Desa Tenggarejo sebesar 917 wajib pajak. Penerimaan desa Jenglungharjo sebesar Rp.24.236.853 atau sebesar 22% dari seluruh penerimaan. Terbesar kedua adalah desa Kresikan yaitu sebesar 20% dari total penerimaan atau sekitar Rp.21.383.452,-. Sedangkan desa yang paling kecil adalah Desa Ngrejo yaitu hanya sekitar 13% dari seluruh penerimaan atau sekitar Rp.14.000.946. Untuk melihat gambaran tentang keuangan di Kecamatan Tanggunggunung berikut disajikan data yakni sebagai berikut :

Tabel 50. Wajib pajak dan penerimaan di Kecamatan Tanggunggunung

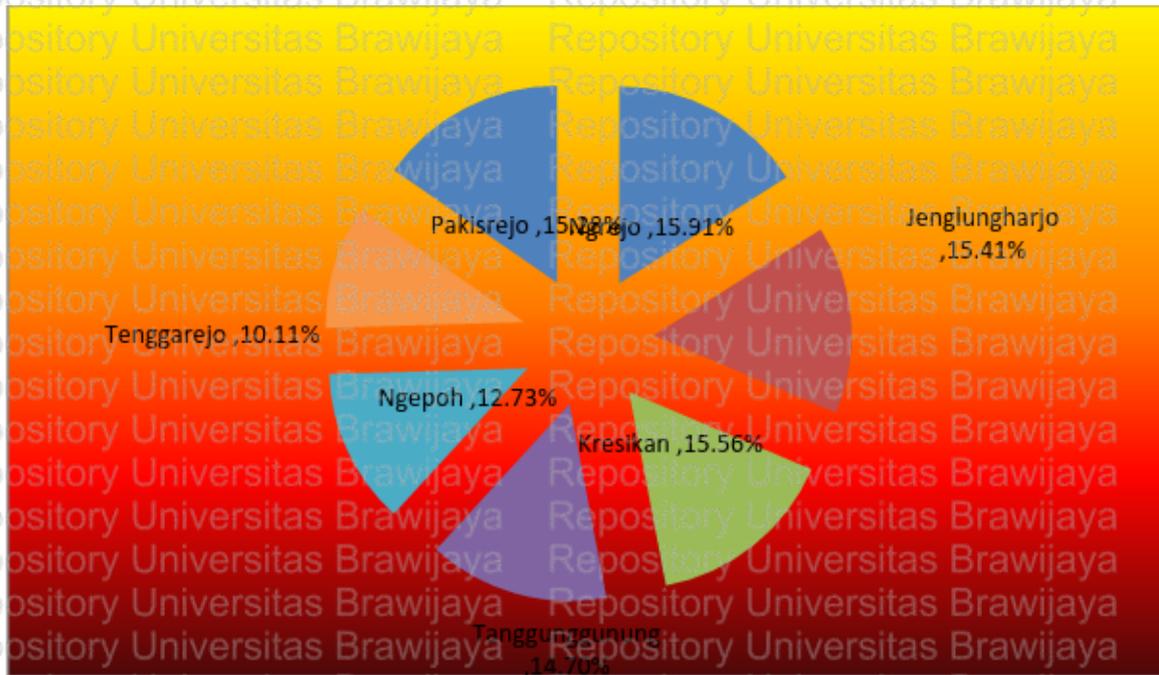
Wajib Pajak dan Penerimaan di Kecamatan Tanggunggunung tahun 2013

Desa	Wajib Pajak	Penerimaan
Ngrejo	1178	14.000.946
Jenglungharjo	1981	24.236.853
Kresikan	1911	21.383.452
Tanggunggunung	1487	17.726.689
Ngepoh	1223	9.376.926
Tenggarejo	917	10.593.913
Pakisrejo	1116	10.786.022
Jumlah	9813	108.104.981

Sumber : Pemerintahan Desa



REALISASI PAJAK DI KECAMATAN TANGGUNGUNUNG TAHUN 2013



SUMBER : PEMERINTAHAN DESA

**B. WISATA ALAM SEMENTARA YANG MASUK DALAM CATATAN DINAS
PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Tabel 51. Wisata alam yang masuk dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**DAFTAR TENTANG CATATAN WISATA ALAM SEMENTARA YANG MASUK DALAM
CATATAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

No.	Nama Pantai	Lokasi	Tiket Masuk	Deskripsi wisata
1.	Pantai Popoh	Jalan Raya Pantai Prigi, Watulimo Desa Besole.	<ul style="list-style-type: none"> Plus Mobil :Rp.2000,00 Plus Montor Rp.1000/ora ng Plus Bus Rp.2500/ora ng 	Terletak di pesisir Samudera Hindia.Ada 2 objek wisata yang dapat kita kunjungi ketika di pantai popoh yaitu teluk dan laut bebas.Keduanya adalah susunan dari batu



				<p>karang. Untuk lokasi teluk berada di dekat parker kendaraan sedangkan untuk laut bebas berjalan 1 KM dari parkir dan menggunakan jalan setapak.</p>
2.	Pantai Sidem	Desa Besole, Kecamatan Besuki	<ul style="list-style-type: none"> • Motor : Rp.1000,00 • Mobil : Rp.2000,00 • Bus : Rp.2500,00 	Objek wisata pantai sidem menjadi satu paket dengan wisata pantai popoh. Sepanjang pantai serta perahu banyak yang berjajar di sekitaran pantai sidem.
3.	Pantai Coro	Desa Besole, Kecamatan Besuki	-	Perjalanan untuk melintasi pantai coro dimulai dengan melintasi perumahan penduduk dan dilanjutkan dengan melewati perbukitan. Banyak sekali komoditas yang di tanam seperti Padi, Pisang, Ketela Pohon dan Pohon Jati. Pantai Coro sebagai pantai yang masih baru dan



				belum terlalu banyak keramaian pengunjung.
4.	Pantai Sine	Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir.	-	
5.	Pantai Molang	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucang Laban	-	Objek Pantai Molang sebagai wisata yang berpasir putih bersih, ratusan batu karang yang terhampar luas, ombak air laut yang ganas serta banyaknya pepohonan yang ada di sekitaran pantai. Pantai ini terletak di pesisir selatan Tulungagung.
6.	Pantai Lumbang	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucang Laban	-	Pantai Lumbang memiliki ciri khas di bibir pantai yang tidak terlalu lebar namun mempunyai keindahan pemandangan yang sangat eksotis. Pantai Lumbang ini masih sangat alami dan merupakan sebagai pantai yang cukup sepi pengunjung.



7.	Pantai Pathok Gebang	Desa Jenglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung	-	Pantai ini memiliki air yang sangat jernih dan juga pemandangan bukit hijau serta pasir yang tersebar di seluruh bibir pantai.
8.	Pantai Klatak	Desa Keboireng Kecamatan Besuki	-	Di obyek wisata ini banyak sekali bebatuan yang tertata rapi di bibir pantai. Batu-batu kecil yang bersih namun bukan batu karang tetapi batuan yang ada di sungai-sungai. Jika terkena ombak maka batuan-batuan tersebut akan menghasilkan suara "KLATAK" berulang kali. Konon kata penduduk setempat, dari bunyi itulah nama pantai Klatak diambil.
9.	Pantai Sanggar	Desa Jenglungharjo Kecamatan Tanggunggunung	-	Pantai Sanggar sangat jernih dan bersih dan merupakan sebagai pantai yang jarang dikunjungi oleh wisatawan. Pada sore hari



				<p>ketika air laut surut kita bisa mencari kerang atau sekedar mengamati kehidupan bawah laut dari balik batu karang. Disekitaran pantai sering dijumpai lobster yang masih kecil yang ikut terseret arus ombak sampai ke bibir pantai. Selain itu juga banyak binatang-binatang laut seperti bintang laut, kuda laut dan masih banyak lainnya.</p>
10.	Pantai Ngalur	Desa Jenglungharjo Kecamatan Tanggunggunung	-	<p>Ombak dipantai ini cukup ganas sehingga tidak dianjurkan melakukan aktivitas laut seperti halnya berenang. Waktu terbaik untuk menikmati pantai adalah pada pagi hari dan non weekend karena pantai masih sangat sepi dan lautnya masih surut.</p>
11.	Pantai Brumbun	Desa Wonokoyo	-	<p>Pantai Brumbun tidak</p>



		Kecamatan Tanggungunung		begitu panjang dan kurang lebih 500 meter.Pantai Brumbun merupakan teluk dari laut lepas Samudera Hindia.Laut begitu tenang.Di ujung teluk tampak beberapa pemancing sibuk dengan kailnya.Sementara di kanan Pantai Brumbun terdapat delta pasir putih yang dikelilingi sungai.
12.	Pantai Kedungtumpang	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucang Laban.	Rp.5000,00	Pantai Kedung Tumpang merupakan sebagai tebing-tebing alami yang mempunyai bentuk berbeda-beda bahkan yang special membentuk kolam-kolam kecil dan besar.Tebing yang membentuk kolam-kolam ini berisi air laut yang jernih.Tebing yang berwarna coklat keemasan, birunya air laut dan



				hijaunya warna lumut yang berada di pinggiran tebing kolam.Hempasan ombak yang menghantam tebing-tebing menyisakan buih putih sebelum akhirnya surut dan kembali terhantam ombak.
13.	Pantai Gerangan	Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung	-	Pantai Gerangan sebagai pantai yang sangat sepi, sunyi dan berbeda dengan tetangganya yakni Pantai Brumbun yang jauh lebih ramai.Pasir di Pantai Gerangan terdiri dari pasir putih dan pasir hitam.Karena letaknya di Teluk, ombaknya tak begitu besar.Untuk warna air biru-kehijauan.
14.	Pantai Dlodo	Kecamatan Kalidawir, Desa Rejosari	-	Pantai yang menghadap ke Samudera Hindia ini merupakan sebagai pantai dengan garis pantai terpanjang dan memiliki



				<p>gumuk pasirnya, pantai ini juga memiliki ombak yang cukup besar dan bisa mencapai 7 meter. Selain gumuk pasir putih, di sini juga ada bukit pasir kecil yang berisi bijih besi. Sebagian pasir yang berupa bijih besi sudah ditambang sehingga menyisakan kubangan tambang pasir. Untuk sisa pasir lainnya sama dengan pasir yang ada di kawasan Pantai Lumbung yaitu pasir putih dengan ada sedikit pasir hitamnya.</p>
15.	Pantai Pacar	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban	-	<p>Pantai ini terkadang menghilang jika air laut sedang pasang, sehingga pantai ini kebanyakan dikenal oleh para pemancing saja. Terlihat hamparan pasir putih yang timbul tenggelam dihantam</p>



				ombak.
16.	Pantai Banyu Mulok	Desa Besole, Kecamatan Besuki	-	Sesuai dengan namanya dalam bahasa Jawa, Banyu artinya air, sedangkan Mulok merupakan pengembangan dari muluk yang berarti naik. Penamaan ini didasarkan pada adanya air yang naik ke atas di tepi tebingnya. Air yang naik ke atas ini tidak setinggi dan banyak di pantai Pathok Gebang, walaupun demikian jika beruntung di sini terdapat pelangi yang merupakan hasil dari pembiasan cahaya oleh semburan air. Selain semburan air dan pelangi, di pantai Banyu Mulok juga terdapat padang rumput di atas bukit.
17.	Pantai Sioro	Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung	-	Pantai Sioro adalah salah satu pantai yang masih alami. Gabungan antara



				<p>pasir putih dan hijaunya tebing di sebelah kiri dan kanannya membuat pantai tersebut terlihat eksotisme. Dilihat ke laut lepas maka terdapat sebuah gugusan karang yang cukup besar dengan tumbuhan hijau yang menutupinya. Pantai ini merupakan sebagai pantai yang jarang mempunyai karang besar yang ditumbuhi dengan tanaman hijau dan berdiri sendiri berada di tengah lautan.</p>
18.	Pantai Bayem	Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat	-	<p>Pantai Bayem berdekatan dengan Pantai Klatak. Pantai yang membentang cukup panjang ini bisa di tempuh dengan membutuhkan waktu ±45 Menit dari pusat Kota Tulungagung. Jalur Akses cukup mudah dan kondisi pantai Bayem yang</p>



				masih semi private menjadikan pantai ini sebagai rekomendasi travelling kita ke Tulungagung.
19.	Pantai Pucang Sawit	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban	-	Dipantai ini terdapat batu-batu besar yang ada di pinggir pantai. Sekilas dengan batu-batuan yang besar tersebut pantai Pucang Sawit ini seperti halnya yang ada di Belitung. Sehingga pantai ini disebut dengan Belitungnya Tulungagung karena keberadaan batuan-batuan besar tersebut.
20.	Pantai Gemah	Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.	-	Pantai Gemah ini juga merupakan salah satu pantai yang mempunyai garis pantai yang cukup panjang. Terlihat di area pinggir pantai ini juga terdapat pohon-pohon cemara.



21.	Pantai Sawah Ombo	Desa Wonokoyo Kecamatan Tanggunggunung	-	Pantai yang menawarkan keasriannya ini berada tidak jauh dari Pantai Brumbun. Pantai dengan pasir putih dan lembut. Air laut yang bersih dan kebiru-biruan menjadi sebuah pelengkap yang ada di Pantai Sawah Ombo tersebut.
22.	Air Terjun Alas Kandung	Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan	-	Air terjun ini memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian yang bervariasi, paling tinggi di puncak air terjun memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Warna air yang terlihat kebiru-biruan. Air terjun Alas Kandung dikelilingi dengan pepohonan dan memiliki kedalaman sekitar 4-8 Meter. Air terjun alas kandung dikelilingi pepohonan menambah tenteram suasana yang ada



						di pantai. Di dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan dan udang kecil akan menghampiri ketika masuk ke dalam air.
23.	Air Terjun Senggani	Jurang	Desa Geger	Kecamatan Sendang	-	Air terjun ini terletak di lereng Gunung Wilis berada pada ketinggian 1200 M
24.	Air Terjun Rejeng	Kenteng	Desa Sawo	Kecamatan Campur Darat.	-	Air terjun Kenteng Renjeng memiliki tinggi sekitar 8-10 meter dan alirannya lumayan deras. Aliran airnya tumpah dan bercabang menjadi beberapa aliran. Aliran mata air ini berasal dari sungai bawah tanah dan mengalir membentuk sungai kecil terus turun menjadi Air Terjun Kenteng Renjeng. Pemberian nama Kenteng Renjeng karena sifat air yang mengalir dengan deras sepanjang tahun bagaikan suara



				<p>pemukul (Kenteng) yang berisik. Pada musim kemarau aliran Air Terjun Kenteng Renjeng akan semakin deras, sebaliknya kalau musim hujan aliran airnya akan berkurang.</p>
25.	Air Terjun Lawean	Desa Geger Kecamatan Sendang.	-	<p>Air Terjun Lawean memiliki ketinggian sekitar 100 m. Disuguhkan dengan air terjun yang bertingkat dan bercabang.</p>
26.	Air Terjun Sarang Awan	Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo.	-	<p>Air Terjun Sawang ini memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan intensitas air yang meluncur cukup deras. Suara airnya sudah terdengar cukup keras pada radius sekitar 150 meter dari spotnya. Menurut cerita yang berkembang munculnya nama Sarang Awan ini, kemungkinan disebabkan karena air yang jatuh dari ketinggian itu</p>



				<p>menciptakan kabut putih yang mirip dengan awan yang seakan-akan bersarang di atasnya. Menurut kesaksian warga sekitar bahwa sensasi kabut awan ini hamper selalu bisa disaksikan di siang hari.</p>
27.	Ranugumbolo	Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo	Rp.5000	<p>Di kalangan backpacker bahwa tempat ini dinamakan dengan "Ranukumbolo Wonorejo Tulungagung". Bendungan ini juga dilengkapi dan dekat dengan Bendungan Wonorejo. Belum diketahui siapa yang mempopulerkan lokasi ini, namun mulai populer sejak tahun 2015 dan tempat ini menarik sebagai keindahan alam yang asri dan alami. Masyarakat lokal Tulungagung biasanya menggunakan tempat ini</p>



				untuk memancing karena lokasi ini terdapat banyak ikan seperti halnya Ikan Nila, Mujair, Gurame, Lele, Ikan Hias dan kadang juga ditemukan Ikan Louhan.
28.	Tumpak Bledek	Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo	Rp.5000,00	Dalam wisata utama Bendungan Wonorejo terdapat sebenarnya wisata yang tersembunyi seperti halnya Tumpak Bledek. Spot wisata Tumpak Bledek merupakan sebagai tempat wisata yang merupakan sebagai bekas penambangan. Lokasi wisata ini kurang lebih 4 km dari parkiran Ranugumbolo.
29.	Coban Kromo	Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat	-	Coban Kromo merupakan sebagai air terjun yang mempunyai view alam yang asri. Air terjun ini berasal dari aliran sungai-sungai yang melewati bukit berkapur di daerah itu. Saat



				ini mulai rame di kunjungi kembali oleh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya.
30.	Kedung Tretes	Desa Sukorejowetan Kecamatan Rejotangan	Rp.2000,00	Kedung Tretes atau disebut juga dengan Kedung Dawuhan merupakan sebagai obyek wisata yang berupa kolam alami yang memiliki warna air biru toska.Kedalaman airnya mencapai 10 Meter.
31.	Tebing Congor Kindang	Desa Wonokoyo Kecamatan Tanggunggunung	-	Merupakan sebagai salah satu tebing yang sering digunakan oleh warga sekitar Pantai Brumbung untuk memancing.Di sebelah tebing ini terdapat satu pantai kecil yang bernama Pantai Semrawang.Terdapat juga penyu dan lumba-lumba yang menampakkan diri dan terlihat para pemancing di area tebing ini.



32.	Tebing Omben Banteng	Desa Wonokoyo Kecamatan Tanggunggunung	-	Tebing yang satu ini hanya berupa sekumpulan batu-batu besar yang tertaruh rapi di atas tebing datar.
33.	Tebing Tononggo	Desa Wonokoyo Kecamatan Tanggunggunung	-	Merupakan sebuah tebing yang juga tidak jauh dengan Pantai Brumbun. Akses untuk menuju Pantai tersebut masih cukup sulit dilalui kendaraan umum. Hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki melalui jalan setapak. Untuk menuju wisata tersebut perlu adanya pemandu wisata agar tidak salah jalur untuk menuju lokasi tersebut.

Wisata pantai di atas merupakan sebagai wisata yang masuk daftar Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung baik wisata pantai yang lama maupun wisata pantai yang tersembunyi atau belum terjamah sama sekali oleh pemerintah daerah setempat dalam artian sangat dibutuhkan proses pengembangan yang dilakukan Pemerintah, Pelaku Usaha dan Komunitas tertentu yang berkecimpung dalam dunia pariwisata sehingga hal ini menjadikan wisata alam sebagai asset penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Termasuk halnya Pantai Sioro merupakan sebagai pantai yang masih perawan atau masih baru. Hal ini bahwa Pantai



Sioro yang terletak di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung tersebut sebagai pantai yang masih baru dan juga sepi pengunjung meskipun sebagian dari luar kota sudah pernah melakukan berkunjung di tempat wisata tersebut namun wisata pantai tersebut masih sangat sepi dan juga belum memiliki fasilitas apapun termasuk juga dengan pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan raya, jaringan komunikasi, tempat penginapan dan sebagainya. Pantai Sioro adalah salah satu pantai yang masih alami. Gabungan antara pasir putih dan hijaunya tebing di sebelah kiri dan kanannya membuat pantai tersebut terlihat eksotisme. Dilihat ke laut lepas maka terdapat sebuah gugusan karang yang cukup besar dengan tumbuhan hijau yang menutupinya. Pantai ini merupakan sebagai pantai yang jarang mempunyai karang besar yang ditumbuhi dengan tanaman hijau dan berdiri sendiri berada di tengah lautan.

C. Keadaan tentang Pantai Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

a. Gambaran tentang Pantai Sioro Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung

Tabel 52. Data observasi tentang wisata Pantai Sioro

HASIL OBSERVASI LAPANGAN TENTANG WISATA PANTAI SIORO DI KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Kategori Pengelolaan Wisata	Keterangan
1.	Data Pendapatan Masyarakat	Pendapatan masyarakat sementara diperoleh dari hasil



		<p>perkebunan pisang.Sedangkan untuk wisata pantai masih belum ada penarikan retribusi yang di dapat karena pengelolaan masih dikatakan belum pasti dan belum tetap.Namun untuk sementara bahwa seperti halnya pantai Sioro sebagian dikelola masyarakat meskipun belum seoptimal mungkin seperti halnya pantai-pantai yang lainnya.</p>
2.	Kegiatan Masyarakat	<p>Lebih banyak mengelola sektor perkebunan yakni perkebunan pisang seperti halnya perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan bukit untuk menuju wisata Pantai Sioro dan pantai-pantai yang lainnya.</p>
3.	Jumlah Pengunjung	<p>Belum ada data yang pasti,namun berdasarkan informasi masyarakat bahwa setiap minggu dan musim kemarau pengunjung banyak yang berdatangan terutama di wisata Pantai Sioro.Pengunjung didominasi dari Surabaya dan Kediri, sedangkan pengunjung dari wilayah lainnya seperti halnya Malang dan Blitar masih sedikit.</p>
4.	Keadaan Sarana dan prasarana pantai	<p>a. Jalan untuk menuju wisata yang masih belum memadai.</p> <p>b. Belum adanya petunjuk jalan yang jelas terutama untuk petunjuk jalan di pantai-pantai yang satu paket dengan pantai Sioro seperti halnya pantai Godeg, Laut Sioro, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Mbranjang, Ceplukan dan Segoro alas.</p> <p>c. Belum adanya fasilitas toilet umum.</p>



		<p>d. Belum adanya tempat untuk berteduh atau masih kosong.</p> <p>e. Belum adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar pesisir pantai.</p> <p>f. Banyaknya jalan yang rusak terutama di musim penghujan sehingga tidak semua kendaraan roda dua dapat melewati jalan yang untuk menuju wisata pantai Sioro.</p> <p>g. Belum adanya petugas pengamanan dan alat pantau untuk memantau keadaan obyek wisata yang ada di sekitaran pantai Sioro.</p> <p>h. Belum adanya pedagang di sepanjang jalan untuk menuju pantai Sioro seperti pedagang makanan dan minuman.</p>
<p>5.</p>	<p>Peran Stakeholder</p>	<p>❖ Masyarakat :</p> <p>a. membangun sebagian jalan setapak yang dibangun oleh petani sekitar perkebunan pisang untuk memudahkan pengunjung menuju obyek wisata.</p> <p>b. Lebih banyak melakukan pengelolaan terhadap perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan untuk menuju obyek wisata pantai Sioro dan pantai yang lainnya.</p> <p>❖ Pemerintah :</p> <p>a. Belum adanya pengelolaan secara optimal namun sudah adanya upaya dari pemerintah Kabupaten yakni Bupati langsung mengunjungi obyek wisata di</p>



		<p>sekitarann pantai Sioro.</p> <p>b. Bupati menggelontorkan dana untuk membantu petani perkebunan pisang dalam membangun sebagian jalan setapak untuk menuju obyek wisata pantai Sioro.</p>	
6.	Strategi Ke depan	<p>Berdasarkan Informasi dari warga Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :</p> <p>A. Strategi Pemerintah :</p> <p>Membangun Infrastruktur Jalan untuk menuju wisata Pantai Sioro.</p>	<p>Keterangan</p> <p>Kebijakan Berdasarkan Hasil observasi Lapangan</p>
			<p>Belum ada rencana pembangunan infrastruktur karena menunggu MoU antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhutani untuk melakukan pembebasan lahan yang merupakan milik perhutani.</p>



	<p>Membangun bandara transportasi udara untuk wilayah Kabupaten Tulungagung.</p>	<p>berdasarkan di lapangan masih belum ada kepastian</p>	<p>Informasi</p>
	<p>Menjadikan Pantai Sioro sebagai tujuan wisata para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tulungagung yang telah mendapatkan persetujuan/ACC dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung).</p>	<p>Belum ada kepastian dari Dinas Pariwisata karena hal tersebut tidak lepas dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Perhutani.</p>	

SUMBER : OLAH PENULIS/PENELITI

Terkait dengan wisata Pantai Sioro berdasarkan hasil observasi lapangan penelitibahwa wisata pantai tersebut adalah sebagai wisata yang masih membutuhkan banyak pengembangan dan juga pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan pengembangan agrowisata.Kegiatan pengembangan



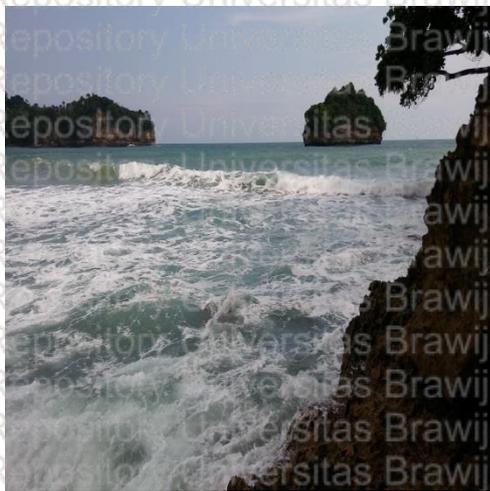
agrowisata adalah sebagai bentuk dan upaya penting untuk mendukung adanya kegiatan pariwisata yang ada di Kecamatan Tanggunggunung hal ini akan membantu petani dalam bertani dan mengembangkan usaha hasil-hasil pertanian dan juga menjadikan hasil pertanian sebagai kontribusi untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Hasil-hasil pertanian merupakan sebagai salah satu potensi untuk dijadikan sebagai potensi yang dapat mengembangkan suatu kegiatan pariwisata yang ada di Desa Ngrejo dan juga digunakan sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Ngrejo. Meskipun Pantai Sioro merupakan sebagai pantai yang baru dan juga merupakan sebagai pantai yang tersembunyi namun pantai tersebut sudah cukup banyak pengunjung yang mendatangi wisata tersebut namun dalam hal ini belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang ada di Desa Ngrejo karena secara retribusi belum ada dan wisata pantai tersebut masih belum masuk program kerja yang disusun dalam road map tentang pengembangan wisata pantai Sioro untuk Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Termasuk juga berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa Desa Ngrejo merupakan sebagai desa yang berpotensi termasuk juga hasil-hasil pertanian yang merupakan sebagai potensi penting untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa Ngrejo dan juga menjadikan Desa Ngrejo sebagai desa Agrowisata. Terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di wisata Pantai Sioro yakni berdasarkan dokumentasi gambar yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 36.Kondisi jalan menuju pantai Sioro



Gambar 37.Kondisi jalan menuju wisata Sioro



Gambar 38.Ombak Pantai Sioro



Gambar 39.Wisata Pantai Sioro



Gambar 40.Pembangunan rumah pohon



Gambar 41.Rumah Pohon di jalan menuju Sioro



Gambar 42. bersama Bupati, Mpok Darwis dan masyarakat



Gambar 43. Pembangunan Rumah Pohon



Gambar 44. Pembangunan rumah pohon



Gambar 45. Pembangunan Rumah Pohon



Gambar 46. Syrup Mangrove Khas Unggulan Tulungagung



Gambar 47. Syrup Mangrove

b. Potensi Pendapatan dari Pengelolaan Potensi Unggulan

Selain berkecipung dalam pariwisata namun adanya suatu potensi-potensi yang lainnya untuk melakukan dan mendukung kegiatan wisata yang ada di Desa Ngrejo



Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung tersebut, dalam hal ini bahwa dengan adanya pengembangan agrowisata tersebut hal ini akan meningkatkan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Hal ini menjadi kesempatan masyarakat, pemerintah desa dan para petani serta juga komunitas sadar wisata bagaimana mengembangkan desa mandiri dan juga desa yang bisa meningkatkan pendapatan dan penghasilannya sebagai tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun secara fasilitas belum terpenuhi serta juga belum adanya program kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengembangan wisata pantai Sioro, namun untuk saat ini pengembangan hal lain sudah dilakukan misalnya pembangunan rumah pohon di sekitaran jalan menuju pantai Sioro, melakukan pelatihan terhadap kelompok tani untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Ngrejo yang nanti akan menjadi produk unggulan yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Hal ini bahwa untuk meningkatkan perekonomian desa bahwa salah satu potensi pertanian yang ada di Desa Ngrejo tersebut terus di tumbuhkan dikembangkan dengan memberdayakan para petani yang ada di desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung, sehingga dalam hal ini untuk meningkatkan penghasilan tersebut petani juga harus dilatih dan terus diberdayakan bagaimana untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Berdasarkan observasi di lapangan bahwa pengembangan produk-produk unggulan tersebut sebagai pendukung adanya kegiatan pariwisata termasuk juga yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung hal ini akan mendorong perekonomian desa Ngrejo serta harapan akhirnya akan terbentuk menjadi Desa Wisata. Namun terkait dengan pendapatan/penghasilan masyarakat saat ini lebih banyak dari pengembangan hasil-hasil perkebunan yang di bentuk dari kelompok tani yang ada di



Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Terkait dengan penghasilan kelompok tani Wono Mulyo yang ada di Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

Tabel 53. Data pendapatan kelompok tani “WONOMULYO”

**PENDAPATAN KELOMPOK TANI “WONO MULYO” DUSUN KUNING
KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Februari	24/2/16	Penjualan Phouslu	1.200.000	
		26/2/16	Penjualan Organik dan Petroorganik	600.000	
			300 sak		
		27/2/16	Penjualan Phouslu	600.000	
			120 sak		
		28/2/16	Penjualan Organik	300.000	
			Petroorganik 150 sak		
		28/2/16	Rapat Kelompok (konsumsi)		450.000
			F.C Undangan		10.000
28/2/16	Transport		600.000		
	Angkutan				
	Pupuk				



			Jumlah Bulan ini	2.700.000	1.060.000
			Jumlah s/d bulan lalu	0	
			Jumlah Semua	2.700.000	
			Saldo	1.640.000	
2.	Maret	2/3/2016	Penjualan Phonka 100 sak	500.000	
			Penjualan Organik	400.000	
			Petroorganik 200 sak		
		5/3/2016	Penjualan Phonska 86 sak	430.000	
			Penjualan organic 300 sak	600.000	
		9/3/2016	Penjualan Pupuk Urea 240 sak	1.200.000	
			Organic Petro 200 sak	400.000	
			Penjualan Urea 240	1.200.000	



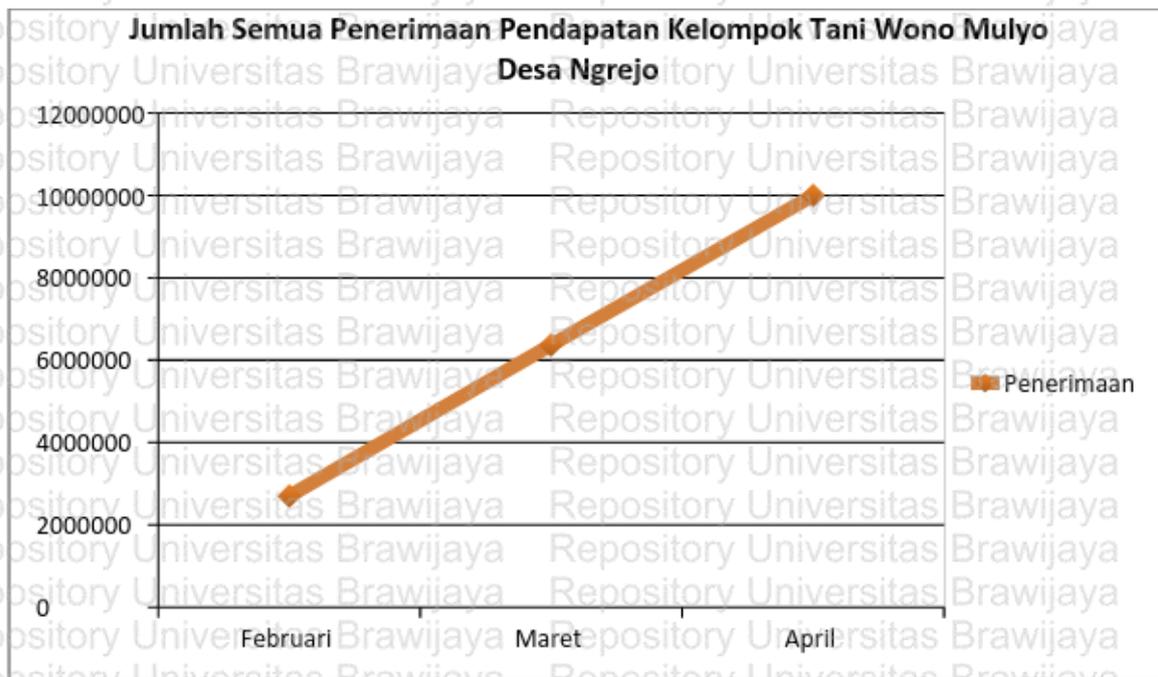
		28/3/2016	sak		
		28/3/2016	Transport Angkutan		400.000
			Pupuk		
			Jumlah Bulan ini	4.730.000	400.000
			Jumlah S/D bulan lalu	1.640.000	
			Jumlah Semua	6.370.000	
			Saldo	5.970.000	
3.	April	3/4/2016	Penjualan Urea 240 sak	1.200.000	
		15/4/2016	Penjualan Urea 240 Sak		
		15/4/2016	Transport Angkutan		400.000
		22/4/2016	Penjualan Urea 2016	1.200.000	
		25/4/2016	Akta Notaris & Badan Hukum		2000.000



		Kelompok		
	25/4/2016	Rapat Anggota (konsumsi)	400.000	
	26/4/2016	Insentif Pengurus 3 bulan @100.000	900.000	
	26/4/2016	Penjualan Organik 215 sak	430.000	
		Jumlah bulan ini	4.030.000	3.700.000
		Jumlah s/d bulan lalu	5.970.000	
		Jumlah Semua	10.000.000	
		Saldo	6.300.000	

Sumber : Buku Kas Kelompok Tani "Wono Mulyo" Desa Ngrejo

Jika di ringkas terkait dengan jumlah keseluruhan untuk pendapatan kelompok tani Wono Mulyo yakni digambarkan dalam statistik sebagai berikut :



Sebagai alat untuk mendukung kegiatan wisata termasuk Pantai Sioro yang merupakan sebagai wisata baru di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung bahwa sebagai desa yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan sangat tinggi bahwa masyarakat juga berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi perkebunan seperti halnya perkebunan pisang yang merupakan sebagai salah satunya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Ngrejo. Selain itu juga ada hasil-hasil lain yang di kembangkan seperti halnya Durian, Alpukat yang nantinya ke depan sebagai produk unggulan untuk menarik wisatawan/pengunjung yang dari luar kota untuk menuju wisata Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. Hal ini ke depan komunitas kelompok sadar wisata atau di sebut dengan “Mpok Darwis” akan terus berkoordinasi dengan pihak lain termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat Desa Ngrejo, Balai Desa untuk mengembangkan potensi-potensi perkebunan dan pertanian sebagai daya dukung pariwisata terutama wisata Sioro. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Kelompok Sadar wisata (“Mpok Darwis”) yakni sebagai berikut :



“selain itu juga akan memanfaatkan potensi-potensi hasil perkebunan yang akan menjadi produk unggulan yang itu untuk mengangkat kegiatan pariwisata seperti perkebunan pisang yang merupakan sebagai salah satu produk unggulan desa Ngrejo upaya dari mpok darwis saat ini adalah dengan menjual stiker yang mempromosikan tempat wisata pantai sioro yang itu akan menjadi pendapatan mpok darwis” (hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata tanggal 27/02/2017 pukul 11.00 di Kantor Balai Desa Ngrejo)

Namun untuk penghasilan selain dari pengembangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan ada juga penghasilan lain seperti halnya parkir motor dan juga ojek yang digunakan sebagai transport untuk menuju wisata pantai Sioro yang memang masih hanya bisa digunakan untuk roda 2. Hal ini bahwa juga menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan terutama penghasilan untuk masyarakat yang ada di sekitar Desa Ngrejo. Meskipun usaha yang dilakukan komunitas “Mpok Darwis” saat ini belum menjadikan hal yang maksimal dan memberikan penghasilan yang optimal terhadap kas mpok darwis sendiri hal ini akan menjadikan peluang bagi komunitas “mpok darwis” dan masyarakat yang ada di Desa Ngrejo untuk terus mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan yang merupakan sebagai kas yang itu nantinya akan di alokasikan sebagai kebutuhan komunitas “mpok darwis” itu sendiri. Dalam hal ini berdasarkan pernyataan ketua komunitas “Mpok Darwis” yakni sebagai berikut :

“kalau penghasilan ojek di hitung per sepeda dan satu kali jalan menunggu sampai pulang sekitar 50.000, untuk parkir per sepeda 5000, selain itu juga di tambah dengan penghasilan dari stiker yang di banderol harga 5000 namun keuntungannya hanya 3000 mas. Selain itu juga seperti kaos yang merupakan sebagai penghasilan mpok darwis. Namun untuk saat ini usaha yang di lakukan oleh Mpok Darwis tetap belum



optimal sebelum fasilitas lainnya terpenuhi” (hasil wawancara dari Ketua Komunitas “Mpok Darwis” tanggal 27/2/2017 pukul 11.00 di Kantor Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)

Untuk penghasilan dari wisata Sioro itu sendiri masih belum ada pendanaan maksimal yang di karenakan perjanjian kerjasama masih dalam bentuk uji coba serta juga melakukan upaya untuk penghitungan dana bagi hasil antara komunitas “Mpok Darwis”, Perhutani, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta juga Balai Desa yang selama ini di nyatakan belum adil dalam pembagian dana bagi hasil.Hal ini bahwa dengan belum adanya perjanjian kerjasama antara Mpok Darwis,Perhutani, Dinas Pariwisata dan juga Balai Desa hal ini bahwa akan dijadikan suatu pertimbangan-pertimbangan terhadap anggota legislative yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk menyusun Peraturan Daerah dan juga perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terkait.Dalam hal ini bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama dan jika sudah ada keputusan dan dokumen legal antara pihak-pihak yang terkait maka dana dari APBD, APBDes dan dana apapun akan cair ke desa dan juga termasuk ke Mpok Darwis yang nantinya akan membiayai kegiatan wisata termasuk juga untuk pengembangan wisata Sioro sebagai destinasi di Desa Ngrejo.

Gambar 48.Jalan Setapak menuju Wisata Pantai Sioro



Gambar. Jalan setapak menuju wisata pantai Sioro



Gambar.49.Jalan masuk menuju pantai Sioro di Desa Ngrejo

Selain terkendala dengan adanya perjanjian kerjasama dan anggaran pengembangan wisata tersebut juga terkendala dengan dana bagi hasil dan kurangnya sinkronisasi antara Mpok Darwis, Balai Desa, dan termasuk juga dengan Perhutani terutama dalam hal dana bagi hasil yang itu menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan promosi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Terkait dengan pencairan dana terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan wisata, maka hal yang terpenting adalah utama sinkronisasi dengan pihak terkait seperti halnya dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Perhutani, Mpok Darwis, dan juga dengan Balai Desa terutama untuk melakukan pengelolaan anggaran yang nantinya sebagai alokasi pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan potensi wisata. Namun karena saat ini belum adanya kerjasama dan juga perjanjian secara legal maka pengembangan wisata seperti Sioro masih di kelola belum maksimal dan masih mengandalkan tenaga dari Balai Desa Ngrejo dan Mpok Darwis. Hal ini di nyatakan oleh Ketua Kelompok Sadar wisata Desa Ngrejo yakni sebagai berikut

“selama belum ada perjanjian kerjasama dana yang dari APBD, APBDes dan dana apapun tidak akan pernah bisa masuk mas, soalnya kalau sudah ada perjanjian kerjasama antara mpok



darwis, desa, perhutani dan pihak terkait maka anggaran dan segala hal akan bisa masuk. Namun sementara ini masih swadaya dengan menggandeng lembaga masyarakat desa hutan dan di sini kami membuat sekretariat bersama mpok darwis, lembaga masyarakat desa hutan dan BUMdes” (hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo, 27/02/2017 di Balai Desa Ngrejo)

Terkait dengan perjanjian kerjasama untuk mengembangkan wisata Pantai tersebut juga di nyatakan oleh Kepala Sub Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

“Jadi jika kita untuk mengembangkan wisata pantai termasuk Sioro harus melalui proses kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Perhutani terutama untuk melakukan pembebasan lahan yang ada di sepanjang jalan menuju wisata pantai. Setelah adanya perjanjian antara keduanya maka master plan akan terbuat, dan segala fasilitas untuk wisata akan di penuhi. Sedangkan fokus dari pemerintah daerah saat ini adalah untuk pengembangan pantai gemah dan pantai sanggar, sedangkan untuk wisata pantai sioro belum masuk dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Perhutani” (hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, tanggal 06/02/2017. Pukul 09.00 pagi)

“sementara untuk wisata pantai sioro saat ini lebih banyak di tangani oleh komunitas “mpok darwis” yaitu kelompok sadar wisata yang merupakan sebagai komunitas wisata yang berada di Kabupaten Tulungagung yang bertugas untuk mengembangkan setiap wisata. Wisata pantai Sioro saat ini masih pada fokus terutama untuk menjaga kebersihan dan juga mengembangkan kreativitas lainnya sesuai dengan potensi desa yang ada. Selain itu juga terkait dengan pengembangan di pantai sioro tersebut lebih banyak melakukan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas “mpok darwis” (kelompok sadar



wisata).(hasil wawancara dari Kepala Sub Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 06/02/2017, pukul 09.00)

Hal ini adalah proses yang sangat penting adalah untuk melakukan pengembangan wisata dan pantai Sioro tersebut harus diawali dengan adanya proses kerjasama antara pihak yang terkait hingga mencetak dokumen-dokumen legal yang merupakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengelolaan wisata Sioro yang ada di Desa Ngrejo. Memang untuk wisata Sioro saat ini masih belum masuk dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Perhutani terutama untuk melakukan pembebasan lahan sehingga untuk sementara ini pengelolaan dan pengembangan wisata masih di tangani oleh pihak Desa dan Mpok Darwis serta juga mengembangkan potensi-potensi local yang ada di Desa Ngrejo. Meskipun telah ada planning untuk melakukan perjanjian kerjasama, namun untuk pengesahan dan juga pembuatan dokumen kerjasama secara legal masih belum pasti serta juga masih membutuhkan proses untuk uji perjanjian kerjasama. Terkait dengan kerjasama hal ini sepadan dengan yang dinyatakan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

“sebenarnya sudah ada planning dalam perjanjian kerjasama untuk lokasi wisata yakni sampai 20 Hektar, sebenarnya sudah ada planning namun belum di setujui oleh perhutani, namun nanti akan di tinjau ulang dalam perjanjian kerjasama, sehingga ada beberapa poin2 yang akan di revisi terutama kerjasama. Sekarang ini focus juga ke masalah bagi hasil mas..Seperti kemaren di Pantai Sanggar mendapatkan penghasilan 12 juta selama 3 bulan, itu saja Desa hanya mendapatkan 850rb sedangkan Mpok Darwis hanya mendapatkan 900rb yang lainnya untuk Perhutani dan Pajak Korporasi, sehingga yang lebih untung banyak itu Perhutani mas.(Tanggal 27/02/2017 pukul 11.00 dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo berlokasi di Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)



Saat ini bahwa peran pemerintah desa dan Komunitas Mpok Darwis di Desa Ngrejo sedang berupaya bagaimana untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa termasuk potensi perkebunan pisang yang saat ini menjadi andalan Desa Ngrejo serta juga memberikan peluang kepada kelompok tani untuk memaksimalkan produksi-produksi unggulan yang ada di Desa Ngrejo. Namun untuk saat ini bahwa untuk pengembangan produk-produk local unggulan sudah mulai terlihat seperti sirup dan kopi mangrove yang sekarang menjadi produk unggulan Kabupaten Tulungagung selain kopi hijau. Seperti halnya sirup mangrove dan kopi mangrove sekarang sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Tulungagung dan juga menjadi suatu produk-produk penting untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Ngrejo serta sebagai daya dukung kegiatan wisata yang ada di Desa Ngrejo.

Gambar 50. Produk Unggulan Desa Ngrejo



Sumber : Peneliti .

Sirup mangrove ini merupakan sebagai salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung yang sebagaimana juga untuk menunjang kegiatan wisata yang ada



di berbagai tempat di Kabupaten Tulungagung, hal ini bahwa juga tak lepas dengan peran mpok darwis sebagai komunitas sadar wisata yang akan memberikan pelatihan terhadap masyarakat untuk memproduksi Syrup Mangrove dengan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung. Namun produk unggulan untuk Syrup Mangrove tersebut masih belum adanya pemasaran secara tetap dan jika ada orang yang beli harus memesan terlebih dahulu terhadap salah satu anggota atau ketua dari Mpok Darwis yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Namun dengan adanya produk syrup mangrove menjadikan hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan juga dapat memberikan pengalaman terhadap masyarakat dan hal tersebut dapat meningkatkan kegiatan UMKM yang ada di setiap desa. Namun untuk wilayah pantai Sioro itu sendiri masih belum terlalu mengembangkan produk-produk local dan masih berjalan untuk memberikan pelatihan terhadap kelompok tani untuk bercocok tanam dan merubah pola pikir masyarakat di Desa Ngrejo untuk melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon-pohon yang ada di sekitaran jalan serta hal tersebut untuk meningkatkan produksi buah seperti alpukat, durian, mangga dan pisang yang nanti akan di kembangkan dalam produk unggulan desa Ngrejo sebagai kampung wisata. Terkait dengan produk unggulan masyarakat maka dalam hal ini di nyatakan oleh Ketua Mpok Darwis Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

Sedangkan kalau untuk produk unggulan itu salah satunya Syrup Mangrove yang bahan dasarnya adalah buah Mangrove yang lokasinya dari Pantai Gerangan dan Pantai Brumbun. Waktu ada Festival produk tersebut di pasarkan di patok dengan harga Rp.50rb tetapi juga laku mas. Namun syrup ini berkhasiat untuk penyakit Kholesterol dan Asam Urat. (hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Tanggal 27/02/2017, pukul 11.00 di kediaman Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)

Untuk Prosesnya dengan melakukan pelatihan di Balai Desa, dari Dinas Kelautan dan



Perikanan setelah itu di praktekkan pas ada pameran di Alun-alun. Namun pembuatan Syrup Mangrove Mpok Darwis akan menggandeng UMKM dan di bina oleh pihak Kades dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun kalau ada orang ingin pesan Syrup tersebut ya nanti tinggal telepon mas. (Hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata, tanggal 27/02/2017, pukul 11.00 di kediaman Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)

“dengan banyaknya destinasi wisata yang ada di Desa Ngrejo kita optimisi dan harapannya ke depan untuk Desa Ngrejo nanti akan menjadi desa wisata dan selain itu untuk pengembangan agrowisata juga sudah di persiapan seperti halnya pisang, alpukat dan sebagainya yang itu untuk mendukung atau mengangkat kegiatan wisata mas. Namun saat ini mindset masyarakat Desa Ngrejo masih focus pada pertanian jagung. Namun harapan saya ke depan bagaimana pengembangan agrowisata tersebut bukan hanya untuk meningkatkan penghasilan, namun penanaman pohon-pohon tersebut untuk meningkatkan penghijauan dan pada akhirnya nanti akan menjadi desa agrowisata” (Hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata tanggal 27/02/2017, pukul 11.00 di kediaman Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)

Dengan adanya produk unggulan tersebut akan menjadikan Desa Ngrejo sebagai desa yang akan memiliki produk-produk unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dapat mengembangkan sector UMKM yang berbasis agrowisata. Untuk desa Ngrejo nantinya ke depan selain mengembangkan kampung wisata juga akan mengembangkan agrowisata yang hal tersebut akan mendorong kegiatan pariwisata yang ada di Desa Ngrejo termasuk dengan wisata Pantai Soro yang sebagaimana nantinya akan dijadikan sebagai bentuk upaya peningkatan kegiatan perekonomian desa dan mengembangkan proses untuk desa mandiri wisata dan agrowisata. Namun dalam program kerja pemerintah daerah saat ini termasuk juga focus dari Mpok Darwis adalah untuk



membangun infrastruktur termasuk jalan yang masih belum terbangun dan bersifat jalan setapak terutama untuk menuju lokasi obyek wisata. Hal ini bahwa selain adanya infrastruktur jalan mpok darwis, Balai Desa Ngrejo dan Kecamatan akan juga focus perbaikan-perbaikan jalan yang masih rusak termasuk jalan untuk menuju Pantai Brumbun dan Pantai Gerangan yang nantinya akan masuk dalam program kerja pemerintah. Karena tanpa adanya infrastruktur yang layak maka pengembangan wisata akan sulit dilakukan karena akses untuk menuju obyek wisata yang sangat sulit dan hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang layak maka hal tersebut bukan hanya memudahkan dalam pengembangan wisata saja tetapi juga akan memberikan kemudahan terhadap pengunjung yang akan menuju obyek wisata Sioro yang sekarang menjadi wisata terbaru di Kabupaten Tulungagung. Namun tetap menjadi berpegangan dari informasi awal bahwa untuk melakukan pembangunan wisata di Sioro harus melalui proses perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Perhutani sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka semua segala dana akan dicairkan dan pembangunan wisata dapat berjalan. Hal tersebut dinyatakan oleh ketua Kelompok Sadar Wisata di Balai Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

“kalau untuk masalah pendanaan harus butuh legalitas mas dari pemerintah, seperti dana hibah, biaya operasional dan sebagainya, tanpa adanya legalitas dana tidak cair. Saat ini yang ada adalah Dana Desa, dana dari Pemkab, dan penghasilan dari dana-dana pengelolaan potensi yang ada di Desa Ngrejo. Namun terkait dengan program kerja dari Mpok Darwis ke depan lebih mengutamakan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan diutamakan untuk pembangunan Infrastruktur, setelah itu nanti akan mengarah kepada Pengembangan Wisata seperti halnya Pantai Sioro. (Hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata, tanggal 27/02/2017 pukul 11.30 bertempat di Balai Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)

Hal ini bahwa jika belum adanya legalitas dan juga perumusan anggaran yang matang maka



pembangunan wisata belum bisa berjalan sehingga perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Perhutani dan juga termasuk Balai Desa harus benar-benar ada dokumen legal dan juga adanya rancangan anggaran sebagai upaya alokasi pendanaan pembangunan wisata yang ada di Desa Ngrejo. Namun dengan adanya pengembangan wisata tersebut juga di butuhkan partisipasi masyarakat serta juga di butuhkan adanya partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi terutama untuk membangun jalan sebagai akses untuk menuju obyek wisata serta juga membutuhkan tenaga-tenaga dari masyarakat untuk mengembangkan obyek wisata di Desa Ngrejo.

D. Upaya Dan Langkah-Langkah Dari Pihak Terkait

1. Langkah-Langkah Dari Komunitas Sadar Wisata “Mpok Darwis” Dalam Pengembangan Wisata Sioro

Wisata pantai Sioro memang belum masuk dalam program kerja pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, namun dalam hal pengembangannya sudah ada berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendorong wisata yang ada di masyarakat Desa Ngrejo termasuk untuk mengembangkan agrowisata melalui perkebunan pisang, pembentukan kelompok tani dan juga memberikan pelatihan terhadap masyarakat untuk mengembangkan syrup mangrove sebagai salah satu produk unggulan. Hal ini bahwa meskipun belum adanya perjanjian kerjasama dengan pihak terkait dan juga belum masuk dalam program kerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, namun sudah ada upaya dari desa melalui komunitas “Mpok Darwis” dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada di Desa Ngrejo. Hal ini Mpok Darwis tidak bekerja sendiri namun butuh membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti halnya dengan Balai Desa, masyarakat, kecamatan dan sebagainya untuk mengembangkan berbagai potensi yang nantinya untuk menunjang kegiatan wisata yang ada di Desa Ngrejo dengan pengembangan wisata



Sioro. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar wisata Desa Ngrejo yakni terdapat beberapa upaya dan langkah-langkah yang di lakukan oleh “Mpok Darwis” Ke depan dalam mengembangkan wisata Sioro yakni sebagai berikut :

Tabel 54. Program-program dan langkah kerja pengembangan wisata Sioro.

PROGRAM-PROGRAM DAN LANGKAH KERJA DALAM PENGEMBANGAN

WISATA PANTAI SIORO

No.	Program Kerja Ke Depan dalam Pengembangan Wisata Pantai Sioro	Stakeholder
1.	Pembangunan Jaringan HT untuk membantu koneksi jaringan HP pengunjung pada saat mengunjungi pantai	⇒ Balai Desa Ngrejo ⇒ Mpok Darwis ⇒ Kecamatan
2.	Pemberian latihan terhadap kelompok tani seperti halnya penjualan pupuk dan juga pencocokan tanam sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.	⇒ Mpok Darwis ⇒ Petani
3.	Penanaman pohon-pohon sebagai upaya penghijauan kembali yang ada di Desa Ngrejo dan juga upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil produk unggulan.	⇒ Mpok Darwis ⇒ Masyarakat Desa Ngrejo
4.	Akan mengembangkan agrowisata yang saat ini akan di kembangkan di desa Ngrejo seperti halnya buah pisang, alpukat, dan durian yang saat ini sedang di persiapan.	⇒ Mpok Darwis ⇒ Kelompok Tani
5.	Mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok tani sebagai daya dukung untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Ngrejo.	⇒ Mpok Darwis ⇒ LMDH ⇒ BALAI DESA ⇒ Kelompok Tani



6.	Uji perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk pembagian prosentase hasil antara Perhutani, Dinas Pariwisata, Mpok Darwis dan juga Balai Desa agar adanya keadilan dalam pembagian dana hasil.	<p>⇒ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>⇒ Dinas Perhutani</p> <p>⇒ DPRD</p> <p>⇒ Mpok Darwis</p> <p>⇒ Balai Desa</p> <p>⇒ Kecamatan</p>
7.	Penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pembentukan komunitas “mpok darwis” sebagai payung hukum kelompok sadar wisata itu sendiri.	<p>⇒ DPRD</p> <p>⇒ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>⇒ Mpok Darwis</p>
8.	Pembentukan kantor sekretariat LMDH (Lembaga Masyarakat dan Hutan) yang digunakan sebagai kios dan distributor yang nantinya untuk mengakomodasi kelompok tani di desa Ngrejo dalam pengembangan hasil-hasil produk unggulan dalam bidang pertanian.	<p>⇒ Mpok Darwis</p> <p>⇒ Balai Desa</p> <p>⇒ LMDH</p>
9.	Mengembangkan bahan mangrove sebagai produk unggulan desa Ngrejo sebagai upaya untuk menarik para wisatawan serta juga sebagai daya dukung kegiatan wisata Pantai Sioro.	<p>⇒ Mpok Darwis</p> <p>⇒ Balai Desa</p> <p>⇒ Dinas Kelautan dan Perikanan</p>
10.	Pembangunan rumah pohon yang di bangun di sekitaran jalan untuk menuju Pantai Sioro untuk memudahkan pengunjung melihat obyek wisata Sioro	<p>⇒ Mpok Darwis</p> <p>⇒ Masyarakat Desa Ngrejo</p>
11.	Pemberian panah arah menuju pantai Sioro untuk memudahkan wisatawan dan pengunjung baik	<p>⇒ Mpok Darwis</p> <p>⇒ Masyarakat Desa</p>



pengunjung local maupun dari luar kota.

Ngrejo

Sumber : di olah oleh Penulis dari hasil wawancara Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo

Namun dalam hal ini perlu di ingat untuk menuju tahap pengembangan wisata masih belum maksimal dan masih membutuhkan proses dan daya dukung yang lainnya serta juga membutuhkan waktu untuk melakukan pembangunan pariwisata yang ada di Desa Ngrejo hingga sampai dengan pembentukan kampung wisata. Dalam hal ini di karenakan sebagai berikut :

Gambar 51. Gambaran persoalan pembangunan wisata Sioro.

Hambatan-hambatan dalam pembangunan wisata di Desa Ngrejo dalam Pengembangan Pantai Sioro

- Terkendala dengan anggaran yang masih belum cukup
- Masalah pembangunan infrastruktur
- Masih belum adanya persetujuan dari Dinas Perhutani untuk melakukan pembebasan lahan terhadap akses untuk menuju obyek wisata.
- Belum adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Perhutani dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga master plan untuk mengembangkan wisata Sioro belum terancang.

PEMBANGUNAN
PARIWISATA
TERHAMBAT

Gambar. Sumber : gambar di olah Penulis

Namun meskipun wisata pantai Sioro belum masuk dalam program kerja pemerintah



daerah Kabupaten Tulungagung, namun sudah ada upaya-upaya dan langkah dari desa untuk mengembangkan potensi wisata dan desa yang ada di Desa Ngrejo dengan langkah-langkah dari komunitas mpok darwis, Balai Desa dan Masyarakat untuk memaksimalkan berbagai potensi serta juga berusaha untuk memfasilitasi pengunjung-pengunjung yang datang dari luar kota dengan memberikan produk-produk unggulan serta juga dengan penyediaan ojek terhadap para pengunjung untuk memudahkan pengunjung menuju obyek wisata Sioro yang masih baru. Namun hal yang paling di maksimalkan yang ada di Desa Ngrejo adalah memaksimalkan berbagai potensi pertanian dengan mengembangkan produk-produk unggulan dalam hal ini adalah untuk berupaya untuk menarik pengunjung dan mempromosikan terhadap pengunjung terhadap adanya produk-produk unggulan yang ada di Desa Ngrejo. Hal tersebut adalah untuk memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan tersebut sebagai daya dukung kegiatan wisata dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan kelompok tani dan juga masyarakat serta melakukan upaya penghijauan kembali yang ada di Desa Ngrejo. Terkait dengan pengembangan produk-produk agrowisata hal tersebut di nyatakan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

“untuk pengembangan agrowisata saat ini yakni pisang, alpukat dan durian yang sudah siap serta hal tersebut ke depannya untuk produk-produk unggulan sebagai pendukung kegiatan pariwisata seperti dijual sebagai oleh-oleh bagi pengunjung atau wisatawan yang berkunjung yang ada di Pantai tempat wisata tersebut. Nantinya 5 tahun ke depan setiap rumah atau warga akan menanam seperti alpukat, durian, pisang dan sebagainya. Namun untuk saat ini pola pikir masyarakat belum berfikir sampai ke situ masih focus dengan pertanian jagung. Sehingga ke depan nanti akan memfokuskan pengembangan agrowisata yang itu akan mengangkat perekonomian masyarakat.” (Hasil wawancara dari Ketua Kelompok Sadar Wisata tanggal 27/02/2017, pukul 13.00)

Namun selain itu juga bahwa Mpok Darwis selaku komunitas untuk berupaya dalam



memberikan pelatihan terhadap masyarakat dan juga kelompok tani untuk terus memaksimalkan hasil-hasil unggulan yang ada di Desa Ngrejo sebagai upaya untuk mendukung kegiatan wisata. Hal ini bahwa pembinaan terhadap para petani tersebut yang dilakukan oleh Mpok Darwis memiliki suatu tujuan tertentu agar dapat memaksimalkan potensi perkebunan yang ada di Desa Ngrejo dan juga memberikan kesejahteraan terhadap para petani melalui pembinaan kelompok tani dan juga merubah pola pikir masyarakat agar tidak focus dalam satu produk pertanian. Seperti yang telah di terapkan di berbagai tempat wisata adalah salah satunya Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek yang sebagaimana bahwa dengan memaksimalkan potensi perikanan yang ada di Pantai Prigi yang digunakan misalnya untuk oleh-oleh khas unggulan dari Pantai Prigi kepada para wisatawan dan pengunjung dari luar kota, dalam hal ini bahwa potensi perikanan di Pantai Prigi dapat digunakan untuk sumber penghasilan masyarakat yang ada di sekitaran pesisir pantai serta juga sebagai upaya daya dukung pariwisata yang ada di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek. Termasuk yang akan di terapkan di Pantai Sioro Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung bahwa dengan potensi perkebunan yang sangat besar serta juga dengan lahan yang mendukung hal tersebut akan menjadi sumber penghasilan masyarakat yang ada di Desa Ngrejo serta sebagai upaya untuk menarik para pengunjung dan wisatawan yang berasal dari luar kota serta memberikan dorongan terhadap masyarakat dan kelompok tani untuk terus mengembangkan berbagai varietas unggulan yang akan menjadi ciri khas Desa Ngrejo. Hal ini adalah menjadi salah satu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat serta juga mendorong masyarakat Desa Ngrejo produktif dalam mengembangkan agrowisata yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.

Pembinaan kelompok tani yang dilakukan oleh Mpok Darwis adalah suatu bentuk untuk memberikan pembinaan agar kelompok tani ke depannya dapat menjadi pendukung kegiatan perkebunan yang ada di Desa Ngrejo. Hal ini bahwa dengan potensi perkebunan



yang sangat besar serta potensi wisata pantai yang sangat tinggi dalam hal ini akan mendorong masyarakat yang ada di Desa Ngrejo untuk produktif dengan diberikannya pelatihan dan pembinaan di bidang tertentu termasuk dalam bidang perkebunan dan pertanian yang nantinya untuk mendukung kegiatan pariwisata hingga terbentuknya kampung wisata di Desa Ngrejo yang akan menjadi planning dari Mpok Darwis dan Pemerintah Daerah. Hal ini bahwa ke depan nantinya sampai 5 tahun ke depan maka Pemerintah Daerah harus benar-benar mempersiapkan berbagai strategi dan juga langkah-langkah tertentu dalam pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Desa Ngrejo dan Mpok Darwis dalam pengembangan potensi Desa Ngrejo sebagai kampung wisata bahwa seperti pembentukan kelompok tani salah satunya adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada yakni potensi dari masyarakat dan juga potensi hasil-hasil dari perkebunan yang sebagaimana hal tersebut akan meningkatkan nilai tambah serta memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian yang ada di Desa Ngrejo. Terkait dengan langkah-langkah tersebut akan di nyatakan oleh ketua Mpok Darwis Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

“rencana ke depan nanti kita akan mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok tani. Jadi kelompok tani nanti akan ambil di LMDH dan Petani akan ambilnya di kelompok Tani jadi nanti akan ada rantai-rantai distribusi yang akan di lakukan sebagai langkah ke depan. LMDH akan sebagai kios dan distributor nanti akan di distribusikan kepada kelompok tani dan petani sehingga kelompok tani tetap mendapatkan untung. (Hasil wawancara dari Ketua Komunitas Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo tanggal 27/02/2017 pukul 13.00, di Desa Ngrejo)

“Kelompok tani nanti akan punya pemasukan sendiri dan keuntungan di dapat dari penjualan pupuk misalnya 1 sak pupuk nanti keuntungannya berapa, terus untuk memberi gaji pengurusnya berapa, jadi nanti akan ada prosentasenya berapa persen gaji untuk pengurus dan



penghasilan untuk kelompok tani.

Namun untuk penghasilan mpok darwis sendiri ini adalah dari penjualan stiker dan penjualan kaos yang itu nanti menjadi pemasukan kas mpok darwis. Untuk stiker modal 2000 dan nanti untuk kas 3000 sehingga penjualan untuk stiker mencapai 5000 an mas. Selain itu secara tidak langsung stiker tersebut digunakan untuk promosi terhadap wisatwan meskipun secara tidak langsung dalam hal ini menjadi salah satu cara untuk menarik pengunjung. (Hasil wawancara dari Ketua Komunitas Kelompok Sadar Wisata Desa Ngrejo tanggal 27/02/2017 pukul 13.00 di Desa Ngrejo)

2. Legalitas Dan Dasar Hukum Pemberdayaan Mpok Darwis Sebagai Pengembang Wisata Di Kabupaten Tulungagung.

Komunitas sadar wisata di Kabupaten Tulungagung memiliki suatu peran yang sangat besar terutama mereka sebagai pelaksana untuk melakukan pengembangan wisata di berbagai obyek wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Seperti dalam ulasan penjelasan sebelumnya bahwa Mpok Darwis sendiri sudah melakukan beberapa langkah yang ada di wisata pantai Sioro seperti melakukan pembinaan terhadap kelompok tani, membentuk kegiatan-kegiatan dalam pengembangan potensi perkebunan, melakukan pembangunan rumah pohon dan sebagainya hal tersebut adalah untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Pantai Sioro Desa Ngrejo. Dengan adanya untuk memaksimalkan potensi tersebut harapannya ke depan Mpok Darwis yang akan memegang estafet pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung sedangkan pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan mpok darwis. Hal Ini bahwa peran Mpok Darwis memiliki suatu peran yang sangat penting sebagai pelaksana yang ada di Lapangan untuk melakukan terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata. Untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan tersebut bahwa Mpok Darwis harus melakukan



berbagai penyusunan program kerja serta merencanakan berbagai alokasi anggaran yang akan di cairkan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di berbagai desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hal ini juga tidak lepas dengan peran masyarakat yang ada di Desa dengan menggandeng masyarakat dan juga balai desa serta harus adanya sinkronisasi antara pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan program-program kerja terkait dengan pengembangan wisata.

Pembentukan Mpok Darwis tersebut juga adalah tidak lepas dengan peran Balai Desa yang memiliki peran serta juga tidak lepas dari bantuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sebagaimana dalam hal ini antara pihak terkait harus adanya sinkronisasi dalam menjalankan program-program kerja serta juga meningkatkan upaya untuk melaksanakan program untuk mengembangkan potensi-potensi wisata serta juga melaksanakan pembangunan wisata yang ada di berbagai desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan upaya untuk membentuk serta juga mempeberdayakan komunitas mpok darwis, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung merancang substansi peraturan daerah tentang bagaimana pemberdayaan mpok darwis yang sebagaimana hal tersebut termuat hal-hal yang penting terkait yakni sebagai berikut :

Tabel 55. Substansi peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pok Darwis

**BEBERAPA POIN-POIN PENTING TENTANG ADANYA PEMBERDAYAAN
“MPOK DARWIS” DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BAB	PASAL	SUBSTANSI	ISI
-----	-------	-----------	-----



<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">2</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. POKdarwis dibentuk sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata agar supaya dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik. 2. Meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air.
	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">3</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">FUNGSI DAN KEDUDUKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapa pesona di lingkungan daerah tujuan wisata. 2. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah
	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">4</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">KEDUDUKAN DAN TEMPAT</p>	<p>Pok darwis berkedudukan di desa dan kelurahan dan di sekitar daerah tujuan wisata.</p>



5.	KEANGGOTAAN	<p>Syarat-syarat umum keanggotaan mpok darwis yakni sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bersifat sukarela Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan komitmen Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah anggota setiap PokDarwis minimal 15 orang.
6.	KEPENGURUSAN, STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS	<ol style="list-style-type: none"> Kepengurusan PokDarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, Sekretariat, Anggota dan seksi-seksi. Hubungan dan koordinasi pengurusan pok darwis dilaksanakan secara insentif dan di terjemahkan dalam suatu gambar struktur organisasi yang sistematis sehingga setiap pihak dapat mengetahui jabatan dan wewenang masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam



			<p>lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>c. Sebagai acuan fungsi dan tugas dari masing-masing pengurus kelompok sadar wisata di lanjut diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>
	<p>7</p>	<p>KEGIATAN</p>	<p>Lingkup kegiatan mpok darwis meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota mpok darwis dalam bidang kepariwisataan.</p> <p>b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.</p> <p>c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.</p> <p>d. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan</p>



			<p>memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.</p> <p>e. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.</p> <p>f. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat</p>
<p>3</p>	<p>8</p>	<p>PEMBENTUKAN MPOK DARWIS</p>	<p>a. Pok darwis dapat dibentuk melalui inisiatif masyarakat local maupun inisiatif dari instansi yang terkait di bidang kepariwisataan.</p> <p>b. Dalam hal Pokdarwis dibentuk inisiatif masyarakat local maka dapat dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa/lurah <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa/lurah melaporkan hasil pembentukan Pok Darwis oleh masyarakat kepada dinas setempat yang



					<p>membidangi kepariwisataan selaku pembina untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan</p> <p>b. Pengukuhan mpok darwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas membidangi kepariwisataan.</p> <p>c. pencatatan dan pendaftaran Mpok Darwis dilakukan oleh Dinas yang membidangi kepariwisataan untuk di laporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Dalam hal pembentukan Kelompok Sadar Wisata dibentuk dari inisiatif dari kepariwisataan maka dilakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Dinas Pariwisata Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk Pokdarwis dengan menggalang inisiatif ke masyarakat di</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>desa untuk membentuk mpok darwis atau inisiatif dapat muncul dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota menggalang inisiatif ke masyarakat di tingkat desa untuk membentuk Pokdarwis.</p> <p>b. Kepala desa/Lurah memfasilitasi pertemuan warga masyarakat dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk mpok darwis.</p> <p>c. Hasil pembentukan mpok darwis selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan pengesahan dan pembinaan lebih lanjut.</p> <p>d. Pengukuhan pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>e. Pencatatan dan pendaftaran Podarwis dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi Pariwisata serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			Kreatif.
	9		Pokdarwis didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas dengan sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
4	10	PEMBINAAN	<p>1. Tujuan PokDarwis adalah “</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di daerahnya.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.</p> <p>2. Adapun sasaran pembinaan kelompok sadar wisata adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Meningkatkan kapasitas mpok darwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di daerah.</p>



			<p>b. Tumbuhnya mpok darwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.</p> <p>c. Terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Mpok Darwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.</p>
	<p>11</p>	<p>BENTUK PEMBINAAN</p>	<p>1. Pembinaan langsung yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsure Pembina dengan PokDarwis sebagai pihak yang dibina. Bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan/workshop, lomba, jambore dan lain-lain.</p> <p>2. Pembinaan tak langsung yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsure Pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun media elektronik) maupun media publikasi lainnya. Bentuk</p>



			<p>pembinaan tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya (misalnya : baliho, poster, spanduk dan sebagainya).</p>
	12	<p>UNSUR PEMBINA DAN KEGIATAN PEMBINAAN</p>	<p>1. Unsur Pembinaan Mpok Darwis terdiri dari Pemerintah Daerah atau Dinas yang membidangi Pariwisata, pihak swasta, kalangan industri pariwisata maupun asosiasi kalangan pariwisata</p> <p>2. Dinas yang membidangi kepariwisataan, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan kegiatan sebagai berikut :</p> <p>a. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/pedoman Kelompok Sadar Wisata.</p> <p>b. Penyelenggaraan Sarasehan/Temu Pokdarwis.</p> <p>c. Penyelenggaraan pelatihan Pokdarwis</p> <p>d. Penyelenggaraan Apresiasi/Pemberian penghargaan ke Pok Darwis.</p> <p>e. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data PokDarwis.</p>



	13	SUMBER PENDANAAN DAN PEMBINAAN	Sumber Pendanaan untuk pembinaan Pok Darwis berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dari pihak swasta.
	14	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Evaluasi Pokdarwis merupakan bagian dari langkah pembinaan melalui pengamatan dan penilaian terhadap kondisi dan perkembangann pokdarwis di daerah dikaitkan dengan adanya tujuan, sasaran serta fungsi dari pembentukan tersebut. 2. Pemantauan dan evaluasi Pokdarwis dilakukan oleh Dinas secara terus menerus dan berkesinambungan yang membidangi kepariwisataan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. 3. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar apresiasi atau penghargaan terhadap PokDarwis.

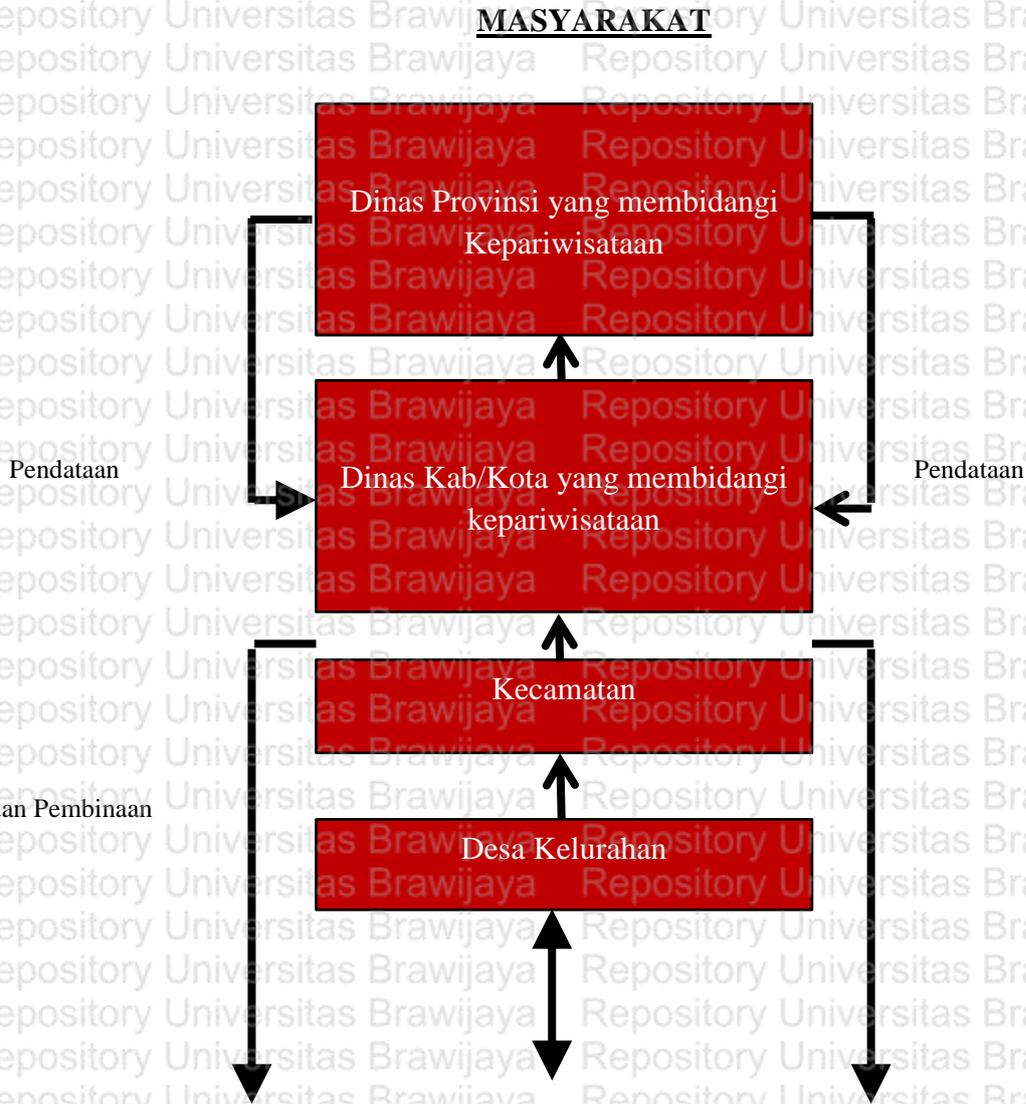
Table Sumber :Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata

Namun dalam draf peraturan daerah yang memuat pokok-pokok penting terkait hal yang memuat substansi pemberdayaan PokDarwis hal ini bahwa dalam peraturan tersebut juga digambarkan tentang bagaimana skema prosedur pembentukan atas inisiatif masyarakat yakni sebagai berikut:



Gambar 52. Skema prosedur pembentukan Mpok Darwis atas inisiatif masyarakat

SKEMA PROSEDUR PEMBENTUKAN POKDARWIS ATAS INISIATIF





GAMBAR. SUMBER: DRAF PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBERDAYAAN POKDARWIS

3. Langkah Dan Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai

Terkait dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, bahwa sebelum mengacu pada substansi strategi kebijakan yakni beberapa tentang visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi yakni sebagai berikut :

Dalam hal ini dipaparkan selanjutnya tentang kinerja utama/sasaran strategis, indikator kinerja utama, formulasi penghitungan, sumber data dan penanggung jawab. Hal ini terkait dengan beberapa indikator yakni dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 56. Indikator dalam kinerja sasaran strategis

INDIKTOR-INDIKATOR DALAM KINERJA SASARAN STRATEGIS

No.	Kinerja Utama/Sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab

	Strategis	utama			
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Th. } n - (n - 1) \times 100\%}{\text{Jumlah wisatawan Th. } N - 1}$	Data dari obyek wisata yang dikelola dan bertribusi	Bidang Pariwisata
2.	Meningkatnya konsumsi produk dan jasa kreatif local	Persentase peningkatan omzet pelaku kreatif	$\frac{\text{Omzet Pelaku Kreatif Th. } n - (n - 1) \times 100}{\text{Omzet Pelaku Kreatif Th. } N - 1}$	Data dari bidang ekonomii kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif
3.	Meningkatnya kesempatan para pemuda untuk mengembangkan produktivitas dan kewirausahaan	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	$\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi Th. } n \times 100}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan Th. } n}$ $\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi Th. } n - (n - 1) \times 100}{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi Th. } n - 1}$ Jumlah Pemuda Wirausaha baru Th. n	Data dari bidang pemuda dan KNPI	Bidang Pemuda

		menjadi wirausaha baru			
4	Meningkatnya prestasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase olahraga yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah organisasi olahraga yang berprestasi Th. } n \times 100}{\text{Jumlah Organisasi olahraga Th. } n}$	Data dari bidang olahraga dan kroni	Bidang Olahraga
		Jumlah pelaku olahraga yang berprestasi	Jumlah pelaku olahraga berprestasi Th.n		

TABEL. SUMBER : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

E. ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

1. LANGKAH-LANGKAH KOMUNITAS MPOK DARWIS DALAM PENGEMBANGAN SIORO

Dalam mengembangkan suatu kepariwisataan perlu adanya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dan juga perlu adanya rencana-rencana yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini bahwa dengan adanya langkah-langkah strategis dan juga upaya-upaya dalam melaksanakan pembangunan pariwisata harus sesuai dengan apa yang di orientasikan dalam hal untuk membangun kegiatan pariwisata serta juga perlu adanya sumber daya-sumber daya yang mendukung kegiatan pembangunan kegiatan pariwisata. Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata serta juga langkah strategis yang dilakukan perlu adanya oprientasi paradigm pembangunan dalam kepariwisataan serta juga perlu adanya suatu

rancangan atau desain tertentu untuk membangun suatu pariwisata. Dalam pembangunan pariwisata di bagi menjadi 2 paradigma pembangunan yakni pertumbuhan dan keberlanjutan (Dalam buku Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*). Hal ini bahwa dipaparkan tentang adanya paradigma pembangunan kepariwisataan yakni sebagai berikut :

Tabel 57. Orientasi dalam paradigma pembangunan

No.	Karakteristik	Orientasi Paradigma Pembangunan Kepariwisataan	
		Pertumbuhan (Growth)	Berlanjut (Sustainable)
1.	Fokus	Growth : Mass Tourism	Development
2.	Nilai yang dikejar	Devisa & Investasi	Community Based & Green Tourism
3.	Indikator	Jumlah kunjungan Lama tinggal & Pembelanjaan wisatawan	Dampak multi Ganda dari Kepariwisataa
4.	Peran Pemerintah	Enterprenaur & Developer	Fasilitator
5.	Peran Masyarakat		
	Akses	Tertutup	Terbuka
	Peran	Pasif	Aktif-partisipatif
	Karakter	Beneficiaries	Entrepreneur
	Posisi	Marginal	Stakeholder
6.	Tuntutan kualitas	Standart lokal	Standart universal

(Sumber : Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan Destinasi*

Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)

Sedangkan dalam hal untuk pembangunan wisata Pantai Sioro jika di analisis dan interpretasikan berdasarkan paradigme kepariwisataan yakni sebagai berikut :

Tabel 58. Analisis tentang pembangunan Wisata Sioro

No.	Karakteristik	Orientasi Paradigma		Gambaran Pembangunan Wisata		Keterangan
		Pembangunan Kepariwisataan		Sioro		
		Pertumbuhan (Growth)	Berlanjut (Sustainable)	Pertumbuhan (Growth)	Berlanjut (sustainable)	
1	Fokus	Growth : Mass Tourism	Development	-	-	Untuk wisata sioro lebih melakukan arah pengembangan dan pembangunan dan sifatnya berlanjut. Hal ini bahwa di buktikan dengan melakukan seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah pohon • Pengembangan produk unggulan • Pemberdayaan kelompok tani • Pembentukan kantor sekretariat sebagai kios dan distributor untuk mengkomodasi kebutuhan kelompok

					tani <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan HT untuk membantu wisatawan/pengunjung dalam berkomunikasi
2	Nilai yang dikejar Devisa & Investasi	Community Based & Green Tourism	-		Untuk pembangunan wisata Sioro bahwa nilai yang di kejar berorientasi berlanjut karena berbasis community dan Green Tourism. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya Mpok Darwis atau kepanjangan dari Komunitas Sadar Wisata hal tersebut lebih banyak melibatkan komunitas dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan.Sedangkan Green Toursim adalah seperti yang akan dilakukan oleh Mpok Darwis yakni melakukan penghijauan kembali di sekitaran jalan yang untuk menuju obyek wisata seperti Sioro,

REPOSITORY.UB.AC.ID UNIVERSITAS BRAWIJAYA	3 Indikator	Jumlah kunjungan Lama tinggal & Pembelanjaan wisatawan	Dampak multi Ganda dari Kepariwisataa	-	-	Brumbun dan Gerangan.
REPOSITORY.UB.AC.ID UNIVERSITAS BRAWIJAYA	4 Peran Pemerintah	Enterprenaur & Developer	Fasilitator			Terkait dengan pengembangan wisata Sioro bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai pendukung sumber daya dan fasilitator, sedangkan pelaksanaannya adalah Mpok Darwis atau kelompok sadar wisata beserta kelompok lainnya seperti kelompok tani dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata dan agrowisata sebagai pendukung kegiatan pariwisata di Desa Ngrejo.
REPOSITORY.UB.AC.ID UNIVERSITAS BRAWIJAYA	5 Peran Masyarakat					Untuk pengembangan
REPOSITORY.UB.AC.ID UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Akses	Tertutup	Terbuka	-		Untuk pengembangan

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

					wisata Sioro keterlibatan masyarakat menjadi hal yang prioritas.Hal ini dengan adanya komunitas Mpok Darwis bahwa akan memberikan peluang akses yang luas terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan obyek wisata
	Peran	Pasif	Aktif-partisipatif	-	Pembentukan kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung menjadikan masyarakat semakin partisipatif
	Karakter	Beneficiaries	Entrepreneur	-	Pembentukan kelompok tani di Desa Ngrejo adalah salah satu untuk memberikan pelatihan terhadap para petani untuk berwirausaha melalui sector perkebunan.Hal ini juga merupakan sebagai bentuk untuk mengembangkan agrowisata yang nantinya sebagai produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah.

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya

Posisi	Marginal	Stakeholder	-	Pengembangan pariwisata termasuk di wisata Sioro juga membangun relasi dengan Stakeholder lainnya seperti Mpok Darwis, Balai Desa, Kecamatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perhutani. Namun dalam pelaksanaan kerjasama terkadang masih kurang sinkronisasi terutama prosesstase pembagian hasil.
6 Tuntutan kualitas	Standart lokal	Standart universal	-	Dalam pembangunan kepariwisataan menjadi harapan dari Bupati ke depannya Kabupaten Tulungagung bisa seperti Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata yang sangat besar namun dapat menarik berbagai pengunjung dari berbagai tempat dan daerah. Hal ini dengan besarnya potensi wisata di Kabupaten Tulungagung akan mendorong perekonomian menjadi

			lebih pesat dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai alokasi untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung . Sehingga keinginan dari pemerintah daerah untuk Kabupaten Tulungagung nanti menjadi wisata yang benar-benar membawa perekonomian Tulungagung menjadi lebih baik serta juga dapat menarik berbagai pengunjung yang ada dari berbagai daerah di Indonesia.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : di olah oleh penulis

Namun dalam kinerja pembangunan pariwisata terdapat beberapa aspek yang harus di ukur seperti halnya aspek indicator lingkungan fisik, aspek indicator social budaya dan juga aspek indicator ekonomi. Ketiga aspek tersebut adalah bagaimana menggambarkan tentang indicator kinerja pembangunan kepariwisataan yang ada di setiap daerah serta upaya dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata tersebut. Hal ini dinyatakan dalam buku *Drs. Bambang Sunaryo. M.Sc. MS, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata* bahwa aspek-aspek dalam kinerja pembangunan pariwisata yakni di uraikan sebagai berikut

Tabel 59. Aspek-aspek indicator dalam kinerja pembangunan kepariwisataan

ASPEK-ASPEK INDIKATOR DALAM KINERJA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN



No.	Aspek-aspek Indikator dalam Pembangunan Kepariwisata	Uraian penjelasan
1	Aspek Indikator Lingkungan Fisik	<p>Ada dua kategori indikator lingkungan dari komponen fisik yang memerlukan adanya suatu pengamatan dan pengukuran secara periodik yakni sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fisik yang bersifat <i>fixed</i> : yaitu berupa sumber daya alam/ekologi bukan buatan manusia, seperti lanskap, hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara, terumbu karang, flora dan fauna dan sebagainya. 2. Lingkungan fisik yang bersifat <i>flexible</i> : yaitu berupa sumber daya alam buatan manusia, seperti : sistem infrastruktur, <i>water supply</i> , pembuangan limbah, jaringan listrik, transportasi, pos dan telekomunikasi, layanan kesehatan, perbankan, restoran, cinderamata dan sebagainya.
2	Aspek Indikator Sosial Budaya	<p>Beberapa indikator yang harus selalu dimonitor dan ditakar kondisi dan kapasitasnya pada aspek sosial budaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah wisatawan dan tipe kegiatan rekreasi serta perilaku wisatawan yang dapat diserap oleh destinasi tanpa harus memengaruhi identitas, gaya hidup dan kehidupan sosial



--	--

<p>budaya serta adat istiadat dari masyarakat setempat.</p> <p>2. Lama Tinggal dan tipe kepariwisataan yang tidak mengubah budaya lokal secara signifikan baik langsung maupun tak langsung utamanya dalam hal seni, kerajinan, sistem kepercayaan, upacara, adat dan tradisi.</p> <p>3. Tipe kepariwisataan yang tidak ditolak oleh penduduk setempat, terutama yang tidak menghalangi mereka untuk menggunakan layanan dan fasilitas masyarakat/umum yang ada di destinasi.</p> <p>4. Jumlah pengunjung dan tipe interaksi antara wisatawan dan lingkungan di destinasi, tanpa harus menimbulkan penurunan pengalaman dan kenyamanan pengunjung secara drastis.</p>

--

3 Aspek Indikator Ekonomi	
---------------------------	--

<p>Beberapa indikator yang harus selalu dipantau keadaannya dari aspek ekonomi pada model kepariwisataan berlanjut adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Derajat spesialisasi dalam kepariwisataan yang sudah berpengaruh pada hilangnya peluang kerja dan usaha masyarakat setempat.</p> <p>2. Angka dislokasi tenaga kerja atau tingkat kehilangan tenaga kerja manusia di sektor-</p>

--



	<p>sektor lain yang disebabkan oleh industri kepariwisataan yang ada.</p> <p>3. Keadilan distribusi pendapatan dari kegiatan kepariwisataan dan dampak penguatannya pada masyarakat maupun kelembagaan setempat.</p> <p>4. Tingkat penyerapan tenaga kerja dari aktivitas kepariwisataan di destinasi terhadap sumber daya manusia pariwisata yang ada.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel.....SUMBER :Drs.Bambang Sunaryo.M.Sc. MS, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Sedangkan untuk pengembangan wisata Sioro di Desa Ngrejo Kecamatan

Tanggunggunung tersebut bisa di lihat yakni sebagai berikut :

Tabel 60.Analisis pembangunan kepariwisataan wisata Sioro

No.	Aspek-aspek Indikator dalam Pembangunan Kepariwisataaan	Uraian penjelasan	Gambaran di Wisata Sioro
1	Aspek Indikator Lingkungan Fisik	Ada dua kategori indikator lingkungan dari komponen fisik yang memerlukan adanya suatu pengamatan dan pengukuran secara periodik yakni sebagai	Sedangkan untuk di wisata Sioro bahwa lingkungan fisik masih berupa Fixed .Karena masih sebagai wisata baru dan belum



			<p>berikut :</p> <p>a. Lingkungan fisik yang bersifat <i>fixed</i> : yaitu berupa sumber daya alam/ekologi bukan buatan manusia, seperti lanskap, hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara, terumbu karang, flora dan fauna dan sebagainya.</p> <p>b. Lingkungan fisik yang bersifat <i>flexible</i> : yaitu berupa sumber daya alam buatan manusia, seperti : sistem infrastruktur, <i>water supply</i> , pembuangan limbah, jaringan listrik, transportasi, pos dan telekomunikasi, layanan kesehatan, perbankan, restoran, cinderamata dan sebagainya.</p>	<p>terlalu banyak pengunjung dan pembangunan fisik yang masih sangat minim.Selain itu akses untuk menuju wisata Sioro masih sangat minim dan juga di penuh dengan hutan-hutan dan perkebunan pisang.Polusi udara pun masih cukup segar karena belum adanya akses jalan yang baik sehingga masih sedikit lalu lintas dari para wisatawan.Kondisi pantai masih cukup bersih dan juga pengunjung masih belum terlalu banyak yang mengunjungi wisata Sioro.</p>
2	Aspek Budaya	Indikator Sosial	<p>Beberapa indikator yang harus selalu dimonitor dan ditakar kondisi dan kapasitasnya pada aspek sosial budaya adalah :</p>	



	<p>3.</p> <p>a. Jumlah wisatawan dan tipe kegiatan rekreasi serta perilaku wisatawan yang dapat diserap oleh destinasi tanpa harus memengaruhi identitas, gaya hidup dan kehidupan sosial budaya serta adat istiadat dari masyarakat setempat.</p>		<p>Untuk di pantai Sioro karena masih baru dan juga jumlah pengunjung masih belum terlalu banyak karena akses jalan yang masih belum terfasilitasi hal ini kehidupan social budaya dan adat istiadat dari masyarakat desa Ngrejo masih sangat terjaga dan sesuai dengan khas lokalnya. Sebagai masyarakat yang terkenal santun dan ramahnya, serta juga sifat tolong menolong masih sangat melekat di ciri khas masyarakat Desa Ngrejo</p>
	<p>4.</p> <p>b. Lama Tinggal dan tipe kepariwisataan yang tidak mengubah budaya lokal secara signifikan baik langsung maupun tak langsung utamanya dalam hal seni,</p>		<p>Fasilitas menuju wisata Sioro belum terbangun dan hanya beberapa saja. Belum ada fasilitas pendukung lainnya seperti Villa, Penginapan, dan sebagainya sehingga masih</p>



		<p>kerajinan, sistem kepercayaan, upacara, adat dan tradisi.</p>	<p>belum ada wisatawan yang tinggal sementara atau menginap di sekitaran akses tempat tersebut. Sehingga budaya local masih tetap terjaga dan hal yang terkait dengan adat dan tradisi serta kerajinan ataupun seni masih terjaga di wilayah Desa Ngrejo.</p>
	<p>5. c. Tipe kepariwisataan yang tidak ditolak oleh penduduk setempat, terutama yang tidak menghalangi mereka untuk menggunakan layanan dan fasilitas masyarakat/umum yang ada di didestinas.</p>		<p>Tipe kepariwisataan sama sekali tidak di tolak keberadaannya oleh masyarakat di desa Ngrejo. Bukan hanya wisata Sioro, termasuk Pantai Brumbun dan Gerangan sangat membantu dan mendukung kegiatan masyarakat apalagi jika semua akses terpenuhi nantinya Desa Ngrejo menjadi kampung wisata yang hal ini akan memberikan kontribusi</p>



		terhadap perekonomian di Desa Ngrejo.
6.	d. Jumlah pengunjung dan tipe interaksi antara wisatawan dan lingkungan di destinasi, tanpa harus menimbulkan penurunan pengalaman dan kenyamanan pengunjung secara drastis.	Terkait dengan jumlah pengunjung dan tingkat interaksi hal ini masih belum bisa teridentifikasi secara jelas. Namun berdasarkan informasi di Lapangan, bahwa banyak wisatawan yang cukup mengalami penyesalan jika melihat akses wisata yang belum terbangun dengan baik. Hal ini karena informasi yang berupa gambar di social media terlalu cepat mempublikasikan tentang wisata tersebut termasuk Sioro tanpa menjelaskan tentang akses menuju obyek wisata sehingga



			<p>dalam hal ini menjadi sifat penasaran dari para wisatawan. Namun semakin hari pengunjung semakin sedikit karena akses jalan yang belum terbangun sehingga terkesan obyek wisata di Kabupaten Tulungagung terutama yang masih baru menjadi wisata musiman.</p>
7	Aspek Indikator Ekonomi	<p>Beberapa indikator yang harus selalu dipantau keadaannya dari aspek ekonomi pada model kepariwisataan berlanjut adalah sebagai berikut :</p>	
		<p>8. Derajat spesialisasi dalam kepariwisataan yang sudah berpengaruh pada hilangnya peluang kerja dan usaha masyarakat setempat.</p>	



	<p>9. Angka dislokasi tenaga kerja atau tingkat kehilangan tenaga kerja manusia di sektor-sektor lain yang disebabkan oleh industri kepariwisataan yang ada.</p>		
	<p>10. Keadilan distribusi pendapatan dari kegiatan kepariwisataan dan dampak penguatannya pada masyarakat maupun kelembagaan setempat.</p>		<p>Terkait dengan distribusi pendapatan belum adanya pembagian secara adil terutama terhadap Mpok Darwis. Pembagian penghasilan akan disetorkan kepada Dinas Perhutani, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Balai Desa dan Mpok Darwis. Namun dalam pembagiannya Dinas Perhutani selalu mendapatkan jatah lebih dibandingkan dengan Desa dan Mpok Darwis.</p>
	<p>11. Tingkat penyerapan tenaga kerja dari aktivitas</p>		<p>Terkait dengan tenaga kerja bahwa penyerapannya cukup baik. Hal ini bahwa</p>



		<p>kepariwisataan di destinasi terhadap sumber daya manusia pariwisata yang ada.</p>	<p>Mpok Darwis mengoptimalkan masyarakat local dan petani local untuk mengembangkan potensi wisata dan agrowisata yang ada di Desa Ngrejo. Hal ini akan meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat desa Ngrejo sehingga nantinya akan menjadikan masyarakat yang mandiri dalam mengelola potensi wisata dan agrowisata dan menjadi sumber penggerak perekonomian yang ada di Desa Ngrejo.</p>

Sumber : data di olah oleh penulis

Dalam pengelolaan wisata sangat dibutuhkan adanya suatu peran dan langkah-langkah tertentu dan juga perlu adanya suatu hal upaya strategis untuk mengembangkan



sector pariwisata yang ada di suatu daerah. Pengelolaan potensi wisata yang menjadi penting adalah untuk meningkatkan suatu perekonomian suatu daerah melalui potensi wisata dan juga membutuhkan kerjasama dengan pihak lain atau stakeholder untuk melaksanakan langkah strategis dalam mengembangkan suatu pariwisata sebagai alat untuk meningkatkan nilai tambah. Secara lebih detail, Liu (1994:6) dan Western (1993:9) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut :

Tabel 61. Daftar fungsi dalam pengelolaan pariwisata strategis

FUNGSI-FUNGSI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA STRATEGIS

No.	FUNGSI-FUNGSI	URAIAN PENJELASAN
1	Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.	Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.
2	Keberlanjutan ekonomi	Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor



		<p>yang menguras adanya devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan produk ekspor yang tidak lari ke mana-mana yang merupakan menjadi sumber devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.</p>
3	Peningkatan integritas budaya	<p>Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun maka lambat laun akan ditinggalkan.</p>
4	Nilai pendidikan dan pembelajaran	<p>Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan suatu pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung</p>



	<p>pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman tata nilai (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan dan pembelajaran.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : *Pengantar Ilmu Pariwisata*

Selain itu untuk langkah-langkah ke depan terdapat beberapa hal untuk mengembangkan wisata sioro ke depan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata Sioro yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung tersebut sudah beberapa langkah yang dilakukan oleh komunitas Mpok Darwis untuk mengelola potensi wisata yang ada di Desa Ngrejo dengan memberdayakan terhadap kelompok tani, masyarakat dengan dipandu oleh Mpok Darwis dan Balai Desa sehingga hal ini akan memberikan suatu pengembangan dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana untuk melakukan pengelolaan wisata yang ada di daerah. Adalah bahwa jika di analisis dengan menggunakan pendekatan langkah-langkah pengelolaan pariwisata yakni sebagai berikut :

Tabel 62. Analisis langkah-langkah tentang pengelolaan Wisata Sioro

No.	FUNGSI-FUNGSI	URAIAN PENJELASAN	PENERAPAN DI WISATA SIORO
1	Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.	Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari	Untuk di Desa Ngrejo terutama jalan akses menuju Sioro, Pantai Gerangan dan Pantai Brumbun ke depan akan melakukan berbagai kegiatan penghijauan dan mengembangkan hasil-hasil perkebunan yang ada di Desa Ngrejo. Dengan adanya potensi



	<p>kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.</p>	<p>wisata yang besar bukan berarti akan mengabaikan potensi pertanian dan perkebunan sebagai sumber daya yang ada di Desa Ngrejo. Potensi tersebut menjadi hal yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Desa Ngrejo. Seperti penanaman pohon-pohon yang hal tersebut sebagai upaya reboisasi/penghijauan kembali sehingga dalam hal ini menjadikan desa Ngrejo bukan hanya sebagai kampung wisata namun juga sebagai kampung tani yang menghasilkan produk-produk unggulan.</p>	
2	Keberlanjutan ekonomi	<p>Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang menguras adanya devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah</p>	<p>Sebagai desa yang berpotensi wisata dan pertanian serta juga perkebunan, Mpok darwis sebagai komunitas melakukan berbagai agenda seperti pengembangan agrowisata pisang, alpukat dan durian yang</p>



	<p>tersebut dengan menyediakan produk ekspor yang tidak lari ke mana-mana yang merupakan menjadi sumber devisa.Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.</p>	<p>saat ini mulai di persiapan.Hal ini Mpok Darwis melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani dengan memberikan pelatihan seperti penjualan pupuk, penjualan hasil produk yang nantinya sebagian pendapatan akan menjadi kas dari Mpok Darwis dan sebagian menjadi pendapatan petani.Selain itu juga dengan memanfaatkan buah mangrove menjadi sirup mangrove akan menambah nilai ekonomis terhadap masyarakat dan juga kelompok tani yang sebagaimana akan menambah penghasilan masyarakat.Jadi ke depan pendapatan Kabupaten Tulungagung tidak hanya dari pariwisata tetapi juga dari agrowisata yang di kembangkan dari kampung wisata yang mendorong kegiatan pariwisata di setiap kampung atau desa</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			yang ada di Kabupaten Tulungagung.
3	Peningkatan integritas budaya	Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun maka lambat laun akan ditinggalkan.	Pekan budaya yang di terapkan di Kabupaten Tulungagung akan menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di setiap desa dan kecamatan terkait potensi wisata yang dimiliki. Dalam hal ini akan memberikan hal positif terhadap wisata yang ada di Desa dan Kecamatan hal tersebut selain digunakan untuk memberikan kegiatan promosi terhadap masyarakat atau wisatawan tetapi juga memberikan nilai tambah dan menambah penghasilan yang lebih terhadap daerah, seperti kegiatan pekan budaya yang diadakan di pantai Sanggar dalam satu hari bisa menghasilkan puluhan juta, hal tersebut akan meningkatkan



			nilai tambah yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.
4	Nilai pendidikan dan pembelajaran	Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan suatu pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman tata nilai (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan dan pembelajaran.	Untuk penerapan wisata pantai Sioro, bahwa dengan potensi wisata yang dimiliki memberikan pengalaman dan pembelajaran khususnya masyarakat desa Ngrejo dan pemuda-pemuda desa Ngrejo. Adanya komunitas Mpok Darwis adalah salah satu komunitas yang memberikan didikan terhadap masyarakat betapa pentingnya pengetahuan tentang wisata dan juga bagaimana mengelola wisata dengan baik dan berorientasi terhadap penghasilan masyarakat. Kegiatan dan Agenda-agenda yang berkaitan dengan kegiatan Mpok Darwis memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan masyarakat serta mampu menjadikan desa



			yang mandiri, berpenghasilan sendiri dan mengentaskan masalah perekonomian di suatu desa.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

Table : Sumber : *diolah oleh penulis*

Pendekatan Local Governance adalah suatu pendekatan yang cocok untuk menganalisis berbagai kegiatan tentang bagaimana agenda-agenda kerja tentang pariwisata serta juga program kerja pemerintah dalam mengembangkan suatu wisata yang ada suatu daerah. Dengan adanya peran pemerintah daerah dan juga peran masyarakat local hal ini setiap urusan-urusan di daerah sudah menjadi kewenangan dan juga tanggungjawab setiap rumah tangga yang ada di daerah baik Kabupaten maupun Kota. Hans Bjorn Olsen. 2007. *Dalam Paper Desentralitations And Local Governance*. Swiss menyatakan tentang perbandingan antara Desentralisasi dan Local Governance yakni diuraikan sebagai berikut :

Tabel 63. Perbedaan antara desentralisasi dengan Local Governance

Perbedaan antara Desentralisasi dengan Local Governance

No.	Desentralisasi	Local Governance
1	Mendukung adanya element sektor publik formal dalam hal melakukan upaya reformasi desentralisasi.	Mendukung adanya masyarakat, NGOs, dan sektor privat untuk membangun sebuah hubungan kerja dan juga memonitoring kerja pemerintah daerah.
2	Examples Include <ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah pusat untuk merespon terkait dengan 	Example Include <ul style="list-style-type: none"> • Membantu kontraktor dari sektor privat dalam hal untuk



reformasi kebijakan dan undang-undang baru. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk improvisasi perencanaan, manajemen keuangan dan sebagainya. • Dana pembangunan dari pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan air bersih, jalan raya, fasilitas kesehatan dan sebagainya. 	mendesentralisasikan kontrak kerja. <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam hal memegang akuntabilitas pemerintah daerah. • Mendukung adanya keadilan dan pemberdayaan gender.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Hans Bjorn Olsen.2007.*Dalam Paper Desentralitations And Local Governance*

Seperti halnya pengembangan wisata yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung adalah bahwa kemandirian pembangunan wisata sudah mulai diterapkan dengan adanya membentuk komunitas local yang bernama Mpok Darwis dan juga partisipasi para petani dan masyarakat di desa Ngrejo hal tersebut membentuk desa menjadi mandiri terutama dalam mengembangkan suatu perekonomian yang ada di desa Ngrejo melalui pengembangan wisata dan agrowisata sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah desa adalah fasilitator terhadap kegiatan wisata yang ada di Desa Ngrejo.Hal ini dapat di uraikan analisisnya yakni sebagai berikut :

Tabel 64.Uraian Analisis penerapan di desa Ngrejo berdasarkan Local Governance

No.	Desentralisasi	Local Governance	Penerapan di Desa Ngrejo		Uraian analisis
			Local		

		Desentralisasi	Governance	
<p>1</p> <p>Mendukung adanya element sektor publik formal dalam hal melakukan upaya reformasi desentralisasi.</p>	<p>Mendukung adanya masyarakat, NGOs, dan sektor privat untuk membangun sebuah hubungan kerja dan juga memonitoring kerja pemerintah daerah.</p>	-		<p>Seperti dukungan terhadap Mpok Darwis dan Kelompok tani menjadikan hal tersebut membangun kemandirian masyarakat sedangkan pemerintah desa hanya sebagai fasilitator dan pendukung terhadap agenda Mpok Darwis dan Masyarakat.</p>
<p>2</p> <p>Examples Include</p> <ul style="list-style-type: none"> Membantu pemerintah pusat untuk merespon terkait dengan reformasi kebijakan dan undang-undang baru. 	<p>Example Include</p> <ul style="list-style-type: none"> Membantu kontraktor dari sektor privat dalam hal untuk mendesentralisasikan kontrak kerja. 	-	-	<p>Dalam pengelolaan dan pengembangan wisata masih belum ada keterlibatan perusahaan swasta atau investor dan saat ini</p>

Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih terus mengoptimalkan peran Mpok Darwis dan Masyarakat dalam mengembangkan wisata.

Hal ini juga di terapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung dan DPRD dengan membuat peraturan daerah tentang Pemberdayaan Mpok Darwis.Selain itu juga kegiatan Balai Desa dan Mpok darwis yang memberikan pelatihan terhadap

- Pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk improvisasi perencanaan, manajemen keuangan dan sebagainya.
- Mendukung mendidik masyarakat untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam hal memegang akuntabilitas pemerintah daerah

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

kelompok tani
untuk
mengoptimalkan
potensi pertanian
yang ke depannya
digunakan sebagai
agrowisata.

• Dana pembangunan dari pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan air bersih, jalan raya, fasilitas kesehatan dan sebagainya.

• Mendukung adanya keadilan dan pemberdayaan gender.

-

Pemberdayaan gender sudah mulai dicanangkan.Mpok Darwis bersama pemerintah desa akan memberdayakan semua masyarakat bagaimana untuk bercocok tanam yang menghasilkan dan juga bagaimana pengembangan wisata ke depan.Sedangkan untuk keadilan masih belum terlihat karena dalam pembagian

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

				hasil dari pengembangan wisata bahwa Desa dan Mpok Darwis masih belum mendapatkan hasil yang sesuai dan sebagian besar pendapatan masuk di Di Dinas Perhutani.
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table..... Sumber : diolah oleh penulis

Keterlibatan suatu *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata sangat dibutuhkan, hal ini bahwa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan maka akan menjadikan sebuah keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan juga suatu keputusan yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan agenda-agenda yang telah disusun. Seperti yang dinyatakan oleh Bramwell dan Lane (2004 dalam Cater, 2003:44) dalam Buku Pengantar Pariwisata bahwa keterlibatan stakeholder akan memberikan manfaat yang diuraikan yakni sebagai berikut :

1. Pelibatan beragam *stakeholder*/ pemangku kepentingan termasuk dari kepentingan non ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.

2. Keterlibatan stakeholder dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership*



juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas yang lainnya.

3. Beragamnya *stakeholder* yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi juga memicu suatu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

4. Partisipasi yang luas dalam hal pembuatan suatu kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasikan pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building* dan *skill acquisition* bagi mereka yang diwakili.

Dalam hal ini bahwa jika dilihat tentang keterlibatan stakeholder dalam pengembangan wisata Sioro di Desa Ngrejo yakni sebagai berikut :

Tabel 65. Analisis stakeholder di Desa Ngrejo dalam pengembangan Sioro

MANFAAT STAKHOLDER	URAIAN ANALISIS
<p>1. Pelibatan beragam <i>stakeholder</i>/ pemangku kepentingan termasuk dari kepentingan non ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.</p>	<p>1. Terbukti dengan keterlibatan Mpok Darwis dan Masyarakat serta pemerintah desa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten menambah penghasilan dari pengembangan wisata seperti diadakannya kegiatan pekan budaya di Pantai Sanggar salah satunya dengan melibatkan Mpok Darwis dan Masyarakat maka penghasilan pun lebih dan mencapai</p>



	<p>puluhan juta dalam satu hari. Hal ini jika optimalisasi wisata tersebut terlaksana dan partisipasi dari Balai Desa, Masyarakat dan Mpok Darwis tinggi hal ini menjadikan perekonomian Kabupaten Tulungagung semakin berkembang.</p>
<p>2. Keterlibatan stakeholder dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik proses pengambilan keputusan, sedangkan <i>partnership</i> juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas yang lainnya.</p>	<p>2. Seperti halnya penyusunan Draft peraturan daerah tentang Pemberdayaan Mpok Darwis hal tersebut DPRD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu melibatkan perwakilan pimpinan Mpok Darwis di setiap desa, tokoh masyarakat dan juga Pemerintah Desa terutama dalam hal pembagian prosentase penghasilan pengembangan wisata. Hal ini bahwa keputusan yang diambil dalam penyusunan Perda telah melibatkan perwakilan masyarakat local dan juga Mpok Darwis sehingga menghasilkan peraturan yang adil.</p>
<p>3. Beragamnya <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan pariwisata</p>	<p>3. Keterkaitan seperti nomor 2 namun hal ini juga mulai</p>



<p>memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi juga memicu suatu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.</p>	<p>diterapkannya keadilan dalam pembagian prosentase hasil pengembangan wisata antara Perhutani, Dinas Pariwisata, Desa dan Mpok Darwis. Namun hal tersebut dilakukan harus adanya sinkronisasi antara pemerintah, masyarakat dan Mpok Darwis agar dalam pembagian hasil juga merata.</p>
<p>4. Partisipasi yang luas dalam hal pembuatan suatu kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasikan pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat <i>capacity building</i> dan <i>skill acquisition</i> bagi mereka yang diwakili.</p>	<p>4. Hal ini terbukti keterlibatan Mpok Darwis beserta masyarakat desa dan kelompok tani akan memperkuat desa-desa termasuk desa Ngrejo kecamatan Tanggunggunung menjadi berkembang meskipun belum optimal namun dalam perkembangannya kemandirian sudah mulai di canangkan seperti pengembangan produk unggulan, penciptaan sirup mangrove dan di promosikan serta juga mengembangkan hasil-hasil perkebunan pisang, alpukat dan durian yang nantinya mendukung</p>



kegiatan wisata yang ada di Desa Ngrejo.

Sumber : di olah oleh Penulis

2. LEGALITAS DAN DASAR HUKUM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MPOK DARWIS

Seperti yang di jelaskan dari analisis pertama, partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan sebagaimana peran masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang harus di di libatkan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dan juga dibutuhkan apalagi peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat harus mulai diagendakan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Drs Bambang Sunaryo .M.Sc.MS. dalam bukunya *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*) bahwa peran masyarakat saat ini menjadi penting sehingga partisipasi masyarakat menjadi hal penting serta perlu adanya keterbukaan dari pemerintah terhadap masyarakat dalam keterlibatan pengambilan keputusan agar pembangunan sektor seperti pariwisata bisa berlanjut. Melihat paradigma sekarang yang menjadi terbuka dan partisipatif serta sudah menjadi *trend* dan juga sudah menjadi hal yang harus di terapkan oleh pemerintah sehingga suatu kebutuhan masyarakat bisa di analisis dan ke depan pemerintah dan masyarakat bisa sinkron dalam pengambilan suatu keputusan.

Pemberdayaan komunitas local adalah menjadi salah satu untuk membangun partisipasi masyarakat dan hal ini bahwa meningkatkan sumber daya dari masyarakat. Termasuk seperti halnya di terapkan di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung dalam pengembangan wisata Sioro bahwa keterlibatan Mpok Darwis dan Masyarakat menjadi bentuk upaya untuk meningkatkan kemandirian desa melalui agrowisata dan sector perkebunan yang menjadi potensi desa saat ini. Hal tersebut akan meningkatkan nilai tambah masyarakat serta juga



menggerakkan perekonomian desa serta meningkatkan kemandirian masyarakat melalui agrowisata dan wisata. Terkait dengan pemberdayaan Mpok Darwis sebagai komunitas local sadar wisata bahwa terdapat uraian analisis tentang draf peraturan daerah yang akan mengatur tentang pemberdayaan Mpok Darwis yakni sebagai berikut:

Tabel 66. Uraian analisis tentang Pemberdayaan Pok Darwis

BAB	PASAL	SUBSTANSI	ISI	Uraian Analisis
2	2	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>1. POKdarwis dibentuk sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata agar supaya dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik.</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air.</p>	<p>POK Darwis di anggap sebagai stakeholder dan mitra masyarakat. Hal ini bahwa telah adanya pemberdayaan secara partisipatif untuk meningkatkan dan membangun partisipasi masyarakat agar masyarakat desa semakin paham dan mengerti tentang perannya dalam mengelola wisata yang ada di daerahnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk produktif dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.</p>



	3	FUNGSI DAN KEDUDUKAN	<p>1. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan daerah tujuan wisata.</p> <p>2. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah</p>	<p>Mpok darwis adalah komunitas mewakili masyarakat yang juga menjadi mitra pemerintah. Hal ini bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan wisata akan diagendakan dalam program kerja Mpok Darwis dan nantinya akan diajukan kepada pemerintah daerah sebagai keputusan perda maupun anggaran dan dana bagi hasil.</p>
	4	KEDUDUKAN DAN TEMPAT	<p>Pok darwis berkedudukan di desa dan kelurahan dan di sekitar daerah tujuan wisata.</p>	<p>Hal ini Pokdarwis sudah berperan mewakili pemerintah daerah. Dengan begitu padatnya urusan pemerintah maka Pokdarwis menjadi komunitas yang mewakili pemerintah daerah di setiap desa dan kecamatan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata.</p>
	5.	KEANGGOTAAN	<p>Syarat-syarat umum keanggotaan mpok darwis yakni sebagai berikut :</p> <p>a. Bersifat sukarela</p> <p>b. Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan komitmen</p> <p>c. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata.</p> <p>d. Mempunyai mata pencaharian atau</p>	<p>Menjadi anggota Mpok Darwis harus benar-benar berorientasi terhadap masyarakat dan wisatawan. Hal ini seperti yang di terapkan di perusahaan baik BUMN maupun BUMS bahwa dalam melayani harus berbasis customer/pelanggan. Termasuk menjadi anggota Mpok Darwis pun demikian harus benar-benar</p>



			pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik langsung maupun tidak langsung.	memiliki dedikasi untuk membina masyarakat dalam pengembangan wisata dan apa yang dilakukan harus berorientasi terhadap wisatawan dan masyarakat.
	6.	KEPENGURUSAN, STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS	<p>1. Kepengurusan PokDarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, Sekretariat, Anggota dan seksi-seksi.</p> <p>2. Hubungan dan koordinasi pengurusan pok darwis dilaksanakan secara insentif dan di terjemahkan dalam suatu gambar struktur organisasi yang sistematis sehingga setiap pihak dapat mengetahui jabatan dan wewenang masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>3. Sebagai acuan fungsi dan tugas dari masing-masing pengurus kelompok sadar wisata di lanjut diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>	<p>Bahwa mpok darwis sudah menjadi organisasi yang terstruktur dan tersusun dalam pembagian kerjanya. Hal ini bahwa dengan adanya pembagian kerja yang jelas serta susunan struktur organisasi yang baik hal ini bahwa program-program kerja yang disusun oleh PokDarwis terlaksana dengan efektif.</p>
	7.	KEGIATAN	<p>Lingkup kegiatan mpok darwis meliputi sebagai berikut :</p> <p>1. Mengembangkan dan</p>	<p>Mpok darwis membawa dampak positif bagi produktifitas masyarakat dalam mengembangkan</p>



			<p>melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota mpok darwis dalam bidang kepariwisataan.</p> <p>2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.</p> <p>3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.</p> <p>4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.</p> <p>5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.</p>	<p>sector pariwisata. Hal ini karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masyarakat untuk mandiri, produktif dan menghasilkan sesuatu hal yang dapat meningkatkan nilai tambah. • Mendorong masyarakat untuk terampil dan memiliki pengetahuan terutama di bidang pariwisata. • Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi penuh terhadap kegiatan pengembangan pariwisata. • Menjadikan masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sector pariwisata. • Pok darwis sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi oleh pemerintah.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat	
3	8	PEMBENTUKAN MPOK DARWIS	<p>1. Pok darwis dapat dibentuk melalui inisiatif masyarakat local maupun inisiatif dari instansi yang terkait di bidang kepariwisataan.</p> <p>2. Dalam hal Pokdarwis dibentuk inisiatif masyarakat local maka dapat dilakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Kepala desa/lurah</p> <p>b. Kepala desa/lurah melaporkan hasil pembentukan Pok Darwis oleh masyarakat kepada dinas setempat yang membidangi kepariwisataan selaku pembina untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan</p> <p>c. Pengukuhan mpok darwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas membidangi kepariwisataan.</p> <p>d. Pencatatan dan pendaftaran Mpok Darwis dilakukan oleh Dinas yang membidangi kepariwisataan untuk di laporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi</p>	Artinya bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk komunitas sadar wisata namun tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bahwa dengan adanya kebebasan dan juga memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berinisiatif dalam bidang kepariwisataan serta diikuti dengan potensi wisata yang sangat besar hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sector pariwisata di Kabupaten Tulungagung.



				<p>kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3. Dalam hal pembentukan Kelompok Sadar Wisata dibentuk dari inisiatif dari kepariwisataan maka dilakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Dinas Pariwisata Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk Pokdarwis dengan menggalang inisiatif ke masyarakat di desa untuk membentuk mpok darwis atau inisiatif dapat muncul dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota menggalang inisiatif ke masyarakat di tingkat desa untuk membentuk Pokdarwis.</p> <p>b. Kepala desa/Lurah memfasilitasi pertemuan warga masyarakat dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk mpok darwis.</p> <p>c. Hasil pembentukan mpok darwis selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan pengesahan dan pembinaan lebih lanjut.</p> <p>d. Pengukuhan pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>e. Pencatatan dan pendaftaran Podarwis dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi Pariwisata serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>	
	9		<p>Pokdarwis didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas dengan sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p>	
4	10	PEMBINAAN	<p>1. Tujuan PokDarwis adalah “</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan</p>	<p>POK Darwis di anggap sebagai stakeholder dan mitra masyarakat.Hal ini bahwa telah adanya pemberdayaan secara partisipatif untuk meningkatkan dan membangun partisipasi masyarakat agar masyarakat desa semakin</p>



			<p>kepariwisataan di daerahnya.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.</p> <p>2. Adapun sasaran pembinaan kelompok sadar wisata adalah sebagai berikut :</p> <p>F. Meningkatkan kapasitas mpok darwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di daerah.</p> <p>G. Tumbuhnya mpok darwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.</p> <p>H. Terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Mpok Darwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.</p>	<p>paham dan mengerti tentang perannya dalam mengelola wisata yang ada di daerahnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk produktif dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga bahwa Mpok darwis adalah komunitas mewakili masyarakat yang juga menjadi mitra pemerintah. Hal ini bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan wisata akan diagendakan dalam program kerja Mpok Darwis dan nantinya akan diajukan kepada pemerintah daerah sebagai keputusan perda maupun anggaran dan dana bagi hasil.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	11	<p style="text-align: center;">BENTUK PEMBINAAN</p>	<p>1. Pembinaan langsung yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsure Pembina dengan PokDarwis sebagai pihak yang dibina. Bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan/workshop, lomba, jambore dan lain-lain.</p> <p>2. Pembinaan tak langsung yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsure Pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun media elektronik) maupun media publikasi lainnya. Bentuk pembinaan tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya (misalnya : baliho, poster, spanduk dan sebagainya).</p>	<p>Mpok darwis adalah komunitas mewakili masyarakat yang juga menjadi mitra pemerintah. Hal ini bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan wisata akan diagendakan dalam program kerja Mpok Darwis dan nantinya akan diajukan kepada pemerintah daerah sebagai keputusan perda maupun anggaran dan dana bagi hasil.</p>
	12	<p style="text-align: center;">UNSUR PEMBINA DAN KEGIATAN PEMBINAAN</p>	<p>1. Unsur Pembinaan Mpok Darwis terdiri dari Pemerintah Daerah atau Dinas yang membidangi Pariwisata, pihak swasta, kalangan</p>	<p>Hal ini bahwa Mpok Darwis sudah sangat terlihat di berdayakan dengan baik dan juga sudah ada mulai ada peningkatan partisipasi</p>



			<p>industri pariwisata maupun asosiasi kalangan pariwisata</p> <p>2. Dinas yang membidangi kepariwisataan, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan kegiatan sebagai berikut :</p> <p>I. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/pedoman Kelompok Sadar Wisata.</p> <p>J. Penyelenggaraan Sarasehan/Temu Pokdarwis.</p> <p>K. Penyelenggaraan pelatihan Pokdarwis</p> <p>L. Penyelenggaraan Apresiasi/Pemberian penghargaan ke Pok Darwis.</p> <p>M. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data PokDarwis.</p>	<p>yang tinggi terhadap Pok Darwis.Seperti halnya kegiatan sosialisasi kebijakan dan pedoman yang menjadi pelaksanaan kerja Pok Darwis, Kegiatan Sarasehan sebagai kegiatan untuk peningkatan silaturahmi antar Pok Darwis sebagai upaya untuk menurunkan ego daerah, pelatihan Pok Darwis sebagai penambahan pengalaman di lapangan, pemberian penghargaan sebagai untuk peningkatan kinerja dan juga pelaksanaan pendataan Mpok Darwis sebagai alat untuk mengolah data-data terkait tentang kegiatan Pok Darwis dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat desa.</p>
	13	<p>SUMBER</p> <p>PENDANAAN</p> <p>DAN</p> <p>PEMBINAAN</p>	<p>Sumber Pendanaan untuk pembinaan Pok Darwis berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dari pihak swasta.</p>	<p>Hal ini terlihat bahwa meskipun pelaksanaannya adalah Pokdarwis namun pemerintah dan swasta adalah sebagai fasilitator dan juga penyalur anggaran dan dana.Hal ini bahwa jika pemerintah daerah, swasta dan Pok darwis sinkron hal ini akan memperlancar kegiatan pengembangan wisata serta juga pemberdayaan masyarakat berhasil dan terus menopang perekonomian</p>



					desa.
		14	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	<p>1. Pemantauan dan Evaluasi Pokdarwis merupakan bagian dari langkah pembinaan melalui pengamatan dan penilaian terhadap kondisi dan perkembangann pokdarwis di daerah dikaitkan dengan adanya tujuan, sasaran serta fungsi dari pembentukan tersebut.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi Pokdarwis dilakukan oleh Dinas secara terus menerus dan berkesinambungan yang membidangi kepariwisataan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.</p> <p>3. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar apresiasi atau penghargaan terhadap PokDarwis.</p>	<p>Evaluasi terhadap Mpok Darwis sebagai alat agar ke depan nanti Pok Darwis terus bertahan dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa serta juga sebagai proses untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat.</p>

Sumber : diolah oleh Penulis

3. LANGKAH DAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.:

Tabel 67. Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata

KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA



No	Aspek Perencanaan	Implementasi
1.	Penentuan tujuan pembangunan pariwisata	<p>a. Tentukan tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan faktor sosial budaya.</p> <p>b. Konsultasikan tujuan tersebut kepada komunitas</p> <p>c. Rancang area pembangunan dan pengembangan beserta aktivitas yang diperlukan untuk memperlancar proses keberhasilannya.</p> <p>d. Identifikasi kepentingan secara individual dan kolektif dari pemangku kepentingan sehingga dapat diakomodasikan dalam aktivitas dan bisnis pariwisata tersebut.</p>
2.	Inventarisasi	<p>a. Lakukan survei dan analisis karakteristik kawasan pembangunan</p>



	<p>dan pengembangan termasuk lingkungan, sejarah, budaya, masyarakat, ekonomi, sumber daya, pola penguasaan dan pemilikan tanah dan perairan.</p>
	<p>b. Lakukan identifikasi dan evaluasi atraksi dan aktivitas pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.</p>
	<p>c. Lakukan identifikasi dan evaluasi sarana dan prasarana akomodasi yang tersedia dan fasilitas serta pelayanan pariwisata.</p>
	<p>d. Evaluasi atas akses transportasi ke kawasan pengembangan pariwisata termasuk halnya kondisi infrastruktur pendukungnya saat ini dan pengembangannya di masa depan.</p>
	<p>e. Review dan pastikan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan dari pemerintah setempat baik jangka</p>



		pendek maupun jangka panjang terutama cetak biru program pengembangan pariwisata.
3.	Infrastruktur dan fasilitas	<p>a. Sediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata</p> <p>b. Bangun mekanisme untuk membantu sektor informal membangun usaha yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan cari cara membantu mereka agar bisa memenuhi standar baru yang ditetapkan.</p>
5	Pasar	<p>a. Analisis kondisi pasar pariwisata nasional dan internasional, tetapkan tujuan dan target pemasaran, analisis akomodasi, fasilitas, pelayanan yang dibutuhkan.</p> <p>b. Ketahui target pasar sehingga harapan dan tujuan realistis dan dapat diwujudkan. Target pasar harus bisa diakses oleh fasilitas komunikasi dan transportasi</p>



		<p>c. Bantu usaha perseorangan dengan menyediakan riset pasar yang berpotensi membantu pemasaran dan program promosi.</p>
5.	Daya dukung	<p>a. Tentukan batas ambang (carrying capacity) kawasan pengembangan pariwisata melalui adanya analisis lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.</p> <p>b. Tentukan batas standar yang dapat ditoleransi untuk aktivitas dan kegiatan ekonomi oleh operator pariwisata, termasuk di dalamnya adalah batas maksimal pengunjung dan wilayah yang dapat dijelajahi.</p> <p>c. Implementasikan prosedur yang dapat menentukan kapan kawasan pengembangan dan dalam kondisi mengalami kerusakan bagaimana kondisi tersebut dapat dipulihkan.</p>
1	Pengembangan	<p>a. Buat rencana pengembangan struktur pariwisata di kawasan tersebut termasuk adanya atraksi dan aktivitas utama, pengembangannya secara</p>



		<p>regional, disertai akses dan jaringan transportasinya.</p> <p>b. Buat rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan adanya fasilitas, pelayanan dan infrastruktur yang terkait.</p> <p>c. Bantu pemodal dan pengembang lokal mengenai apa yang dibutuhkan agar memenuhi adanya suatu kelayakan menurut standar yang ditentukan.</p> <p>d. Buat rencana kontingensi untuk tantangan potensial di masa depan untuk menjaga stabilitas pemasaran termasuk kemungkinan pengaruh adanya bencana alam.</p>
7.	Ekonomi	<p>a. Lakukan analisis ekonomi untuk kondisi sekarang dan perkiraan masa depan dari pengembangan pariwisata.</p> <p>b. Buat strategi untuk meningkatkan keuntungan ekonomis dari kegiatan pariwisata.</p> <p>c. Pastikan manajemen finansial</p>



		<p>bekerja dengan baik sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh keuntungan, pengunjung membayar kewajibannya, penduduk lokal mendapat pembagian keuntungan secara adil</p>
1	Lingkungan	<p>a. Evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan dan cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorongnya ke arah yang positif.</p> <p>b. Buat sinergi antara pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan usaha konservasi lainnya, termasuk pembangunan wilayah lindung, manajemen kawasan lindung, pengelolaan limbah, energi, air, zone pesisir, terumbu karang, bencana alam dan sebagainya.</p>
2	Budaya	<p>a. Dampak sosial budaya pariwisata, cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorong ke arah dampak positif.</p>



		<p>b. Berdayakan komunitas lokal sebagai pemilik dan pemangku kepentingan pariwisata dengan menerapkan manajemen yang konsisten dengan nilai local</p>
3 Standar kualitas		<p>c. Buat audit sosial dalam hal bagaimana komunitas lokal, penduduk desa dan masyarakat sekitarnya dipengaruhi oleh pariwisata.</p> <p>a. Buat desain untuk pengukuran standar kualitas bagi fasilitas dan akomodasi untuk memenuhi persyaratan pariwisata.</p> <p>b. Lakukan penilaian standar kualitas untuk akomodasi dan fasilitas pariwisata</p> <p>c. Mediasi dan pacu komponen pendukung pariwisata yang belum memenuhi stgandar kualitas dengan menyediakan insentif finansial dan pajak serta akses kepada spesialis.</p>



4	Sumber daya manusia	<p>a. Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan promosi dan degradasi jabatan serta kewirausahaan di bidang pariwisata.</p>
		<p>b. Sediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggara pariwisata termasuk halnya sertifikasi dan program pelatihan, serta transfer teknologi dan skill</p>
		<p>c. Jalankan program kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga turut berperan positif terhadap kesuksesan pariwisata.</p>
5	Organisasi	<p>Bangun hubungan kerjasama antara organisasi publik, swasta, dan pemerintah untuk menjamin koordinasi yang efektif.</p>
6	Investasi	<p>Sediakan insentif investasi bagi pemodal luar sehingga merangsang keterlibatan investor lokal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata.</p>
7	Regulasi dan pengawasan	<p>a. Bangun mekanisme legislasi dan regulasi untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui</p>



		<p>adanya suatu dukungan organisasi pariwisata nasional, agen biro perjalanan, akomodasi dan sektor-sektor lain dalam pariwisata.</p> <p>b. Buat standar fasilitas, insentif investasi dan zoning.</p> <p>c. Buat prosedur penilaian dan pengawasan.</p>
8	Sistem data dan informasi	<p>Bangun sistem data dan informasi pariwisata secara terintegrasi untuk menjamin kontinuitas operasional yang juga berfungsi sebagai informasi pasar.</p>
9	Implementasi	<p>a. Identifikasi berbagai teknik untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan pariwisata</p> <p>b. Kolaborasikan dengan dunia industri dan dunia akademik untuk menjamin adanya pertanggungjawaban implementasi tersebut.</p>

Sumber : di Adopsi dari Liu (1994)

Dalam hal ini jika diuraikan beberapa analisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :



Tabel 68. Analisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung

No.	Aspek Perencanaan	Implementasi	Uraian Analisis
1	Penentuan tujuan pembangunan pariwisata	a. Tentukan tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan faktor sosial budaya.	Aspek ekonomi : 1. Pengembangan pemasaran pariwisata 2. Melakukan inovasi produk kreatif guna mewujudkan daya saing dalam dunia usaha 3. Memberikan pembinaan sosialisasi, dan penyuluhan kepada pelaku ekonomi kreatif 4. Mengembangkan ekonomi kreatif yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat
		b. Konsultasikan tujuan tersebut kepada komunitas	Keterlibatan Mpok Darwis, Tokoh Masyarakat dalam penyusunan draf peraturan daerah
		c. Rancang area pembangunan dan pengembangan beserta aktivitas yang diperlukan untuk memperlancar proses keberhasilannya.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju destinasi wisata. 2. Melakukan pembenahan tata kelola destinasi wisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan
		a. Identifikasi kepentingan	Melibatkan Pokdarwis dan tokoh masyarakat disetiap kegiatan rapat



		<p>secara individual dan kolektif dari pemangku kepentingan sehingga dapat diakomodasikan dalam aktivitas dan bisnis pariwisata tersebut.</p>	<p>terkait dengan pengembangan wisata.</p>
2	Inventarisasi	<p>a. Lakukan survai dan analisis karakteristik kawasan pembangunan dan pengembangan termasuk lingkungan, sejarah, budaya, masyarakat, ekonomi, sumber daya, pola penguasaan dan pemilikan tanah dan perairan.</p>	
		<p>b. Lakukan identifikasi dan evaluasi atraksi dan aktivitas pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.</p>	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan PokDarwis untuk terus melakukan pembidikkan dan penemuan wisata baru yang ada di Kabupaten Tulungagung.</p>
		<p>c. Lakukan identifikasi dan evaluasi sarana dan prasarana akomodasi yang</p>	<p>Mpok Darwis sebagai komunitas untuk melakukan inventarisasi kebutuhan masyarakat desa dan pemerintah daerah sebagai</p>



		tersedia dan fasilitas serta pelayanan pariwisata.	fasilitator kebutuhan masyarakat.
		d. Evaluasi atas akses transportasi ke kawasan pengembangan pariwisata termasuk halnya kondisi infrastruktur pendukungnya saat ini dan pengembangannya di masa depan.	Untuk akses di kabupaten Tulungagung masih menunggu proses legalitas dan kerjasama antara Dinas Perhutani dan Dinas Pariwisata sebab akses untuk menuju obyek wisata tersebut sebagian lahannya adalah milik dari Dinas Pehutani
		e. Review dan pastikan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan dari pemerintah setempat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama cetak biru program pengembangan pariwisata.	Hal ini dipastikan jika sudah ada legalitas dan kerjasama antara Perhutani dengan Dinas Pariwisata sehingga dalam hal ini masterplan akan tersusun terkait dengan pengembangan pariwisata.
3	Infrastruktur dan fasilitas	c. Sediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata	Sudah terbangun seperti wilayah Pantai Sanggar, Gunung Budeg, Pantai Gemah, namun untuk Sioro masih belum terbangun sebab belum ada pembebasan dari Dinas Perhutani. Pengembangan agrowisata adalah



		<p>d. Bangun mekanisme untuk membantu sektor informal membangun usaha yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan cari cara membantu mereka agar bisa memenuhi standar baru yang ditetapkan.</p>	<p>salah satu yang akan dikembangkan. Selain memiliki potensi wisata namun juga memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang merupakan sebagai bentuk untuk mendukung kegiatan pariwisata.</p>
4	Pasar	<p>d. Analisis kondisi pasar pariwisata nasional dan internasional, tetapkan tujuan dan target pemasaran, analisis akomodasi, fasilitas, pelayanan yang dibutuhkan.</p>	-
		<p>5. e. Ketahui target pasar sehingga harapan dan tujuan realistis dan dapat diwujudkan. Target pasar harus bisa diakses oleh fasilitas komunikasi dan transportasi</p>	-
		<p>f. Bantu usaha perseorangan dengan menyediakan riset pasar yang berpotensi membantu</p>	-



		pemasaran dan program promosi.	
5.	Daya dukung	d. Tentukan batas ambang (carrying capacity) kawasan pengembangan pariwisata melalui adanya analisis lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.	
		e. Tentukan batas standar yang dapat ditoleransi untuk aktivitas dan kegiatan ekonomi oleh operator pariwisata, termasuk di dalamnya adalah batas maksimal pengunjung dan wilayah yang dapat dijelajahi.	
		f. Implementasikan prosedur yang dapat menentukan kapan kawasan pengembangan dan dalam kondisi mengalami kerusakan bagaimana kondisi tersebut dapat dipulihkan.	
6	Pengembangan	e. Buat rencana	Terkait dengan pengembangan



		<p>pengembangan struktur pariwisata di kawasan tersebut termasuk adanya atraksi dan aktivitas utama, pengembangannya secara regional, disertai akses dan jaringan transportasinya.</p>	<p>sudah terbuatnya dokumen masterplan yakni pantai Sanggar, Pantai Gemah dan Gunung Budeg. Namun untuk pantai sioro belum tersusun untuk masterplannya karena belum ada pembebasan dari Perhutani sehingga belum ada legalitas dan keputusan anggaran dalam pengembangan wisata Sioro.</p>
		<p>f. Buat rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan adanya fasilitas, pelayanan dan infrastruktur yang terkait.</p>	<p>Dengan adanya PokDarwis akan membantu penyusunan rekomendasi kebutuhan masyarakat desa hal ini sebagai bentuk yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah daerah.</p>
		<p>g. Bantu pemodal dan pengembang lokal mengenai apa yang dibutuhkan agar memenuhi adanya suatu kelayakan menurut standar yang ditentukan.</p>	<p>Dengan adanya LMDH (LEMBAGA MASYARAKAT DAN HUTAN) yang dibentuk oleh Balai Desa dan Pok Darwis hal ini bahwa akan membantu dalam mengakomodasi kegiatan kelompok tani dan membantu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok tani.</p>
	7.		



		<p>h. Buat rencana kontingensi untuk tantangan potensial di masa depan untuk menjaga stabilitas pemasaran termasuk kemungkinan pengaruh adanya bencana alam.</p>	
7.	Ekonomi	<p>d. Lakukan analisis ekonomi untuk kondisi sekarang dan perkiraan masa depan dari pengembangan pariwisata.</p>	<p>Desa Ngrejo memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang sangat besar, sehingga hal ini menjadi peluang terhadap masyarakat dan petani bagaimana dalam mengembangkan agrowisata sebagai nilai tambah.</p>
		<p>e. Buat strategi untuk meningkatkan keuntungan ekonomis dari kegiatan pariwisata.</p>	<p>Pengembangan agrowisata seperti alpukat, durian, dan pisang adalah salah satunya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa dan juga kelompok tani. Pembentukan kelompok tani serta juga difasilitasi oleh LMDH dan di dukung dana dari Balai Desa dan Kas Mpok Darwis akan mendorong kegiatan agrowisata dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian desa.</p>
		<p>f. Pastikan manajemen</p>	<p>Untuk hasil perkebunan sudah mulai tertata dan rata dalam</p>



	<p>finansial bekerja dengan baik sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh keuntungan, pengunjung membayar kewajibannya, penduduk lokal mendapat pembagian keuntungan secara adil</p>	<p>pembagian hasilnya namun dari pariwisata itu sendiri masih dalam proses untuk pembagian hasil.</p>
8 Lingkungan	<p>c. Evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan dan cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorongnya ke arah yang positif.</p>	<p>Permasalahan lingkungan adalah masih kurangnya pohon dan tanaman yang ada di sekitarnya jalan akses menuju pantai terutama di Pantai Gerangan dan Brumbun sehingga perlu adanya penghijauan kembali.</p>
	<p>d. Buat sinergi antara pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan usaha konservasi lainnya, termasuk pembangunan wilayah lindung, manajemen kawasan lindung, pengelolaan limbah, energi, air, zone pesisir, terumbu karang, bencana alam dan</p>	<p>Pok Darwis beserta pemerintah desa dan juga masyarakat akan membangun beberapa pohon di sekitaran akses ke lokasi obyek wisata, dan dalam hal ini mendorong kegiatan masyarakat agar tetap melaksanakan penghijauan dan peduli dengan lingkungan serta akan mengurangi terjadinya pemanasan global yang saat ini sedang terjadi.</p>



		sebagainya.	
9	Budaya	d. Dampak sosial budaya pariwisata, cari cara untuk menurunkan atau mencegah dampak negatif tersebut dan mendorong ke arah dampak positif.	-
		e. Berdayakan komunitas lokal sebagai pemilik dan pemangku kepentingan pariwisata dengan menerapkan manajemen yang konsisten dengan nilai lokal	Pembentukan Pokdarwis adalah sebagai bentuk untuk memberdayakan komunitas local.Hal ini sebagai komunitas yang akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa dan sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat desa dengan Pemerintah Daerah.
		f. Buat audit sosial dalam hal bagaimana komunitas lokal, penduduk desa dan masyarakat sekitarnya dipengaruhi oleh pariwisata.	-
1	Standar kualitas	d. Buat desain untuk pengukuran standar kualitas bagi fasilitas dan akomodasi untuk memenuhi persyaratan pariwisata.	-



		11. e. Lakukan penilaian standar kualitas untuk akomodasi dan fasilitas pariwisata	
		12. f. Mediasi dan pacu komponen pendukung pariwisata yang belum memenuhi stgandar kualitas dengan menyediakan insentif finansial dan pajak serta akses kepada spesialis.	
1	Sumber daya manusia	d. Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan promosi dan degradasi jabatan serta kewirausahaan di bidang pariwisata.	
		e. Sediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggara pariwisata termasuk halnya sertifikasi dan program pelatihan, serta transfer teknologi dan skill	Melakukan pelatihan terhadap masyarakat dalam pembuatan syrup mangrove yang ada di Desa Ngrejo dengan bekerjasama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan
		f. Jalankan program	Dengan adanya program-program pelatihan yang dilakukan oleh Pok



		kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga turut berperan positif terhadap kesuksesan pariwisata.	Darwis hal ini akan mendorong kepedulian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata
1	Organisasi	Bangun hubungan kerjasama antara organisasi publik, swasta, dan pemerintah untuk menjamin koordinasi yang efektif.	Kerjasama telah dibangun dengan melibatkan tokoh masyarakat, Pok Darwis, DPRD, Dinas Perhutani dan Dinas Pariwisata dan Kelautan hal ini bahwa untuk terus berusaha melakukan sinkronisasi antara pihak-pihak tersebut agar ke depan tetap adil dalam pembagian prosentase hasilnya.
1	Investasi	Sediakan insentif investasi bagi pemodal luar sehingga merangsang keterlibatan investor lokal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk saat ini dan harapan ke depan untuk sector pariwisata tetap berada dalam pengelolaan Pok Darwis dan masyarakat tanpa harus melibatkan investor untuk mengelolanya.
1	Regulasi dan pengawasan	a. Bangun mekanisme legislasi dan regulasi untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui adanya suatu dukungan organisasi pariwisata nasional, agen	Dengan adanya Draf Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Mpok Darwis hal tersebut sebagai dasar hukum untuk pembentukan pok Darwis agar ke depannya para pimpinan dan anggota PokDarwis



		<p>biro perjalanan, akomodasi dan sektor-sektor lain dalam pariwisata.</p> <p>b. Buat standar fasilitas, insentif investasi dan zoning.</p> <p>c. Buat prosedur penilaian dan pengawasan.</p>	<p>memahami prosedur dan juga substansi tentang apa yang harus dilaksanakan Pok Darwis dalam pengembangan sector pariwisata.</p>
1	Sistem data dan informasi	<p>Bangun sistem data dan informasi pariwisata secara terintegrasi untuk menjamin kontinuitas operasional yang juga berfungsi sebagai informasi pasar.</p>	<p>Dengan adanya aplikasi <i>TOURISM PLACE APPLICATION</i> yang merupakan sebagai aplikasi yang berbasis android dan Smartphone lainnya hal tersebut akan memudahkan wisatawan baik local maupun luar kota akan mengetahui tentang keberadaan obyek wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung.</p>
1	Implementasi	<p>a. Identifikasi berbagai teknik untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan pariwisata</p> <p>b. Kolaborasikan dengan dunia industri dan dunia akademik untuk menjamin adanya pertanggungjawaban implementasi tersebut.</p>	<p>Untuk pelaksanaan tersebut masih terfokus dengan legalitas kerjasama, anggaran dan juga infrastruktur termasuk obyek wisata yang masih baru seperti wisata Sioro. Hal tersebut jika sudah ada legalitas maka anggaran akan cair serta pengembangan pariwisata akan jalan, namun sebelum adanya kerjasama untuk</p>



			<p>pembebasan lahan maka dana dari APBD, hibah, BUMD, BUMDes, dan lainnya belum bisa cair sehingga perencanaan pariwisata belum bisa terlaksana secara optimal.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : diolah oleh Penulis



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pengembangan wisata Sioro yang ada di Kecamatan Tanggunggunung dapat di simpulkan bahwa :

➤ Dari langkah-langkah Pemerintah Daerah

1. Belum adanya perjanjian kerjasama yang menghasilkan dokumen legal dalam melakukan pengembangan terhadap sector pariwisata sehingga pelaksanaannya pun masih bisa dilakukan hal ini menjadikan anggaran apapun baik dari APBDDes, APBD, BUMDes, dana hibah dan lainnya masih belum bisa cair karena menunggu adanya legalitas dan juga aturan dasar dalam pengembangan wisata di Sioro. Hal ini menjadikan bahwa masterplan untuk Pantai SIORO masih belum terancang dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Pok Darwis dan Pemerintah desa masih belum bisa maksimal. Hal ini menjadikan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, listrik, telekomunikasi masih belum bisa terbangun karena belum adanya perencanaan anggaran dan master plan dalam pengembangan wisata Sioro.
2. Belum adanya sinkronisasi secara baik antara Pemerintah dengan Pok Darwis dan masyarakat terutama dalam prosentase pembagian hasil. Sinkronisasi yang terhambat disebabkan karena penghasilan selama ini lebih banyak didominasi oleh Perhutani sebab karena akses yang dimiliki lahannya adalah milik dari perhutani, hal ini menjadi terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil terutama hasil yang diperoleh oleh Balai Desa dan Pok Darwis.
3. Perluasan kesempatan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat sudah mulai luas terutama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sector



pariwisata yang ada di setiap desa. Hal tersebut dengan memberikan pemberdayaan melalui Pok Darwis kepentingan masyarakat akan mudah diakomodasi oleh pemerintah. Namun untuk saat ini yang menjadi kendala adalah tetap infrastruktur terutama pembangunan jalan yang masih dalam kondisi kurang baik dan masih banyak jalan menuju akses wisata yang masih menggunakan jalan setapak.

4. Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sudah mulai dicanangkan dan sudah masuk dalam program kerja di semua lembaga atau instansi pemerintah termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Hal ini membawa dampak positif terhadap perekonomian desa dengan salah satunya adalah mengembangkan produk unggulan, namun di sisi lain adalah pembangunan infrastruktur adalah tetap yang menjadi kendala terutama untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Pedesaan.

➤ Dari langkah-langkah Pok Darwis

Terdapat beberapa langkah-langkah dari “Mpok Darwis” yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan Jaringan HT untuk membantu koneksi jaringan HP pengunjung pada saat mengunjungi pantai.
2. Pemberian latihan terhadap kelompok tani seperti halnya penjualan pupuk dan juga pencocokan tanam sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.
3. Penanaman pohon-pohon sebagai upaya penghijauan kembali yang ada di Desa Ngrejo dan juga upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil produk unggulan.
4. Akan mengembangkan agrowisata yang saat ini akan di kembangkan di desa Ngrejo seperti halnya buah pisang, alpukat, dan durian yang saat ini sedang di persiapkan.
5. Mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok tani sebagai daya dukung untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Ngrejo.



6. Uji perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk pembagian prosentase hasil antara Perhutani, Dinas Pariwisata, Mpok Darwis dan juga Balai Desa agar adanya keadilan dalam pembagian dana hasil.
7. Penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pembentukan komunitas “mpok darwis” sebagai payung hukum kelompok sadar wisata itu sendiri.
8. Pembentukan kantor sekretariat LMDH (Lembaga Masyarakat dan Hutan) yang digunakan sebagai kios dan distributor yang nantinya untuk mengakomodasi kelompok tani di desa Ngrejo dalam pengembangan hasil-hasil produk unggulan dalam bidang pertanian.
9. Mengembangkan bahan mangrove sebagai produk unggulan desa Ngrejo sebagai upaya untuk menarik para wisatawan serta juga sebagai daya dukung kegiatan wisata Pantai Sioro.
10. Pembangunan rumah pohon yang di bangun di sekitaran jalan untuk menuju Pantai Sioro untuk memudahkan pengunjung melihat obyek wisata Sioro
11. Pemberian panah arah menuju pantai Sioro untuk memudahkan wisatawan dan pengunjung baik pengunjung local maupun dari luar kota.

B. SARAN

Terkait dengan pengembangan wisata Sioro yang ada di Kabupaten Tulungagung bahwa terdapat beberapa saran dari peneliti untuk ke depannya yakni sebagai berikut :

1) Saran Bagi Masyarakat dan Komunitas :

- a. Optimalisasi sumber daya desa mulai dari perangkat desa sampai dengan warga desa untuk mendorong kegiatan pengembangan pengelolaan wisata Pantai Sioro. Hal ini bisa juga melakukan beberapa langkah-langkah yakni sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyediaan jasa-jasa pendukung



seperti halnya parkir/ penitipan kendaraan, retribusi tiket masuk dan juga jasa ojek untuk menuju tempat wisata.

- Pengumpulan sebagian pendapatan masyarakat dan juga anggaran desa sebagai upaya untuk memperbaiki sebagian jalan untuk menuju obyek wisata.
- Memberikan kesempatan masyarakat sekitar untuk berdagang di sekitaran pesisir pantai dengan memanfaatkan produk lokal seperti halnya perkebunan pisang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Menugaskan sebagian masyarakat sekitar sebagai petunjuk serta sebagai pemantau wisata untuk memberikan arahan dan pengamanan terhadap wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tulungagung

b. Optimalisasi perkebunan sebagai produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat. Hal ini bisa dilakukan hal langkah yakni :

- Pengelolaan perkebunan pisang menjadi barang jadi misalnya menjadi makanan lokal sebagai dagangan warga di sekitar pesisir

c. Optimalisasi sumber daya sebagai upaya pembangunan sarana dan prasarana dasar sebagai fasilitas pengunjung.

- Sinergitas antara perangkat desa dengan masyarakat untuk menambah fasilitas di sekitaran sepanjang jalan untuk menuju pantai Sioro dan juga dengan pantai-pantai yang lainnya yang satu paket dengan pantai Sioro seperti halnya peta petunjuk jalan untuk menuju destinasi lain yang satu paket dengan pantai Sioro.
- Memberikan fasilitas lain seperti halnya toilet dan tempat berteduh untuk pengunjung.
- Pembangunan Guesthouse dengan konsep “sederhana layak huni” dengan di



fasilitasi kamar mandi sebagai tempat penginapan para pengunjung terutama pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Tulungagung

- Sebagai peningkatan keamanan perlu adanya petugas tambahan baik dari kepolisian sektor maupun dari masyarakat yang sukarela untuk memberikan pengamanan terhadap pengunjung terutama di pintu masuk obyek wisata pantai dan juga di sekitar pesisir untuk memberikan perlindungan terhadap para pengunjung yang berwisata di pantai tersebut.

d. Optimalisasi peran pelopor masyarakat serta tindak aktif dari perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap wisata pantai Sioro.

- Membentuk adanya “komunitas siap explore” dengan memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk mempromosikan wisata-wisata pantai terutama di Sioro dan destinasi pantai yang lainnya sebagai upaya untuk mengenal wisata baru terhadap para wisatawan terutama dari luar Kabupaten Tulungagung

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Referensi

Sugiyono.2003.*METODE PENELITIAN ADMINISTRASI*.Bandung: ALFABETA

Rahmat, Dr.M.Si.2013.*Filsafat Administrasi*.Bandung:CV.PUSTAKA SETIA

Miftah Thoha.2008.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Jakarta:KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani.*Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*.Jogjakarta.UGM

Pusat Kajian Reformasi Administrasi.Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.2016.*PAPARAN PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL DIKLAT*

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK PROVINSI BANTEN.Jakarta.Lembaga Administrasi Negara.

e.prints.umk.ac.id. *Dalam Makalah Tentang Pendekatan-Pendekatan Strategi*

Kajian Paper USU (Universitas Sumatera Utara).*Tipe-Tipe dalam Strategi*

Dokumen *Local Governance Final* .*Kajian Local Governance di Cambodia*

Hans Bjorn Olsen.2007.*Dalam Paper Desentralitations And Local Governance*.Swiss

Shah Anwar and Shah Sana.*The New Vision of Local Governance and The Evolving Roles of Local Government*.

Sunaryo Bambang, Drs, M.Sc.MS.2013.*Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta:GAVA MEDIA.

Pitana Gde I, Prof.Dr, M.Sc.2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta:ANDI OFFSET.



Suryadi, Dr, MS.2013.Dalam proposal penelitiannya *Respon Birokrasi dalam Menanggapi Keluhan Publik*.Malang.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

2. Regulasi/Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kepariwisataaan

Draf Rancangan Peraturan Daerah Tulungagung Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata

3. Situs Website

Penelitian

Kualitatif

(Metode Pengumpulan Data)

(<https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/> Diakses tgl 18 September 2016

Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung

Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung.co.id

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.co.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tulungagung

Kementerian Pariwisata.co.id

4. Dokumen-dokumen legal terkait

Dokumen Kinerja Pariwisata Nasional.*Satelit Pariwisata Nasional*.Kementerian Pariwisata RI

Dokumen Buku Kas Kelompok Tani Wono Mulyo Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.



Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Dokumen Tulungagung dalam Angka

Dokumen Tanggunggunung dalam Angka

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2014-2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN GAMBAR



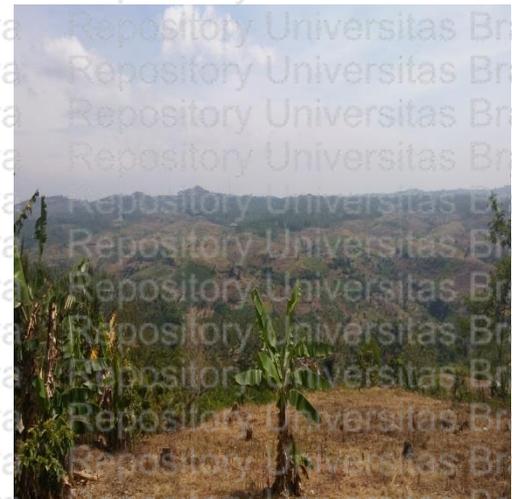
Jalan Menuju Wisata Pantai



Jalan setapak di tengah perkebunan pisang



Jalan Setapak Menuju Pantai



Pemandangan sekitar jalan setapak





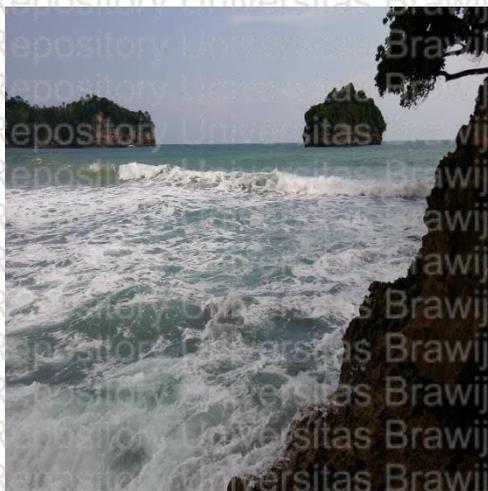
Pemandangan pantai Sioro dari kejauhan



Kondisi jalan sebagian menuju Sioro



Kondisi jalan sebagian menuju pantai Sioro



Kondisi jalan menuju wisata Sioro



Ombak Pantai Sioro

Wisata Pantai Sioro



Pembangunan rumah pohon



Rumah Pohon di jalan menuju Sioro



Syrup Mangrove produk kelompok Siroya Berdandan



DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Table 1.Data pertumbuhan Pariwisata

Table 2.Data penerimaan wisatawan mancanegara menurut tempat tinggal

Table 3 Data Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia

Tabel 4 Produk Domestik Bruto Pariwisata

Tabel 5 Daftar wisata Kabupaten Tulungagung

Tabel 6 data tentang table tersembunyi yang ada di Kabupaten Tulungagung

Table 7.Observasi Lapangan Pantai Sioro

Table 8.Daftar paparan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Table 8.Proses Policy suatu Kerangka Analisis

Table 9.Prinsip-prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan

Table 10.Daftar aksi agenda dalam Program Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 11.Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

Table 12.Aspek Indikator dalam Kinerja Pembangunan Kepariwisata

Table 13.Perbandingan antara Desentralisasi dan Local Governance

Table 14.Daftar elemen Kunci dalam Citizen-Centered Governance

Tabel 15.Daftar Pengembangan Sumber Daya Alam sebagai Pariwisata

Tabel 16.Daftar factor pendorong dalam Pengembangan Wisata

Table 17.Daftar peluang karier dalam sector pariwisata

Table 18.Sumber Daya Pariwisata Minat Khusus

Tabel 19.Fungsi-fungsi dalam Pengelolaan Pariwisata Strategis

Table 20.Metode dalam Pengelolaan Pariwisata

Table 21.Prinsip-prinsip dalam Penerapan Strategi Manajemen Sumber Daya

Table 22.Prinsip-prinsip dalam Manajemen Sumber Daya Pariwisata

Table 23.Paradigma Kebijakan Pariwisata

Table 24.Peran dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Manajemen Pariwisata

Table 25.Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata



Tabel 26. Kegiatan-kegiatan pokok dalam Pariwisata

Tabel 27. Penjelasan tahapan destinasi wisata

Table 28. Peluang Pengembangan Destinasi Wisata

Table 29. Sumber Data Penelitian

Table 30. Data luas kemiringan tanah Kabupaten Tulungagung

Table 31. Luas wilayah dan kepadatan penduduk

Table 32. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

Tabel 33. Daftar wisata di Kabupaten Tulungagung

Tabel 34. Wisata Pantai yang Belum di Ketahui

Tabel 35. PDRB Kabupaten Tulungagung 2010-2014

Table 36. PDRB Kabupaten Tulungagung ADHB 2010-2014

Tabel 37. PDRB atas dasar harga konstan

Tabel 38. Daftar sector penting untuk domestic regional Bruto Daerah

Tabel 39. Rencana dan Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung

Table 40. Rencana dan realisasi belanja kabupaten daerah Kabupaten Tulungagung

Tabel 41. Luas wilayah dan jarak kecamatan ke Kota

Tabel 42. Indikator Kependudukan Kecamatan Tanggunggunung

Tabel 43. Daftar statistic Tanaman Pangan Tahun 3013

Table 44. Data statistic peternakan Kecamatan Tanggunggunung

Table 45. Jumlah usaha dan tenaga kerja perdagangan

Table 46. Daftar sarana transportasi di Kecamatan Tanggunggunung

Tabel 47. Data sarana komunikasi di Kecamatan Tanggunggunung

Table 48. Data tentang jasa-jasa di Kecamatan Tanggunggunung

Table 49. Daftar perseorangan di Kecamatan Tanggunggunung

Table 50. wajib pajak dan penerimaan di Kecamatan Tanggunggunung

Table 51. Wisata alam yang masuk dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Table 52. Data observasi tentang wisata Pantai Sioro



Table 53.data tentang pendapatan kelompok tani “WONOMULYO”

Table 54.Program-program dan langkah kerja Pengembangan wisata Sioro

Table 55 Substansi peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pok Darwis

Table 56.Indikator dalam kinerja sasaran strategis

Table 57.Oriientasi dalam Paradigma Pembangunan

Table 58.Analisis tentang pembangunan Wisata Sioro

Table 59.Aspek-aspek indicator dalam kinerja pembangunan kepariwisataan

Table 60.Analisis pembangunan kepariwisataan wisata Sioro

Table 61.Daftar fungsi dalam Pengelolaan pariwisata strategis

Table 62.Analisis langkah-langkah tentang wisata Sioro

Tabel 63.Perbedaan antara desentralisasi dengan local governance

Table 64.Uraian Analisis penerapan di Desa Ngrejo berdasarkan Local Governance

Table 65.Analisis stakeholder di Desa Ngrejo dalam Pengembangan Wisata Sioro

Table 66. Uraian analisis tentang pemberdayaan Pok Darwis

Table 67.Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata

Table 68.Analisis rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung



DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep Pengelolaan Potensi Wisata

Gambar 2. Regulasi dalam Pengelolaan pariwisata

Gambar 3. Substansi undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Gambar 4. persoalan potensi pengelolaan wisata Pantai Sioro

Gambar 5. Uraian Sasaran Kebijakan

Gambar 6. Konsep dalam Daya Saing Daerah

Gambar 7. Konsep pariwisata sebagai daya saing daerah

Gambar 8. Kajian-kajian dalam Administrasi Publik

Gambar 9. Konsep dalam New Public Management

Gambar 10. Gambaran dalam Konsep Governance

Gambar 11. Konsep Kebijakan Model Elite

Gambar 12. Gambaran dinamika dalam proses kebijakan

Gambar 13. Proses dalam Kebijakan

Gambar 14. Model alokasi Sumber yang Rasional

Gambar 15. Konsep kebijakan incremental

Gambar 16. Kebijakan dalam Model Sistem

Gambar 17. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 18. Model 4 kuadran hubungan antara kepariwisataan dan lingkungan

Gambar 19. Ilustrasi Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan

Gambar 20. Indikator Kepariwisataaan Kebberlanjutan

Gambar 21. Elemen-elemen dalam Pariwisata

Gambar 22. Fungsi-fungsi dalam Manajemen

Gambar 23. Stakholder dalam Pariwisata

Gambar 24. Aspek Kebijakan Pariwisata

Gambar 25. Sklus Destinasi Pariwisata

Gambar 26. Alur analisis data Miles and Hubberman

Gambar 27. Kerangka kerja penelitian skripsi



Gambar 28.Peta Kabupaten Tulungagung

Gambar 29.Peta Kecamatan Tanggunggunung

Gambar 30.Jalan menuju wisata pantai

Gambar 31.Jalan setapak menuju pantai

Gambar 32.Jalan setapak perkebunan pisang

Gambar 33.Pemandangan sekitar di jalan setapak

Gambar 34.Pemandangan pantai Sioro

Gambar 35.Kondisi jalan sebagian menuju Sioro

Gambar 36.Kondisi jalan menuju Sioro

Gambar 37.Kondisi jalan menuju wisata Sioro

Gambar 38.Ombak Pantai Sioro

Gambar 39.Wisata Pantai Sioro

Gambar 40.Pembangunan rumah pohon

Gambar 41.Rumah Pohon di jalan menuju Sioro

Gambar 42.Bersama Bupati, Mpok Darwis dan masyarakat

Gambar 43.Pembangunan rumah pohon

Gambar 44.Pembangunan rumah pohon

Gambar 45.Pembangunan rumah pohon

Gambar 46.Syrup mangrove Khas Unggulan Tulungagung

Gambar 47.Syrup Mangrove

Gambar 48.Jalan setapak menuju Wisata Pantai Sioro

Gambar 49.Jalan masuk menuju wisata Pantai Sioro

Gambar 50.Produk unggulan Desa Ngrejo

Gambar 51.Gambaran persoalan pembangunan wisata Sioro

Gambar 52.Skema prosedur pembentukan Mpok Darwis atas inisiatif masyarakat

GAMBARAN SITUASI SERTA REKOMENDASI SEMENTARA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA PANTAI SIORO DESA NGREJO KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG.

1) GAMBARAN INFORMASI TERKAIT DENGAN OBYEK WISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Wisata-wisata yang terdapat di Kabupaten Tulungagung berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika yakni sebagai berikut :

Tempat Wisata Menurut Nama dan Alamat di wilayah Kabupaten Tulungagung,2015		
I.	Wisata Alam	Nama kecamatan/Wilayah/Desa
1	Bendungan Wonerejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
3	Coban Kromo (indah)	Dsn. Jambu,Ds. Pelem Kec. Campurdarat
4	Telaga Buret	Ds. Sawo,Kec. Campurdarat
5	Telaga Baran	Ds. Banyuurip ,Kec.Kalidawir
6	Telaga Ngambal	Ds. Winong, Kec.Kalidawir
7	Pesanggrahan Argo Wilis	Ds. Sendang, Kec.Sendang
8	Taman Kusuma Wicitra	Jl. R.A. Kartini No. 1 Tulungagung
II.	Wisata Purbakala	
1	Candi Gayatri	Ds. Boyolangu, Kec.Boyolangu
2	Candi Cungkup	Ds. Srangghahan, Kec.Boyolangu
3	Candi Dadi	Ds.Wajak Kidul, Kec.Boyolangu
4	Candi Gambar	Ds.Mirigambar, Kec.Sumbergempol
5	Candi Ampel	Ds.Ngampel, Kec.Sumbergempol
6	Candi Tuban	Ds.Domasan, Kec.Kalidawir
7	Candi Nilosuwarna	Ds.Aryojeding, Kec.Rejotangan
8	Candi Asmoro Bangun	Ds.Geger, Kec.Sendang
9	Makam Mbah Mlinjo	Ds.Ngepoh, Kec.Tanggunggunung
10	Makam Srigading	Ds.Bolo, Kec.Kauman
11	Makam Setono Gedong	Ds.Sukodono, Kec.Karangrejo

12	Makam Sunan Kuning	Ds.Macanbang, Kec.Pakel
13	Makam Patih	Ds.Tiudan, Kec.Gondang
14	Makam Ngadirogo	Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Ds.Bangunmulyo, Kec.Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Ds.Ndemuk, Kec.Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Ds.Rejotangan, Kec.Rejotangan
18	Makam Soka	Ds.Karang Sari, Kec.Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Ds.Mulyosari, Kec.Pagerwojo
20	Makam Majan	Ds.Majan, Kec.Kedungwaru
21	Makam Mbedalem	Ds.Besole, Kec.Besuki
22	Makam Surontani I	Ds. Tanggung ,kec.Campurdarat
23	Makam Surontani II	Ds.Wajak Kidul, Kec.Boyolangu
24	Goa Selomangleng	Ds.Sanggrahan, Kec.Boyolangu
25	Goa Tan Tik syu	Ds.Sumber Agung, Kec.Rejotangan
26	Goa Tan Tik syu	Ds.Sendang, Kec.Sendang
27	Goa Banyu	Ds.Banyuurip, Kec.Kalidawir
28	Goa pasir	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
29	Goa Pasetran Gondomayit	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
30	Goa Tritis	Ds.Tanggung, Kec. Campurdarat
31	Situs Mbah Bodho	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
32	Situs Mbah Bodho	Ds.Kalidawir, Kec.Kalidawir
33	Situs Mbah Bodho	Ds.Gondang, Kec.Gondang
34	Situs Gembrong	Ds.Domasan, Kec.Kalidawir
35	Situs Kanigoro	Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol
36	Situs Lemah Duwur	Ds.Bantengan, Kec.Bandung
37	Situs Atas Kebutan	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
38	Situs Watu Garit	Ds.wateskroyo, Kec.Besuki
39	Situs Song Gentong I	Ds.Besole, Kec.Besuki

40	Situs Song Gentong II	Ds.Besole, Kec.Besuki
41	Situs Omben Jago	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
42	Situs Punden Gedong	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
43	Situs Kucur Sanga	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
44	Penemuan Fosil	Ds.Gamping, Kec.Campurdarat
45	Balai penyelamat (Museum Daerah)	Jl.Raya Popoh, Kec.Boyolangu
46	Dwarapala (Reco Pentung)	Ds.Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar
47	Monumen Wajakensis	Ds. Gamping Kec. Campurdarat
48	Prasasti Lawadan	Ds. Besole Kec. Besuki
III.	Wisata Pantai	
1	Pantai Sine	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
2	Pantai Dlodod	Ds.Rejosari, Kec.Kalidawir
3	Pantai Popoh	Ds.Besuki, Kec.Besuki
4	Pantai Klatak	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
5	Pantai Sidem	Ds.Besuki, Kec.Besuki
6	Pantai Nglarap	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
7	Pantai Brumbum	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
8	Pantai Molang	Ds.Pucanglaban, Kec.Pucanglaban
9	Pantai Gerangan	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
10	Pantai Bayem	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
11	Pantai Coro	Ds.Besuki, Kec.Besuki
12	Wisata Sanggar	Kec. Tanggunggunung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Dalam catatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang dilansir oleh BPS bahwa dalam wisata pantai di kabupaten Tulungagung terdapat 12 Pantai yang saat ini di ketahui oleh Pemerintahan Kabupaten dan masyarakat setempat namun belum sepenuhnya terutama wisatawan dari luar yang mengetahui keberadaan wisata pantai yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan dalam hal ini bahwa berdasarkan data dari komunitas media sosial dari Explore Tulungagung bahwa terdapat beberapa wisata pantai yang sebagaimana dalam hal ini terdapat beberapa yang tersembunyi atau baru ditemukan yakni sebagai berikut :

No.	Nama-nama Pantai di Kab.Tulungagung yang belum diketahui.
-----	-----------------------------------------------------------

- | | |
|-----|-----------------------|
| 1. | Pantai Sanggar |
| 2. | Pantai Patok Gebang |
| 3. | Pantai Ngalur |
| 4. | Pantai Molang |
| 5. | Pantai Lumbang |
| 6. | Pantai Nglinci |
| 7. | Pantai Pucang Sawit |
| 8. | Pantai Kedung Tumpang |
| 9. | Pantai Dlado |
| 10. | Pantai Dadap |
| 11. | Pantai Sioro |
| 12. | Pantai Godeg |
| 13. | Pantai Gerangan |
| 14. | Pantai Sawah Ombo |
| 15. | Pantai Wedi Putih |

SUMBER : MEDIA EXPLORE TULUNGAGUNG

Keterangan :

Pantai Sioro Kabupaten Tulungagung di Kenal dengan sebagai pantai yang sangat potensial dan secara pesona destinasi memiliki keindahan alam namun dengan ombak yang cukup besar. Pantai Sioro sebagai pantai yang satu paket dengan wisata-wisata yang lainnya yakni seperti halnya Laut Sioro, Pantai Segoro Alas, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Godeg, Batu Godeg, Pantai Branjang, Pantai Ceplukan yang merupakan sebagai destinasi wisata yang satu paket dengan pantai Sioro. Namun pantai ini masih cukup tersembunyi dan juga belum memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya jalan yang untuk menuju ke pantai tersebut, fasilitas toilet, Pajak Retribusi, Tempat Peneduhan, Pedagang dan lain sebagainya. Bahkan untuk menuju pantai harus berjalan atau bahkan ada yang menggunakan kendaraan roda 2 sepanjang \pm 5 km dengan jalanan yang kurang memadai dan ekstrim serta sering mengalami kerusakan terutama di musim penghujan.

2) HASIL OLAHAN GAMBARAN ANALISIS PERSOALAN

Potensi Kabupaten Tulungagung

Desa Ngrejo : Pantai Sioro

Pantai Sioro Terletak di Desa Ngrejo terdiri dengan destinasi wisata pantai yang lainnya seperti :

- Pantai Cengger
- Laut Sioro
- Pantai Sioro
- Pulau Songkalong
- Pantai Godeg
- Pantai Mbranjang
- Batu Godeg
- Pantai Ceplukan
- Wisata Segoro Alas

GAMBARAN POTENSI WISATA YANG TERDAPAT DI KECAMATAN TANGGUNGUNUNG DESA NGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

Satu desa bisa mengunjungi beberapa wisata yang juga dikatakan sangat potensial

Permasalahan pada Obyek Wisata

Informasi Dari warga Ngrejo

Informasi dari Pemkab/Dinas

- akses jalan yang belum memadai.
- Belum adanya fasilitas seperti toilet di sekitaran Pantai.
- Belum adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pesisir.
- Masih adanya jalan setapak untuk menuju obyek wisata Sioro dan pantai lainnya.
- Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya kendaraan khusus untuk menuju pantai tersebut.
- Belum adanya pengelolaan secara tetap dan pasti terkait dengan pengelolaan wisata pantai Sioro dengan pantai yang lainnya yang satu paket dengan Pantai Sioro.
- Belum adanya pembayaran retribusi untuk masuk di wisata Pantai.

Hasil Pengamatan Observasi

- Informasi belum didapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena Informasi didapat langsung dari obyek wisata dan berdasarkan Informasi dari Masyarakat.

- Belum adanya arah jalan yang jelas terutama untuk menuju wisata pantai yang lainnya yang merupakan satu paket dengan Pantai Sioro.
- Belum terkelolanya secara optimal tentang keberadaan pantai tersebut/ belum adanya kepastian siapa yang akan menjadi pengelola tetap terhadap pantai Sioro dan pantai yang lainnya.
- Jalan yang curam dan ekstrim serta sempit cukup berbahaya terutama jalan setapak untuk menuju pantai Sioro.
- Belum adanya fasilitas seperti halnya toilet, tempat berteduh dan sebagainya.
- Belum adanya penarikan pajak Retribusi untuk masuk di wilayah pesisir pantai Sioro tersebut.
- Belum adanya peta yang jelas terkait arah jalan menuju pantai.

Berdasarkan olahan data yang diperoleh dari warga Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yakni digambarkan sebagai berikut :

**HASIL OBSERVASI LAPANGAN SEMENTARA DI PANTAI SIORO DESA NGREJO KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

No.	Kategori Pengelolaan Wisata	Keterangan
1.	Data Pendapatan Masyarakat	Pendapatan masyarakat sementara diperoleh dari hasil perkebunan pisang. Sedangkan untuk wisata pantai masih belum ada penarikan retribusi yang di dapat karena pengelolaan masih dikatakan belum pasti dan belum tetap. Namun untuk sementara bahwa seperti halnya pantai Sioro sebagian dikelola masyarakat meskipun belum seoptimal mungkin seperti halnya pantai-pantai yang lainnya.
2.	Kegiatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak mengelola sektor perkebunan yakni perkebunan pisang seperti halnya perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan bukit untuk menuju wisata Pantai Sioro dan pantai-

3.

Jumlah Pengunjung

pantai yang lainnya.

Belum ada data yang pasti, namun berdasarkan informasi masyarakat bahwa setiap minggu dan musim kemarau pengunjung banyak yang berdatangan terutama di wisata Pantai Sioro. Pengunjung didominasi dari Surabaya dan Kediri, sedangkan pengunjung dari wilayah lainnya seperti halnya Malang dan Blitar masih sedikit.

4.

Keadaan Sarana dan prasarana pantai

a. Jalan untuk menuju wisata yang masih belum memadai.

b. Belum adanya petunjuk jalan yang jelas terutama untuk petunjuk jalan di pantai-pantai yang satu paket dengan pantai Sioro seperti halnya pantai Godeg, Laut Sioro, Pantai Cengger, Pulau Songkalong, Pantai Mbranjang, Ceplukan dan Segoro alas.

c. Belum adanya fasilitas toilet umum.

d. Belum adanya tempat untuk berteduh



5.

Peran Stakeholder

❖ Masyarakat :

- a. membangun sebagian jalan setapak yang dibangun oleh petani sekitar perkebunan pisang untuk memudahkan pengunjung menuju obyek wisata.
- b. Lebih banyak melakukan

atau masih kosong.

e. Belum adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar pesisir pantai.

f. Banyaknya jalan yang rusak terutama di musim penghujan sehingga tidak semua kendaraan roda dua dapat melewati jalan yang untuk menuju wisata pantai Sioro.

g. Belum adanya petugas pengamanan dan alat pantau untuk memantau keadaan obyek wisata yang ada di sekitaran pantai Sioro.

h. Belum adanya pedagang di sepanjang jalan untuk menuju pantai Sioro seperti pedagang makanan dan minuman.

		
6.	Strategi Ke depan	<p> pengelolaan terhadap perkebunan pisang yang berada di sepanjang jalan untuk menuju obyek wisata pantai Sioro dan pantai yang lainnya. </p> <p> ❖ Pemerintah : </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya pengelolaan secara optimal namun sudah adanya upaya dari pemerintah Kabupaten yakni Bupati langsung mengunjungi obyek wisata di sekitarann pantai Sioro. b. Bupati menggelontorkan dana untuk membantu petani perkebunan pisang dalam membangun sebagian jalan setapak untuk menuju obyek wisata pantai Sioro.
	Strategi Ke depan	<p> Berdasarkan Informasi dari warga Desa Ngrejo yakni sebagai berikut : </p> <p> A. Strategi Pemerintah : </p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Infrastruktur Jalan untuk menuju wisata Pantai Sioro.
		

- Membangun bandara di sekitaran perbukitan sebagai sarana transportasi udara untuk wilayah Kabupaten Tulungagung.
- Menjadikan Pantai Sioro sebagai tujuan wisata para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tulungagung yang telah mendapatkan persetujuan/ACC dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung).

SUMBER: Di olah Oleh Penulis (Dari warga Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung)

3) Gambaran perencanaan dan misi pembangunan Kabupaten Tulungagung

GAMBARAN UMUM UNTUK PERENCANAAN DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- 1) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan Pembangunan sektor-sektor lain.
- 2) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata serta Perkebunan melalui Kewirausahaan.
- 3) Pengeganaan dan Penanggulangan Kemiskinan terpadu.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan budaya.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis

GAMBARAN DAN URAIAN PENJELASAN PERENCANAAN DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014-2018

No.	PERENCANAAN DAN MISI PEMBANGUNAN	URAIAN PENJELASAN
1	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pembangunan untuk sektor-sektor yang lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti halnya jalan, banjir, permukiman, sampah, air minum dan lain-lain. o Mendorong pembangunan Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta adanya perubahan iklim. o Mewujudkan adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu
2	Pembangunan Ekonomi kerakyatan berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan.	<ul style="list-style-type: none"> o Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai dengan kompetensi Kabupaten Tulungagung yang didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.
3	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan Pola Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan kebudayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan o Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial. o Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
4	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
5	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang murah dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis	<ul style="list-style-type: none"> o Mendorong adanya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan. o Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

	<ul style="list-style-type: none">○ Mewujudkan adanya suatu tatanan politik yang harmonis○ Meningkatkan masyarakat yang akan sadar hukum○ Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama/kepercayaan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Dokumen Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018

4) REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terkait dengan adanya sebuah upaya untuk mengembangkan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung bahwa sebenarnya terdapat beberapa hal yang akan direkomendasikan oleh penulis terkait dengan pengembangan pengelolaan wisata pantai Siro Ngrejo Kabupaten Tulungagung yakni sebagai berikut :

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wisata

Rekomendasi Kebijakan Ke depan

Rekomendasi Bagi Masyarakat

Rekomendasi Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Rekomendasi Bagi Masyarakat

- 1) Optimalisasi sumber daya desa mulai dari perangkat desa sampai dengan warga desa untuk mendorong kegiatan pengembangan pengelolaan wisata Pantai Sioro.
- 2) Optimalisasi perkebunan sebagai produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat.
- 3) Optimalisasi sumber daya sebagai upaya pembangunan sarana dan prasarana dasar sebagai fasilitas pengunjung.
- 4) Optimalisasi peran pelopor masyarakat serta tindak aktif dari perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap wisata pantai Sioro.

Rekomendasi Bagi Pemerintah

1. Memperkuat sinergitas antara pemerintah dengan perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan alokasi dana dalam pembangunan fasilitas seperti Penerangan, Peta Jalan, Perbaikan Jalan dan fasilitas yang mendukung pengunjung untuk menuju ke obyek wisata.
2. Memberikan fasilitas lain yang mendukung kegiatan masyarakat dalam mengembangkan wisata pantai Sioro sebagai peningkatan kegiatan perekonomian lokal.

Dalam hal ini bahwa jika digambarkan uraian terkait rekomendasi sementara yang dirumuskan sementara yakni sebagai berikut :

**GAMBARAN KONSEP REKOMENDASI RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN WISATA SIORO KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

No.	Rekomendasi Bagi Masyarakat	Uraian Rekomendasi	Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah	Uraian Rekomendasi
1.	<p>Optimalisasi sumber daya desa mulai dari perangkat desa sampai dengan warga desa untuk mendorong kegiatan pengembangan pengelolaan wisata Pantai Sioro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyediaan jasa-jasa pendukung seperti halnya parkir/penitipan kendaraan, retribusi tiket masuk dan juga jasa ojek untuk menuju tempat wisata. • Pengumpulan sebagian pendapatan masyarakat dan juga anggaran desa sebagai upaya untuk memperbaiki sebagian jalan untuk menuju obyek wisata. • Memberikan kesempatan masyarakat sekitar untuk berdagang di sekitaran pesisir pantai dengan memanfaatkan produk lokal seperti halnya perkebunan pisang untuk meningkatkan 	<p>Memperkuat sinergitas antara pemerintah dengan perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan alokasi dana dalam pembangunan fasilitas seperti Penerangan, Peta Jalan, Perbaikan Jalan dan fasilitas yang mendukung pengunjung untuk menuju ke obyek wisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menyiapkan sebagian dana untuk membantu warga sekitaran dalam pembangunan infrastruktur misalnya jalan raya, Penerangan dan Peta Jalan hal ini ke depan untuk memudahkan pengunjung.



pendapatan masyarakat.

- Menugaskan sebagian masyarakat sekitar sebagai petunjuk serta sebagai pemantau wisata untuk memberikan arahan dan pengamanan terhadap wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung harus aktif untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain seperti Blitar, Kediri dan Trenggalek yang sebagaimana hal tersebut untuk merupakan sebagai upaya mempromosikan potensi wisata local serta juga memberikan pengenalan terhadap para wisatawan dari luar Tulungagung untuk mempromosikan potensi wisata local tersebut.

Merancang konsep masterplan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk merumuskan paket wisata yang ada di desa Ngrejo berdasarkan kondisi dan

Pemerintah melakukan sinergitas dengan daerah lain seperti Kediri, Blitar dan Trenggalek yang notabene juga mempunyai potensi wisata dengan melakukan upaya promosi terhadap wisatawan yang lainnya serta melakukan pengenalan-pengenalan tentang potensi local yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Hal ini bahwa pemerintah melakukan perancangan terhadap konsep masterplan untuk merumuskan paket wisata yang ada di Desa Ngrejo termasuk gabungan antara

situasi yang ada di desa Ngrejo.

Wisata Sioro dengan wisata-wisata lainnya yang ada di Desa Ngrejo. Hal ini digunakan untuk gambaran perencanaan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan wisata hingga kegiatan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dari potensi wisata tersebut.

2.

Optimalisasi perkebunan sebagai produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat

- Pengelolaan perkebunan menjadi barang jadi misalnya menjadi makanan lokal sebagai dagangan warga di sekitar pesisir

Memberikan fasilitas lain yang mendukung kegiatan masyarakat dalam mengembangkan wisata pantai Sioro sebagai peningkatan kegiatan perekonomian lokal

- Pemerintah daerah memberikan fasilitas lain misalnya membangun sistem pemantau di sekitaran pesisir sebagai memantau gerakan ombak yang ada di sekitaran pantai sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pasang surut air laut.

3.

Optimalisasi sumber daya sebagai upaya pembangunan sarana dan prasarana dasar sebagai fasilitas pengunjung

- Sinergitas antara perangkat desa dengan masyarakat untuk menambah fasilitas di sekitaran sepanjang jalan untuk menuju pantai Sioro dan juga dengan pantai-pantai yang lainnya yang satu paket dengan pantai Sioro seperti halnya peta petunjuk jalan untuk menuju destinasi

Peningkatan adanya sistem keamanan dan keselamatan di sekitaran pesisir dalam hal untuk mendorong pengunjung tetap selamat dan aman dalam melakukan proses berwisata.

- Perumusan dan penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur) keselamatan untuk wilayah pesisir sebagai standar dalam hal berwisata.
- Pembuatan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para pengunjung selama berwisata di Pantai Sioro dan pantai yang lainnya.



lain yang satu paket dengan pantai Sioro.

- Memberikan fasilitas lain seperti halnya toilet dan tempat berteduh untuk pengunjung.
- Pembangunan Guesthouse dengan konsep “sederhana layak huni” dengan difasilitasi kamar mandi sebagai tempat penginapan para pengunjung terutama pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Tulungagung
- Sebagai peningkatan keamanan perlu adanya petugas tambahan baik dari kepolisian sektor maupun dari masyarakat yang sukarela untuk memberikan pengamanan terhadap pengunjung terutama di pintu masuk obyek wisata pantai dan juga di sekitar pesisir untuk memberikan

4.

Optimalisasi peran pelopor masyarakat serta tindak aktif dari perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap wisata pantai Sioro

perlindungan terhadap para pengunjung yang berwisata di pantai tersebut.

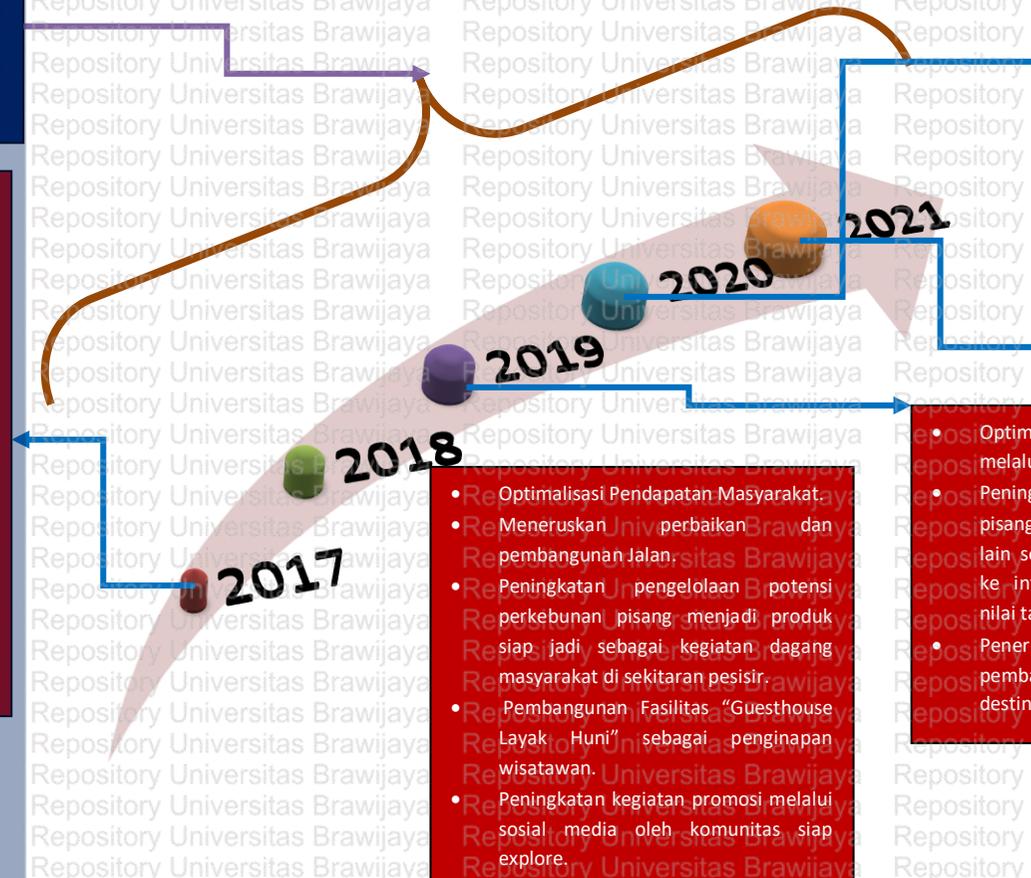
- Membentuk adanya “komunitas siap explore” dengan memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk mempromosikan wisata-wisata pantai terutama di Sioro dan destinasi pantai yang lainnya sebagai upaya untuk mengenal wisata baru terhadap para wisatawan terutama dari luar Kabupaten Tulungagung.

Sumber : Dirumuskan oleh Peneliti

GRAND DESIGN DRAF REKOMENDASI RENCANA STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI SIORO DI DESA NGREJO KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG.

JANGKA WAKTU REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MASYARAKAT DESA NGREJO

- Optimalisasi Pendapatan dari sektor jasa masyarakat.
- Perbaikan dan pembangunan sebagian jalan setapak untuk menuju destinasi wisata.
- Optimalisasi Perkebunan pisang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Membangun arah petunjuk jalan yang jelas untuk menuju obyek wisata
- Pembangunan fasilitas toilet dan tempat teduh pengunjung.
- Penambahan petugas keamanan di sekitaran pesisir



- Optimalisasi Pendapatan Masyarakat.
- Meneruskan perbaikan dan pembangunan Jalan.
- Peningkatan pengelolaan potensi perkebunan pisang menjadi produk siap jadi sebagai kegiatan dagang masyarakat di sekitaran pesisir.
- Pembangunan Fasilitas "Guesthouse Layak Huni" sebagai penginapan wisatawan.
- Peningkatan kegiatan promosi melalui sosial media oleh komunitas siap explore.

- Optimalisasi Pendapatan masyarakat dari sektor jasa termasuk pengelolaan wisata yang telah melakukan adanya perbaikan dan pengembangan.
- Alokasi sebagian dana untuk melakukan perawatan berbagai fasilitas seperti halnya toilet, Guesthouse dan jalan raya.

• Terbentuknya "KAMPUNG WISATA DESA NGREJO KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG"

- Optimalisasi Pendapatan Masyarakat melalui sektor jasa.
- Peningkatan ekspor hasil produksi pisang menjadi barang jadi ke wilayah lain seperti halnya luar jawa bahkan ke internasional untuk peningkatan nilai tambah masyarakat.
- Penerusan perbaikan dan pembangunan jalan untuk menuju destinasi wisata.

**JANGKA WAKTU REKOMENDASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH TULUNGAGUNG**

- Penyuntikan sebagian dana dari pemerintah untuk membantu masyarakat desa Ngrejo dalam hal pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan raya, Penerangan dan Peta Jalan.
- Pembuatan SOP keselamatan dan keamanan sebagai standar dalam berwisata.
- Pembuatan aturan-aturan sebagai hal untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan selama berwisata
- Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung harus aktif untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain seperti Blitar, Kediri dan Trenggalek yang sebagaimana hal tersebut untuk merupakan sebagai upaya mempromosikan potensi wisata local serta juga memberikan pengenalan terhadap para wisatawan dari luar Tulungagung untuk mempromosikan potensi wisaya local tersebut.

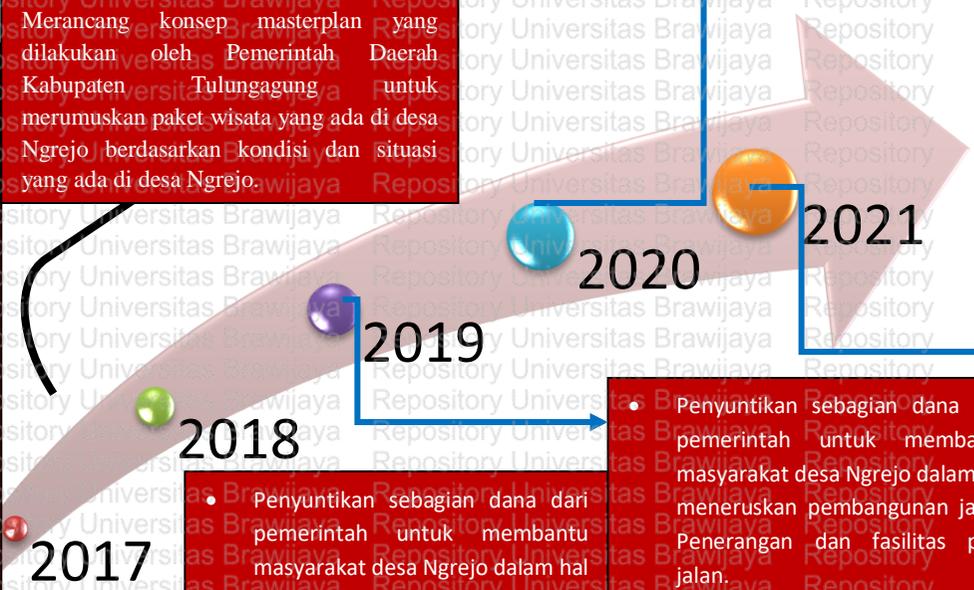
Merancang konsep masterplan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk merumuskan paket wisata yang ada di desa Ngrejo berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di desa Ngrejo.

- Penyuntikan sebagian dana dari pemerintah untuk membantu masyarakat desa Ngrejo dalam hal meneruskan pembangunan jalan, Penerangan dan fasilitas peta jalan.
- Memberikan fasilitas pos untuk masyarakat untuk menjadi petugas keamanan di pantau oleh petugas tim sar dan kepolisian sektor untuk memantau para pengunjung wisatawan serta memberikan fasilitas keamanan.

- Penyuntikan sebagian dana dari pemerintah untuk membantu masyarakat desa Ngrejo dalam hal meneruskan pembangunan jalan, Penerangan dan fasilitas peta jalan.
- Memberikan fasilitas sistem pemantau wisata pantai untuk memudahkan petugas dalam hal memantau ombak pasang surut air laut sebagai hal untuk tanda peringatan terhadap para wisatawan.

- Penyuntikan sebagian dana dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk membantu masyarakat dan perangkat desa dalam hal membiayai lainnya seperti halnya perawatan dan sebagainya.
- Pembangunan Jembatan yang menghubungkan sebagian bukit di sekitaran pantai untuk memudahkan pengunjung dalam hal melihat pesona wisata di sekitaran pantai Siro.

Terbentuknya “Desa Kampung Wisata” sebagai penggerak perekonomian lokal Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.



Terkait dengan rekomendasi kebijakan yang disusun di atas bahwa diharapkan akan adanya hasil-hasil yang ada di capai yakni sebagai berikut :

GAMBARAN CAPAIAN DARI REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA SIORO

REKOMENDASI KEBIJAKAN										HARAPAN YANG DICAPAI										
Pemerintah					Masyarakat					Pemerintah					Masyarakat					
2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Penyuntikan sebagai dana dari pemerintah	Penyuntikan sebagai bagian dana dari pemerintah	Penyuntikan sebagai bagian dana dari pemerintah	Penyuntikan sebagai bagian dana dari pemerintah	Penyuntikan sebagai bagian dana dari pemerintah	Optimalisasi Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Pendapatan Masyarakat	Terbentuknya kawasan “KAMPUNG WISATA NGREJO”	Peningkatan dana dalam pembangunan wisata	Peningkatan dana dalam pembangunan wisata	Peningkatan dana dalam pembangunan wisata	Peningkatan dana dalam pembangunan wisata	Meningkatnya kegiatan perekonomian lokal	Meningkatnya dana pembanguan wisata	Meningkatnya dana pembanguan wisata	Meningkatnya dana pembanguan wisata	Meningkatnya dana pembanguan wisata	Terbentuknya kampung wisata sebagai penggerak ekonomi lokal	
Pembuatan SOP keselamatan dan keamanan	Pembangunan pos sekitar jalan	Pembangunan sistem pemantau pesisir	Pembangunan jembatan yang menghubungkan antar bukit		Perbaikan dan Pembangunan Jalan Setapak	Penerusan perbaikan dan pembangunan jalan	Peningkatan ekspor hasil produksi pisang	Alokasi sebagai dana untuk melakan perawatn berbagai fasilitas seperti toilet, Guesthouse dan jalan raya.		Upaya pengant isipasi terjadinya kecelakaan dalam berwisata	Dapat membantu masyarakat lokal dalam mengant isipasi terjadinya kecelakaan dalam berwisata	Mengetahui terjadinya pasang surut air laut sebagai antisipasi		Infrastruktur jalan yang memadai	Infrastruktur jalan yang memadai	Meningkatnya nilai tambah masyarakat	Mengurangi kerusakan fasilitas dan bertahannya kualitas pelayanan			
Pembuatan aturan-aturan keamanan dan					Optimalisasi sektor perkebunan pisang	Peningkatan pengelolaan perkebunan	Penerusan perbaikan dan pembangunan jalan			Meningkatnya keamanan dan keselamatan dalam berwisata				Sebagai peningkatan pendapatan masyarakat lokal	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pengelo	Meningkatnya kelayakan infrastruktur				

REKOMENDASI TAMBAHAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN WISATA SIORO

REKOMENDASI KEBIJAKAN		HARAPAN YANG DICAPAI	
TAHUN	SUBSTANSI KEBIJAKAN	TAHUN	SUBSTANSI YANG DI CAPAI
2017	<p>Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung harus aktif untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain seperti Blitar, Kediri dan Trenggalek yang sebagaimana hal tersebut untuk merupakan sebagai upaya mempromosikan potensi wisata local serta juga memberikan pengenalan terhadap para wisatawan dari luar Tulungagung untuk mempromosikan potensi wisaya local tersebut.</p>	2017	<ul style="list-style-type: none"> Potensi wisata local yang ada di Kabupaten Tulungagung akan di kenal oleh wisatawan teruama luar Kabupaten Tulungagung.Selain itu hal ini bahwa potensi wisata Kabupaten Tulungagung akan dikenal oleh wisatawan luar Tulungagung dan akan menjadi daya tarik dari para wisatawan.
2017	<ul style="list-style-type: none"> Merancang konsep masterplan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk merumuskan paket wisata yang ada di desa Ngrejo berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di desa Ngrejo. 	2017	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki gambaran perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan wisata Sioro serta juga memiliki perencanaan terkait dengan perumusan paket wisata yang ada di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

MAPPING HASIL PENELITIAN TENTANG PENGEMBANGAN WISATA SIORO DIKECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

